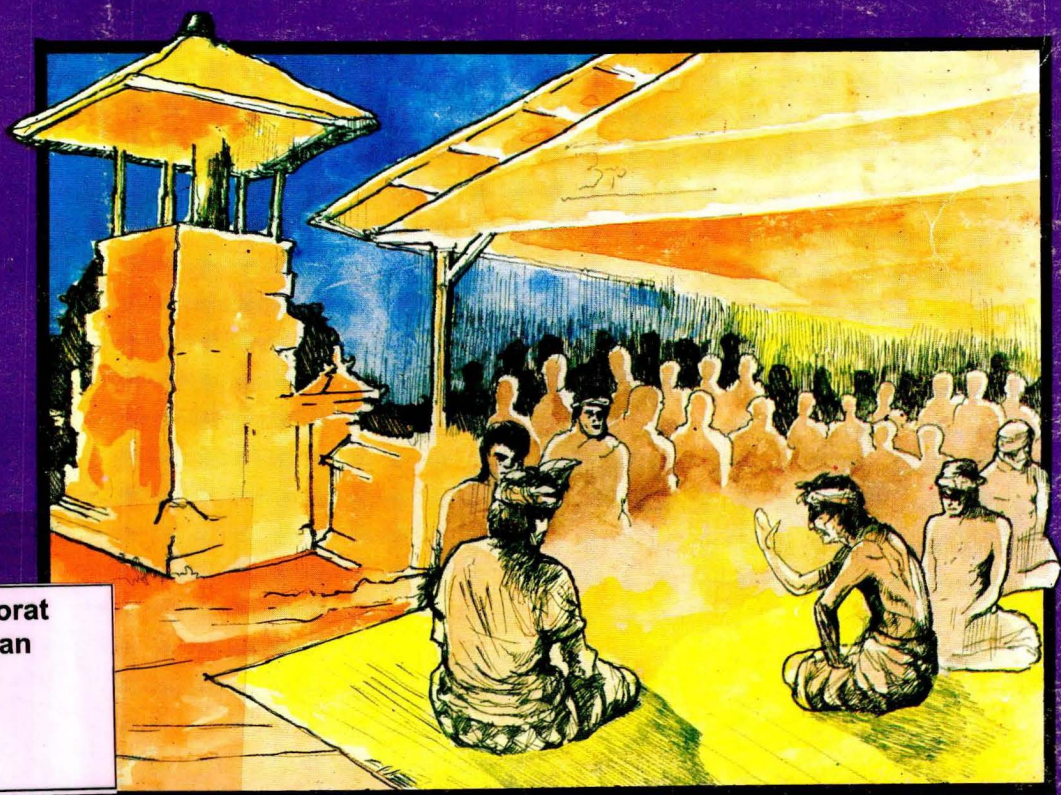




PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT BALI



ektorat
ayaan

307 807 KETP

MILIK DEPDIBUD
Tidak Diperdagangkan

PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT BALI

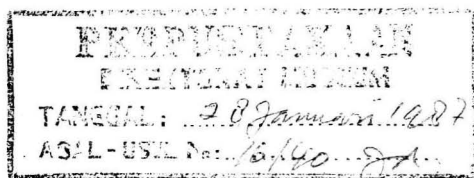
Peneliti / Penulis

1. **Drs. Ketut Sudhana Astika**
2. **Drs. I Wayan Suwena**
3. **Drs. Ni Nyoman Ayu Candradewi**

Penyempurna/Editor

1. **Drs. IGN. Arinton Puja**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
1986**



Cetakan pertama - th. 1986/1987

Gambar kulit - Ida Bagus Martin

P R A K A T A

Usaha untuk membina dan mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional memang perlu. Dalam pada itu Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali mengupayakan mencetak beberapa buah buku, di antaranya buku "Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali" dan ini merupakan hasil kegiatan Proyek Inventarisasi Kebudayaan Daerah Bali tahun 1985/1986. Kami menyadari bahwa buku ini banyak kekurangannya dan masih perlu disempurnakan lagi di masa mendatang.

Berhasilnya usaha penerbitan buku ini berkat kerjasama yang baik antara tim penyusun, tim editor, Pemda Tk. I Bali, Kanwil Depdikbud Propinsi Bali, Universitas Udayana Denpasar dan tenaga-tenaga ahli perorangan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Sebagai akhir kata kami sampaikan semoga terbitan buku ini ada manfaatnya.

Denpasar, 20 Agustus 1986

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali



[Signature]
DRS. IDA BAGUS MAYUN.
NIP. 130 327 335.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan Daerah diantaranya ialah naskah Peranan Banjar pada Masyarakat Bali Daerah Tahun 1985 / 1986.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga ahli perorangan, dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Agustus 1986
Pemimpin Proyek,



DRS. H. AHMAD YUNUS
NIP. 130146112

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI**

Om Swastiastu,

Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan Manusia Indonesia yang menempatkan dimensi rohaniah dan lahiriah seimbang dan selaras, memerlukan bahan-bahan pustaka yang mengandung nilai-nilai yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, mencerminkan kepribadian nasional serta menumbuhkan rasa bangga terhadap kebudayaan nasional. Oleh karena itu saya sangat menghargai usaha Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali untuk mencetak dan menerbitkan buku : Peranan Banjar pada Masyarakat Bali, pada tahun anggaran 1986 / 1987.

Buku tersebut merupakan bahan pustaka yang mengandung nilai-nilai luhur Kebudayaan daerah yang sangat penting artinya untuk menunjang kelestarian kebudayaan nasional. Dengan diterbitkannya buku tersebut, maka khasanah kepustakaan kita semakin lengkap. Namun, tanpa dibaca dan dimanfaatkan dengan baik, bahan-bahan pustaka tersebut tidak akan memberikan arti apa-apa. Oleh karena itu saya menganjurkan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya generasi muda untuk membaca dan memanfaatkan penerbitan ini sebaik-baiknya, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat dipahami, dihayati dan dikembangkan.

Mengenal dan mencintai kebudayaan daerah bukan berarti kita membiarkan diri tercekam pada nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit, melainkan dapat mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional untuk memperkuat kesetiakawanan berbangsa serta menanamkan sikap mental tenggang rasa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pemimpin Proyek, baik Pusat maupun Daerah Bali, Tim Penulis serta pihak-pihak lainnya yang telah mengusahakan dan membantu terbitnya buku tersebut.

Semoga usaha dan kerjasama serupa ini dapat diteruskan dan ditingkatkan dalam rangka mengisi pembangunan nasional pada umumnya dan melestarikan kebudayaan nasional pada khususnya.

Denpasar, 18 Agustus 1986



Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

DRS. MUSTI LANANG OKA

Telp. : 130 433 209.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN : ANALISA DAN KESIMPULAN HASIL	
PENELITIAN TENTANG PERANAN BANJAR PADA	
MASYARAKAT BALI	
A. BANJAR DAN DESA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI	1
B. FUNGSI BANJAR DALAM STRUKTUR KEBUDAYAAN BALI	14
1. Fungsi Pada Subsistem Ekonomi	15
2. Fungsi Pada Subsistem Sosial	20
3. Fungsi Pada Subsistem Administrasi	24
4. Fungsi Dalam Subsistem Upacara dan Adat	29
C. KEDUDUKAN BANJAR BAGI MASYARA- KAT BALI	31
1. Banjar Sebagai Bagian Dari Desa	32
2. Banjar Sebagai Pusat Orientasi Masyarakat Bali	34
3. Banjar Sebagai Lembaga Pengenalan Pro- gram Pembangunan	36
D. BEBERAPA PERUBAHAN SECARA KON- SEPTUAL DAN TEORITIS MENGENAI PERUBAHAN KEBUDAYAAN DAN MA- SYARAKAT, KHUSUSNYA MENGENAI PERUBAHAN BANJAR DAN DESA	42
E. RAMALAN MENGENAI PERANAN BAN- JAR PADA MASYARAKAT BALI DIMASA MENDATANG	47

BAB II : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT BALI.

KASUS 1 : PERANAN BANJAR DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN : SEBUAH DESKRIPSI TENTANG BANJAR TRADISIONAL YANG JAUH DARI PUSAT KERAJAAN/PEMERINTAHAN

(KASUS BANJAR ADAT KAUH DAN BANJAR ADAT PANDE)

A.	IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN . . .	
1.	Lokasi Geografis	53
2.	Kondisi dan Lingkungan Alam	54
3.	Penduduk dan Gambaran Demografis	55
4.	Struktur Pola Menetap dan Perumahan	57
5.	Struktur Administrasi Desa dan Banjar	59
6.	Sistem Ekonomi yang Berkembang	60
7.	Beberapa Kegiatan Lain dalam Banjar dan Desa	61
B.	PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT TRADISIONAL DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN	
1.	Kedudukan Banjar dan Fungsi Banjar bagi Desa	62
2.	Sistem Aturan dan Perlengkapan Banjar	63
3.	Sistem Keanggotaan Banjar dan Desa dan Kelompok Sosial lain	65
4.	Sistem Pengerahan Tenaga dan Pengendalian Sosial	67
5.	Sistem Upacara di Banjar dan di Desa	68
6.	Sistem Pengorganisasian Kegiatan-kegiatan Banjar dan Desa	69
7.	Analisa Tentang Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali, di Desa Adat Tenganan Pegringsingan	70

KASUS 2 : PERANAN BANJAR DI DESA MENGWI : SEBUAH DESKRIPSI TENTANG BANJAR TRADISI YANG DEKAT DENGAN PUSAT KERAJAAN/PEMERINTAHAN (KASUS BANJAR PRAGAE)

A.	IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN . . .	
1.	Lokasi Geografis	83
2.	Kondisi dan Lingkungan Alam	84
3.	Penduduk dan Gambaran Demografis	86
4.	Struktur Pola Menetap dan Perumahan	89
5.	Struktur Administrasi Desa dan Banjar	91
6.	Sistem Ekonomi yang Berkembang	94
7.	Beberapa Kegiatan Lain dalam Banjar dan Desa	95
B.	PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT TRADISIONAL DESA MENGWI	
1.	Kedudukan Banjar dan Fungsi Banjar bagi Desa	97
2.	Sistem Aturan dan Perlengkapan Banjar	108
3.	Sistem Keanggotaan Banjar dan Desa dan Kelompok Sosial Lain	118
4.	Sistem Pengerahan Tenaga dan Pengendali- an Sosial	128
5.	Sistem Upacara di Banjar dan di Desa	140
6.	Sistem Pengorganisasian Kegiatan-kegiatan Banjar dan Desa	146
7.	Analisa Tentang Peranan Banjar Pada Ma- syarakat Bali, di Desa Tradisional Desa Mengwi	156

**KASUS 3 :: PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT KOTA DENPASAR :
SEBUAH DESKRIPSI TENTANG BANJAR TRANSISI DI
PUSAT KOTA
(KASUS BANJAR GERENCENG, DESA PEMECUTAN KAJA).**

A.	IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN . . .	163
1.	Lokasi Geografis	163
2.	Kondisi dan Lingkungan Alam	164
3.	Penduduk dan Gambaran Demografis	165
4.	Struktur Pola Menetap dan Perumahan	167
5.	Struktur Administrasi Desa dan Banjar	168

6. Sistem Ekonomi yang Berkembang	170
7. Beberapa Kegiatan Lain Dalam Banjar dan Desa	171
B. PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT TRANSISI, BANJAR DI KOTA DENPASAR: BANJAR GERENCENG	
1. kedudukan Banjar dan Fungsi Banjar bagi Desa	172
2. Sistem Aturan dan Perlengkapan Banjar . . .	174
3. Sistem Keanggotaan Banjar dan Desa dan Kelompok Sosial Lain	175
4. Sistem Pengerahan Tenaga dan Pengenda- lian Sosial	177
5. Sistem Upacara di Banjar dan di Desa	179
6. Sistem Pengorganisasian Kegiatan-kegiatan Banjar dan Desa	180
7. Analisa Tentang peranan Banjar Pada Ma- syarakat Bali, Masyarakat Transisi di Pusat Kota	182

**KASUS 4 : PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT KOTA :
SEBUAH DESKRIPSI TENTANG BANJAR PARA PENDATANG
DI KOTA ADMINISTRATIF DENPASAR
(KASUS BANJAR KERTA PURA, DESA PEMECUTAN)**

A. IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN . . .	191
1. Lokasi Geografis	191
2. Kondisi dan Lingkungan Alam	191
3. Penduduk dan Gambaran Demografis	193
4. Struktur Pola Menetap dan Pemukiman . . .	196
5. Struktur Administrasi Desa dan Banjar . . .	197
6. Sistem Ekonomi yang Berkembang	201
7. Beberapa Kegiatan Lain dalam banjar dan Desa	203
B. PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT PERKOTAAN, BANJAR DI KOTA DENPA- SAR: BANJAR KERTA PURA	

1. Kedudukan Banjar dan Fungsi Banjar bagi Desa	205
2. Sistem Aturan dan Perlengkapan Banjar ...	213
3. Sistem Keanggotaan Banjar dan Desa dan kelompok Sosial Lain	221
4. Sistem Pengerahan Tenaga dan Pengendalian Sosial	229
5. Sistem Upacara di Banjar dan di Desa	238
6. Sistem Pengorganisasian Kegiatan-kegiatan Banjar dan Desa	244
7. Analisa Tentang Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali, di Masyarakat Perkotaan	252

BIBLIOGRAFI

Lampiran-lampiran:

1. Daftar Nama Responden dan Informan ...	263
2. Daftar Pertanyaan yang dipakai dalam Penelitian	271

BAB I
PENDAHULUAN

ANALISA DAN KESIMPULAN HASIL PENELITIAN
TENTANG PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT BALI

PENDAHULUAN

A. Banjar dan Desa dalam Kehidupan Masyarakat Bali

Dalam hidupnya manusia cenderung mengadakan hubungan antara sesamanya yang akhirnya membentuk suatu masyarakat. Di samping itu, hubungan juga berkembang dengan lingkungannya sebagai usahanya untuk menanggapi secara aktif lingkungan alam tersebut. Beberapa bentuk atau pola hubungan yang berkembang kemudian serta bentuk atau pola tanggapan manusia terhadap lingkungannya memunculkan bentuk atau pola-pola kehidupan yang khas yang disebut sebagai pola-pola kebudayaan manusia.

Suatu pola hubungan antara sesama manusia yang bersifat resiprokal menjadi dasar dari suatu interaksi sosial di antara kelompok serta terciptanya kelompok-kelompok sosial. Shepard (1974:235) seorang ahli sosiologi, memberi batasan kepada kelompok sosial yang ia nyatakan sebagai suatu bentuk dari suatu struktur sosial yang menciptakan pola-pola interaksi antara sejumlah orang yang mempunyai identitas yang sama dan nyata, cita-cita, dan tujuan, tata nilai dalam berpikir, serta perasaan, sikap, dan tingkah laku nyata yang tercermin dalam pola hubungan atau pola komunikasi yang langsung dan tidak langsung.

Dengan pola komunikasi dan interaksi antara sesamanya yang bertujuan untuk meneruskan tata nilai, gagasan dan keyakinan serta pengetahuan dan tradisi yang mereka punyai, maka kelompok sosial yang terbentuk itu dapat memberikan ciri yang khas sebagai bentuk kelompok sosial yang nyata. Demikian juga kelompok sosial tersebut memperlihatkan wujudnya sebagai bentuk tanggapan aktif manusia dalam menanggapi lingkungannya. Pada berbagai bentuk kelompok sosial seperti ini terwujud suatu bentuk-bentuk komunitas, seperti: komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas pedagang dan sebagainya.

Pengertian komunitas itu sendiri dimaksudkan sebagai wujud komunitas seperti apa yang dikemukakan oleh Kuntjaraningrat (1974:55) yang menyatakan bahwa komunitas adalah bentuk suatu kesatuan sosial karena adanya ikatan wilayah atau tempat kehidupan. Sebagai suatu kesatuan sosial, warga suatu komunitas

biasanya mempunyai perasaan kesatuan sedemikian kuatnya sehingga rasa kesatuan itu menjadi sentimen perasaan akan rasa persatuan. Hal seperti ini dapat mewujudkan rasa kepribadian kelompok serta rasa bangga dan cinta pada wilayah dan kelompok sosialnya. Dengan demikian rumusan konsep komunitas itu mempunyai tiga ciri pokok, yaitu. wilayah, kepribadian dan kelompok.

Dengan ciri yang demikian luasnya, masih dibedakan antara komunitas besar seperti. negara bagian, negara atau persekutuan antar negara, dan komunitas kecil, seperti desa, nagari, huta, kampung, dan rukun tetangga, yang disamping berbeda dalam nama juga berbeda-beda dalam struktur, besar, serta tingkatan dan wujud kebudayaan yang menjadi isinya. Untuk itu, bagi komunitas kecil selain tiga ciri utama tadi masih ada ciri-ciri lain sebagai tambahan, seperti semua warganya masih bisa saling kenal dalam frekuensi yang besar, tidak ada aneka warna yang khusus dalam bagian-bagian kelompok itu, serta yang para warganya kelompoknya dapat menghayati sebagian besar lapangan-lapangan kehidupan yang ada (Kuntjaraningrat, 1974:156).

Sebagai bentuk komunitas kecil *banjar* di Bali mempunyai peranan yang penting dalam membentuk kehidupan masyarakatnya. Banjar juga dapat menjadi pusat orientasi para anggota masyarakat untuk suatu kegiatan-kegiatan tertentu serta pilihan untuk pengadaan dan pengarahan tenaga dalam upacara. Sebagai bagian dari desa (dalam bentuk komunitas yang lebih besar), banjar juga mempunyai ciri-ciri yang khas yang ada pada ciri desa sebagai kesatuan kelompok sosial. Dalam keterkaitan seperti itu sejak lama sudah diketahui bahwa banjar sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang khas tadi mempunyai hubungan peranan yang demikian kuat bagi desa. Keterkaitan dan hubungan yang demikian ini dapat berupa hubungan struktural di mana banjar merupakan bagian dari desa, atau hubungan fungsional yaitu, banjar merupakan fungsi pengerahan tenaga serta fungsi lainnya bagi desa desa.

Bagi masyarakat Bali sendiri, di mana struktur desa dibedakan antara struktur *desa adat* dan struktur *desa dinas* memberikan suatu pengertian pada perbedaan fungsi dan peranan para anggota desa pada desa secara organisatoris. Keterkaitan yang terjadi selain keterkaitan seperti tersebut di atas, juga kaitan lainnya yang secara

struktural dan fungsional menggiatkan para anggota banjar dan desa dalam berbagai kegiatan. Konsep desa seperti yang dikemukakan oleh Gusti Gede Raka (1955:19), memberikan gambaran tentang desa sebagai wujud sistem kemasyarakatan orang Bali yang diberikan batasan.

1. suatu kesatuan wilayah di mana para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Desa dengan pengertian ini disebut *desa adat*. Rasa kesatuan sebagai warga *desa adat* terikat oleh adanya faktor-faktor: *karang desa* (pekarangan, wilayah atau tempat bangunan desa, dimana warga desa bertempat tinggal), *awig-awig desa* (suatu sistem aturan desa dengan perangkat pelaksanaannya, yang dibuat dan diberlakukan kepada segenap warga desa) dan *Kahyang an Tiga* (tiga *pura* desa, sebagai satu sistem tempat persembahyangan bagi pra warga desa yang menyangkut sejumlah kewajiban bagi para warga desa atau *penyungsungunya*). Ketiga *pura* tersebut adalah *Pura Puseh*, *Pura Desa* dan *Pura Dalem* yang ada pada tiap-tiap *desa adat* dan menjadi ciri pada adanya satu *desa adat*.
2. sebagai suatu kesatuan wilayah administratif di bawah kecamatan, sehingga merupakan bagian dari struktur vertikal dari pemerintahan (propinsi dan kabupaten). Desa dengan pengertian ini disebut *desa dinas* atau desa administratif. Para warga desa terikat oleh kesatuan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai bagian dari struktur vertikal pemerintahan resmi atau pemerintahan negara sebagai kesatuan administratif. Kesatuan ini dibatasi oleh adanya faktor-faktor: wilayah desa yang jelas batas-batasnya, warga atau penduduk desa yang bertempat tinggal di wilayah desa tersebut, dan sistem aturan pemerintahan desa yang berasal dari sistem aturan pemerintah yang lebih tinggi yang berasal dari peraturan/perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan aturan-aturan tambahan sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan. Warga desa dinas mempunyai fungsi memelihara dan mengaktifkan kegiatan dalam desa serta tunduk pada sistem aturan yang berlaku.

Dengan dua konsepsi seperti itu dengan jelas dapat dibedakan antara pengertian *desa adat* sebagai suatu kesatuan masyarakat dalam

satu wilayah desa yang secara bersama-sama mengaktifkan suatu sistem upacara yang berhubungan dengan kesucian dan kesatuan desa. Sedangkan *desa dinas* adalah suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah pemerintahan desa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan administratif bagi kelancaran sistem pemerintahan dan pengaturan warga desa sendiri. Bagian-bagian kesatuan yang lebih kecil dari sebuah desa seperti tersebut di atas adalah terwujudnya *banjar adat* dan *banjar dinas* pada tiap-tiap desa yang ada di Bali.

Kesatuan wilayah desa biasanya ditandai oleh adanya batas-batas yang jelas antara satu desa dengan desa lainnya. Batas-batas tersebut dapat berupa daerah persawahan, sungai, lembah, bukit atau tempat-tempat tertentu yang disepakati atau telah diterima demikian adanya sejak dahulu. Tentunya pada pemekaran desa, seperti yang banyak dilakukan belakangan ini — terutama desa administratif — banyak tanda-tanda batas dibuat dan disepakati antara warga desa. Dan tanda batas-batas desa pun di buat permanen dan memberi ciri yang khas pada desa tersebut. Pusat-pusat desa yang biasanya berupa perkampungan atau kompleks perumahan penduduk biasanya terletak di tengah-tengah dengan ciri tertentu seperti: adanya pasar, beberapa warung, *ten-ten* (pasar kecil yang terjadwal), perempatan jalan, pohon beringin, lapangan atau adanya balai desa sebagai tempat pertemuan umum.

Untuk *desa adat* ciri utama yang dapat membedakannya antara satu desa dengan desa lainnya adalah, adanya tempat persembahyangan atau *pura-pura* sebagai ciri adanya sebuah desa di satu lingkungan wilayah perkampungan. *Pura Desa* dan *Pura Puseh* kadang-kadang ada di tengah-tengah desa namun dapat juga berlokasi jauh dari pusat pemukiman. *Pura Dalem* sendiri mempunyai tempat yang khusus yaitu dekat dengan pekuburan atau makam desa, karena memang tempat pemujaan kepada Dewa Syiwa dan istrinya Dewi Durga, dewa kematian. *Desa dinas* atau desa administratif ditandai oleh adanya kantor desa — walaupun kadang-kadang dan banyak masih terdapat di pedesaan kantor kepala desa ada di rumah Kepala Desa sendiri —, adanya balai desa permanen ataupun masih darurat, perangkat administrasi desa lainnya lengkap dengan atribut-atribut yang dibuat, seperti pakaian seragam, tanda-tanda pangkat dan sebagainya. Pusat desa dinas sendiri tidak tentu dan tidak selalu tepat antara satu desa dengan desa

lainnya, tetapi biasanya mencari tempat yang strategis dan dekat dari semua bagian wilayah desa atau dekat dengan tempat yang banyak menjadi tujuan warga desa. Untuk itu pusat pemerintahan desa ini banyak yang dibangun di pinggir jalan utama di desa tersebut, atau dekat dengan pasar, dekat persimpangan jalan, bahkan belakangan ini banyak kantor Kepala Desa dibangun di tempat-tempat yang tanahnya dapat dimanfaatkan secara murah dan mudah.

Dalam membatasi pengertian-pengertian tentang desa ini seorang peneliti asing Swellengrebel (1960:12) menyatakan bahwa selain sebagai kesatuan wilayah dengan batas-batasnya yang jelas, desa selalu ditandai oleh batas-batas pemujaan. Anggota desa satu dengan lainnya membatasi diri mereka pada batas-batas pemujaan pada tiga *pura* lingkungan desa mereka (*Kahyangan Tiga*) dari mana mereka berasal atau melakukan keaktifan untuk suatu proses persembahyangan di tiga *pura* tersebut. Kegiatan para warga desa juga dapat dilihat pada kegiatan untuk keperluan desa dinas mereka sehingga dalam setiap kegiatan yang berlangsung di desa memang agak sukar untuk membedakan mana kegiatan untuk *desa adat* dan mana untuk *desa dinas*. Tetapi umumnya bagi para pengamat, melihat perbedaan kegiatan dan khususnya pengerahan tenaga yang berlangsung di antara para warga desa dapat dibedakan mana kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan *desa adat* dan mana kegiatan yang berlangsung untuk *desa dinas*. Di beberapa desa bahkan perbedaan ini dapat terlihat nyata berbedanya hak dan kewajiban serta tanggung-jawab di antara para warga desa sendiri, apakah seseorang menjadi warga *desa adat* saja atau warga *desa dinas* saja. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan status keanggotaan mereka dalam kelompok yang lebih kecil lagi yaitu *banjar*. Karena secara resmi atau pada kenyataannya keanggotaan seseorang dalam desa selalu dilihat/terlihat pada keanggotaannya pada *banjar*. Keterkaitan antara desa dan banjar seperti telah dikemukakan di depan terlihat pada sistem keanggotaan desa dan banjar.

Untuk mempertegas kembali pengertian tentang desa dapat dikemukakan di sini tulisan dari Covarubias (1972:58) yang menyatakan desa sebagai:

‘ . . . the close relationship between the cult of the ancestors and the administration of the community . . . ’

yang dinyatakannya sebagai suatu kesatuan yang tertutup/terbatas pada pemujaan leluhur dan pengaturan administrasi masyarakat. Dengan demikian baik Swellengrebel, Covarubias ataupun Gede Raka sudah melihat dan membatasi pengertian mereka tentang desa sebagai suatu kesatuan pengaturan wilayah yang juga disertai oleh kesatuan pemujaan atau kegiatan upacara dan keagamaan. Selanjutnya Covarubias dalam uraiannya juga melengkapi dengan adanya unsur kesatuan *pura* sebagai unsur pengikat sebuah desa yaitu: *Pura Desa* (*The Civil Temple*) *Pura Puseh* (*The Temple of Origin*) dan *Pura dalem* (*The Temple of Death*). Ketika kesatuan *pura* tadi umum dikenal oleh masyarakat Bali sebagai *pura Kahyangan Tiga*.

Untuk melihat desa sebagai suatu kesatuan wilayah dengan pemerintahan desa sebagai pengatur tingkah laku para anggotanya Covarubias (1972:58) selanjutnya menyatakan:

‘ . . . is a self-contained, independent community a little republic ruled by a council of representatives viiagers (*krama desa*), in which everyone has equal rights and obligations . . . ’

dalam pernyataannya mana terlihat bahwa sistem pengaturan atau pemerintahan desa terletak di tangan para anggota atau *kerama desa*. *Kerama* desa kemudian melengkapi suatu kesatuan desa dengan perlengkapan lainnya sebagai kelengkapan suatu kesatuan desa seperti: *awig-awig desa*, *perabot desa*, *tanah laba desa* dan suatu perangkat pimpinan desa yang umumnya dipilih dari dan oleh *kerama desa*.

Bagi para warga desa, kedua pengertian mengenai desa ini memang tidak terlalu ketat batasan dan pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena baik dalam kewajiban untuk kepentingan desa adat maupun untuk kepentingan desa dinas, setiap warga desa telah diatur dalam wujud peranannya masing-masing. Lagi pula kewajiban sebagai anggota desa akan lebih nyata dalam tanggung jawab serta peranannya sebagai anggota banjar.

Banjar merupakan kesatuan sosial yang lebih kecil lingkupnya dan sifatnya dari pada sebuah desa. Dan banjar merupakan bagian dari sebuah desa. Di dalam banjar ini terpadu sifat, pengertian dan peranan seorang anggota banjar sebagai anggota sebuah *desa adat* dan *desa dinas*. Hanya pada kasus tertentu saja sebuah banjar tidak merupakan bagian dari sebuah desa tetapi mungkin bagian dari dua buah desa, sehingga pada keadaan seperti ini anggota banjar yang bersangkutan berada antara dua peranan. Peranan pertama adalah menggiatkan kehidupan banjarnya sendiri dan peranan kedua adalah memenuhi kepentingan desanya yang mungkin berbeda kepentingan antara desa satu dengan desa lainnya dalam pelaksanaan sistem upacaranya (Astika, 1985:132-138).

Berdasarkan uraian tentang desa di Bali dan hubungannya dengan banjar dalam kehidupan masyarakat, terlihat bahwa hubungan antara desa dan banjar tidak saja merupakan hubungan yang telah ditata sedemikian rupa, tetapi lebih merupakan keterkaitan yang berfungsi antara keduanya. Pada wujud desa adat lembaga ini memberikan gambaran tentang fungsi yang demikian jelas pada para anggota desa untuk menggiatkan dirinya pada satu sistem kesatuan upacara, sedangkan pada desa dinas lebih memperlihatkan pada peranan kegiatan sosial yang bersifat administratif. Semuanya itu tercermin pada kewajiban, tanggung jawab, haknya sebagai anggota banjar sebagai bagian dari desa.

Kalau dalam desa ada unsur-unsur adat yang mengikat yang tercermin dari sistem upacara di *Pura Kahyangan Tiga* yang harus dilakukan oleh anggota sebuah desa adat — sehingga kesatuan sosial serupa itu merupakan kesatuan sosial yang diperkuat oleh unsur-unsur kesatuan adat dan unsur-unsur upacara keagamaan, maka dalam banjar lebih banyak terdapat jenis ikatan dalam kesatuan sosial yang khusus tadi. Covarubias melihatnya sebagai berikut.

‘ . . . cooperative societies: of people bound to assist each other in marriages, home festivals, and especially during the expensive cremations. The various *banjar* of a village take part in the activities, assisting in the repair and improvement of the temples and contributing to the villages festivals . . . ’ (Covarubias, 1972:60).

Apa yang dikemukakan oleh Covarubias seperti tersebut di atas

memperlihatkan fungsi *banjar* dalam hubungannya dengan desa, serta peranan apa yang harus dimainkan oleh para warga atau anggota *banjar* dalam kaitannya sebagai anggota desa (adat). *Banjar* sebagai suatu bentuk kerja sama antar anggota dalam satu kelompok yang saling bantu membantu dalam kegiatan desa dan kegiatan untuk upacara keagamaan, menghidupkan fungsi upacara dan kegiatan lainnya dalam desa. Keberadaan sebuah *banjar* dalam lingkungan suatu masyarakat memang ditentukan oleh adanya berbagai unsur dalam sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Karena kelengkapan dari unsur-unsur pembentuknya itulah yang memberi ciri pada adanya sebuah *banjar*, dan terwujudnya sebuah desa.

Lebih jauh Covarubias (1972:60) menyebutkan adanya unsur-unsur anggota, pimpinan dan hak milik sebagai ciri kehidupan sebuah *banjar*, sedang pada kenyataannya mungkin ada lebih banyak unsur-unsur pendukung lainnya. Demikian misalnya masih dapat ditambahkan beberapa unsur lain yang dapat melengkapi unsur pembentuk yang telah ada, seperti. sistem aturan, pola hubungan antara anggota *banjar*, fungsi *banjar* bagi desa, tujuan dan struktur *banjar* pada sebuah desa, serta seberapa jauh anggota *banjar* mempunyai peranan pada kegiatan desa. Penambahan unsur-unsur tersebut tentu tidak akan jauh menyimpang pada batasan sebuah kelompok sosial atau *social group* seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi John M. Shepard (1974:235), sebagai berikut:

‘... it is a type of social structure that is created through the patterned interaction of a relatively few persons who share a common identity, goals, rules of thinking, feeling and behaving, and direct or indirect lines of communication ...’

Dengan demikian pada sebuah *banjar* yang dapat disamakan sebagai sebuah kelompok sosial, dapat ditemukan pola-pola interaksi yang khas dari para anggota dengan tujuan tertentu serta identitas tertentu pula yang disebut *banjar*. Dan meskipun sebagai suatu bentuk kelompok sosial yang umum, sebuah *banjar* mempunyai wujudnya yang khusus karena dalam hubungan atau keterkaitan tugas dan fungsinya pada desa ia diberi bobot unsur-unsur keaga-

maan yang dapat mengikat dan mengaktifkan para anggotanya. Dalam hubungan ini sebuah *banjar* merupakan bagian dari sebuah desa, tetapi banjar juga menghidupkan aktivitas desa terutama dalam hubungan aktivitas upacara dan kegiatan keagamaan. Pola hubungan yang terjadi antara banjar dan desa adalah pola hubungan yang struktural dan fungsional, yang kadang-kadang jelas batas-batasnya tetapi kadang-kadang juga sangat sukar untuk dibedakan kapan seorang anggota *banjar* bertindak untuk kepentingan desanya dan kapan ia bertindak dan bertingkah laku untuk kepentingan *banjarnya* karena amat sukar bagi dirinya untuk membedakan kedua wujud peranan ini.

Secara umum dapat dilihat bahwa baik pada masa lalu ketika tulisan tentang *banjar* banyak dikemukakan oleh para peneliti asing — maupun pada masa-masa berikutnya, dalam hubungan ini terlihat adanya keterikatan atas dasar hubungan yang tetap antara *banjar* dan desa. *Banjar* sebagai organisasi yang lebih bersifat sekuler dan desa sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat keagamaan berfungsi dalam menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi dalam kedua kegiatan tadi: upacara keagamaan dan kegiatan kedinasan atau fungsi administrasi. Biasanya (dan ditemukan dalam fakta sejarah) dekat dengan pusat kerajaan atau pusat pemerintahan, kedudukan banjar diperkuat oleh adanya tujuan penguasaan atas desa-desa yang ada, dan dalam fungsinya *banjar* dapat diaktifkan menjadi satu organisasi yang potensial dalam pengerahan tenaga untuk memperkuat kedudukan kerajaan atau pemerintahan yang ada. Demikian juga pada masa sekarang untuk suatu usaha pengerahan tenaga dan menggerakkan anggota desa, organisasi *banjar* adalah kesatuan wilayah dan orang/tenaga yang dapat digerakkan secara cepat dan praktis. Dan tidak terbatas pada usaha pengerahan tenaga saja, untuk suatu pengadaan dana atau usaha-usaha lainnya serta sumbangan-sumbangan untuk pembangunan, seperti: dana kebersihan lingkungan, dana untuk korban bencana alam dan dana sosial lainnya; pengerahan dana dari masyarakat lewat sistem *banjar* ini adalah cara yang paling efektif. Karena itu untuk memperkuat unsur-unsur sekuler yang ada dan dipunyai oleh *banjar*, maka pemberian bobot pada unsur-unsur upacara agama adalah cara yang dapat mengikat dan mengaktifkan para anggotanya. Pada organisasi banjar yang jauh kedudukannya dari

pusat kerajaan dimasa lalu dan jauh dari pusat pemerintahan di masa sekarang, kedudukan *banjar* dan desa mempunyai fungsi yang lain serta bentuk yang berbeda. Demikian misalnya dapat dikemukakan banjar yang ada di desa-desa yang bersifat tradisional seperti di desa-desa *Bali Aga*, di desa-desa pegunungan dan desa-desa pantai yang terisolir dari pengaruh pusat pemerintahan tadi. Perbedaan bentuk dan fungsi dari *banjar* serta fungsinya pada desa juga ada pada banjar di pusat-pusat kota sekarang, wujud banjar sebagai organisasi sosial akan sangat berbeda dengan wujudnya di desa-desa seperti yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan atas konsepsi yang diberikan oleh para peneliti tentang *banjar* dan desa seperti tersebut di atas serta gejala empirik yang ditemukan sekarang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan di sini menyangkut fungsi dan kedudukan *banjar* pada desa. Lalau pada masa lalu kedudukan dan fungsi banjar memperlihatkan suatu hubungan yang terkait atau berfungsi sedemikian rupa, dimana *banjar* berfungsi sebagai potensi pengerahan tenaga dan kegiatan lain bagi desa. Dengan perkembangan yang ada sekarang dan di beberapa tempat tertentu karena berbagai alasan fungsi tersebut sudah memperlihatkan perubahan. Karena itu permasalahan yang dapat diangkat sebagai suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah, kedudukan dan fungsi *banjar* pada desa yang bervariasi sebagai berikut:

1. kedudukan dan fungsi *banjar* yang tidak demikian kuat dan menonjol pada desa, tampak pada masyarakat yang masih tradisional khususnya pada masyarakat yang mempunyai suatu struktur pemerintahan desa adat yang kuat dan khas,
2. kedudukan dan fungsi *banjar* yang lebih kuat dari pada desa, terutama dalam potensi pengerahan tenaga dan kegiatan lainnya pada masyarakat transisi;
3. kedudukan dan fungsi *banjar* pada desa yang bervariasi lain terutama dalam potensi pengerahan tenaga, pengumpulan dana dan kegiatan lainnya, pada masyarakat di pusat kota dan pemusatan pemukiman.

Kategorisasi seperti tersebut di atas tentunya berdasarkan suatu pandangan pada gejala yang ada yang seharusnya masih perlu dibuktikan dari data penelitian serta kajian konsep yang teoritis-

nya. Untuk itu penelitian ini memang menekankan pada masalah peranan banjar pada masyarakat Bali, terutama pada:

1. fungsinya dalam struktur kebudayaan Bali dan dalam kaitannya dengan fungsi desa, terutama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat,
2. kegunaannya dalam kehidupan masyarakat Bali sendiri pada masa sekarang, terutama pada masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan dalam wujud dan struktur sosialnya.

Untuk itu penelitian ini mengambil ruang lingkupnya pada masyarakat Bali yang mempunyai ciri-ciri kehidupan yang masih tradisional (dengan sistem aturan adatnya yang masih demikian kuat), pada masyarakat transisi, serta pada masyarakat yang hidup di daerah perkotaan dengan berbagai ciri-ciri kehidupan yang kadang-kadang berpengaruh pada wujud dan struktur *banjar* yang diwujudkan. Pengamatan itu sendiri tetap berlandaskan pada konsep yang ditetapkan untuk membatasi pengertian yang ada tentang banjar dan desa itu sendiri. Dengan demikian landasan penelitian ini dan pelaporan hasilnya nanti dapat memberikan suatu penggambaran yang jelas dan runtut tentang masalahnya sendiri.

Berdasarkan permasalahan penelitian seperti tersebut di atas serta pembatasan pada pengamatan di lapangan nantinya, maka untuk penelitian ini disusun suatu hipotesa sebagai berikut:

1. *Banjar* dan desa adalah dua satuan atau unsur yang ada dalam kebudayaan Bali, yang masing-masing mempunyai struktur dan fungsi yang berlainan tetapi saling melengkapi dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, administrasi, politik, sosial dan upacara keagamaan;
2. Kegunaan *banjar* dan desa bagi masyarakat Bali adalah dalam pengorganisasian kegiatan-kegiatan: ekonomi, administrasi, politik, ketertiban sosial, ketertiban moral serta upacara adat dan agama, dan berbagai usaha inovasi untuk kemajuan.
Semakin kuat pengaruh tradisi pada masyarakat semakin kuat fungsi *banjar* bagi masyarakat tersebut dan semakin kuat pengaruh kemajuan atau inovasi baru, semakin lemah kegunaan *banjar* bagi masyarakat.

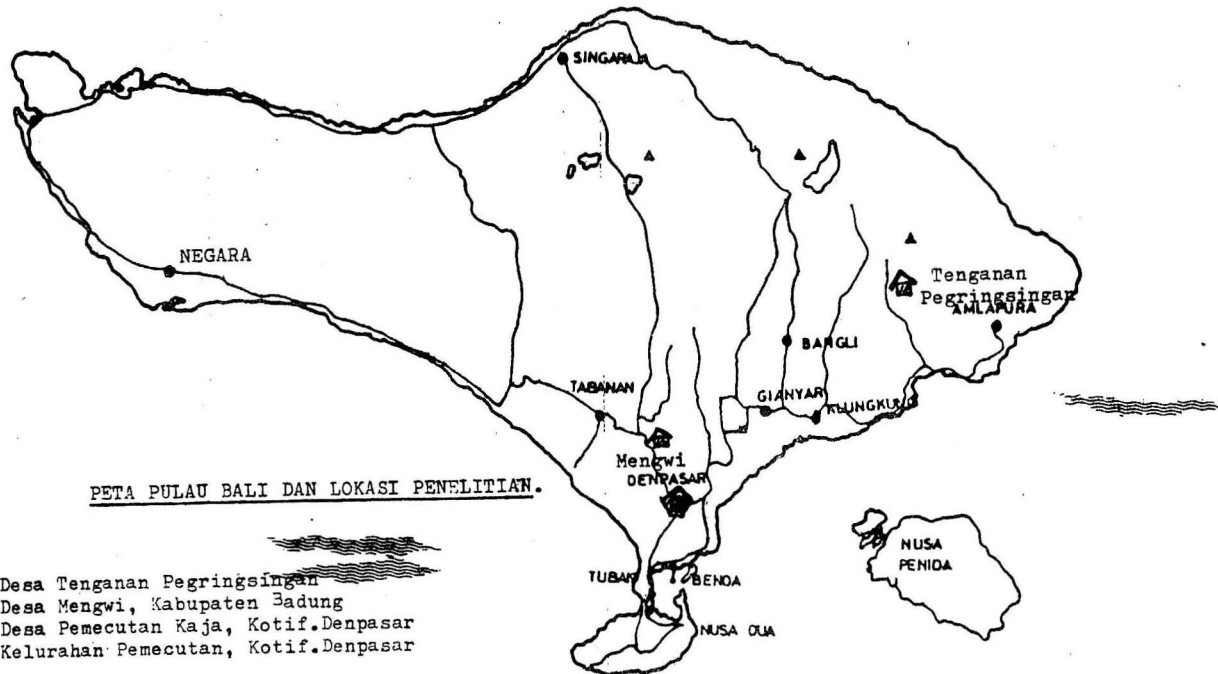
Pembuktian atas rumusan hipotesa tersebut akan dilihat pada em-

pat buah *banjar* yang akan dijadikan daerah penelitiannya yang dipilih berdasarkan kategorisasi atas bentuk *banjar* seperti telah disebutkan di depan. Empat *banjar* tersebut dipilih secara purposif berdasarkan atas permasalahan dan hipotesa yang telah disusun. Keempat *banjar* yang diteliti untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan tersebut adalah:

1. *Banjar* di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem; sebagai *banjar* di masyarakat tradisional yang jauh dari pusat pemerintahan atau kerajaan di masa lampau;
2. *Banjar* di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, sebagai *banjar* di masyarakat tradisional yang dekat dengan pusat pemerintahan atau pusat kerajaan mengwi di masa lampau.
3. *Banjar* Gerenceng di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Badung, sebagai *banjar* di masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisinya ditengah-tengah perkembangan kemajuan lingkungan dan tata nilainya (*banjar* tradisi yang ada di tengah kota).
4. *Banjar* Kertapura di Desa Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Badung, sebagai *banjar* di masyarakat perkotaan yaitu lingkungan *banjar* yang tumbuh dan berkembang pada pemusatan pemukiman baru dari para pendatang di kota Denpasar.

Pembandingan keadaan di keempat *banjar* tersebut yang diteliti dengan instrumen dan cara pendekatan yang sama diharapkan dapat menjawab permasalahan serta hipotesa yang telah dikemukakan di depan.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana peranan *banjar* dan desa dalam kehidupan masyarakat Bali dalam hal ini perlu dilihat bahwa konsep peranan *banjar* itu sendiri akan dilihat bahwa *banjar* dan desa sebagai dua satuan yang ada dalam sistem kehidupan orang Bali, yang masing-masing berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan fungsional dalam struktur yang ada pada kaitan yang lebih luas lagi yaitu: kebudayaan Bali itu sendiri. Lingkup kebudayaan Bali sendiri memberikan batasan konsepsi pada suatu pola tingkah laku yang khas dari orang Bali dalam menanggapi lingkungan hidupnya yang didasarkan atas suatu tata nilai, gagasa,



PETA PULAU BALI DAN LOKASI PENELITIAN.

1. Desa Tenganan Pegringsingan
2. Desa Mengwi, Kabupaten Badung
3. Desa Pemecutan Kaja, Kotif.Denpasar
4. Kelurahan Pemecutan, Kotif.Denpasar

serta norma yang telah dibiasakan sedemikian rupa dalam menata pola tingkah laku tadi dan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Jadi kebudayaan Bali sendiri berkembang di lingkungan orang Balinya sendiri dengan suatu tujuan yang pasti ialah menata kehidupan mereka. Demikian pula *banjar* dan desa sebagai wujud kegiatan organisasi sosial yang menata kehidupan orang Bali merupakan perwujudan dari salah satu aspek kebudayaan Bali. Karena itu *banjar* dan desa berakar pada sistem budaya orang Bali.

Fungsi unsur-unsur dalam sistem peranan *banjar* dan desa itu sendiri adalah untuk menggerakkan aktivitas para warga/anggota *banjar* dan desa itu sendiri sehingga dengan mudah dapat dilihat pada berbagai kegiatan kehidupannya. Demikian misalnya dapat dilihat pada berbagai subsistem kehidupan yang paling terkait dengan kehidupan sehari-hari orang Bali, seperti: subsistem ekonomi, subsistem upacara keagamaan dan adat, subsistem politik, subsistem administrasi, subsistem sosial, serta berbagai subsistem lainnya yang berfungsi dalam usaha pemenuhan kebutuhan anggota masyarakatnya.

Konsep lainnya yang juga dapat dikemukakan di sini dalam mencari jawaban atas pertanyaan sejauh mana peranan *banjar* dan desa dalam kehidupan masyarakat Bali, adalah konsep fungsi dan kegunaan dari sistem organisasi *banjar* dan desa tadi dalam kehidupan masyarakat Bali. Keseluruhan dari isi konsep fungsi dan kegunaan tadi: terlihat dalam wujud *banjar* dan desa berfungsi sebagai sarana untuk berorganisasi, mempertahankan tradisi dan mengembangkan tata nilai, serta sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dalam perkembangan jaman, menyerap inovasi baru dan mengembangkan rasa aman bagi segenap warga atau anggota. Dan semuanya itu memberikan jawaban atas kajian konsep pada data di lapangan itulah peranan *banjar* dan desa pada masyarakat Bali.

Uraian ini sendiri didasarkan atas hasil suatu penelitian secara antropologis dengan pendekatan kualitatif atas empat kasus *banjar* di Bali. Pendekatan tersebut juga ditunjang oleh data kuantitatif untuk mendapatkan suatu gambaran informasi yang lebih pasti. Dilaksanakan dalam waktu kurang dari sepuluh bulan oleh suatu tim peneliti dan sejumlah petugas lapangan, dengan dana dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali tahun anggaran 1985/1986.

B. Fungsi Banjar dalam Struktur Kebudayaan Bali

Berbicara tentang fungsi *banjar* dalam struktur kebudayaan Bali mengharuskan kita melihat pengertian fungsi itu sendiri dalam kaitan struktur yang lebih luas. Malinowski yang memperkenalkan pemakaian teori fungsi dalam membicarakan masalah kebudayaan memusatkan perhatiannya pada bagian-bagian suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi dan kegunaan dalam kebudayaan tersebut. Karena demikian pendapatnya, kalau suatu bagian kebudayaan sudah tidak mempunyai fungsi lagi maka bagian kebudayaan tersebut akan hilang atau punah. (Kallen, 1953). Sedangkan anggapan tentang punahnya suatu bagian kebudayaan kemungkinan karena bagian dari kebudayaan tersebut mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dikenali lagi. Namun dalam struktur fungsinya bagian tersebut tetap mempunyai kaitan yang erat dengan bagian lainnya sebagai suatu kesatuan.

Robert K. Merton yang juga mengembangkan teori fungsi dalam usahanya mengupas berbagai masalah yang berhubungan dengan kebudayaan menggunakan berbagai istilah untuk menjelaskan tentang hubungan berfungsi dari bagian-bagian kebudayaan yaitu: 'saling ketergantungan fungsional' dan 'hubungan fungsional' serta pengertian-pengertian 'saling ketergantungan', 'hubungan timbal balik dan variasi-variasi yang tergantung satu sama lainnya' (Merton, 1957:21). Dengan demikian apa yang dikemukakannya dengan pengertian berfungsi adalah adanya saling keterkaitan atau hubungan yang bervariasi dan tergantung satu sama lainnya dalam bagian-bagian suatu kebudayaan.

Lebih jelas lagi pendapat Malinowski tentang fungsi sosial unsur kebudayaan seperti adat atau pranata sosial lainnya adalah seperti yang dikutip oleh Kuntjaraningrat (1980: 167) berdasarkan tulisan Kabery (1957:82), sebagai berikut:

1. fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat;
2. fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai mak-

sudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan;

3. fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial yang tertentu.

Tentang adanya hubungan yang berfungsi antara unsur-unsur kebudayaan lebih jauh Malinovski menyatakan bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Proses pengenalannya sendiri melalui suatu proses belajar yang panjang untuk seseorang dapat menyelami suatu unsur kebudayaan tertentu (Kuntjaraningrat, 1980: 170-171).

Dalam pengertian fungsi seperti itulah fungsi *banjar* dalam struktur kebudayaan Bali ingin dilihat, yaitu bagaimana keterkaitan antara beberapa unsur yang ada dalam pengertian fungsinya sebagai fungsi sosial, sebagai pranata sosial, dengan tambahan unsur adat dan upacara keagamaan diabstraksikan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Abstraksi mana dapat berupa atau dirasakan sebagai pengaruh terhadap tingkah laku manusia dan pranata sosial lain dalam masyarakat atau pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat untuk mencapai maksud yang sesuai dengan konsepsi masyarakat, serta pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi suatu sistem sosial tertentu. Pada bagian ini abstraksi masyarakat atau orang Bali terhadap *banjar* yang terwujud dalam struktur kebudayaannya sendiri diuraikan berdasarkan hasil penelitian di keempat lokasi *banjar* sampel.

1. Fungsi Pada Sub Sistem Ekonomi

Fungsi *banjar* pada subsistem ekonomi dari masyarakat memperlihatkan variasi yang berbeda pada keempat *banjar* yang diteliti. Jika subsistem ekonomi dari *banjar* diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggota *banjar* didapat atau diatur melalui organisasi sosial *banjar* serta segala sesuatu pemenuhan kebutuhan hidup diabstraksikan dapat dicapai dengan bantuan *banjar*

maka pengertian fungsi ekonomi *banjar* pada masyarakat di keempat banjar akan mempunyai pengertian yang berbeda. Namun sebagai suatu subsistem yang terintegrasi dengan subsistem lainnya dalam wujud suatu kebudayaan, subsistem ekonomi ternyata juga dapat menghidupkan suatu sistem kebudayaan karena ia dapat memberikan ciri yang khas bagi masyarakat *banjar* itu sendiri sebagai wujud suatu sistem sosial.

Di empat *banjar* yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan sebagai *banjar* yang dipilih dari desa tradisional jauh dari pusat kerajaan/pemerintahan, memperlihatkan suatu ciri yang khas bahwa sistem ekonomi masyarakat diatur oleh desa secara tradisional. Di desa ada suatu sistem aturan atau *awig-awig desa* yang mengatur bagaimana para anggota masyarakat desa secara adat mendapatkan distribusi dari hasil pertanian tanah desa, baik itu berupa hasil panen sawah maupun hasil kebun atau ladang. Di tiga *banjar* dari keempat banjar yang ada yaitu: *Banjar Kauh*, *Banjar Tengah* dan *Banjar Kangin* yang secara adat masuk atau merupakan bagian dari Desa Adat Tenganan Pegringsingan bahkan berlaku suatu sistem aturan adat yang ketat terhadap pembagian hasil ini sebagai pengatur suatu sistem ekonomi bagi para anggota desa. Di sini karena hasil dari tanah desa dirasakan cukup untuk pembagian dan keperluan hidup sehari-hari termasuk untuk kegiatan upacara, maka masyarakat desa tidak dibebankan lagi pungutan untuk kebutuhan desa lainnya. Bahkan semacam tabungan desa atau persiapan untuk masa-masa paceklik juga dipikirkan dengan pembuatan beberapa lumbung desa untuk persiapan tersebut. Di *banjar Pande* yang tidak termasuk sebagai bagian desa adat Tenganan tetapi hanya termasuk sebagai desa dinas, sistem ekonomi yang berkembang adalah seperti pada masyarakat Bali umumnya. Masyarakat berusaha sendiri untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan mengembangkan berbagai subsistem mata pencaharian seperti: bertani, buruh tani, pedagang dan sebagainya.

Pengaturan secara adat sistem ekonomi masyarakat di desa adat Tenganan Pegringsingan mengharuskan adanya pengaturan secara pasti sistem distribusi hasil produksi tanah-tanah desa. Di sini berlaku sistem keanggotaan adat dalam desa yang berjenjang sedemikian rupa sehingga untuk kedudukan atau jabatan tertentu seorang anggota desa mendapat sejumlah hak tertentu pula. Dan

karena semuanya diatur berdasarkan adat (*awig desa adat*), maka status seseorang sebagai anggota *banjar* dalam pengaturan sistem ekonomi ini menjadi tidak begitu penting. Artinya tidak ada peranan *banjar* dalam pengaturan sistem ekonomi pada masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan. Sistem ekonomi pada masyarakat ini diatur secara adat berdasarkan peraturan desa adat, sehingga yang berperan dalam hal ini adalah sistem pemerintahan desa adat. *Banjar* hanya merupakan bagian dari desa dan mempunyai fungsi lain dalam kegiatan yang lain pula. Kecuali di *banjar* Pande karena strukturnya berbeda dengan ketiga *banjar* lainnya maka secara khusus sistem ekonomi masyarakat di *banjar* ini berbeda dengan ketiga *banjar* lainnya.

Di *Banjar - Pragai* Desa Mengwi sebagai *banjar* sampel untuk *banjar* tradisional dekat dengan pusat kerajaan/pemerintahan, para anggota *banjar* umumnya hidup dari mata pencaharian sebagai tukang dan buruh bangunan, di samping ada juga yang bekerja sebagai petani atau merangkap keduanya sebagai buruh bangunan dan sebagai petani. Sebagai tukang dan buruh bangunan mereka harus mencari pemasaran akan tenaga mereka di luar desa bahkan kadang-kadang sampai keluar kabupaten atau propinsi. Untuk suatu keperluan akan jumlah tenaga yang besar biasanya diperlukan suatu koordinasi dalam merekrut atau mencari tenaga-tenaga tersebut di desa. Demikian juga jika ada kebutuhan akan tenaga kerja oleh para pemborong atau suatu proyek bangunan maka harus ada koordinasi dalam pengadaan tenaga tersebut. Di sinilah peranan *banjar* dan para anggota *banjar* yang mengetahui terlebih dahulu akan keperluan ini untuk merekrut tenaga tersebut dari *banjar* Pragai sendiri atau dari *banjarnya* sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi *banjar* di sini mempunyai fungsi penting karena dapat memberikan jalan bagi para anggota *banjar* sendiri untuk mendapatkan pekerjaan.

Fungsi lain dalam sistem ekonomi *banjar* bagi para anggotanya adalah dalam usaha pembangunan di *banjar* sendiri. Karena sebagian besar anggota *banjar* adalah para tukang dan buruh bangunan, maka pada pembangunan *balai banjar* atau bangunan untuk umum lainnya dapat dikerjakan secara gotong royong tanpa harus mengeluarkan biaya, untuk ongkos atau upah tukang, melainkan hanya biaya untuk bahan-bahan saja yang harus diusahakan

secara bersama-sama.

Di Banjar Gerenceng sebagai *banjar* yang terletak di pusat kota Denpasar di mana kebutuhan akan ruang dan fasilitas demikian sulit untuk didapat oleh para warga serta terbatas adanya, maka keberadaan *banjar* sangat membantu para warganya dalam beberapa kegiatan. Misalnya untuk suatu pekerjaan adat yang memerlukan ruang yang lebih luas, maka *bale banjar* atau bangunan banjar yang bersifat umum dapat dimanfaatkan oleh anggotanya. Demikian juga segala perabotan dan peralatan lainnya yang perlu dimiliki oleh *banjar* dapat dipakai dengan hanya membayar uang administrasi sebesar Rp. 500,—

Untuk beberapa kegiatan yang dilakukan di *banjar* seperti upacara *odalan di merajan banjar* (persembahyangan bersama di pura banjar), pemeliharaan dan perbaikan beberapa bagian bangunan, pembayaran listrik dan air dan sebagainya biasanya diambil dari kas *banjar* yang ada yang berasal dari hasil sawah yang dimiliki oleh *banjar*. Sumber keuangan juga di dapat dari iuran uang pendaftaran bagi penduduk yang tinggal di lingkungan *banjar* dan ikut terdaftar sebagai anggota banjar dinas atau banjar tidak tetap. Bagi penduduk yang tinggal di lingkungan banjar dan ikut dalam kegiatan serta keanggotaan *banyar* secara administratif ini ada beberapa keuntungan yang mereka dapatkan, misalnya status administrasi dalam kependudukan sebagai penduduk kota Denpasar.

Sebagai sebuah *banjar* yang terletak di pusat kota Denpasar, maka dapat diperkirakan kesibukan para anggotanya untuk bekerja atau masing-masing dengan kegiatannya sendiri. Dalam memperoleh pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan di kota masing-masing orang dituntut untuk berusaha sendiri sesuai dengan kemampuannya, keahliannya serta keterampilannya. Dalam hal ini *banjar* sebagai organisasi sosial masyarakat memang tidak banyak dapat memberikan bantuan seperti pengakuan para responden di banjar ini. Demikian juga seandainya ada anggota yang mempunyai persoalan ekonomi seperti kesulitan dalam keuangan, tidak ada yang pernah meminjam uang ke *banjar*. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh alasan karena rasa malu, karena umumnya lebih banyak pada keadaan seperti ini para anggota akan mencari pinjaman atau bantuan di antara para tetangga, atau meminjam pada

bank sebagai lembaga keuangan yang resmi.

Hal yang sama juga terlihat di banjar Kerta Pura banjar lainnya yang terletak di tengah kota Denpasar, sebagai banjar yang dibangun oleh para pendatang baru di kota ini. Sebagai suatu organisasi sosial yang diadakan oleh para penduduk yang baru datang di kota Denpasar dan memerlukan suatu wadah untuk kegiatan sosial mereka, *banjar* ini didirikan lebih banyak untuk suatu tujuan sosial. Karena itu fungsi ekonomi dari banjar ini kepada para anggotanya hampir-hampir tidak ada. Hanya pernah untuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anggota meminjam *bale banjar* untuk meringankan biaya atau sewa ruangan. Baru dua tahun belakangan ini karena kebutuhan akan ruang pendidikan anak-anak maka salah satu ruangan di *bale banjar* itu dimanfaatkan untuk ruangan Taman Kanak-kanak. Hal ini tentunya lebih berupa fungsi sosial dalam pendidikan, tetapi karena ruangan yang ada dapat dipakai secara gratis maka untuk ruang pendidikan di kota yang seharusnya dibangun atau disewa mahal dalam hal ini sudah dapat ditekan sehingga meringankan para orang tua yang mempunyai anak yang harus sekolah di lingkungan kota seperti kota Denpasar ini. Mungkin dengan adanya sekolah Taman Kanak-kanak di lingkungan *banjar* sendiri bagi para anggota *banjar* sudah merupakan fungsi ekonomi daripada *banjar* yang mereka bangun dan bina sebagai organisasi.

Dengan gambaran seperti itu untuk banjar yang ada di desa tradisional tidak kelihatan bahwa banjar mempunyai dasar untuk suatu fungsi ekonomi karena semua kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi telah diatur dalam aturan desa adat. Anggota *banjar* berpartisipasi dalam statusnya sebagai anggota desa adat dan hanya untuk beberapa kegiatan saja ikut berpartisipasi sebagai anggota *banjar*. Sedangkan pada *banjar* tradisional lainnya fungsi ekonomi dari banjar bagi para anggota banjar terlihat pada koordinasi *banjar* untuk usaha mencari kerja secara kelompok bagi para anggotanya. Demikian juga adanya anggota lain yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sering dan bahkan banyak di antaranya yang mengajak kawan-kawan atau tetangga yang sama-sama satu banjar untuk mencari kerja bersama.

Di *banjar* yang terletak di pusat kota Denpasar sebagai banjar transisi (masih ketat dengan aturannya di tengah-tengah tuntutan mo-

dernisasi lingkungan), fungsi ekonomi dari banjar sebagai organisasi hanya berupa kemudahan-kemudahan bagi para anggota untuk mendapatkan fasilitas pemakaian *bale banjar* sebagai salah satu upaya mendapatkan keringanan serta pelayanan banjar bagi para anggotanya. Demikian juga halnya di *banjar* kota lainnya yang memanfaatkan *bale banjar* nya sebagai ruang belajar untuk anak-anak T.K. yang secara tidak disadari telah ikut meringankan orang tua anak dari beberapa biaya lainnya.

2. Fungsi pada Subsistem Sosial

Sebagai wujud suatu organisasi sosial maka *banjar* pada pokoknya memang memperlihatkan fungsi sosial yang lebih menonjol dari pada fungsi lain-lainnya. Namun di keempat banjar yang diteliti memperlihatkan beberapa variasi dalam masing-masing fungsi sosial tersebut. Di ketiga banjar yang ada di desa Tenganan Pegringsingan (yang selanjutnya tidak akan dibedakan antara banjar Kauh, Banjar Tengah dan Banjar Kagingin, tetapi hanya akan dibedakan dengan banjar Pande saja yang mempunyai adat dan tata cara yang berbeda) fungsi sosial yang dilihat pada kegiatan saling tolong menolong di lingkungan rumah tangga memperlihatkan bahwa kegiatan tersebut sudah dirasakan oleh para anggota banjar jauh sebelum mereka masuk menjadi anggota banjar. Jadi kegiatan tolong-menolong antara anggota, atau antara tetangga tidak tergantung kepada apakah seseorang itu sudah menjadi anggota banjar atau tidak (yang biasanya ditentukan apakah seseorang itu sudah menikah atau tidak). Hal ini disebabkan karena sistem aturan adat atau tata nilai yang berkembang di desa tersebut memungkinkan seseorang atau setiap warga memberikan bantuan atau pertolongan pada setiap kegiatan di lingkungan ketetanggaan atau di lingkungan yang lebih luas yaitu desa. Sebagai anggota banjar di lingkungan Desa adat tersebut memang tidak banyak kegiatan yang dilakukan jika dibandingkan dengan status mereka sebagai anggota desa adat. Kegiatan banjar yang banyak dilakukan adalah 'kerja bakti' membersihkan saluran air yang ada di lingkungan banjar mereka atau memperbaiki keadaan lingkungan mereka yang memang khas yaitu berundag-undag. *Bale banjar* sendiri tidak banyak berfungsi karena umumnya rapat-rapat pen-

ting lebih banyak diadakan di *bale desa* atau *bale agung*, karena umumnya rapat yang diadakan adalah rapat adat oleh segenap warga desa adat. Menurut para responden menjadi anggota banjar memang memberikan rasa aman pada mereka tetapi tentunya yang menjadi orientasi dari mereka adalah menjadi anggota desa adat lebih penting lagi.

Di Banjar Pragai desa Mengwi fungsi sosial dari banjar juga kelihatan memberikan variasi yang hampir sama dengan desa Tenganan Pegringsingan. Tetapi di sini sifat tolong menolong antar tetangga pada fungsi sosial ini ditambah lagi dengan bantuan yang berupa bahan atau barang yang diperlukan dalam kegiatan dan dapat diusahakan oleh para tetangga. '*Seka patus*' adalah wujud sub sistem sosial lain di bawah atau di lingkungan banjar yang memungkinkan setiap anggota mendapatkan bantuan benda selain bantuan tenaga dari warga banjar atau para tetangga. Bantuan tersebut dapat berupa beras, kain putih, kelapa, atau hasil kebun lainnya bila kegiatan tersebut ada hubungannya dengan kematian; atau berupa beras, hasil kebun, barang keperluan upacara kalau kegiatan tersebut bukan kegiatan yang berhubungan dengan kematian. Hampir semua responden menyatakan bahwa bantuan tersebut sudah mereka terima sebelum mereka menjadi anggota banjar, sehingga suasana kehidupan antar anggota banjar atau hubungan ketetanggaaan memungkinkan sistem tolong menolong berjalan sangat lancar. Bantuan lain dalam sistem sosial ini juga didapatkan oleh para warga banjar dalam kegiatan tolong-menolong yang bersifat gotong royong dalam membangun rumah atau bagian-bagian dari rumah tangga. Karena semua penduduk mempunyai keahlian sebagai tukang maka tidak sulit bagi mereka untuk meminta bantuan tetangga dalam kegiatan membangun ini, biasanya bahan yang sudah ada dikerjakan bersama dalam beberapa kali kesempatan yang tidak mengganggu kegiatan mencari nafkah dengan hanya imbalan makan dan minum saja.

Di Banjar Gerenceng sebagai banjar yang berada pada keadaan transisi — karena sistem aturan yang berlaku masih demikian ketat sementara penyesuaian ke arah situasi yang lebih moderen sesuai dengan tuntutan lingkungan juga sedang diusahakan — variasi tentang sistem sosial banjar pada para anggotanya memperlihatkan keadaan seperti di bawah ini. Fungsi sosial dalam wujud ban-

tuan dan tolong menolong antar tetangga dirasakan jauh sebelum menjadi anggota banjar dirasakan oleh sebagian besar responden. Tetapi keadaan tersebut dirasakan jauh meningkat kemudian setelah mereka menjadi anggota banjar. Dengan demikian status sebagai anggota banjar selain meningkatkan rasa aman pada mereka juga memberikan fungsi lain yaitu meningkatnya bantuan yang berupa tolong-menolong dan bantuan lainnya. Jenis bantuan yang didapat juga memperlihatkan hal yang sama dengan apa yang terjadi di banjar *pregai* Mengwi, yaitu dapat berupa bahan atau benda dan tenaga jika bantuan itu diperlukan pada saat ada upacara. Hanya karena banjar ini berlokasi di daerah pusat kota, di mana kesibukan para anggota adalah dalam sektor perdagangan dan jasa, maka bantuan tenaga yang diinginkan seperti di desa Mengwi tidak mungkin dapat dituntut oleh para anggota. Untuk kegiatan membangun atau mendirikan rumah warga banjar biasanya mengupah tenaga, tetapi pada kegiatan upacaranya dapat diharapkan tenaga bantuan yang sifatnya tolong-menolong tadi. Bahkan kecenderungan belakangan ini adalah membeli sebagian peralatan upacara, sehingga bantuan yang diharapkan dari para tetangga dan anggota banjar adalah pada pelaksanaan upacaranya saja. Status keanggotaan banjar di banjar Gerenceng ini yang dibedakan antara anggota *banjar ngarep* (suka duka) dengan anggota *banjar mati* atau *tan ngarep* (administrasi), membedakan pula sifat tolong menolong atau fungsi sosial dari banjar pada para anggotanya. Hal ini dapat diketahui dari pendapat responden bahwa ada juga yang berpendapat bahwa bantuan atau pertolongan dalam kegiatan-kegiatan tertentu hanya diberikan pada anggota *banjar ngarep* saja. Dan untuk kegiatan lain seperti kematian, atau halangan tertentu bantuan diberikan oleh setiap orang dan kepada setiap orang. Rasa aman dirasakan meningkat oleh responden jika mereka sudah menjadi anggota banjar jika dibandingkan belum menjadi anggota banjar. Rasa aman ini dirasakan karena mereka merasa akan mendapatkan bantuan dari anggota lain, serta merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai warga masyarakat.

Dalam hubungan dengan kegiatan di tingkat desa, umumnya para warga banjar merasakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kewajiban setiap warga untuk melaksanakannya. Kegiatan di tingkat desa yang dilaksanakan bersama dengan warga banjar lainnya adalah kerja bakti pembersihan lingkungan, pembangunan balai

desa atau pengerahan tenaga lainnya. Kerja bakti pembersihan lingkungan dilaksanakan sebulan sekali dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada baik anggota *banjar ngarep* maupun anggota *banjar tan ngarep*.

Di Banjar Kerta Pura sebagai banjar yang dihuni oleh para pendatang di Denpasar fungsi sosial dari banjar lebih lemah jika dibandingkan dengan banjar sampel lainnya. Hal ini kalau dilihat bahwa frekuensi upacara yang memerlukan pengerahan tenaga para anggota banjar lainnya lebih kecil dilaksanakan di lingkungan banjar itu jika dibandingkan dengan upacara yang dilaksanakan di tempat asal mereka. Karena itu pengerahan tenaga secara tolong menolong ataupun gotong royong di banjar tersebut hanya terbatas pada kegiatan kerja bakti atau kalau ada upacara untuk banjar dan *pura banjar* saja. Penduduk atau warga yang mengadakan upacara dalam rangka daur hidup umumnya kembali ke desa mereka sendiri, sehingga bantuan tenaga memang diharapkan datang dari warga desa asal mereka sendiri. Di samping itu heterogenitas etnis yang ada di lingkungan banjar itu sendiri tidak memungkinkan bagi para warga untuk mengharapkan sumbangan tenaga dalam bentuk tolong menolong, dari semua warga banjar karena tidak semua anggota dapat mengerti atau memahami adat dan tata cara yang berlaku pada etnis lain. Dalam hal kematianpun umumnya para warga (yang orang Bali) akan mengupacarakan atau mengubur jenazah keluarganya kembali ke desa asal, sehingga kunjungan antar tetangga di lingkungan banjar Kerta Pura sendiri juga tidak ada. Dengan demikian fungsi sosial dari banjar di lingkungan ini hanya berarti saling meringankan beban atau tolong menolong dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan banjar seperti kerja bakti dan pembangunan *bale banjar*.

Dengan demikian fungsi sosial banjar pada para anggota banjar yang diartikan dalam suatu kegiatan tolong menolong dan pengerahan tenaga bantuan suka rela memberikan variasi yang berbeda-beda antara satu banjar dengan banjar lainnya. Banjar sebagai organisasi sosial dalam hal ini memberikan fungsi suatu bentuk atau wadah saling bantu membantu di antara para warga banjar. Di samping itu warga banjar dengan organisasi banjarnya menciptakan suatu bentuk kegiatan tolong menolong atau hubungan antar ketetanggaan yang bersifat khas. Hal ini terlihat dari pernya-

taan para responden yang menyatakan bahwa dengan menjadi anggota banjar mereka mendapatkan rasa aman, dapat menolong atau memberikan bantuan kepada sesama anggota banjar, serta merasa sudah memenuhi kewajiban dalam hidup. Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa bantuan itu sudah diterima jauh sebelum menjadi anggota banjar dan meningkat setelah menjadi anggota banjar. Variasi terjadi pada keempat banjar sampel adalah: pada banjar di mana aturan desa adat kuat maka fungsi sosial banjar tidak nampak karena semua sudah diatur oleh aturan desa adat. Pada banjar yang ada di kota terjadi dua variasi yaitu banjar yang dihuni oleh penduduk yang umumnya asli banjar tersebut fungsi sosial lebih kuat, sedangkan pada banjar di mana penduduknya adalah para pendatang fungsi sosial banjar berkurang karena untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan perwujudan fungsi sosial itu para warga banjar sudah mendapatkannya atau kembali ke desa asalnya.

3. Fungsi pada Subsistem Administrasi

Fungsi administrasi dari suatu banjar menyangkut kejelasan akan keanggotaan seseorang pada suatu wilayah banjar. Kejelasan akan keanggotaan pada suatu wilayah banjar ini memberikan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab pada seseorang kepada banjar, lingkungannya serta dirinya sendiri. Pada keempat banjar yang diteliti kejelasan akan keanggotaan ini hampir sama kelihatannya karena hampir semua responden menyatakan menjadi anggota sebuah banjar ditempat mereka menetap sekarang. Sebagai tanda bahwa mereka tercatat sebagai anggota sebuah banjar mereka mempunyai surat keterangan penduduk (KTP), walaupun tidak berarti semua mempunyai surat tersebut secara sah. Karena banyak juga di antara para responden yang hanya mempunyai surat keterangan pindah (karena baru saja tercatat di tempat yang baru sebagai warga), bahkan di satu banjar keterangan mereka ini hanya tercantum dalam kartu keluarga (KK) saja. Perbedaan antara keempat banjar sampel pada fungsi banjar secara administratif ini terlihat pada kewajiban dan tanggung jawab yang ada dan bervariasi pada setiap banjar.

Di banjar yang ada di Desa Tenganan Pegringsingan fungsi

administrasi menyangkut pada kejelasan pendaftaran penduduk lingkungan desa tersebut yang dibagi atas empat banjar, yaitu. banjar Kauh, Banjar Tengah, Banjar kangin dan Banjar Pande. Pembagian lokasi keempat banjar ini ditata menurut leretan tempat tinggal mereka yang kebetulan tertata berdasarkan pola menetap khas desa-desa *Bali Aga*. Karena itu penataan ataupun pembagian wilayah di lingkungan banjar sendiri juga menjadi lebih jelas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas banjar yang berhubungan dengan fungsi administrasi ini hampir semua responden menyatakan bahwa mereka melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh banjar, bahkan dinyatakan bahwa tugas-tugas tersebut telah dilakukan jauh sebelum mereka menjadi anggota banjar atau *ngayahin*, sebagai arena latihan untuk menjadi anggota banjar. Umumnya yang menjadi tuga latihan ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tata upacara, dan kemudian baru meningkat pada tugas-tugas sebagai anggota banjar penuh. Beberapa kewajiban yang disebutkan sebagai kewajiban anggota banjar yang berhubungan dengan fungsi administrasi ini antara lain mentaati beberapa aturan banjar juga disebutkan oleh para responden ada dipenuhi walaupun tidak semuanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya sanksi bagi para pelanggarnya. Disamping itu mereka juga menyatakan bahwa menjadi anggota banjar untuk mengharapkan adanya pelayanan administrasi dari para perangkat banjar.

Di banjar Pregai di desa Mengwi status kejelasan keanggotaan ini juga dirasa perlu oleh para responden. Hal ini terutama disebabkan karena sering kali para anggota banjar bepergian keluar banjar bahkan keluar desa untuk suatu pekerjaan. Karena itu memiliki sebuah KTP dengan tercatat sebagai anggota satu banjar adalah mutlak. Dengan KTP ini pula beberapa urusan administrasi di luar banjar terutama yang berhubungan dengan instansi pemerintahan memang melancarkan urusan. Den pemilikan KTP pula menyangkut status keanggotaan seseorang dalam Kartu Keluarga yang berarti bahwa yang bersangkutan menjadi anggota salah satu keluarga di lingkungan banjar tersebut.

Karena banyak di antara warga banjar ini yang bekerja di luar banjar bahkan di luar desanya, maka tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan banjar yang tidak

dapat diikuti. Untuk itu mereka umumnya mendapat keringanan atau dispensasi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Kepada mereka umumnya dikenai uang *ayahan* sebagai uang pengganti atas kegiatan yang tidak dapat diikutinya. Namun pada kegiatan lain jika yang bersangkutan ada di rumah maka kegiatan yang berlangsung harus diikuti, kecuali ada halangan seperti sakit, upacara, baru dapat diwakilkan oleh tenaga lainnya.

Sosialisasi untuk melaksanakan tugas-tugas banjar ini di Banjar Pregai dapat dilakukan dengan baik karena adanya sistem keanggotaan banjar secara bertingkat. Dimulai sebagai anggota banjar *pengele* (pemula) baru kemudian meningkat sebagai anggota *banjar ngarep* atau *suka duka*. Tugas dan kewajiban antara kedua status keanggotaan ini juga berbeda yang memberikan gambaran pada sosialisasi tugas dan kewajiban secara terpisah.

Di Banjar Gerenceng Desa Pemecutan Kaja kejelasan akan keanggotaan dalam banjar dipunyai oleh semua responden. Hal ini dapat dilihat pada status mereka sebagai kepala keluarga yang ber-KTP dan berkartu keluarga (KK). Karena persyaratan untuk menjadi anggota banjar adalah didasarkan pada status kawin maka setiap anggota banjar yang sudah melaksanakan pernikahan (anggota laki-laki), maka diwajibkan untuk *tuun mebanjar* (ikut menjadi anggota banjar). Dalam pelaksanaan tugas-tugas banjar umumnya para responden sudah melaksanakannya jauh sebelum menjadi anggota banjar, di samping sebagai latihan juga karena terpaksa (menggantikan tenaga inti dalam keluarga yang berhalangan). Biasanya yang menjadi tugas-tugas latihan adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan tata upacara agama, adat dan pekerjaan lainnya.

Pelayanan administrasi yang diperoleh oleh setiap anggota banjar yang dapat dilayani oleh perangkat banjar antara lain: pembuatan surat-surat keterangan, KTP, atau penunjukkan dan pengumuman penting lainnya dari pemerintah. Untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan desa dinas biasanya ditentukan oleh pimpinan banjar. Pendaftaran penduduk dan anggota baru baik yang berstatus anggota *ngarep* maupun anggota *tan ngarep* juga merupakan bagian dari fungsi administrasi ini yang dilakukan oleh para pimpinan banjar sendiri. Bahkan belakangan ini beberapa

pengumuman penting yang ada hubungannya dengan masalah pembangunan seperti Keluarga Berencana, Gizi, Paket Kejar, kebersihan lingkungan serta pungutan lainnya juga dilakukan oleh pimpinan banjar sebagai bagian dari fungsi pelayanan administrasi. Pendaftaran anak sekolah untuk masuk Sekolah Dasar juga dilakukan oleh banjar dalam rangka rayonisasi anak-anak SD di lingkungan desa Pemecutan sendiri.

Di Banjar Kerta Pura sebagai banjar dari penduduk para pendatang fungsi administrasi ini lebih nampak karena umumnya warga banjar sangat mementingkan kejelasan status akan keanggotaan banjar ini. Hal ini menyangkut kejelasan akan tempat tinggal mereka di lingkungan banjar Kerta Pura, disamping untuk beberapa kemudahan yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan hubungan dengan instansi lainnya. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh para anggota banjar sendiri dalam hubungannya dengan status keanggotaan tadi tidaklah banyak. Umumnya tugas-tugas yang ada adalah kerja bakti membersihkan lingkungan serta jalan-jalan yang ada di lingkungan banjar. Menurut para responden mereka mengerjakan semua tugas-tugas tersebut, walaupun tidak merupakan suatu tugas latihan sebelumnya. Tetapi begitu mereka tercatat sebagai anggota banjar di sana maka tugas-tugas tersebut segera memang harus dikerjakan. Untuk beberapa kesibukan para anggota banjar dapat mewakili pelaksanaan tugas-tugas ini kepada para penggantinya. Tidak ada sistem latihan dalam pelaksanaan tugas-tugas ini karena umumnya para warga banjar pindah ke wilayah ini setelah mereka sebelumnya menjadi warga atau anggota banjar di tempat lain (di daerah asal).

Heterogenitas dari etnis yang mendiami wilayah banjar ini memungkinkan pelaksanaan dari fungsi administrasi berjalan secara kompleks. Karena aturan-aturan yang diterapkan harus bersifat tegas dan dapat dimenerti oleh semua pihak. Demikian juga dalam rapat-rapat yang diadakan di lingkungan banjar banyak masukkan yang berasal dari keragaman etnis ini yang berguna untuk diterapkan di lingkungan banjar tersebut. Walaupun kemudian ada perbedaan status yang didasarkan pada lama tidaknya seseorang terdaftar sebagai anggota banjar di sana, namun pada hakekatnya kepada semua anggota dikenakan peraturan yang sama, tugas dan kewajiban yang sama pula.

Mereka yang lebih dahulu menjadi anggota banjar atau para pendiri banjar disebut *para sesepuh*, mempunyai hak yang sama dengan mereka yang baru setahun atau sebulan menjadi anggota banjar. Kelebihan dari *para sesepuh* ini mungkin hanya terletak pada rasa kebanggaan bahwa mereka telah dapat menghimpun diri dan mendirikan banjar lebih dari dua puluh tahun yang lalu walaupun *bala banjarnya* secara permanen baru dibangun beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu para pendatang baru masih berdatangan, dan kemungkinan untuk penambahan anggota baru tetap ada karena wilayah ini sendiri tetap berkembang sebagai wilayah pemukiman yang tidak begitu jauh dari pusat keramaian atau pusat perkantoran dan sekolah di kota Denpasar. Sementara itu status keadatan mereka tetap berada di tempat asal.

Fungsi administrasi dari banjar pada para anggotanya yang terlihat pada kejelasan status keanggotaan dalam banjar tersebut mencakup beberapa aspek antara lain: pencatatan penduduk, aturan keanggotaan, pelaksanaan tugas dan kewajiban dan aspek pelayanan administrasi oleh perangkat banjar kepada para anggotanya. Di keempat banjar sampel dapat diketahui adanya variasi dari aspek-aspek tersebut. Antara lain di banjar yang ada di desa adat Tengana Pegringsingan kejelasan keanggotaan ada tetapi tidak terlalu diperhatikan oleh para anggota sendiri, ternyata ada anggota banjar yang sampai sekarang hanya memiliki kartu KK, dan tidak memiliki KTP karena kemungkinan dirasakan tidak begitu banyak fungsinya (banyak di antara para warga desa yang sama sekali tidak bepergian selama setahun ini). Di samping itu berlakunya sistem aturan desa adat yang demikian ketat mengaburkan fungsi aturan dinas atau administratif yang ada, serta tidak begitu banyak kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan fungsi administrasi ini.

Di banjar Pragai dan banjar Gerenceng yang mempunyai status keanggotaan banjar yang bertingkat fungsi administrasi menjadi demikian penting karena dapat membedakan seseorang pada keanggotaan mana mereka berada. Dengan demikian jelas pula perbedaan antara hak, kewajiban serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh para anggota di setiap tingkat. Di Banjar Kerta Pura sendiri fungsi administrasi menjadi demikian kuatnya karena wujud banjar ini sebagai wujud banjar dari para penduduk penda-

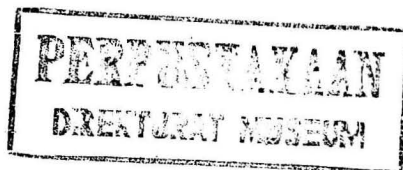
tang atau para pemukim baru di Denpasar.

4. Fungsi dalam Subsistem Upacara Agama dan Adat

Telah dapat dilihat bahwa pada beberapa banjar aspek kehidupan agama dan adat dapat menghidupkan sistem banjar secara keseluruhan, hal mana memperlihatkan adanya keterkaitan antara kehidupan beragama dari para anggota pada sistem banjarnya sendiri. Sebaliknya sebagai organisasi sosial, banjar juga dapat mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan tata upacara keagamaan dan tata upacara adat. Variasi yang ditunjukkan oleh keempat banjar sampel untuk fungsi kegiatan upacara keagamaan dan adat dari banjar adalah sebagai berikut:

Di banjar yang ada di Desa Tenganan Pegringsingan kegiatan upacara adat dan agama yang tertata secara khusus dan khas ada pada fungsi desa adat. Banjar sendiri yang ternyata mempunyai fungsi koordinasi pengerahan tenaga hanya pada kegiatan tertentu saja dalam kegiatan upacara ini tidak mempunyai peranan. Setiap upacara yang dilakukan di desa itu melibatkan seluruh atau sebagian warga desa adat, yang tidak ditunjuk atau dibagi berdasarkan wilayah banjar tetapi berdasarkan suatu struktur masyarakat yang sudah tentu dan pasti menurut kedudukannya dan tugasnya masing-masing. Struktur kemasyarakatan mana sudah ditentukan secara ketat dan pasti berdasarkan aturan adat atau awig-awig adat. Pengerahan tenaga banjar hanya diperlukan apabila ada upacara yang memerlukan pengamanan, dan bukan pada fungsi mengaktifkan sistem upacaranya sendiri.

Di Banjar Pragai di Desa Mengwi yang mempunyai *merajan banjar* atau *pura banjar* fungsi untuk mengaktifkan sistem upacara agama berlangsung setiap 210 hari sekali di mana dilakukan upacara *odalan* di *merajan banjar* tersebut. Pada upacara *odalan* itu dilakukan persembahyang bersama oleh setiap warga banjar. Dan karena upacaranya sendiri melibatkan seluruh warga banjar maka persiapan untuk upacara itu juga dilakukan jauh sebelumnya dan melibatkan hampir semua warga banjar. Pada upacara seperti ini biasanya biaya ditanggung bersama oleh warga banjar demikian juga acara pelaksanaan upacaranya sendiri. Pada saat-saat tertentu jika dipandang perlu dilakukan pula upacara *peber sihan* atau *me-*



caru yaitu upacara persembahan korban untuk memohon keselamatan pada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa dan segala manifestasinya. Semua kegiatan tersebut melibatkan seluruh warga banjar dalam suatu keaktifan atau aktifitas bersama untuk bersama-sama berupacara.

Di Banjar Gerenceng Desa Pemecutan Kaja hal yang sama juga ditemukan yaitu keaktifan warga banjar dalam sistem upacara agama dan adat sebagai fungsi banjar dalam mengaktifkan upacara di lingkungan para warganya. Di *merajan banjar* dimana dilakukan upacara *odalan* setiap 210 hari sekali dengan pergiliran sekali *odalan* biasa dan sekali *odalan nadi* atau besar-besaran. Pada kegiatan seperti ini seluruh warga banjar ikut berperan secara aktif melakukan persiapan upacara sampai upacaranya berlangsung bahkan juga sampai pembersihan peralatan ketika upacara sudah selesai dilakukan. Pada upacara ini tidak terbatas lagi peranan anggota banjar baik *banjar ngarep* maupun *banjar tan ngarep*, semuanya datang dan ikut bersembahyang, dan aktif mempersiapkan upacaranya. Untuk kegiatan ini karena simpanan banjar masih cukup maka segala pembiayaan diambil dari simpanan yang ada sementara para anggota hanya diharapkan partisipasinya saja.

Kegiatan upacara yang ada hubungannya dengan upacara desa adat biasanya diserahkan kepada masyarakat sendiri, kecuali upacara yang ada hubungannya dengan *pecaruan desa* di lingkungan desa adat sendiri. Karena itu para responden berpendapat jika ada upacara di lingkungan Pura Desa, Pura Puseh atau Pura Dalem, maka masyarakat secara sendiri-sendiri datang ke pura untuk melakukan upacara tanpa dikoordinasikan oleh banjar. Tetapi bila ada persembahyangan yang mengharuskan itu dilakukan di tingkat banjar maka para warga banjar memperoleh petunjuk pelaksanaannya dari pimpinan banjar. Sebagai contoh adalah upacara *pecaruan tawur kesanga* yang dilakukan setahun sekali pada setiap bulan Maret. Pada saat seperti itu masyarakat berduyun datang ke banjar untuk melakukan upacara *pecaruan* tersebut dengan membawa *prani* atau sajian untuk upacara *tawur* tersebut. Dalam hal ini tidak ada anggota banjar yang dapat melakukan upacaranya secara sendiri-sendiri karena upacara itu sendiri memang harus dilakukan di banjar baru kemudian turun ke pekarangan masing-masing. Sama seperti upacara *odalan* maka pada kesempatan seper-

ti ini tidak ada perbedaan status keanggotaan banjar dalam turuf aktif melakukan kegiatan upacara ini. Semua anggota banjar turut serta dalam kegiatan ini.

Di Banjar Kerta Pura Desa Pemecutan juga dilakukan kegiatan upacara odalan di *Padmasana* yang ada di banjar. Sama seperti upacara odalan di pura lainnya maka upacara odalan di sini juga berlangsung setiap 210 hari sekali, yang melibatkan sejumlah anggota banjar yang beragama Hindu. Kegiatan upacara yang dilakukan memang terbatas hanya pada upacara odalan saja, karena upacara-upacara lainnya umumnya para warga banjar sudah melakukan di daerah asal masing-masing. Partisipasi seluruh anggota banjar memang diharapkan tetapi karena adanya heterogenitas etnis tadi dengan latar belakang agama yang berbeda maka aktifitas kegiatan berupacara agama secara ini hanya dapat diharapkan dari para warga yang beragama Hindu saja. Para *sesepuh banjar* yang bukan beragama Hindu juga ada yang ikut aktif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, sebagai wujud terlaksananya kehidupan keagamaan yang rukun antar umat. Sementara itu kegiatan upacara keagamaan yang berhubungan dengan desa adat tidak ada yang dilakukan secara koordinasi oleh banjar, tetapi secara langsung dilakukan oleh para warga banjar sendiri-sendiri. Dan kegiatan upacara adat yang berhubungan dengan daur hidup juga lebih banyak dilakukan oleh masyarakat di lingkungan desa atau tempat asal mereka masing-masing.

C. Kedudukan Banjar Bagi Masyarakat Bali

Setelah melihat fungsi banjar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali maka untuk melihat peranan banjar pada kehidupan masyarakat Bali secara luas perlu diketahui kedudukan banjar bagi kehidupan masyarakat Bali sendiri. Kedudukan banjar di sini diartikan sebagai status hubungan antara banjar sendiri dengan desa, baik hubungan secara adat maupun dinas, kemudian banjar sebagai pusat orientasi masyarakat serta peranannya sebagai media pelaksanaan inovasi baru serta sebagai lembaga sosial tradisional dengan dasar yang kuat pada struktur kebudayaan Bali sendiri.

1. Banjar Sebagai Bagian Dari Desa

Bahwa banjar merupakan bagian dari desa telah dikemukakan secara luas pada uraian di depan, di mana secara struktural dan fungsional banjar merupakan bagian dari sebuah desa. Secara struktural banjar merupakan bagian dari desa, baik desa dinas (administratif) maupun desa adat, yang kemudian memunculkan pada tingkat banjar: banjar dinas dan banjar adat. Ada kemungkinan satu desa dinas yang terdiri atas beberapa banjar dinas yang berada pada lingkungan satu atau lebih desa dinas. Karena legitimasi dari masing-masing desa tersebut berbeda-beda maka memang agak sulit untuk mengetahui apakah desa adat yang lebih besar ataukah desa dinas, atau mungkin juga sebaliknya, kemungkinan keduanya itu bisa saja apalagi belakangan ini ada perluasan wilayah kota administratif serta pemekaran beberapa desa dinas yang memungkinkan kedua struktur itu bisa saja terjadi.

Pada hubungan yang struktural sudah jelas dan dapat dipastikan bahwa banjar adalah bagian dari sebuah desa, dan perangkat sebuah banjar disesuaikan dengan perangkat pemerintahan desa dengan beberapa penyesuaian menurut keperluannya. Tetapi pada hubungan yang fungsional kadang-kadang agak sulit untuk mengetahui apakah kedudukan banjar pada desa tetap sama saja yaitu sebagai bagian dari desa. Ternyata hasil penelitian di keempat banjar memperlihatkan adanya perbedaan kedudukan tersebut yang memberikan ciri kedudukan banjar pada desa: sama, lebih tinggi/berperan dan lebih rendah/lemah, dan itu pun bervariasi pada beberapa aspek kehidupan atau fungsinya pada beberapa subsistem kehidupan.

Pada desa yang mempunyai tata aturan adat yang kuat atau desa-desa tradisional, fungsi dan kedudukan banjar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat ternyata lebih lemah atau kurang berperan dalam menata kehidupan masyarakatnya. Hal ini terlihat di Desa Tenganan Pegringsingan yang mempunyai aturan adat yang sangat kuat di tingkat desa, sehingga banjar sebagai bagian dari desa dinas hanya berperan sedikit dan kedudukannya terhadap desa adat juga lemah sekali. Fungsi untuk menghidupkan kegiatan upacara ada pada desa adat dan banjar hanya mempunyai fungsi pada kegiatan administrasi saja. Kemudian karena sistem ekonomi

yang menyangkut subsistem produksi, konsumsi dan distribusi juga ada pada desa adat maka peranan banjar semakin lemah pada kedudukan desa. Banjar hanya berfungsi pada mengaktifkan pengerahan tenaga pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dinas atau pemerintahan saja sepanjang hal itu belum diambil alih oleh desa adat.

Pada kehidupan banjar yang mengarah kepada suatu keadaan transisi, yaitu keadaan di mana kehidupan banjar masih bertahan pada sistem aturan yang ada secara tradisional sementara modernisasi dan pembaharuan juga mendesak kehidupan masyarakatnya, maka kedudukan banjar pada desa berada pada kedudukan yang sama (tetapi kadang-kadang terjadi perubahan banjar lebih kuat dari pada desa atau banjar lebih lemah dari pada desa, sangat tergantung kepada aspek mana yang ingin dilihat). Hal ini terlihat di banjar Gerenceng Desa Pemecutan Kaja Denpasar. Pada kegiatan yang berhubungan dengan adat maka kedudukan banjar pada desa menjadi lebih tinggi karena banjar dapat merupakan potensi pengerahan tenaga bagi kegiatan tersebut. Di saat seperti ini kedudukan desa dinas lebih lemah dari pada kedudukan banjar, karena banjar dapat mengaktifkan kegiatan upacara keagamaan sementara desa tidak. Sedangkan pada keadaan di mana kegiatan tersebut ada hubungannya dengan pengerahan tenaga untuk kegiatan dinas seperti kerja bakti maka kedudukan banjar pada desa sejajar karena desa dapat mengaktifkan kegiatan ini bersama banjar.

Usaha banjar untuk tetap menerapkan sistem aturan secara tradisional dan ekalian untuk dapat menampung tuntutan akan lingkungan yang sudah mulai berkembang adalah dengan melaksanakan sistem keanggotaan yang berbeda antara mereka yang akan terkena aturan yang ketat dan mereka yang akan dikenai peraturan yang longgar. Anggota *banjar ngarep* atau *suka duka* adalah mereka yang terkena sistem aturan adat dan kedinasan secara penuh dan ketat, sementara anggota *banjar tan ngarep* atau administrasi adalah mereka yang terkena peraturan terbatas. Pada keadaan yang bersifat transisi ini kedudukan banjar pada desa tidak selalu sama dan sangat tergantung kepada fungsi dan sifat kegiatan yang dilakukan.

Di Banjar Kerta Pura dengan ciri fungsi banjar pada subsistem administrasi sangat kuat maka kedudukan banjar pada desa juga

menjadi kuat. Koordinasi banjar pada kegiatan yang berhubungan dengan upacara tidak demikian besar sehingga banjar hanya berfungsi untuk menggiatkan sistem administrasi saja. Dalam hal ini walaupun kedudukan banjar tetap merupakan bagian dari desa tetapi potensi untuk pengerahan tenaga bagi kegiatan desa ada pada banjar sendiri. Bagi masyarakat anggota banjar mereka hanya bergerak jika ada perintah dari pimpinan banjar, dan tidak mungkin pimpinan desa dapat langsung memberikan perintah yang serupa.

2. Banjar Sebagai Pusat Orientasi Masyarakat Bali

Sebagai suatu sistem organisasi sosial yang dapat mengkoordinasikan berbagai kegiatan masyarakat maka banjar dapat merupakan pusat orientasi masyarakat baik untuk kegiatan yang sakral maupun profan, baik di lingkungan banjar sendiri maupun sampai kepada tingkat lingkungan desa. Para responden yang diwawancarai menyatakan bahwa dengan menjadi anggota banjar dirasakan adanya rasa aman dalam kehidupan, sehingga semua orang di lingkungan suatu banjar memang mendambakan untuk menjadi anggota suatu banjar. Selain rasa aman tadi mereka yang sudah menjadi anggota banjar juga menginginkan dan mengharapkan akan didapatkannya suatu pelayanan sosial dari masyarakat jika mereka masuk menjadi anggota banjar. Walaupun di satu daerah sistem aturan yang berlaku dari satu banjar berlainan dengan sistem aturan yang berlaku di banjar lainnya tetapi kebutuhan untuk masuk menjadi anggota banjar dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mutlak oleh sebagian besar masyarakat.

Suatu sistem aturan bertingkat bagi keanggotaan satu banjar berlaku pada berbagai banjar juga merupakan ciri bahwa persyaratan untuk menjadi anggota satu banjar tidaklah mudah disamping beberapa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan juga memberikan sistem aturan yang berbeda. Untuk itu ada berbagai proses sosialisasi yang diberlakukan bagi para anggota baru untuk dapat memahami aturan yang ada.

Rasa takut akan dikenakan sanksi jika tidak menjadi anggota satu banjar disamping mengharapkan akan adanya pelayanan sosial yang didapat jika menjadi anggota banjar adalah ciri bahwa menjadi anggota banjar itu perlu dan ada manfaatnya. Hal itu

dikemukakan oleh responden dalam penelitian ini. Rasa takut akan kena sanksi terutama sanksi sosial dari banjar dan masyarakat jika tidak menjadi anggota banjar merupakan salah satu cara untuk mengembangkan rasa takut dan rasa malu di kalangan masyarakat sebagai salah satu cara pengendalian sosial. Dengan pengembangan kedua rasa tersebut di kalangan masyarakat, maka kepada masyarakat sudah ditanamkan suatu orientasi masyarakat kepada banjar sebagai suatu sistem.

Di kota pada masyarakat yang tergabung dalam lingkungan satu banjar juga dikembangkan suatu rasa memiliki terhadap banjar itu sendiri. Bagi masyarakat yang merupakan pemukim asli di kota Denpasar, nama banjar lebih memberikan arti pada penunjukan alamat/tempat tinggal dari pada nama jalan dan nomor rumah. Dengan mengetahui nama banjar tempat tinggal maka seseorang seakan-akan sudah memperlihatkan identitas dirinya, dan dari mana ia berasal. Demikian juga sebaliknya jika ada orang Bali yang menanyakan rumah seseorang maka terlebih dahulu ia akan menanyakan banjar mana tempat tinggalnya dan baru kemudian menanyakan nama jalan serta nomor rumahnya, tentunya ini berlaku bagi mereka yang merupakan pemukim asli di lingkungan banjar di kota Denpasar.

Bangunan *bale banjar* atau identitas lainnya yang dimiliki oleh banjar juga merupakan suatu kebanggaan bagi para anggota banjar yang kadang-kadang juga dapat memunculkan rasa sentimen kemasyarakatan yang tinggi. Bangunan *bale banjar* selain berguna untuk melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan upacara atau kegiatan sosial lainnya, juga sering menjadi tempat duduk-duduk atau ngobrol oleh para warga banjar. Kadang-kadang di kalangan masyarakat sendiri muncul suatu keinginan untuk bertemu kawan ngobrol di *bale banjar*, sehingga bale banjar dan keriuhan suara obrolan dan anak-anak bermain adalah ciri dari suatu kehidupan banjar. Demikian juga jika di bale banjar ditempatkan pesawat tv, maka pada setiap kesempatan banyak sekali anggota banjar yang menonton dan mendengarkan siaran yang ada. Dalam hal ini menonton bukanlah tujuan pokok tetapi muncul di banjar dan ikut bersama-sama mendengarkan atau menonton merupakan satu keasyikan tersendiri. Karena itu dapat dikemukakan bahwa

banjar dapat merupakan pusat orientasi dari para anggota banjar baik perorangan maupun kelompok.

Dalam wujud sebagai pusat orientasi lainnya banjar mempunyai kaitan erat dengan kehidupan masyarakatnya sendiri karena banjar merupakan bagian dari proses sosialisasi, mengukur tingkat partisipasi anggota, wujud dari pengendalian sosial untuk menciptakan tanggung jawab sosial di lingkungan banjar, desa serta lingkungan masyarakat yang lebih luas.

3. Banjar Sebagai Lembaga Pengenalan Program Pembangunan

Sebagai suatu organisasi sosial, banjar dapat berbentuk suatu lembaga sosial yang paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai anggota lembaga sosial tersebut. Karena itu banyak sekali program-program pembaharuan yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat itu sendiri dan diperkenalkan lewat organisasi ini. Ada berbagai keuntungan dari pengenalan program ini lewat organisasi banjar, seperti: dapat langsung berhubungan dengan sasaran yang akan diprogram atau diberi pengenalan/pembaharuan, dalam struktur masyarakat Bali banjar mempunyai fungsi dan peranan yang demikian terkait dengan fungsi dan peranan lembaga lainnya di lingkungan desa. Pengenalan program pembaharuan lewat banjar sebagai organisasi/lembaga sosial ini juga mengharapkan adanya partisipasi aktif seluruh warga banjar sebagai sasaran yang dituju. Di samping itu lewat pengenalan program pembaruan dengan memfungsikan banjar diharapkan bahwa akan dapat dicapai hasil yang maksimal terutama dengan memanfaatkan banjar sebagai lembaga kontrol dengan sistem pengendalian sosialnya yang dapat menciptakan tanggung jawab sosial. Program pembangunan itu sendiri memerlukan suatu tanggung jawab dan disiplin dalam pelaksanaannya, sehingga dengan melalui lembaga sosial banjar ini diharapkan bahwa program itu bisa diperkenalkan secara efektif, demikian juga rapat banjar atau *pesangkepan banjar* adalah media komunikasi yang sangat efektif dan efisien dalam pengerahan massa.

Sebagai satu contoh program pembaruan atau pembangunan yang digalakkan pengenالannya kepada masyarakat lewat lembaga banjar ini adalah program Keluarga Berencana dan Usaha Perbaik-

an Gizi Keluarga. Pengenalan program ini lewat apa yang disebut dengan 'KB sistem banjar' atau pengenalan Gizi sistem banjar' hanyalah memanfaatkan rapat-rapat atau *sangkep banjar* untuk memperkenalkan cara-cara atau sistem penundaan usia kawin dan menjarangkan kelahiran demi kesehatan ibu dan anak. Dalam hal ini si inovator atau pembawa pesan memanfaatkan rapat-rapat banjar yang diadakan secara periodik ataupun khusus dalam suatu pertemuan yang diadakan untuk keperluan tersebut. Pertemuan itu sendiri ada kalanya dihadiri oleh ibu-ibu saja sebagai sasaran atau secara bersama-sama dengan para kepala keluarga atau bapak-bapak. Sedangkan pertemuan banjar dalam arti sebenarnya biasanya hanya dihadiri oleh para kepala keluarga atau laki-laki anggota banjar, karena yang dibicarakan biasanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai anggota banjar. Karena itu sebagai pengertian sistem yang menyangkut keseluruhan subsistem dalam banjar, maka konsep 'KB sistem banjar' tidaklah menyangkut banjar dalam pengertian adat atau lembaga sosial secara utuh. Apalagi kehadiran 'orang asing' atau si inovator dalam lingkungan rapat banjar akan sangat membatasi komunikasi di antara sesama warga banjar. Karena itu pengenalan program ini lebih bersifat pada aspek kedinasan karena menyangkut program pemerintah.

Di banjar yang ada di Desa Tenganan misalnya di mana program-program seperti ini biasanya diperkenalkan lewat desa, tidak banyak responden yang dapat menjawab bahwa karena sebagai anggota banjarlah mereka mendapatkan pengenalan program KB ini. Lagi pula dengan struktur kependudukan yang masih sangat timpang (pada beberapa tahun yang lalu angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran) maka masih cukup banyak ibu-ibu yang tidak ikut program KB ini. Dan mereka yang ikut program ini juga atas kemauannya sendiri atau karena secara tidak langsung mereka sendiri sudah tidak melahirkan bayi untuk jangka waktu yang cukup lama, atau menerapkan sistem KB secara khusus dengan cara-cara yang tradisional atau secara adat.

Di banjar Pregae Mengwi program KB ini memang masuk lewat sistem banjar ini. Para pimpinan banjar atau *klian banjar* secara khusus pada waktu-waktu tertentu mencatat para ibu —

yang sudah kawin dan sudah mempunyai anak dan segera menyarankan untuk mengikuti program ini. Demikian juga pengenalan perbaikan gizi keluarga dan penimbangan balita juga dilaksanakan lewat banjar. Pada kedua program terakhir ini program diperkenalkan lewat partisipasi ibu-ibu ini lebih banyak pada kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan mempersiapkan upacara atau membuat peralatan upacara. Walaupun demikian semua program dengan "sistem banjar" ini tetap masuk lewat rapat atau pertemuan yang khusus, dan bukan lewat rapat-rapat banjar secara adat.

Di Banjar Gerenceng yang ada di kota Denpasar program KB selain masuk lewat sistem banjar juga ada yang karena keinginan dan kesadaran sendiri telah mengikuti program ini sejak lama. Tetapi untuk pencatatan data yang berhubungan dengan sistem target dari program ini, tidak jarang para pimpinan banjar atau *klian banjar* masuk ke rumah-rumah untuk mendata dan sekaligus menyarankan para ibu agar mengikuti program ini. Penimbangan balita dan pengenalan program gizi masih dilakukan di *dale banjar* sebagai bagian dari kegiatan para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok PKK.

Karena terbatasnya kesempatan dan waktu rapat secara periodik baru diadakan pada setiap 210 hari, maka para klian banjar selain mendatangi rumah-rumah untuk pemberitahuan program ini juga menggunakan berbagai kesempatan di mana warga banjar berkumpul. Adakalanya pengumuman untuk penimbangan balita diumumkan di kuburan setelah selesai upacara penguburan jenazah, atau ketika rapat adat berlangsung. Kesulitan untuk bertemu dengan warga banjar atau untuk mengumumkan sesuatu secara luas memang dirasakan oleh para pimpinan banjar karena kesibukan anggota banjar dengan pekerjaannya masing-masing. Karena itu pemanfaatan media *kesinoman* atau *juru arah* sebagai perangkat penyampai pesan dilakukan secara efektif dan fungsional. Ada beberapa program dan berita penting yang perlu diketahui masyarakat yang dapat sampai dengan cepat lewat perangkat *kesinoman* atau *juru arah* ini.

Para pimpinan banjar Kerta Pura memanfaatkan dengan baik lembaga banjarnya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan ini. Program KB dan Usaha perbaikan gizi keluarga disampaikan lewat kegiatan arisan ibu-ibu PKK. Karena di banjar ini memang

tidak ada rapat adat secara rutin maka semua penyampaian pesan dilakukan oleh para *kesinoman* atau oleh *klian banjar* sendiri ke rumah-rumah. Hal ini dipermudah lagi karena banyak di antara warga banjar yang sudah mengikuti program tersebut karena kesadaran sendiri walaupun ada juga warga yang baru mengenalnya lewat program banjar.

Pengaturan anak sekolah masuk Sekolah Dasar untuk menghindari menumpuknya anak sekolah di satu sekolah sementara sekolah lain kosong, telah dilakukan lewat 'sistem banjar' di banjar Gerenceng. Hal ini merupakan masukkan baru bagi masyarakat sebagai anggota satu banjar. Beberapa kemudahan yang didapat dari sistem ini adalah pengaturan jarak sekolah dengan rumah si anak sehingga untuk anak-anak sekolah yang masih duduk di kelas I dan II misalnya dapat pergi ke sekolah dengan aman dan cepat tanpa harus diantar orang tua mereka. Bagi masyarakat kota yang mempunyai waktu sedikit untuk urusan mengantar anak tentunya cara yang diambil oleh banjar ini cukup bermanfaat. Untuk banjar-banjar sampel lainnya cara penempatan anak-anak sekolah ke Sekolah Dasar dengan memakai 'sistem banjar' ini belum nampak.

Kegiatan lain yang juga dilakukan lewat lembaga sosial banjar ini yang memfungsikan banjar sebagai wujud pelayanan sosial, ialah pembayaran listrik yang dikoordinir oleh para pemuda banjar. Hal ini juga terjadi di banjar Gerenceng sebagai banjar yang warganya cukup sibuk dengan kehidupan di kota. Sistem pembayaran listrik dengan cara ini memberi keuntungan bagi warga banjar karena tidak terlalu banyak waktu yang harus dihabiskan hanya untuk antre di kantor pembayaran rekening listrik. Di samping itu para pemuda yang mengorganisir kegiatan jasa ini juga mendapatkan dananya dari suatu kegiatan yang produktif. Apa yang dilakukan oleh para pemuda seperti tersebut di atas dalam rangka sosialisasi mereka terhadap tugas-tugas banjar tidak terlihat pada banjar sampel lainnya.

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah wadah kegiatan ibu-ibu dan wanita di lingkungan banjar untuk satu tujuan yaitu memberikan program-program kesejahteraan keluarga dan rumah tangga. Wadah ini sendiri baru ada setelah dirasakan bahwa diperlukan partisipasi aktif para ibu dan wanita di masyarakat untuk menampung pesan dan program pembangunan yang tidak

dapat dilaksanakan oleh laki-laki. Karena itu diperlukan partisipasi aktif wanita dan ibu-ibu dalam hal ini. Sebelumnya partisipasi aktif wanita dan ibu-ibu di lingkungan banjar hanya dirasakan ketika ada upacara di mana mereka bertugas menyiapkan peralatan untuk upacara dan melaksanakan upacara di banjar sampai selesai.

Pada waktu itu di setiap banjar ada PKK karena PKK secara organisatoris dalam struktur administrasi satu banjar harus ada dengan fungsi yang khusus. Kalau pada waktu lalu kehadiran wanita pada rapat-rapat banjar tidak pernah ada kecuali dalam hal yang sangat mendesak dan khusus, maka setelah adanya PKK ini secara khusus ada pertemuan sekali sebulan dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para wanita dan ibu-ibu di lingkungan banjar. Untuk menarik minat para ibu-ibu dan wanita ini datang ke rapat PKK dan mendengarkan beberapa penjelasan yang kadang-kadang dapat berupa ceramah, maka diadakan kegiatan lain yang khas wanita yaitu: arisan.

Seperti juga PKK maka beberapa sub organisasi yang ada di banjar yang juga dapat dipakai sebagai media komunikasi dan penyampaian pesan pembaruan, adalah organisasi pemuda yang pada mulanya merupakan sekelompok pemuda banjar yang mensosialisasi diri mereka dalam tugas-tugas banjar. Tetapi kemudian keanggotaan kelompok ini diperluas dengan anggota wanita dengan fungsi yang lebih luas pula sehingga dari *seka teruna* menjadilah kelompok tersebut *rukun muda-mudi* yang ada di setiap banjar. *Karang taruna* sebagai wujud kegiatan pemuda yang muncul lebih baru adalah program dari pemerintah (Departemen Sosial) yang mengaktifkan pemuda di lingkungan beberapa banjar untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan terutama dalam kegiatan yang bersifat kepemudaan seperti olah raga dan seni.

Adanya organisasi-organisasi di tingkat banjar seperti PKK, Rukun Muda-Mudi, Karang Taruna, Kelompok Pendengar Siaran Pedesaan, *Pesantian*, kelompok Kejar (Bekerja sambil belajar) dan sebagainya memang memungkinkan sampainya suatu program segera kepada tingkat yang paling bawah sebagai kelompok sasaran. Tetapi keberadaan kelompok-kelompok tersebut kemungkinan ada yang didasari oleh suatu kelompok serupa sebelumnya di banjar tersebut dan ada juga yang benar-benar baru. Di banjar di Desa Tenganan Pegringsingan kelompok pemuda dalam rangka

fungsi sosialisasi dan inisiasi pemuda memang sudah ada secara adat yaitu *Teruna Nyoman* dan *Daha*. Demikian juga di banjar Gerenceng ada *Seka Teruna Gerenceng* (STG) yang sudah ada sejak dahulu, dengan fungsi yang diperluas dengan kegiatan sosial lain. Di Banjar Kerta Pura sebagai banjar yang baru kelompok pemudanya langsung berwujud *Rukun Muda Mudi*, dengan fungsi utama adalah membantu banjar dalam beberapa tugas-tugas penting selain fungsi utamanya adalah menggiatkan para pemudanya dalam bidang peningkatan prestasi oleh raga dan seni. Di Banjar Pragai Rukun Muda Mudi ini berusaha secara giat memberikan pelajaran tambahan bagi anak-anak sekolah di lingkungan banjarnya pada setiap hari Minggu dan memperlombakan keterampilan-keterampilan lainnya. Bagi anak yang berprestasi dalam pelajaran selain diberikan hadiah juga dimotivasi untuk segera dapat membantu kawan-kawan lainnya dalam pelajaran yang serupa.

Organisasi PKK sendiri di desa Tenganan Pegringsingan bersifat baru karena sebelumnya para wanita desa telah aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan desa adat. Keberadaan PKK sendiri bukanlah di tingkat banjar tetapi di tingkat desa karena sebelumnya sudah ada kelompok wanita di tingkat desa adat yang cukup berperan. Kegiatan yang dilaksanakan sekarang oleh organisasi PKK ini adalah membantu desa dalam penerimaan tamu-tamu yang banyak berkunjung ke desa tersebut. Penyediaan konsumsi bagi sejumlah tamu yang menginap di desa yang terisolir itu merupakan bantuan yang cukup besar bagi para tamu sendiri dan juga bagi desa. Di tiga banjar lainnya keberadaan PKK tetap dalam wujud organisasi dan wadah kegiatan para wanita yang lebih banyak dalam tugas menyampaikan pesan-pesan pembangunan secara luas kepada para anggotanya. Untuk membuat program dan acara itu menarik maka ditambahkan kegiatan yang khas wanita: kegiatan arisan.

Demikianlah keberadaan banjar dalam masyarakat dalam wujud lembaga sosial yang dapat dimanfaatkan atau difungsikan dalam usaha mengaktifkan para wanita dan pemuda meningkatkan partisipasi mereka dalam beberapa kegiatan pembangunan. Keberadaan organisasi ini ada yang merupakan sub organisasi desa atau ada juga yang menjadi sub organisasi banjar. Di antaranya ada yang sudah mempunyai akar dalam struktur desa atau banjar

itu sendiri dan ada juga yang benar-benar baru dalam wujud organisasi dari pemerintah.

D Beberapa Perubahan Secara Konseptual dan Teoritis Mengenai Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat, Khususnya Mengenai Perubahan Banjar dan Desa

Kalau dibandingkan apa yang dikemukakan oleh para peneliti asing tentang konsepsi *banjar* dan *desa* di awal tulisan ini dengan apa yang ditemukan dalam penelitian di keempat banjar sampel (satu bahkan diambil lingkup desa adat), maka terlihat adanya beberapa perubahan yang telah terjadi secara konseptual pada wujud *banjar* dan *desa* tadi. Kalau Covarubias lebih melihat unsur kegiatan adat dan upacara dalam kehidupan suatu banjar dan desa pada masanya, maka hasil penelitian menunjukkan ada beberapa wujud lain dari kegiatan banjar dan desa yang dapat menghidupkan atau memperlihatkan keberadaan satu banjar atau desa. Demikian juga apa yang dikemukakan oleh Swellengrebel yang menyatakan bahwa desa selalu ditandai oleh adanya batas-batas yang jelas dalam wilayahnya dan dilengkapi oleh unsur-unsur pemujaan terhadap tiga *pura* lingkungan desa mereka yang juga menjadi batas-batas pemujaan bagi para warga desa. *Banjar* sebagai wujud sistem sosial yang lebih kecil kemudian menjadi suatu arena interaksi di antara sesama warga dengan berbagai kegiatan adat yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi karena kegiatan yang menyangkut kegiatan desa dan kegiatan banjar.

Mungkin berdasarkan pendapat para ahli tersebut yang melakukan pengamatannya pada masa penjajahan, Gusti Gede Raka kemudian muncul dengan konsepsinya tentang desa yang dapat dibedakan wujudnya berdasarkan fungsinya yaitu, adanya wujud desa adat dan wujud desa dinas atau administratif. Desa adat mengkonsepsikan kepada para warganya suatu pola-pola interaksi berdasarkan kegiatan yang berhubungan dengan adat yaitu kegiatan yang ada hubungannya dengan upacara untuk ketiga *pura* atau *Kahyangan Tiga*, yaitu: *Pura Desa*, *Pura Puseh* dan *Pura Dalem*. Wujud konsepsi tersebut ada hubungannya dengan konsepsi Hindu di Bali tentang tanggapan manusia terhadap lingkungannya yang terwujud dalam konsepsi *Tri Hita Karana*. Konsepsi itu sendiri mewujudkan adanya tiga unsur dalam kehidupan masyarakat Bali

dalam kehidupannya yaitu adanya *Parhyangan* unsur Tuhan dan Dewa-dewa sebagai jiwa dari desa atau lingkungan tempat tinggal, *Pawongan* atau unsur manusia dalam kehidupan desa atau lingkungan tertentu dan *Palemahan* atau unsur wilayah dari suatu desa atau lingkungan kehidupan. Konsepsi ini tentunya sangat erat hubungannya dengan konsepsi yang lebih luas dalam kehidupan keagamaan orang Bali yaitu tentang adanya unsur Macrocosmos atau *Bhuwana Agung* yaitu Tuhan Yang Maha Esa (*Sang Hyang Widhi Wasa*), dan unsur Microcosmos atau *Bhuwana Alit* yaitu manusia. Dengan demikian desa adat dalam konsepsi kehidupan orang Bali memberikan pengertian yang demikian luas karena mewujudkan pola-pola hubungannya dengan lingkungannya sendiri atau memperlihatkan wujud tanggapan manusia terhadap lingkungannya. Kebudayaan Bali sendiri tercermin dari sikap manusia Bali sendiri yang menanggapi secara positif lingkungan kehidupannya dan memberikan ciri bahwa itulah suatu bagian yang sangat luas dari kehidupan orang Bali.

Desa dinas sendiri menurut Gede Raka mempunyai wujud administrasi pemerintahan desa yang mengikat sejumlah warga dalam satu wilayah administrasi. Wujud kegiatan dan pola interaksi yang terjadi di lingkungan desa dinas hanya berupa wujud yang ada hubungannya dengan status kedinasan seorang warga desa. Ada sejumlah aturan yang kemudian harus diikuti yang ada hubungannya dengan sistem pemerintahan desa dinas. Dari situ kemudian lahir sejumlah kegiatan yang mengatifikan anggota desa dalam fungsi kegiatan bersama, pengerahan tenaga sukarela dan berbagai pelaksanaan program pembangunan. Dan wujud ini kemudian berkembang dengan bentuk-bentuk kelembagaan baru di tingkat desa yang dibentuk sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam pemerintahan desa serta sesuai dengan kepentingannya dalam pengaturan tugas dan kewajiban warga desa.

Kalau kemudian dilihat pada sistem pemerintahan desa menurut Undang-undang Pokok Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1978 bahwa unsur pemerintahan desa adalah Kelurahan serta bagian-bagiannya adalah Dusun, maka konsep pemerintahan desa dengan bagian-bagian desa adat dan desa dinas tidaklah ada. Dalam hal ini konsepsi tentang adanya pemerintahan desa atau wujud desa yang berdasarkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diak-

tifkan oleh warga desa sebagai fungsi interaksi sesama warga tidaklah tercantum. Di samping itu menurut undang-undang tersebut jelas fungsi dan peranan desa pada warganya yaitu dalam usaha mengatur dan menata kehidupan masyarakat di pedesaan.

Banjar sebagai wujud organisasi sosial yang lebih kecil lingkupnya dari pada desa dan merupakan bagian dari pada desa (berdasar struktur pemerintahan desa), memberikan konsepsi yang paling dasar dari pada pola hubungan dan interaksi para warganya. Di tingkat banjar terlihat adanya kegiatan yang lebih mengaktifkan warganya dalam adat dan kedinasan. Dalam banjar pula dan lingkungan perumahan serta pemukiman yang lebih luas konsepsi tentang kehidupan orang Bali: *Tri Hita Karana* terlihat nyata. Di lingkungan ini aktifitas manusianya sebagai warga banjar dalam menanggapi lingkungan kehidupannya terwujud dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan tata cara pelaksanaan kehidupan keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Pengerahan tenaga, pengendalian sosial, dan pola kepemimpinan di banjar memperlihatkan ciri-ciri yang khusus yang kemudian membentuk ciri yang umum yang ada pada sebuah desa. Demikian pula di tingkat banjar terbentuknya kelompok-kelompok kerja yang memudahkan terlaksananya sistem pengerahan tenaga yang diperlukan oleh desa. Banjar dan desa berfungsi dalam keterkaitan hubungan struktural maupun fungsional. Banjar dan desa merupakan wujud dari kebudayaan Bali karena ia mewujudkan pola-pola tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya dalam konsepsi yang hidup dan berkembang di Lali yaitu: *Tri Hita Karana*.

Dalam perkembangannya pada waktu belakangan ini banjar dan desa mempunyai bobot yang lebih berat karena banjar dan desa harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dimuati dengan pesan dan program pembangunan. Karena merupakan bagian yang paling dekat dengan potensi sasaran yaitu masyarakatnya sendiri maka muatan-muatan tadi diharapkan dapat langsung dihayati dan terkait sebagai suatu kebutuhan yang pokok dalam kehidupan manusianya. Maka lahirlah kelompok-kelompok lain yang merupakan sub dari organisasi banjar dan desa. Dalam hal ini, karena muatan-muatan tersebut lebih banyak berupa tuntutan akan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat maka program yang diperkenalkan itu juga diharapkan dapat terkait secara lang-

sung dengan wujud banjar dan desa itu sendiri. Maka lahirlah beberapa program yang menggunakan istilah banjar atau desa sebagai sistem pelaksanaannya, walaupun kalau dilihat secara tegas sistem yang dipakai baru menyangkut permukaannya saja, dari keseluruhan wujud sistem banjar atau sistem desa itu sendiri. Namun demikian beberapa program yang menggunakan 'sistem banjar' ini ada yang telah berhasil dengan baik karena memanfaatkan pola kepemimpinan, pola pengendalian sosial dan tanggung jawab sosial dari banjar dan desa yang efektif untuk pelaksanaan programnya tersebut.

Kalau secara teoritis banjar adalah bagian daripada desa yang menciptakan adanya hubungan yang struktural antara desa dengan banjar yang berada di bawahnya, maka pada kenyataannya pola hubungan yang ada adalah pola hubungan yang fungsional selain hubungan struktural tadi. Dan karena pada pengertiannya masih dikonsepsikan (konsep yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat) tentang fungsi desa adat dan desa dinas, maka pola hubungan yang ada antara desa dengan banjar juga bervariasi antara hubungan: desa dinas dengan banjar dinas, desa adat dengan banjar adat. Pola hubungan ini memberikan variasi pada fungsi dan peranan banjar itu sendiri dalam kelembagaan desa. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa di desa yang masih tradisional di mana aturan adat memegang peranan yang penting dalam menata kehidupan masyarakatnya, peranan banjar menjadi lemah karena semua kegiatan telah tercakup dalam kegiatan desa adat. Pada masyarakat yang transisi di mana sistem banjar masih ingin dipertahankan menurut aturan yang ada sementara penyesuaian pada kemajuan lingkungan juga sudah mendesak, ada perbedaan yang tegas antara fungsi dan peranan banjar adat dan fungsi serta peranan banjar dinas. Walaupun antara keduanya tidak terpisah secara tegas namun hal ini memberikan gambaran kepada hubungan antara banjar dan desa lebih bersifat kepada hubungan kedinasan saja. Hal ini terjadi karena dalam kegiatan yang bersifat adat para warga masyarakat sudah melaksanakannya sendiri-sendiri tanpa koordinasi oleh banjar, sehingga dalam hal ini hubungan banjar-desa agak lemah sifatnya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa perjalanan waktu dan penambahan kepentingan penduduk sebagai

salah satu bagian dari wujud sistem banjar dan desa telah mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan dalam wujud banjar dan desa itu sendiri. Perubahan pertama yang menyangkut perubahan konsepsi masyarakat tentang kedudukan banjar dan desa yang mempunyai variasi yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, antara desa yang masih tradisional-transisi-dan desa yang berada di perkotaan. Perubahan kedua menyangkut pengertian teori-tis tentang banjar dan desa dari sudut pandangan luar yang menganggap pengertian banjar dan desa sebagai suatu sistem organisasi sosial yang demikian praktis karena segera dapat berhubungan dengan masyarakat. Pandangan seperti ini mengakibatkan adanya pengertian, banyak hal yang dapat dilaksanakan dengan memakai sistem banjar ini. Perububahan ketiga adalah pengertian praktis dari anggota banjar dan desa sendiri, yang merasakan adanya perubahan fungsi dan peranan banjar dan desa dalam struktur kebudayaan mereka. Hal ini dirasakan dengan semakin banyaknya muatan-muatan baru yang harus dilaksanakan oleh mereka sebagai anggota banjar dan desa, yang akhirnya juga mengubah pola orientasi mereka. Walaupun demikian sebagai suatu kesatuan sistem, masyarakat tetap melihat banjar sebagai wujud organisasi interaksi sosial yang kecil dan desa sebagai wujud interaksi yang lebih luas. Dan salah satu atau kedua-duanya mempunyai bobot tanggung jawab yang bersifat keadatan serta tata upacara agama.

Perubahan pada suatu kebudayaan dapat berupa perubahan pada seluruh sistem kebudayaan tersebut atau dapat berupa bagian-bagian atau sub sistem kebudayaan tersebut yang mengalami perubahan. Pada sistem kemasyarakatan yang menyangkut subsistem struktur, subsistem aturan, subsistem anggota dan sebagainya, perubahan dapat terjadi pada masing-masing subsistem tersebut atau juga pada keseluruhan sistem yang ada. Demikian pula halnya dengan sistem banjar dan desa di Bali yang menjadi ciri dari kebudayaan Bali sendiri, perubahan pada salah satu bagian dari banjar atau desa tersebut dapat memberikan ciri perubahan pada kebudayaan dan struktur masyarakat Bali sendiri.

Perubahan yang terjadi pada fungsi dan peranan banjar pada masyarakat Bali dengan berubahnya keterkaitan tugas banjar pada desa, demikian juga perubahan yang terjadi pada subsistem peranan anggota bagi banjar dan desa; telah memberikan gambaran yang

agak berubah pada wujud sistem banjar dan desa. Dengan bertambahnya muatan-muatan baru pada banjar dan desa memberikan gambaran bahwa pada sistem organisasi sosial masyarakat Bali telah dapat diadakan perubahan sehingga kebudayaan Bali itu sendiri juga kelihatan berubah. Satu hal yang positif dalam perubahan ini adalah, perubahan tersebut menyangkut perubahan dalam tingkah laku nyata masyarakat sebagai anggota banjar atau desa dalam menerima muatan-muatan baru bagi banjar dan desanya dalam rangka mengadakan perubahan dalam sistem kehidupan masyarakat secara luas. Dan perubahan itu kemudian memberi ciri pada perubahan pada kebudayaan Bali sendiri.

E. Ramalan Mengenai Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali Di Masa Mendatang

Kalau dilihat perjalanan sejarah tentang pengertian, konsepsi serta pandangan beberapa peneliti dan pengamat tentang *banjar* dan *desa*, memang menarik untuk dikaji terutama setelah adanya beberapa perubahan baik dalam wujud, fungsi dan peranan dari banjar dan desa tersebut. Satu hal yang tentunya menarik adalah mengkaji wujud banjar dan desa dimasa mendatang terutama dalam kaitannya dengan kebudayaan dan struktur masyarakat Bali sendiri. Hasil penelitian memang tidak menjangkau sampai sejauh itu, tetapi mengingat bahwa wujud banjar dan desa adalah perwujudan dari kebudayaan Bali dan struktur masyarakatnya maka baik juga dilihat ramalan tentang bagaimana peranan banjar dimasa mendatang. Mengingat pula bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi dalam wujud banjar dan desa terutama dalam usaha masyarakat sebagai anggota banjar dan desa menanggapi lingkungan kehidupannya. Beberapa perubahan terutama dalam kedudukan, fungsi dan peranan dari banjar dan desa tadi telah mengubah hubungan dan pola-pola yang terbentuk dalam hubungan banjar dengan desa tadi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada perubahan itu pun antara banjar atau desa satu dengan banjar dan desa lainnya perubahannya tidaklah sama, dan sangat tergantung pada subsistem apa yang paling cepat dapat berubah atau menyesuaikan dengan subsistem baru yang ingin difungsikan ke dalam banjar dan desa.

Ada

Ada lima prakiraan atau ramalan yang dapat dikemukakan mengenai peranan banjar pada masyarakat Bali di masa mendatang, dengan prakiraan sebagai berikut.

1. Secara konseptual banjar akan mempunyai peranan tetap seperti sekarang karena adanya muatan adat dan tata upacara keagamaan yang mengikat dan menggiatkan para anggota dalam ikatan banjar selama ini. Seperti telah dikemukakan oleh para pengamat bahwa banjar sebagai organisasi sosial mengikat para anggotanya dalam satu kesatuan karena adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para anggota dalam hubungannya dengan kebiasaan dalam melaksanakan tata upacara keagamaan. baik pada banjar di masyarakat yang masih tradisional karena kuatnya pengaruh atau fungsi aturan adat dari desa, maka peranan banjar pada masyarakat seakan-akan diambil alih oleh desa adat. Karena itu unsur adat yang ada pada setiap banjar lainnya juga dapat mengikat dan memfungsikan banjar seperti yang ada di masyarakat tradisional tadi. Walaupun keadaan itu sendiri memberikan variasi lain dalam hubungan antara banjar dan desa. Pada banjar di masyarakat perkotaan unsur adat dan pelaksanaan tata upacara keagamaan secara bersama-sama di antara sesama anggota banjar juga masih ingin terus dipertahankan (dan pada banjar-banjar yang baru dibangun unsur kelengkapan bale banjar dengan tempat upacara juga tetap diadakan), yang diharapkan dapat mengikat para anggota pada suatu kewajiban berupacara bagi banjarnya.

2. Secara konseptual banjar akan berubah peranannya mengingat semakin banyaknya muncul banjar-banjar baru dengan fungsi dan peranan yang berubah pula, karena lingkungan banjar tersebut berbeda.

Pemekaran kota dan perluasan tempat-tempat pemukiman baru di Bali berakibat pada bertambahnya pusat-pusat pengelompokan penduduk yang tetap memerlukan adanya pola interaksi antara sesamanya dan akhirnya memerlukan suatu organisasi sebagai wadah interaksi tersebut. Dalam hal ini pilihan organisasi adalah pada organisasi sosial banjar karena wadah ini sudah hidup dan berkembang dalam struktur kebudayaan Bali. Tetapi mengingat para anggota lingkungan suatu pemukiman bukanlah terdiri khusus dari orang Bali saja maka banjar sebagai wadah interaksi itu memasuk-

kan berbagai unsur atau subsistem lain seperti pungutan-pungutan berupa uang untuk suatu tujuan yang pada banjar sebelumnya tidak banyak dilakukan. Bentuk wadah 'banjar baru' ini juga kehilangan satu unsur yang umumnya mengikat para warga yaitu rasa kebersamaan untuk menggiatkan pelaksanaan tata upacara keagamaan di lingkungan banjar. Hal ini disebabkan karena para anggota banjar ini sudah terikat pada banjar adat di tempat asalnya atau karena heterogenitas etnis anggota yang tidak memungkinkan untuk memaksakan terlaksananya subsistem upacara keagamaan Hindu bagi banjar. Akhirnya banjar hanya akan berbentuk lingkungan ketetanggaan saja dengan beberapa prinsip kebersamaan yang terbatas sesuai dengan latar belakang kehidupan para anggotanya.

3. Peranan banjar pada masyarakat akan berubah secara pasti dengan diberlakukannya Undang-undang Pemerintahan Desa secara tegas.

Kalau pada prakiraan yang kedua banjar diperkirakan akan berubah secara konseptual karena perubahan wujud dari banjar itu sendiri, maka kalau Undang-undang Pemerintahan Desa diberlakukan secara tegas maka baik peristilahan banjar maupun pengertian yang terkandung di dalamnya juga akan berubah. UU itu sendiri menyatakan bahwa sistem pemerintahan desa di Indonesia di tingkat desa adalah *Kelurahan* dengan bagian-bagiannya disebut *Dusun*. Dewasa ini hanya desa-desa yang sudah setingkat swadaya yang memperoleh predikat Kelurahan dan desa-desa yang menuju ke arah itu disebut desa Persiapan. Ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk dapat menjadi Kelurahan dan Desa Persiapan harus berusaha memenuhi kriteria tersebut. Banjar pada tingkat ini akan lebih banyak terwujud pada fungsi administrasi dan pengerahan tenaga sukarela untuk beberapa kegiatan. Demikian juga banjar akan berwujud pada fungsinya untuk melaksanakan muatan-muatan baru yang berhubungan dengan berbagai pembaruan yang perlu dilaksanakan dan ditujukan pada sasaran yang tepat yaitu anggota banjar. Muatan adat serta kebiasaan untuk melakukan tata upacara keagamaan meskipun tidak hilang tetapi telah kehilangan fungsinya dan bobotnya sebagai unsur pengikat yang kuat di kalangan para anggota masyarakat sendiri. Kegiatan dan keaktifan para anggota akan terwujud pada kesibuk-

an baru.

4. Peranan banjar akan berubah karena terjadinya perubahan orientasi masyarakat pada banjar.

Pada masa sekarang banjar masih menjadi pusat orientasi masyarakat walaupun di beberapa banjar (terutama banjar baru) sudah berubah. Hal ini disebabkan karena masih adanya unsur yang dapat menguatkan orientasi tersebut yaitu adat dan tata upacara keagamaan yang dilakukan di banjar. Di samping itu dewasa ini beban muatan banjar yang berupa penyampaian pesan dan beberapa program masih tertampung oleh beberapa suborganisasi banjar itu sendiri yang melaksanakannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Dimasa mendatang apabila beban muatan baru itu bertambah dan dirasakan adanya kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan beban tadi maka banjar bukan lagi menjadi pusat orientasi di mana para anggota dapat mengharapkan perlindungan dan rasa aman, bahkan banjar akan dirasakan sebagai wadah persatuan yang cukup memberatkan. Akhirnya peranan banjar akan berubah dari organisasi sosial yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anggotanya karena adanya berbagai aturan yang harus dilaksanakan secara ketat namun mempunyai sifat mengikat yang menyebabkan para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab pada banjarnya. Dengan perubahan peranan dan fungsi demikian juga perubahan kewajiban dan tanggung jawab berubah pula pola orientasi para anggota kepada banjarnya sebagai kesatuan tempat tinggal ke arah organisasi lain yang dapat meringankan beban dan tanggung jawabnya sebagai anggota, mungkin dalam bentuk kelompok-kelompok persatuan kecil setingkat Rukun Tetangga (RT).

5. Peranan banjar pada masyarakat Bali akan tetap bahkan bertambah kuat kalau pola hubungan banjar-desa diwujudkan dalam bentuk kesatuan tempat tinggal berdasarkan konsepsi *Tri Hita Karana* yang melambangkan adanya keselarasan dan keseimbangan kehidupan antara alam lingkungan, manusia dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Prakiraan ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa selama ini bahkan jauh sebelumnya kehidupan masyarakat Bali dengan mewujudkan organisasi banjar dan desa telah menerapkan konsepsi *Tri Hita Karana* itu secara utuh dan bulat, dan menjadi ciri dari

kebudayaan Bali sendiri. Bahkan sekarang di beberapa desa dan banjar pola-pola penerapan keseimbangan hubungan manusia dengan alam lingkungannya dan Tuhannya terus dikembangkan dan digalakkan lewat pembinaan, pembentukan dan perlombaan Lembaga Desa Adat. Usaha ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan pola kehidupan yang serasi dan seimbang, di samping sebagai usaha untuk tetap mempertahankan nilai budaya yang telah ada dan berkembang sejak lama. Semakin kuatnya wujud Desa Adat akan mewujudkan pula kesatuan banjar adat di tingkat yang lebih bawah dalam struktur kebudayaan Bali. Desa adat dan banjar adat ini akan mengaktifkan para anggota dalam suatu kesatuan yang utuh karena rasa kesatuan itu sendiri tidak saja ditandai oleh kesatuan tempat tinggal saja tetapi bahkan diperkuat oleh rasa kesatuan dalam tanggung jawab melaksanakan kewajiban secara bersama-sama. Rasa kesatuan itu sendiri dapat dipertahankan dan dipupuk di kalangan masyarakat lewat satu bentuk saling pengertian antar anggota masyarakat. Prosesnya sendiri melalui sosialisasi dan transmisi nilai budaya berdasarkan konsepsi kehidupan yang telah ada. Dan konsepsi *Tri Hita Karana* memberikan wujudnya bagaimana memelihara keselarasan dan keseimbangan hubungan: manusia dengan alam lingkungannya atau tempat tinggalnya, manusia dengan manusia atau sesama warga banjar dan desa dan manusia dengan Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa). Keselarasan dan keseimbangan hubungan seperti itulah yang diwujudkan oleh kesatuan banjar adat dan desa adat selama ini dan jauh sebelumnya. Kalau saja hal ini dapat dipertahankan maka peranan banjar pada masyarakat Bali akan tetap kuat dan tidak akan berubah, dengan catatan tambahan muatan baru berupa pesan dan program diharapkan dapat menyesuaikan dengan pola yang telah ada.

Demikianlah prakiraan tentang peranan banjar pada masyarakat Bali dimasa mendatang sehubungan dengan beberapa konsepsi yang ada tentang banjar dan desa dan beberapa perubahan yang terjadi dan dialami oleh banjar dan desa diwaktu-waktu belakangan ini.

BAB II

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT BALI

KASUS 1

**PERANAN BANJAR DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN:
SEBUAH DESKRIPSI TENTANG BANJAR TRADISIONAL
YANG JAUH DARI PUSAT KERAJAAN/PEMERINTAHAN
(KASUS BANJAR ADAT KAUH DAN BANJAR ADAT PANDE)**

A. IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN

1. Lokasi Geografis:

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di Kecamatan Manggis Kabupaten Kr.Asem, lebih kurang 67 km dari kota Denpasar Ibukota Propinsi Bali dan sekitar 18 km dari kota Amlapura. Desa ini berada sekitar 2 km dari tepi laut dengan ketinggian kira-kira 70 meter di atas muka laut dan suhu rata-rata 28°C pada musim kemarau. Keadaan yang memberi kesan terpencil atau terisolir dari desa ini dengan desa lainnya adalah letak desa ini di antara dua buah bukit yang mengapit sebuah lembah yang menjadi pemukiman penduduk desa. Pemukiman itu sendiri memanjang dari *Kaja* (Utara) sampai *Kelod* (Selatan) dengan bukit *kangin*/(Timur) dan bukit *Kauh* (Barat) yang menapitnya. Dua buah *awangan* (pintu masuk) yang ada di bagian Utara dan Selatan memberi kesan tentang tertutupnya desa tersebut pada masa lalu, yang sekarang dimanfaatkan oleh penduduk desa sebagai pintu penghubung dengan desa-desa lainnya.

Desa terdekat yang dapat dihubungi adalah desa Pesedahan yang ada di bagian selatan, sedangkan wilayah desa Tenganan Pegringsingan sendiri masih ada yang terletak jauh di balik bukit dan harus dicapai dengan berjalan kaki. Sementara ke desa Tenganan Pegringsingan kendaraan roda empat sudah bisa sampai ke pintu masuk desa, dan penduduk desa biasa bepergian dengan kendaraan roda dua milik sendiri atau menumpang *ojek*. Ke ibukota kabupaten sendiri ada dua jalan yaitu jalan raya umum dan lewat bukit Kaja dengan jalan kaki. Karena sudah banyak kendaraan yang ada maka biasanya penduduk bepergian dengan menumpang kendaraan.

Sebenarnya lokasi yang memberi kesan terisolir dan tertutup tadi hanyalah lokasi pemukiman desa saja, sedangkan persawahan milik desa ada di balik bukit-bukit tersebut. Sehingga penduduk yang berkepentingan pergi ke sawahnya berjalan kaki melewati bukit-bukit yang ada. Wilayah desa atau bagian desa yang lain juga terletak di luar wilayah pemukiman tadi, kecuali tiga banjar yang berada di dalam pemukiman yaitu:

1. banjar Tenganan Pegringsingan yang terdiri atas
 - a. Banjar Adat Kauh

b. Banjar Adat Tengah

c. Banjar Adat Pande

sedangkan bajar-banjar:

2. banjar Gumung
3. banjar Tenganan Dauh Tukad
4. banjar Bukit Kangin
5. banjar Bukit Kauh

terletak di luar pemukiman tadi. Kantor Desa Tenganan Pegringsingan terletak di desa adat Tenganan Pegringsingan. Luas wilayah desa sendiri lebih kurang 950 Ha, dengan perincian, daerah persawahan sekitar 250 Ha, perkebunan/tegalan lebih kurang 600 Ha dan perumahan lebih kurang 50 Ha yang tersebar dikelima banjar dinas tadi.

2. Kondisi dan Lingkungan Alam Sekitar

Dengan lokasi geografis yang berada di antara dua bukit dan ketinggian sekitar 70 meter di atas muka laut memberikan gambaran kepada lingkungan alam desa tersebut pada lingkungan pegunungan yang sejuk. Tetapi karena bukit sebelah barat agak gundul dan gersang keadaannya maka suhu rata-rata yang ada ialah 28°C pada musim kemarau. Pada musim hujan curahnya cukup tinggi yang dapat memberikan suasana pegunungan. Dari tempat yang ketinggian di desa, laut sebelah selatan kelihatan dengan jelas sehingga memberikan pemandangan yang cukup indah untuk dinikmati.

Lokasi perumahan di desa Adat Tenganan Pegringsingan yang benar-benar merupakan satu kompleks pemukiman ini membedakan wilayah desa tersebut menjadi tiga bagian yaitu: kompleks pemukiman yang terdiri atas tiga banjar adat, lokasi persawahan yang ada jauh di balik bukit-bukit, dan lokasi perladangan atau tegalan yang ada di bukit-bukit yang membatasi desa tadi. Sawah-sawah umumnya ditanami padi dengan sistem pengairan yang teratur sehingga bisa panen dua kali setahun, yang umumnya dikerjakan oleh para penyakap yang tinggal di desa lain. Bukit-bukit yang ada adalah bukit-bukit yang terpelihara hutannya disamping juga ada pohon-pohon yang produktif: seperti enau, durian, kelapa, jambu dan mangga yang pengelolaannya

diatur secara adat oleh desa adat. Penggunaan beberapa kayu hutan juga diatur sehingga tidak terjadi penebangan hutan secara sewenang-wenang, sehingga tetap terawasi.

Baik tanah sawah maupun tanah tegalan merupakan tanah yang subur sehingga hasil pertanian dan hasil hutan sendiri mencukupi bagi penduduk desa untuk hidup sehari-hari. Padi yang dihasilkan dua kali setahun, serta hasil hutan yang dapat dipungut menurut musimnya memberikan gambaran bahwa lingkungan desa cukup memberikan kehidupan kepada masyarakat. Binatang ternak yang dipelihara dan hidup di desa adalah kerbau dan babi, sementara yang ada di daerah di luar desa adalah sapi kambing dan ayam. Pemeliharaan binatang ini umumnya karena diperlukan untuk binatang pekerja atau binatang yang diperlukan untuk upacara. Sedangkan pemeliharaan secara ekonomis masih dilakukan secara sambilan.

3. Penduduk dan Gambaran Demografis

Gambaran tentang jumlah penduduk di desa Tenganan Pegriingsingan masih memperlihatkan keadaan penduduk yang masih kecil jika dibandingkan dengan wilayah desa yang cukup luas. Keadaan ini tentunya sangat berlainan dengan beberapa desa yang ada di sekitar desa ini yang umumnya mempunyai jumlah penduduk yang besar dan kepadatan yang tinggi. Kepadatan penduduk di Desa Adat ini sendiri dapat dilihat masih sangat kecil dilihat masih banyaknya *karang desa* yang masih kosong dan belum ditempati. Umumnya penduduk atau keluarga di desa ini menempati satu karang desa dengan sistem menetap setelah kawin adalah *neo lokal*. Dari banyaknya *karang desa* yang kosong berarti satu saat sebelumnya pernah penduduk desa Tenganan lebih besar jumlahnya daripada sekarang.

Tabel II-1 di bawah memperlihatkan keadaan penduduk desa ini yang digambarkan menurut umur, jenis kelamin, di tiga banjar adat yang ada di sana.

Tabel II-1
Penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan
1980

No.	Banjar	KK	0 — 4 5—14 15—24 25 — Jml. Total											
			L		P		L		P		L		P	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Banjar Kauh	58	8	10	14	12	9	4	44	51	77	77	152	
2.	Banjar Tengah	48	4	8	12	19	8	8	38	42	62	77	139	
3.	Banjar Pande	80	13	17	37	28	12	20	62	70	124	135	259	
Jumlah		186	25	35	63	59	29	32	144	163	261	289	550	

Melihat tabel tersebut dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun-tahun sebelumnya dapat dicatat bahwa pertambahan penduduk di desa tersebut terutama di dua banjar yaitu banjar Kauh dan banjar Tengah sangatlah kecil. Tabel II-2 berikut ini memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk yang ada sekarang masih jauh dari jumlah penduduk yang dapat dicatat lewat seabad yang lalu. Narendra dan kawan-kawan yang pernah mengadakan penelitiannya di sana dapat mencatat keadaan tersebut. Demikian juga Astika dalam penelitiannya tentang masa berpantang di sana dapat melihat bahwa pertumbuhan penduduk yang rendah tersebut disebabkan oleh beberapa aturan adat yang diberlakukan secara ketat bagi penduduk desa di sana.

Tabel II-2
Keadaan Penduduk di Banjar Kauh dan
Banjar tengah 1875 — 1985

Tahun	Jumlah (orang)	Tahun	Jumlah (orang)
1875	402	1977	284
1900	440	1978	288
1925	410	1979	289
1929	415	1980	291
1950	340	1981	290
1963	279	1982	298
1973	297	1983	312
1975	287	1984	326
1976	291	1985	335

Sumber: Narendra dkk. 1982.13
Data lapangan.

Dengan demikian kelihatan bahwa pada tahun-tahun dan periode tertentu pernah jumlah penduduk desa tersebut berkurang dari tahun sebelumnya, disamping juga pertumbuhannya yang memang kecil pada tiap tahunnya.

Pekerjaan penduduk umumnya adalah pada sektor pertanian walaupun sebagian besar di antaranya adalah petani pemilik yang menggarapkan sawah atau ladangnya kepada petani penggarap yang ada di sekitar daerah sawah mereka. Sudah banyak juga di antaranya yang bekerja menjadi pegawai atau pedagang yang berhubungan dengan kepariwisataan. Pendidikan juga sudah maju di desa dengan adanya dua Sekolah Dasar, sementara untuk SMP dan SMA anak-anak di desa harus pergi ke kota lain. Lulusan sarjana dari universitas dan akademi juga sudah cukup banyak yang umumnya sudah bekerja di luar desa sendiri sebagai pegawai negeri.

4. Struktur Pola Menetap dan Perumahan

Struktur pola menetap masyarakat Desa Adat Tenganan Pe-

gringsingan memang khas (seperti juga pola menetap di desa-desa tradisional atau *Bali Aga* lainnya di Bali). Dengan keadaan lingkungan yang berundag-undag, perumahan ditata dalam tiga jalur atau leret dengan bentuk rumah yang juga khusus. Kekhasan ini ditambah lagi dengan adanya fungsi bangunan yang ada di tiap-tiap pekarangan yang dibangun dengan fungsinya masing-masing sesuai dengan keperluannya. Ada sejumlah 220 *karang desa untuk perumahan*, ukuran dan letaknya sudah ada sejak dahulu yaitu membujur dari Utara ke Selatan dengan enam leret yang berhadap-hadapan. Di antara masing-masing leret tersebut terdapat halaman terbuka sebagai bagian dari pola pemukiman itu seluruhnya, di mana terletak bangunan-bangunan suci dan bangunan adat. Dari pencatatan yang dilakukan di lapangan dapat dicatat ada 14 buah bangunan suci seperti pura dan *bale agung*, 11 buah bangunan adat seperti *bale pemuda* dan 15 buah bangunan yang berfungsi umum lainnya: lumbung pakeklik, *bale bengong*, wantilan dan sebagainya.

Empat leret *karang desa* yang ada menjadi tempat pemukiman anggota desa adat Tenganan Pegringsingan dengan dua banjar yaitu Banjar Kauh dan Banjar Tengah, sedangkan dua leret lagi menjadi tempat pemukiman warga Banjar Pande, yang konon asalnya juga dari warga banjar Kauh atau Tengah yang 'dibuang' karena sesuatu kesalahan yang mereka buat. Sebagai sanksinya adalah mereka 'dibuang' ke banjar Pande, dan menjadi warga yang hanya berpindah tempat tetapi adat hampir sama.

Dalam setiap *karang desa* yang luasnya antara 1,5 sampai 2 are tidak termasuk halaman belakang atau *teba*; terdapat bangunan-bangunan yang hampir sama di setiap rumah yaitu: satu *bale buge*, satu *bale tengah*, satu *bale meten*, satu *paon*, *sanggah kemulan*, *sanggah pesimpangan* dan *natah* serta *teba*. Bangunan-bangunan tersebut mempunyai fungsi adat dan untuk melaksanakan upacara daur hidup di lingkungan keluarga. Sedangkan *natah* atau *teba* berfungsi untuk tempat memelihara binatang piaraan. Rumah-rumah adat dibangun dari bahan-bahan yang didapatkan di desa: kayu hutan, atap alang-alang atau daun enau. Hanya *bale meten* yang dapat diubah menurut model bangunan moderen dengan bahan yang baru: tembok, genteng dan ubin. Dengan masuknya listrik ke desa tersebut banyak perubahan telah terjadi

dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam membuka komunikasi masyarakat dengan dunia luar.

5. Struktur Administrasi Desa dan Banjar

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan termasuk bagian dari Desa Tenganan yang terdiri atas lima banjar dinas. Banjar Tenganan Pegringsingan sendiri terdiri atas tiga banjar adat yaitu: banjar adat Kauh, banjar adat Tengah dan banjar adat Pande. Dalam struktur administrasi, di mana kantor Kepala Desa ada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan empat banjar lainnya terletak di luar lingkungan desa adat itu sendiri. Karena itu sistem pengaturan pemerintahan desa sering mengalami keterlambatan karena letak banjar-banjar yang lain agak terpisah dan jauh dari desa.

Dalam struktur pemerintahan dinas tidak ada perbeeaan dengan sistem pemerintahan administrasi dengan desa-desa lainnya. Sedangkan dalam pemerintahan adat secara khusus masyarakat desa adat tersebut memberlakukan beberapa aturan khusus. Hal ini sangat erat hubungannya dengan peranan dan keanggotaan seseorang dalam desa adat dan juga dalam banjar. Karena adanya aturan-aturan khusus mengenai adat ini yang diberlakukan secara ketat maka dalam pengaturan keanggotaan seseorang dalam banjar juga berlaku aturan ini.

Orientasi masyarakat terutama dalam desa adalah dapat diterima sebagai anggota desa adat (sudah menikah, memenuhi beberapa persyaratan desa, keturunan asli dari orang tua yang sudah menjadi anggota desa adat), terutama untuk menempati struktur atas dari keanggotaan desa. Karena itu struktur pemerintahan desa adat yang berlaku lokal (di kedua banjar adat tadi) berlaku secara ketat. Anggota banjar Pande karena berada di luar lingkungan pemerintahan adat tadi sudah mengembangkan sejenis aturan tambahan yang mengatur pola interaksi mereka. Sehingga struktur yang dapat digambarkan adalah Desa Tenganan terdiri atas lima banjar dinas, satu di antaranya adalah *Banjar Tenganan Pegringsingan*. Banjar Tenganan Pegringsingan sendiri adalah wujud satu *Desa adat* yang terdiri atas tiga *banjar adat*: *Kauh*, *Tengah* dan *Pande*. Sehingga di sini banjar secara administrasi meliputi pen-

duduk ketiga banjar adat tadi yang berada dalam satu sistem aturan adat yang sangat ketat. Orientasi penduduk banjar akhirnya lebih terpusat pada sistem aturan adat dari pada aturan ke-dinasan.

6. Sistem Ekonomi yang Berkembang

Di desa ini berkembang suatu sistem ekonomi yang khas yang dilaksanakan oleh masyarakatnya sebagai warga desa. Sistem ekonomi ini mengembangkan suatu sistem produksi, distribusi dan konsumsi yang diatur secara bersama dan diatur oleh adat pengelolaannya di tingkat desa. Produksi pertanian misalnya memeprihatkan bahwa tanah pertanian adalah tanah desa di mana hasilnya dibagi secara merata kepada anggota desa dan berdasarkan jen-jangan kedudukan seseorang di tingkat/struktur desa. Tanah sebagai modal produksi tidak dimiliki oleh perorangan (kecuali dari hasil usaha sendiri), tetapi dimiliki oleh desa, hasilnya dibawa ke desa dan anggota mendapatkan bagiannya sesuai dengan kedudukannya dalam keanggotaan desa.

Distribusi hasil pertanian ini dilakukan oleh desa atau petugasnya berdasarkan aturan pembagian yang telah ada. Kemudian dalam pola konsumsi dari hasil pertanian tersebut selain untuk konsumsi sehari-hari lebih banyak digunakan untuk kepentingan upacara adat. Jadi konsumsi dari hasil produksi tadi juga dilakukan lewat beberapa kegiatan adat yang ada. Karena itu sistem produksi khususnya produksi hasil pertanian dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara tradisional dan khas menurut aturan desa.

Dalam sistem produksi hasil kebun atau tegalan juga berlangsung cara pengelolaan yang khusus pula terutama dalam hubungannya dengan sistem penggarapan. Sistem ini memungkinkan desa sebagai pemilik tanah tegalan mendapatkan hasil yang tidak terlalu merugikan, misalnya kalau pada suatu saat ada upacara berlangsung di desa maka desa dapat meminta hasil dari tanahnya untuk waktu itu saja. Sistem ini berlaku terutama pada pengolahan ladang/tegal enau untuk produksi tuak yang akan dijadikan bahan gula enau.

Dalam pengelolaan hasil hutan seperti beberapa macam buah-buahan, telah ditetapkan satu sistem aturan desa secara adat yaitu:

buah yang boleh diambil atau dipetik adalah buah yang benar-benar sudah matang atau masak di pohon. Bahkan untuk buah-buahan yang bernilai ekonomis seperti: *kemiri*, *pangi*, *durian*, hanya boleh diambil kalau benar-benar sudah jatuh ke tanah. Dan oleh masyarakat desa boleh diambil dengan bebas dan secukupnya menurut keperluan.

Pemeliharaan dan pelestarian hutan juga dilakukan secara tradisional dengan beberapa aturan adat yang ketat, terutama dalam penebangan kayu hutan. Setiap pasangan yang baru kawin di desa mendapat hak dari desa untuk memperoleh kayu ramuan rumah dari jenis tertentu dengan jumlah yang terbatas. Demikian juga halnya dengan cara penebangan kayu-kayu lainnya hanya boleh ditebang jika sudah benar-benar tua dan tidak menghasilkan lagi secara produktif. Sistem pemeliharaan hutan dan penebangan kayu lainnya secara adat ini setidaknya-tidaknya telah dapat memelihara kehijauan bukit Kangin sampai sekarang. Dan dengan demikian berarti di desa tersebut tingkah laku ekonomi dari para warganya diatur dalam suatu sistem aturan adat tertentu secara tradisional yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat secara adat.

7. Beberapa Kegiatan Lain dalam Banjar dan Desa

Di desa adat Tenganan Pegringsingan kegiatan-kegiatan yang dilakukan umumnya adalah kegiatan adat. Ada banyak sekali upacara-upacara yang berlangsung berdasarkan sistem kalender yang berlaku secara khusus di desa tersebut. Yang penting di antaranya adalah upacara *sasih Sambah* dengan acara *Perang Pandan*, acara persembahyangan di rumah-rumah keluarga atau upacara di Bale Agung. Dalam kegiatan yang bersifat adat ini warga desa yang terlibat adalah mereka yang sudah menjadi warga desa adat. Para pemudanya atau para pemudinya mempunyai lagi wadah khusus untuk menerapkan sosialisasi dan proses transmisi mereka pada adat yang berlaku dengan menghimpun diri dalam kelompok *Teruna Nyoman* dan kelompok *Daha*. Berbagai kegiatan dilakukan oleh kelompok pemuda dan pemudi ini dalam wujud kegiatan adat.

Kegiatan lain yang diartikan sebagai kegiatan warga sebagai

anggota banjar tidaklah banyak. Yang ada hanyalah kerja bakti membersihkan *boatan* atau saluran air yang mengalir di *awangan* atau jalan yang ada di depan rumah mereka sendiri. Jika ada permintaan tenaga dari desa untuk suatu keperluan maka barulah anggota banjar yang juga anggota desa adat bergerak. Dalam hal ini mereka bergerak lebih banyak merasa sebagai anggota desa adat. Kegiatan PKK dari para wanita juga baru mulai setelah adanya usaha untuk menggalakkan peranan wanita di desa. Hal ini dirangsang dengan memberikan keterampilan menenun, sebagai kelanjutan usaha menenun secara tradisional jenis kain *gringsing* kain ikat tradisional di desa tersebut.

B. PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT TRADISIONAL DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

1. Kedudukan Banjar dan Fungsi Banjar Bagi Desa

Di lingkungan masyarakat di mana peranan adat demikian kuatnya menaati kehidupan masyarakatnya, sukar sekali mencari jenis kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat. Hampir semua kegiatan yang dilakukan dirasakan sebagai kegiatan yang harus dilakukan karena adanya kesadaran akan aturan adat yang berlaku. Dalam keanggotaan banjar, semua responden yang jumlahnya 19 orang menyatakan bahwa mereka menjadi anggota banjar; tetapi tidak bisa menjawab apakah mereka ada melakukan tugas-tugas banjar untuk mencari dana, kecuali untuk bekerja bakti. Demikian juga jawaban responden ketika melakukan kegiatan di banjar untuk dana pembangunan bale banjar 94.8% menyatakan tidak pernah melakukan. Hal ini diperkuat dari hasil observasi di desa tidak ada bangunan *bale banjar* yang dijadikan tempat kegiatan masyarakat sebagai anggota banjar. Yang ada hanyalah bangunan-bangunan desa yang dapat dimanfaatkan bersama-sama.

Dalam hubungannya dengan kegiatan para responden sekarang 94.8% menyatakan bahwa kegiatan mereka dalam pekerjaan sekarang tidak ada hubungannya dengan status keanggotaan mereka dalam banjar. Demikian juga dalam usaha mencari pekerjaan 89.5% menyatakan bahwa lebih mudah mencari pekerjaan lewat usaha sendiri dan tidak lewat banjar. Hubungan pekerjaan mereka

sekarang lebih banyak ada hubungannya dengan status keanggotaan mereka dalam desa adat.

Kalau melihat dalam struktur banjar dan desa di desa adat Tenganan Pegringsingan, di mana struktur administrasi banjar Tenganan Pegringsingan meliputi wilayah desa adat Tenganan Pegringsingan sendiri. Dalam wilayah desa adat itu ada tiga banjar adat yaitu banjar adat Kauh, banjar adat Tengah dan banjar adat Pande. Dua yang pertama merupakan kesatuan warga desa dengan sistem aturan adat yang sama sedangkan banjar adat Pande meskipun konon berasal dari orang-orang desa adat Tenganan Pegringsingan sendiri namun sudah mempunyai sistem aturan adat yang agak berbeda. Dengan struktur tersebut di atas memang sukar untuk mendapatkan satu pola tingkah laku masyarakat yang secara khusus dalam wujud tingkah laku masyarakat sebagai anggota banjar. Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik dalam hubungannya dengan kegiatan banjar maupun desa semuadirasakan berada dalam satu sistem aturan yaitu aturan adat. Bagi anggota masyarakat desa sendiri juga sangat sukar untuk membedakan kapan mereka bertindak sebagai anggota banjar dan kapan mereka bertindak sebagai anggota desa. Setiap kegiatan yang mereka lakukan adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan adat dan kebiasaan. Masyarakat sendiri mempunyai persepsi bahwa apa yang mereka lakukan adalah kewajiban dan tanggung jawab kepada desa adat. Sehingga fungsi banjar bagi desa di sini adalah dalam mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terutama dalam kewajiban dan tanggung jawab yang berhubungan dengan kegiatan adat.

2. Sistem Aturan dan Perlengkapan Banjar

Lingkungan yang masih mengikat para anggotanya untuk melakukan aktivitas di desa sendiri, dan tidak begitu banyak berada di luar desa terlihat di desa adat Tenganan Pegringsingan. Kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak seperti bagi mereka yang bekerja di luar desa, 73.8% menyatakan tidak usah melapor kalau bepergian. Mereka ini adalah mereka yang hanya punya kepentingan pergi ke kebun, ke ladang atau ke sawah sehingga tidak perlu memenuhi aturan desa tentang bepergian ini.

Tentang aturan yang lain yaitu aturan keanggotaan dalam

desa dan banjar, semua responden yang berjumlah 19 orang (100%) menyatakan bahwa mereka menjadi anggota banjar dan juga anggota desa. Dan kemudian ketika ditanyakan untuk membedakan sebagai anggota adat atau dinas para responden sukar sekali membedakannya sehingga jawaban menjadi anggota dari ke jenisnya juga serempak menyatakan, ya: (100%). Sistem aturan dan kegiatan desa adat yang memungkinkan semua orang di desa ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan rupanya sukar dibedakan oleh masyarakat kapan suatu kegiatan bersifat adat dan kapan bersifat dinas. Aturan adat yang lebih ketat yang disosialisasi sejak mereka masih muda rupanya mendidik para warga desa untuk bersikap disiplin pada setiap aturan yang ada. Hal ini dinyatakan oleh 94.8% responden bahwa mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajiban banjar atau desa jauh sebelum mereka diangkat/masuk sebagai anggota desa.

Perlengkapan banjar di desa Tenganan Pegringsingan tidaklah ada karena sedikit sekali kegiatan yang dilakukan oleh banjar terutama dalam pengertian banjar dinas. Dalam kegiatan sebagai anggota banjar adat, karena sudah termasuk dalam kegiatan desa adat sendiri maka semua peralatan juga dimiliki oleh desa adat. Semua bangunan yang bersifat umum dan dapat dipakai untuk kepentingan seluruh anggota adalah bangunan milik desa. *Bale Agung* adalah bangunan suci tempat para warga desa adat mengadakan kegiatan. Sebuah *kulkul* atau kentongan yang ada di desa yang disebut *kulkul pengelemahan* adalah benda suci yang tidak setiap waktu dapat dibunyikan. Untuk mengkomunikasikan apa yang akan dilakukan oleh warga desa adat, seorang *saya arah* yaitu perangkat desa pergi keliling desa dan mengumumkan apa yang harus dilakukan oleh warga desa. Dengan berteriak di pintu halaman (tanpa harus masuk ke rumah *saya arah* melaksanakan tugasnya setiap sore hari antara pukul 18.00 – 19.99. *Saya arah* melakukan tugasnya secara bergiliran dan dipilih dari salah satu kelompok anggota desa adat.

Peralatan lain yang baru diadakan sesuai dengan tuntutan pembangunan adalah sebuah *bale tamu*, *bale museum*, dan juga perangkat penerima tamu di tingkat desa, untuk menerima tamu dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang diinginkan oleh para tamu khususnya wisatawan dan para pengunjung

dinas. Lembaga PKK juga melengkapi organisasi mereka dengan berbagai peralatan yang diperlukan seperti peralatan memasak, alat keterampilan. *Bale wantilan* atau *wantilan desa* adalah bangunan yang benar-benar bersifat umum dan tidak suci untuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan dinas/sehari-hari.

3. Sistem Keanggotaan Banjar, Desa dan Kelompok Sosial Lain

Sistem keanggotaan desa adat di desa ini berlaku bagi setiap orang di desa dengan beberapa ketentuan yang mengikat karena orientasi dari masyarakat agar dapat menjadi anggota desa inti atau pertama dalam struktur keanggotaan desa yang ada. Kriteria untuk terjun menjadi anggota desa adalah berdasarkan perkawinan yang ideal menurut pandangan adat setempat, yaitu:

- kedua suami istri tidak cacat baik jasmani maupun rohani.
- kedua suami istri berasal dari desa adat Tenganan Pegringsingan, karena itu bila seorang laki-laki mengambil istri dari luar desa adat (kecuali dari golongan tertentu yang dibenarkan oleh desa) mereka tidak dapat diterima sebagai anggota desa inti. Begitu juga seorang gadis dari desa ini bila kawin keluar desa adat, di samping tidak diakui sebagai anggota desa inti juga orang tuanya didenda sejumlah tertentu.

Keanggotaan dihitung dari pihak lelaki atau suami.

- perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan poligami, karena bila seseorang lelaki kawin lagi atau mempunyai istri dua maka ia segera dipecat dari keanggotaan desa adat.
- kedua suami istri pada masa mudanya adalah anggota *sekeha deha* dan *sekeha teruna*, yaitu kelompok organisasi pemuda dan pemudi desa secara adat yang bertugas mensosialisasi tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota desa.

Kriteria atau persyaratan keanggotaan desa tersebut menentukan apakah seseorang akan dapat memasuki keanggotaan desa adat terutama desa adat. Karena jika seseorang telah diterima menjadi anggota desa adat maka ia akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam struktur desa adat itu sendiri.

Dalam struktur keanggotaan desa adat masing-masing anggota desa mempunyai tugas dan mendapatkan haknya sebagai berikut:

- a. *Luanan* (terdiri dari lima orang) sebagai penasehat dan pengawas jalannya pemerintahan desa adat.
- b. *Bahan Roras* (terdiri dari 12 orang), enam orang yang berkedudukan sebagai *bahan duluan* atau *kliang desa* memegang pemerintahan harian dan perencanaan. Pucuk pimpinan ada pada tangan dua orang yang paling *dulu* atau pucuk yaitu *tamping takon*.
Enam orang lagi *bahan tebenan* adalah pembantu *keliang desa*.
- c. *tambal Apu*, terdiri dari 12 orang yang memegang pimpinan kerja.
- d. *Pengeluduan* (tambal apu ke bawah, jumlahnya bisa bertambah terus) sebagai pelaksana khususnya bertugas *ngalang* yaitu mencari bahan-bahan ke kebun jika ada kegiatan upacara adat.

Urutan perkawinan menentukan posisi seseorang dalam struktur keanggotaan desa adat. Pergeseran keanggotaan terjadi apabila ada anggota desa yang kehilangan keanggotaannya karena:

- a. Salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia. Bagi seorang duda bila ia dapat mengawini lagi seorang gadis dari desa Tenganan Pegringsingan, dapat lagi memperoleh keanggotaannya dalam keanggotaan desa inti. Hal ini tidak berlaku bagi seorang janda.
- b. Salah seorang anak-anaknya kawin.
- c. Karena melakukan pelanggaran yang menurut keputusan desa adat tak dapat lagi diterima sebagai anggota inti.
- d. Karena umur lanjut sehingga tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai anggota desa adat.

Hilangnya keanggotaan seseorang dalam desa adat mengakibatkan terlepasnya hak dan kewajibannya dalam desa. Tetapi mereka masih dapat diterima dalam keanggotaan desa *gumi pulangan* (anggota desa kedua) masih berhak atas pembagian hasil sawah/kebun.

Demikian ketatnya persyaratan untuk dapat menjadi anggota desa adat menyebabkan setiap orang berusaha sebaik-baiknya untuk dapat diterima menjadi anggota. Sementara itu keanggotaan dalam *sekeha teruna* dan *sekeha deha* sebagai organisasi pemulanya juga ketat. Keanggotaan dalam banjar sendiri karena fungsi banjar sangat lemah dalam kegiatan desa (kabur dengan kewajiban dan fungsi desa adat) menyebabkan tidak ada yang mengetahui apa persyaratannya. Setiap orang sebagai diakui oleh responden

(100%), dapat menjadi anggota banjar kalau ia menjadi anggota desa, atau sebaliknya. Keanggotaan dalam kelompok sosial lain seperti PKK dan Pemuda ditentukan dalam aturan yang lebih khusus lagi menurut aturan yang baru secara dinas.

4. Sistem Pengerahan Tenaga dan Pengendalian Sosial

Dalam lingkungan masyarakat di mana berlaku sistem aturan adat secara ketat, maka pengerahan tenaga dan juga pengendalian sosial dapat dilakukan secara efektif lewat keketatan pelaksanaan aturan tersebut dan sistem sanksi yang diberlakukan bagi pelanggaran adatnya. Seperti telah dikemukakan di depan dalam sistem keanggotaan desa adat saja demikian banyaknya persyaratan yang ada yang memungkinkan seseorang untuk bisa diterima sebagai anggota. Demikian juga halnya dengan jenis sanksi yang dikenakan bagi suatu pelanggaran tertentu, sehingga perlu satu cara pengendalian sosial yang juga ketat untuk dapat menjamin terlaksananya suatu aturan adat secara pasti dan ketat. Semuanya itu memberikan gambaran pada berlangsungnya suatu sistem sosial, seperti banjar dan desa.

Sistem pengerahan tenaga terutama untuk kegiatan bersama di desa atau di lingkungan banjar telah berkembang demikian rupa dalam wujud saling tolong-menolong antara tetangga. Hal ini dikemukakan oleh semua responden (100%), demikian juga halnya dengan bantuan yang diperoleh jika mereka memerlukan bantuan tenaga maka para tetangga atau anggota desa lainnya akan memberikan pertolongannya, baik berupa tenaga maupun bahan. Sedangkan bantuan tersebut sudah dirasakan ada jauh sebelum mereka menjadi anggota desa oleh 94.8% dari responden dan meningkat dirasakan setelah mereka menjadi anggota desa oleh 5.2%. dengan demikian sistem pengerahan tenaga sebenarnya sudah tercakup dalam aturan adat yang dilaksanakan secara ketat tadi.

Pengendalian sosial dalam wujud mendidik anggota untuk dapat melaksanakan segala tugas dan kewajibannya dapat dikembangkan dengan sistem sanksi. Sanksi atas pelanggaran aturan adat sendiri sudah jelas adanya, yaitu sanksi yang paling keras adalah tidak diterimanya seseorang dalam keanggotaan desa adat. Orientasi masyarakat untuk dapat duduk dalam keanggotaan desa adat

inti juga merupakan salah satu cara pengendalian sosial di desa ini, di mana kemudian untuk dapat mencapai maksud tersebut setiap orang berusaha memenuhi persyaratan yang ada. Pengembangan rasa malu karena pelanggaran suatu aturan adat juga sangat menentukan dalam pelaksanaan aturan adat secara ketat. Jenis pelanggaran kepada adat yang diumumkan secara luas kepada masyarakat adalah pengembangan rasa malu bagi para pelanggarnya. Dengan demikian harapan untuk dapat melaksanakan aturan adat secara ketat juga dapat tercapai lewat cara ini.

5. Sistem Upacara di Banjar dan Di Desa

Ada banyak sekali upacara yang dilakukan di desa adat Tenganan Pegringsingan dalam setahunnya yang terdiri atas 12 bulan. Namun dalam penentuan hari upacara ini di desa berlaku sistem kalender khusus yang tidak sama dengan kalender masehi. Dalam setahun ada lebih dari 12 kali upacara, dan hanya satu diantaranya dilakukan atau melibatkan anggota banjar. Selebihnya adalah upacara yang dilakukan di tingkat desa adat. Urutan upacara itu (yang dilakukan setiap bulan sekali dalam setahun) adalah:

- a. *Upacara Sasih Kasa* (bulan pertama): disebut *Ngusa Ngusaba Kasa* dilakukan di Bale Agung dan ditujukan untuk *Betara Dharma*.
- b. *Upacara Sasih Karo* (bulan kedua): atau upacara *Neduh* yang dilakukan di Pura Besaka dan di tempat Suci Pakuwon. Dilakukan untuk menghilangkan hama yang mengganggu tegalan dan sawah.
- c. *Upacara Sasih Ketiga*: pada bulan ketiga yang dilakukan dengan upacara *Mebabi Barak* untuk pergeseran *kerama desa* (perubahan keanggotaan desa); dan upacara *Metail* (satu-satunya upacara yang dilakukan di Bale Banjar).
- d. *Upacara Sasih Kapat* (bulan keempat), upacara di Pura *Dalem Pngastulan* dan Pura *Anyar*. dan Upacara *Ngampad* di salah satu rumah pimpinan desa.
- e. *Upacara Sasih Kelima* (bulan kelima), upacara ini biasa disebut *Ngu-saba Sambah* atau *Mekare-kare*.
- f. *Upacara Sasih Kenem* (bulan keenam), yang disebut upacara *Mesang-gah Jumu*, berlangsung di Bale Agung dalam bentuk upacara rapat atau Pesangkepan dengan kilat (Petir).
- g. *Upacara Sasih Kepitu* (bulan ketujuh), disebut upacara *Mesanggah Tengah* di Pura *Dalem Kangin*.

- h. *Upacara Sasih Kewolu* (bulan kedelapan): disebut upacara *Mesang-gah Gede bong* dilakukan di Pura Gaduh, untuk dewa/dewi pelindung dan kemakmuran.
- i. *Upacara Sasih Kesanga* (bulan ke sembilan): upacara *Mebabi Barak* yang kedua yang dilakukan pula di Bale Agung.
- j. *Upacara Sasih Kedasa* (bulan kesepuluh): upacara untuk Betara Dharma yang kedua juga di Bale Agung.
- k. *Upacara Sasih Desta* (bulan ke sebelas): upacara yang berlangsung di pura *Dulunswarga*. Konon upacara ini dahulu adalah upacara dari keluarga Bendesa saja tetapi entah apa sebabnya kemudian diserahkan kepada desa untuk melaksanakannya.
- l. *Upacara Sasih Sada* (bulan keduabelas): upacara di pura Dalem Jero yang ditujukan untuk Ki Patih Tunjung Biru.

Puncak dari semua upacara dalam setahun itu adalah pada sasih Kelima yang disebut Sasih Sambah, yaitu dengan diadakannya upacara *Mekare-kare* atau perang pandan. Upacara ini berlangsung selama sebulan dengan rentetan proses upacara yang sangat rumit. Tujuannya sampai sekarang masih simpang siur informasinya dan satu di antaranya adalah menyatakan dalam rangka acara korban (*tabuh rah*).

Kalau semua upacara-upacara tersebut adalah upacara yang berlangsung di tingkat desa adat, maka upacara yang berhubungan dengan daur hidup seseorang juga tetap berjalan sebagaimana mestinya di tingkat keluarga. Di sinilah perbedaan pengerahan tenaga yang ada dalam pelaksanaan upacara tersebut yaitu pada upacara di tingkat desa adat pengerahan tenaga dilakukan oleh desa adat dengan perangkatnya. Sedangkan upacara yang berlangsung di tingkat rumah tangga pengerahan tenaga secara tolong-menolong antar tetangga dan keluarga dekat.

6. Sistem Pengorganisasian Kegiatan di Banjar dan di Desa

Dalam pengorganisasi kegiatan yang berlangsung di desa terutama yang ada hubungannya dengan kegiatan adat dan upacara di *pura-pura*, semua responden (100%) menyatakan bahwa itu dilakukan oleh desa. Kemudian 94.8% menyatakan bahwa pada kegiatan seperti itu seluruh anggota desa ikut serta. Tidak ada pungutan kepada warga desa tetapi semua menyumbangkan tenaganya

untuk kegiatan tersebut, demikian dinyatakan oleh 94.8% responden tadi. Sebagai imbalan dari kegiatan tersebut 89.5% responden menyatakan bahwa ada perhatian desa terhadap warga desa berupa perhatian dalam kegiatan adat, dan sisanya 10.5% menyatakan bahwa perhatian dari desa ada dengan pemberian berupa bahan bangunan, ketika mereka mulai membangun rumahnya.

Dalam pengorganisasian kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masalah pembangunan pengorganisasian kegiatan juga dilakukan oleh desa. Ini dijelaskan oleh responden ketika pertanyaan diajukan tentang program Keluarga Berencana. Dari delapan responden yang ikut program KB ini (42.1%), tiga orang di antaranya menyatakan ikut karena saran petugas desa (37.5%), sedangkan sisanya (62.5%) menyatakan ikut program karena kehendak sendiri. Di banjar sendiri pengorganisasian tenaga hanya dilakukan ketika acara kerja bakti untuk membersihkan lingkungan atau memperbaiki bangunan yang rusak diadakan. Pengerahan tenaga dilakukan oleh pimpinan banjar. Dengan demikian kelihatan bahwa pengerahan tenaga atau pengorganisasian kegiatan terutama yang berhubungan dengan adat dan upacara lebih banyak dilakukan oleh desa adat, hanya beberapa kegiatan kecil dan khusus yang dilakukan oleh banjar. Di samping itu masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan di tingkat rumah tangga yang memerlukan juga pengerahan tenaga dan pengorganisasian kegiatan. Dalam keadaan seperti ini pengerahan tenaga dilakukan atau berlangsung secara spontan sebagai wujud bantuan tenaga tolong-menolong, terutama pada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan upacara daur hidup di tingkat keluarga atau rumah tangga.

7. Analisa Tentang Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali, Khususnya pada Masyarakat Tradisional Desa Tenganan Pegring-singan

Analisa tentang peranan banjar pada masyarakat akan dilihat pada keterkaitan yang terjadi antara banjar sebagai suatu sistem dan masyarakat sebagai sistem yang lain. Dalam kehidupan suatu masyarakat yang mewujudkan kebudayaannya secara khas akan terlihat bagaimana banjar sebagai sub sistem dalam kehidupan masyarakat Bali memperlihatkan adanya keterkaitannya dengan sub-

sub sistem lain dalam masyarakat. Demikian juga wujud masyarakat yang terbentuk adalah pencerminan dari pola tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut dalam menanggapi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya analisa tentang peranan banjar bagi masyarakat memusatkan perhatiannya pada fungsi dan kedudukan banjar pada masyarakat sebagai subsistem yang terkait.

Dalam kehidupan ekonomi khususnya sistem ekonomi yang berkembang di desa adat Tenganan Pegringsingan lebih memperlihatkan kepada suatu kehidupan sistem ekonomi yang bersifat tradisional. Hal ini dinyatakan oleh hasil penelitian dan pengamatan tentang bagaimana sistem produksi, distribusi dan pola konsumsi ditata di lingkungan masyarakat tersebut. Kehidupan yang diwaris oleh pengaturan adat yang ketat memberikan kepada segenap warga desa rasa aman akan adanya produksi yang dapat menjamin kehidupan semua warga desa. Distribusi juga diatur berdasarkan pembagian yang dilakukan untuk semua warga desa menurut kedudukannya dalam desa adat. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam struktur desa adat makin tinggi pula bagian hak yang dapat diterimanya. Tetapi mereka yang hanya berstatus sebagai warga biasa dan juga bekas warga inti (*gumi pulangan*) hanya akan berhak atas sejumlah pembagian hasil sawah dan kebun. Sistem ekonomi seperti ini juga menyebabkan tumbuhnya atau berkembangnya orientasi masyarakat kepada keberhasilan seseorang untuk dapat duduk dalam struktur keanggotaan desa yang tertinggi.

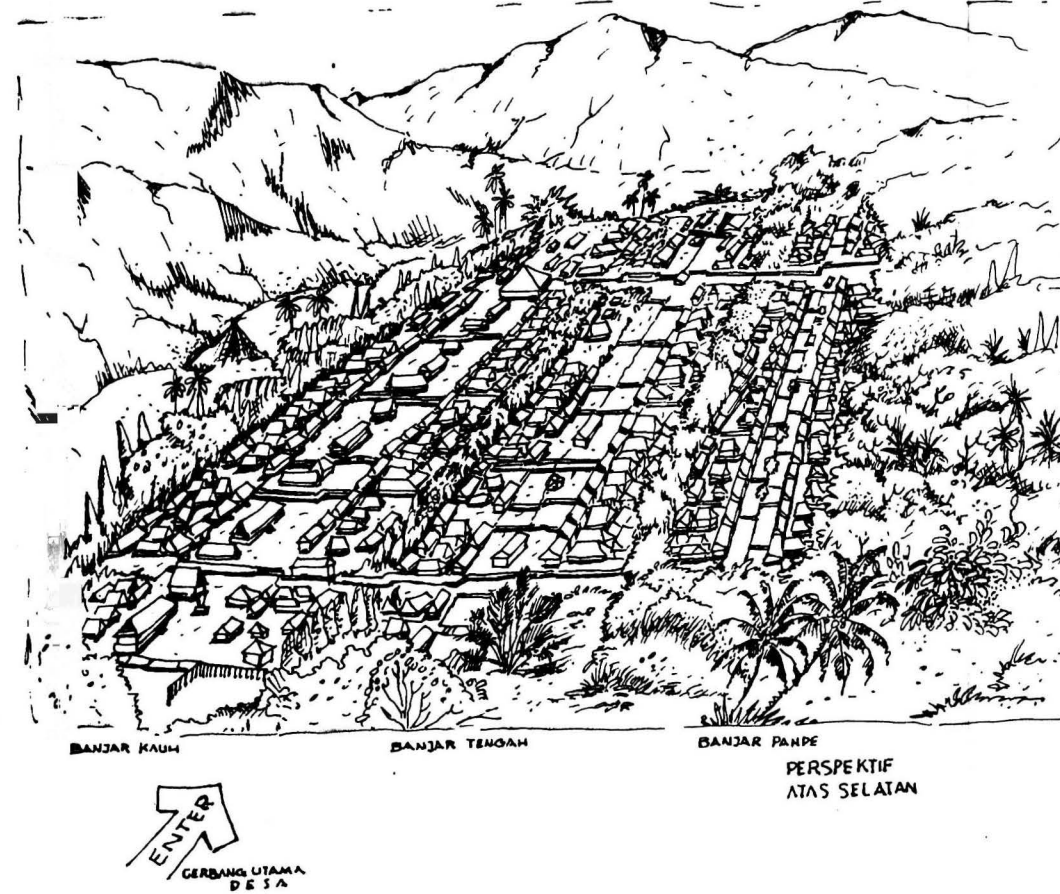
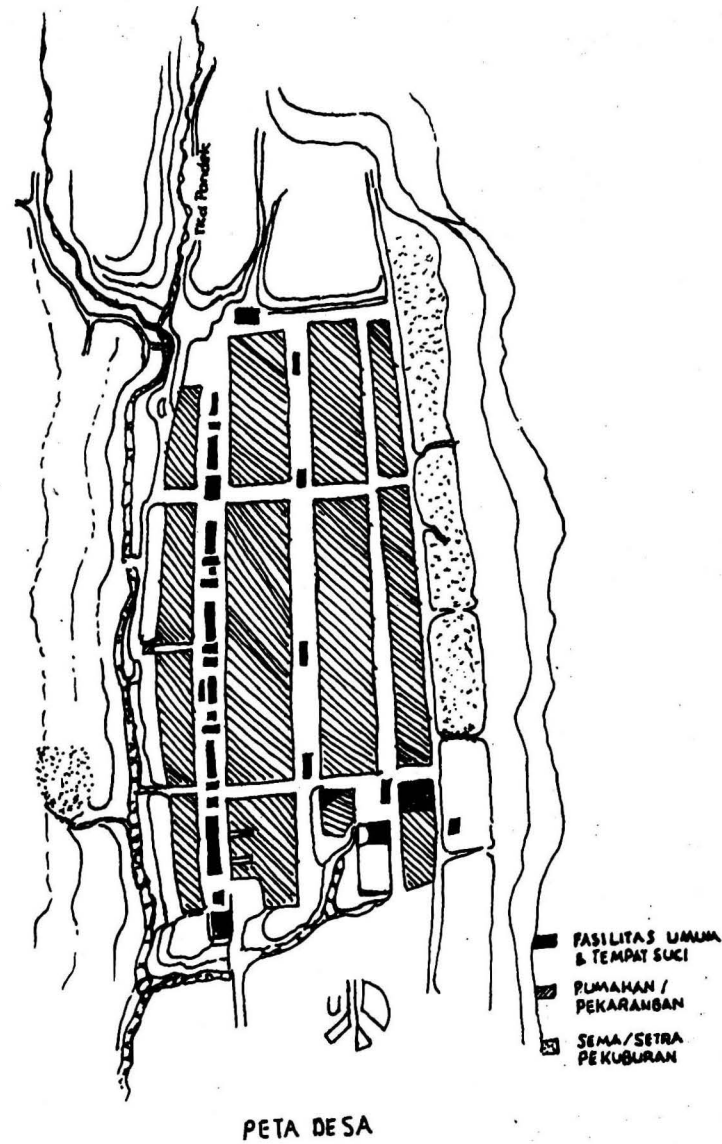
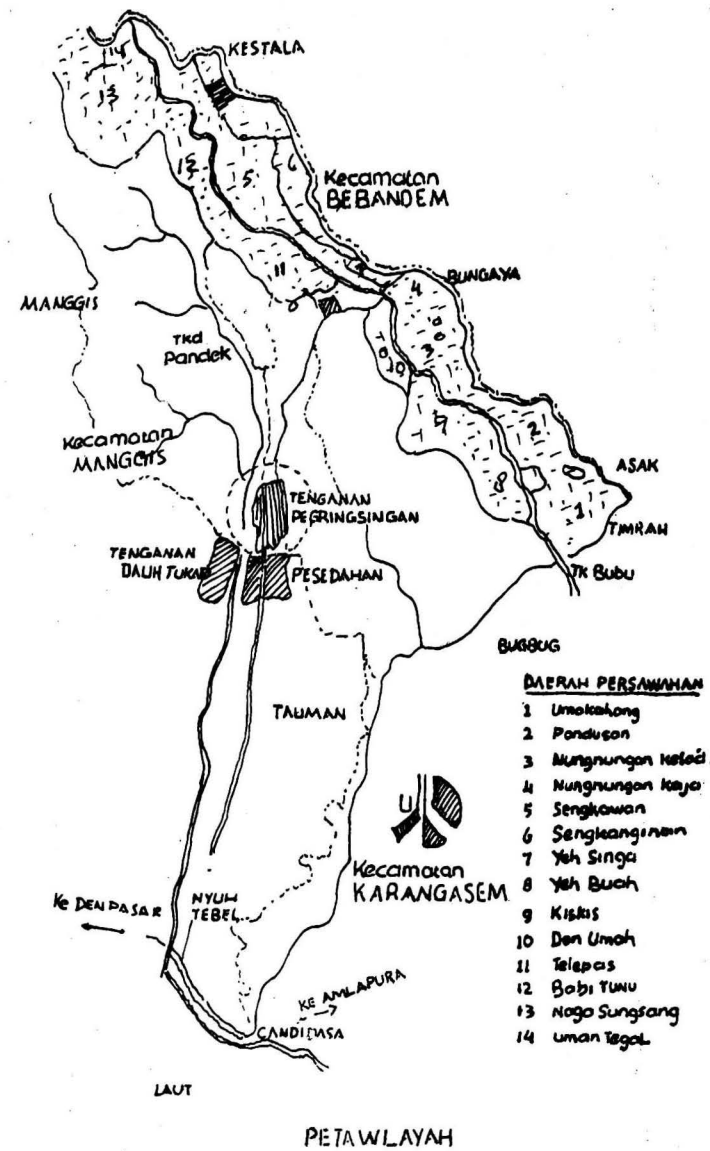
Sistem aturan adat yang ketat di lingkungan masyarakat desa ini memperlihatkan adanya atau tertatanya suatu sistem sosial yang baik dan teratur. Sistem itu sendiri memberikan kemungkinan berkembangnya subsistem lainnya di masyarakat terutama dalam usaha masyarakat menjaga kelangsungan berjalannya sistem desa adat secara keseluruhan. Untuk itu dikembangkan kemudian sub sistem aturan adat yang ketat, sub sistem sanksi dan sub sistem pengendalian sosial untuk mencegah secara dini pelanggaran terhadap sistem aturan adat tadi. Sehingga pada kenyataannya dalam sistem sosial yang berlangsung masyarakat lalu berusaha menepatkan dan mengembangkan sistem aturan adat tersebut sedemikian rupa dalam kehidupan mereka. Di Desa Tenganan Pegringsingan

di mana aturan adat berperan sangat besar dalam kehidupan masyarakat, pola-pola hubungan sosial di antara sesama warga desa didasarkan atas aturan tersebut. Aktivitas yang terjadi di desa sebagai wujud kehidupan memperlihatkan betapa aturan adat sangat berperan dalam pola tingkah laku masyarakatnya. Sehingga organisasi sosial yang dibentuk untuk mewujudkan kepentingan masyarakat untuk berinteraksi juga didasarkan pada sistem aturan yang berlaku. Tentunya tata nilai, gagasan dan beberapa norma dalam kehidupan yang berlangsung adalah tata nilai, gagasan dan norma yang berlaku umum dan dikenal oleh masyarakat. Di sini 'desa adat' adalah wujud sistem sosial yang paling berperan dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sedemikian rupa dalam membentuk masyarakat dan kebudayaan Tenganan Pegringsingan.

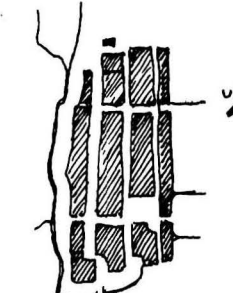
Dalam pengaturan administrasi pemerintahan desa, desa adat sebagai wujud sistem yang tertinggi dalam kehidupan masyarakat juga mengaburkan fungsi sistem yang lain terutama pada sebagian besar anggota masyarakat. Dalam hal ini banjar sebagai wujud sub-sistem yang lebih kecil dari desa mempunyai peranan yang kecil sekali dalam mewujudkan kehidupan masyarakat. Ini terbukti dari beberapa kegiatan masyarakat dalam banjar yang terbatas dalam aktivitas, sarana dan juga wujud lembaganya. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak anggota desa yang juga anggota banjar tidak memperhatikan segi administrasinya seperti dalam pencatatan. Demikian juga dalam sistem upacara yang berlangsung dalam setahun, dari sekian banyak upacara yang berlangsung hanya satu kali ada upacara yang dilakukan di *bale banjar*. Hal ini tentunya tetap akan mengembangkan oreitansi masyarakat kepada desa secara adat sebagai supra sistem dalam kehidupan mereka.

Sistem komunikasi terutama dalam usaha menyampaikan pesan dan onovasi pembangunan yang di desa lain tertuju lewat banjar, di desa ini masih tetap dapat diharapkan peranan desa adat untuk itu. Karena dalam sistem desa adat juga dapat dikomunikasikan berbagai hal termasuk komunikasi untuk program inovasi tadi. Dan mungkin dengan sistem sanksi dan pengendalian sosial yang telah ada tidak sulit untuk mencapai target komunikasi dengan masyarakat yang bertata secara khas tadi. Perangkat desa untuk tugas dan tujuan komunikasi langsung ini juga sudah ada dan diatur secara adat.

Dengan demikian peranan banjar pada masyarakat desa Tenganan Pegringsingan, terutama dilihat dari segi fungsi dan kedudukan banjar pada masyarakat memberikan kesan pada lemahnya fungsi banjar pada masyarakat jika dibandingkan dengan fungsi desa adat untuk tujuan yang sama. Dalam struktur pemerintahan, banjar Tenganan Pegringsingan adalah wilayah desa adat Tenganan Pegringsingan dengan tiga banjar adat. Karena itu struktur desa adat memegang peranan penting dalam wilayah desa ini.



DESA ADAT



TENGANAN
PEGRINGSINGAN

NOTASI

Wilayah desa TENGANAN
PEGRINGSINGAN sebagian
besar merupakan TANAH
KOLEKTIF/Communal yang
terdiri dari:

- daerah persawahan
± 250 Ha.
- daerah tegalan/perkebunan
± 600 Ha.

DAERAH DAERAH tersebut:

- % tanah kolektif
- % tanah personal/
milik individu

SITE / SITUASI DESA

Terletak diantara 3 Bukit
(Bukit Kangin Kaja & Kauh)
dan disebelah Selatan berba-
lasan dan DESA PESEDAHAN
/ dataran rendah

GAMB PETA WILAYAH, DESA
& PERSPEKTIF DESA

SKALA

HAL

01

TGL

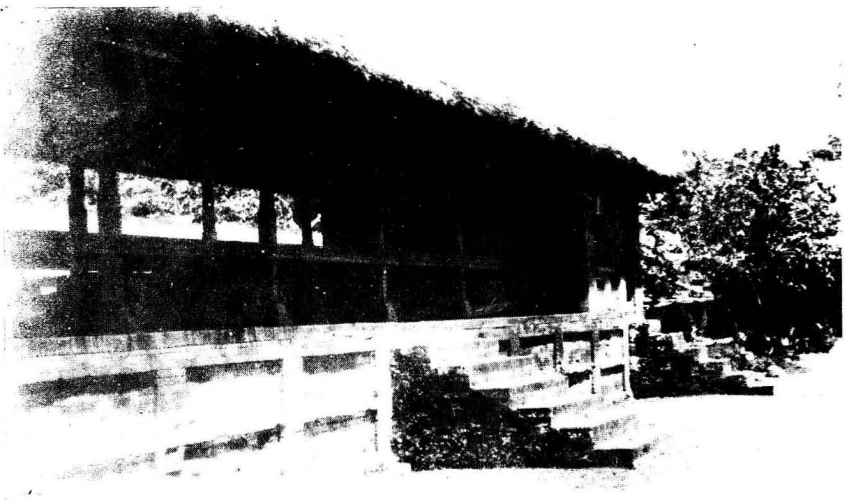
NOV '78



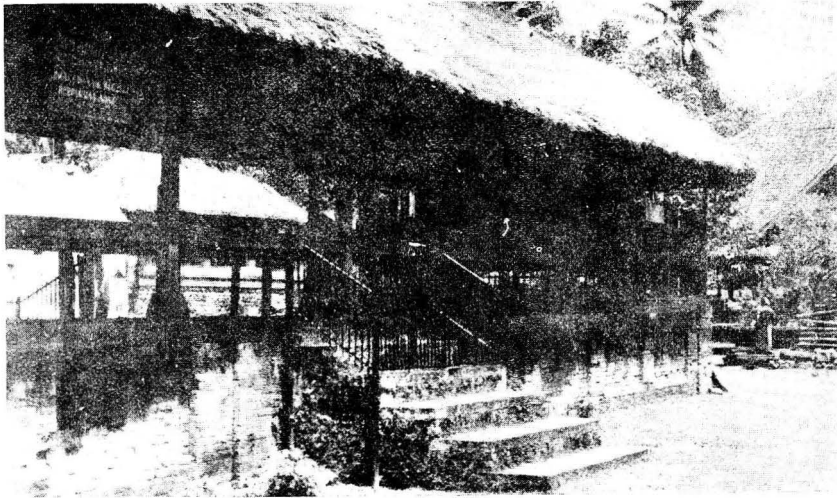
Gambar 1: Sebuah tempat persembahyangan keluarga di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.



Gambar 2: Bangunan *Bale agung* di Desa Tenganan Pegringsingan, tempat warga desa adat mengadakan rapat atau pertemuan dan upacara.



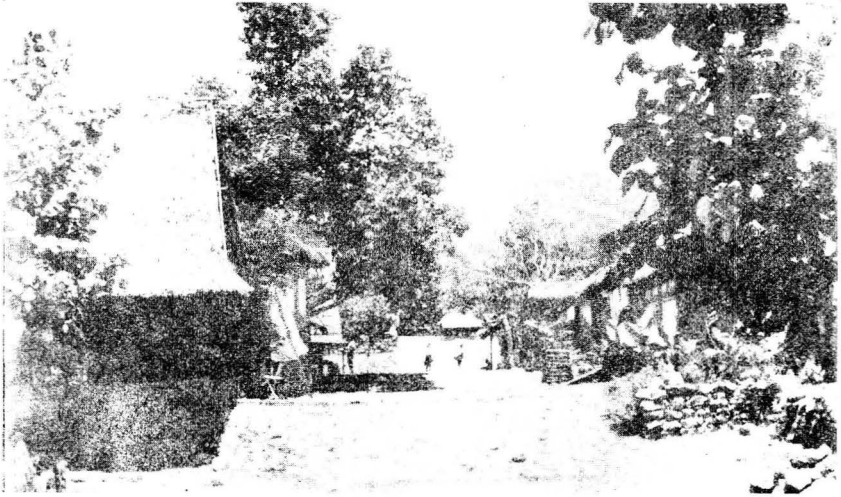
Gambar 3: Bangunan *Bale Petemu Kelod*, sebuah bangunan adat tempat para pemuda mengadakan pertemuan atau berpacara.



Gambar 4: Bangunan *Bale Petemu Kaja*, sebuah bangunan adat yang suci tempat para pemuda/pemudi desa mengadakan upacara atau rapat/pertemuan.



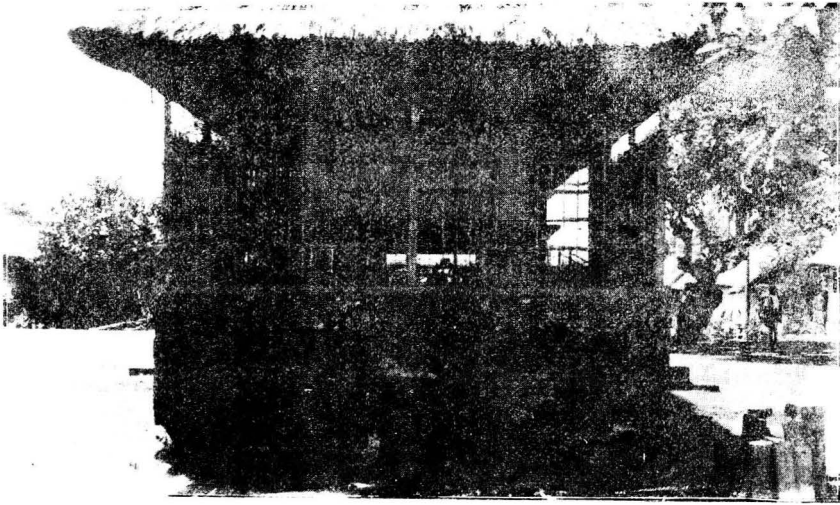
Gambar 5: Pembangunan sebuah Balai Museum Adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, rencana tempat pameran dan peragaan benda-benda budaya Tenganan (wujud tanggapan masyarakat terhadap pariwisata).



Gambar 6: Suasana lingkungan desa Tenganan Pegringsingan dengan pola menetap yang khas dan daerah pemukiman yang berundag-undag, dan jalan lingkungan yang ada di tengah-tengah deretan perumahan.



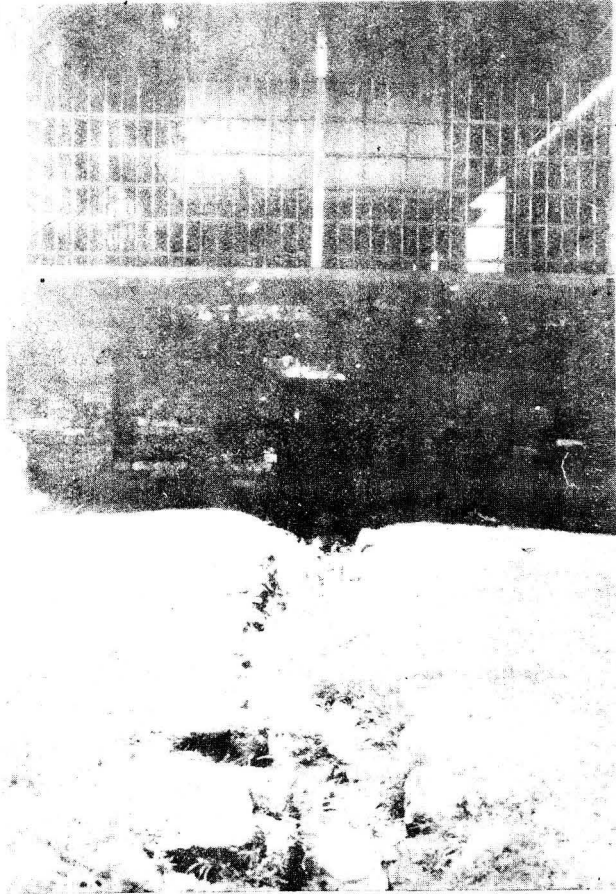
Gambar 7: Sebuah pemandangan atas jalan desa di Desa Tenganan Pegringsingan dengan bangunan rumah dan bangunan umum di kiri-kanannya. Bangunan yang tampak di sebelah kanan adalah lumbung paceklik milik desa.



Gambar 8: Saluran air yang dibuat melalui kolong bangunan sebagai usaha masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam gambar terlihat saluran tersebut mengalir di bawah bangunan Bale Petemu Kaja.



Gambar 9 Sebuah *Karang Desa* yang tidak ditempati, tetapi tetap harus dipelihara oleh masyarakat desa. Mengatu batu-batu atau memelihara tembok pekarangan adalah bagian pekerjaan warga banjar di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.



Gambar 10 Saluran air sebagai sarana kebersihan lingkungan, Saluran air ini dan kelancaran airnya menjadi bagian dari pekerjaan atau kewajiban dari anggota *banjar* untuk memeliharanya.



Gambar 11 *Teba* atau halaman belakang dengan saluran air yang dimiliki oleh masing-masing pekarangan. Saluran ini dipelihara oleh masing-masing pemilik *teba* untuk menjaga kelancaran aliran airnya.

KASUS 2

PERANAN BANJAR DI DESA MENGWI :

**SEBUAH DESKRIPSI TENTANG BANJAR TRADISI YANG DEKAT
DENGAN PUSAT KERAJAAN/PEMERINTAHAN
(KASUS BANJAR PRAGAE)**

A. IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN

1. Lokasi Geografis

Secara administratif *banjar* Pregai merupakan salah satu *banjar* yang terdapat di desa Mengwi Kecamatan Mengwi Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Tingkat I Bali.

Letak banjar Pregai agak masuk ke dalam dari jalan raya jurusan Denpasar — Bedugul dalam jarak 16 km dari kota Denpasar ke arah utara, sehingga warga *banjar* ini terhindar dari keramaian lalu lintas. Jalan yang menghubungkan *banjar* Pregai dengan kantor Camat masih merupakan jalan tanah dalam jarak 300 meter ke arah Timur dan berjarak 350 meter dari kantor Kepala Desa/Perbekel ke arah timur juga. Jalan ini dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Pada waktu musim hujan jalan ini akan menjadi agak licin dan di tengah-tengahnya terdapat genangan-genangan air hujan yang berlumpur. Sebaliknya, pada waktu musim kemarau, jalan ini akan berdebu. Selain jalan ini, terdapat pula 4 (empat) gang/*rurung* yang relatif besar di komplek pola menetap penduduk.

Sebagai bagian dari desa Mengwi, *banjar* Pregai mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. di sebelah utara banjar Munggu;
2. di sebelah timur *banjar* serangan;
3. di sebelah selatan *banjar* Lebak Pangkung; dan
4. di sebelah barat tanah sawah.

Banjar Pregai bertetangga dekat sekali dengan *banjar* Serangan yang hanya dipisahkan oleh jalan tanah tadi, sehingga pekarangan pintu masuk (*kuri*) rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan saling berhadap-hadapan. Sementara dengan banjar-banjar lainnya dibatasi oleh tanah tegalan (*teba*).

Untuk mempermudah pengaturan tugas-tugas kedinasan maupun keadatan, maka wilayah banjar dibagi menjadi empat *tempekan* yaitu:

1. *tempekan kaja kangin* (timur laut);
2. *tempekan kaja kauh* (barat laut);
3. *tempekan kelod kauh* (barat daya); dan
4. *tempekan kelod kangin* (tenggara).

Batas wilayah *tempekan* tidak jelas karena pembagian ini berdasarkan atas jumlah anggota kemudian barulah disesuaikan dengan nama mata angin.

Dari kota Denpasar sampai pusat pemerintahan *banjar* Pregai dapat ditempuh dengan kendaraan umum, kira-kira 30—45 menit perjalanan. Sedangkan dari pusat kecamatan dan pusat pemerintahan dan keramaian desa Mengwi hanya berjarak $\pm$ 350 meter saja, dan dapat dicapai dengan berjalan kaki.

2. Kondisi dan Lingkungan Alam Sekitar

Luas wilayah banjar Pregai adalah 15,54 Ha dengan bentuk datarannya landai dengan ketinggian $\pm$ 210 meter dari permukaan laut dan kemiringan rata-rata 0—10%. Suatu angka yang lebih terperinci mengenai luas wilayah *banjar* Pregai dapat dilihat dalam tabel III.1 terlampir:

Tabel III-1
Tata Guna Tanah di Banjar Pregai

No.	Tata Guna Tanah	Luas Tanah (ha)	Persentase (%)
1.	Tanah Sawah	11,39	73,29
2.	Tanah Kering	4,15	26,71
	J u m l a h	15,54	100,00

Sumber: Catatan data statistik *banjar* Pregai.

Melihat angka-angka dalam tabel tersebut, bahwa tanah sawah jauh lebih luas daripada tanah kering. Yang tergolong tanah kering di sini adalah tanah tegalan/*teba* dan tanah tempat pola menetap. Semua tanah kering ini merupakan milik desa yang sudah diwarisi secara turun-temurun oleh warga banjar yang menempati atau memilikinya sekarang, namun tidak boleh diperjual belikan. Sementara tanah sawah merupakan milik pribadi tetapi tidak seluruhnya dimiliki oleh warga *banjar* Pregai karena ada beberapa dimiliki oleh warga *banjar* lainnya.

Seperti juga daerah-daerah lainnya yang terdapat di pulau Bali, banjar Pregai juga terletak di daerah Katulistiwa yang beriklim tropis. Mengalami musim hujan berkisar pada bulan Oktober sampai April yang disertai dengan angin barat yang bertiup kencang dan musim kemarau berkisar bulan April sampai bulan Oktober yang disertai dengan angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rendah sampai sedang. Jenis pohon-pohonan yang ditanam di tanah tegalan antara lain; kelapa, pisang, bambu, pepaya dan lain-lainnya. Sementara di halaman rumah kadang-kadang ditanam tanaman hias.

Dari sekian banyak pohon-pohonan yang terdapat di banjar tersebut, hanya pohon kelapa yang paling banyak mempunyai fungsi. Daun pohon kelapa yang masih muda dimanfaatkan untuk keperluan membuat peralatan upacara dan dapat pula dianyam untuk atap rumah. Buahnya juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk keperluan upacara, dimakan, dan dijadikan minyak yang bernama minyak kelapa dengan proses pembuatan yang masih bersifat tradisional. Selain itu, pohon yang sudah tua batangnya dapat dimanfaatkan untuk bangunan rumah dan bendungan.

Binatang yang dipelihara di banjar tersebut umumnya sebagai pekerjaan sambilan, seperti: itik, ayam, dan kambing. Tujuan memelihara binatang adalah untuk dikomersialkan dan untuk keperluan upacara adat dan agama. Sementara ini belum ada yang memelihara binatang untuk dikomersialkan secara besar-besaran. Untuk merawat binatang yang dipeliharanya tanpa adanya suatu ketrampilan yang khusus, yang mana sistem pemeliharaannya masih bersifat tradisional dalam terbatas. Selain itu, ada juga yang memelihara binatang untuk kegemaran, seperti kucing, kelinci, anjing, jenis-jenis burung tertentu dan lain-lain. Kucing dipelihara untuk menangkap tikus yang sering merusak padi di lumbung/*jineng* dan merusak pakaian yang tersimpan di kamar. Kelinci dipelihara karena keindahan rupanya. Anjing dipelihara untuk menjaga rumah, karena anjing itu akan menggonggong apabila ada tamu yang datang ke rumah. Sedangkan burung dipelihara karena keindahan bulunya atau kemerduan suaranya.

3. Penduduk dan Gambaran Demografi

Selain sumber daya alam, sumber daya manusia pun tidak dapat diabaikan, sebab kedua faktor tadi dapat saling kait mengait atau saling pengaruh mempengaruhi.

Berdasarkan catatan statistik desa Mengwi, penduduk banjar Pregai berjumlah 529 jiwa yang terdiri atas 109 KK (kepala keluarga). Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin akan disajikan dalam tabel II-2.

Tabel III-2
Komposisi Penduduk Banjar Pregai Menurut
Umur dan Jenis Kelamin

No.	U m u r	Laki	Perempuan	Jumlah Total	Persentase
1	0 — 4	26	29	55	10,40
2	5 — 14	69	51	120	22,67
3	15 — 24	54	62	116	21,93
4	25 — 54	98	96	194	36,67
5	55 ke atas	20	24	44	8,32
	J u m l a h	267	262	529	100,00

Sumber: Catatan statistik desa Mengwi.

Menurut informasi yang diperoleh dari bapak *klian* dinas banjar Pregai, bahwa pertambahan penduduk di banjar ini relatif kecil. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pasangan usia subur sudah memakai alat kontrasepsi yang berupa: IUD, stril dan suntikan. Sementara ini hanya ada satu keluarga penduduk pendatang yang tinggal di wilayah banjar ini.

Di lihat dari segi agama dan kasta, penduduk *banjar* ini masih tampak homogen, karena seluruhnya memeluk agama Hindu dan hanya terdapat satu kepala keluarga dari golongan Tri Wangsa dengan gelar I Gusti Ngurah, sedangkan yang lain semuanya termasuk golongan *Jaba/Sudra*.

Di desa Mengwi telah tersedia fasilitas pendidikan yang beru-

pa sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta, dan sekolah menengah atas baik negeri maupun swasta. Dengan demikian pada dewasa ini, anak-anak yang ada di desa Mengwi umumnya dan di banjar Pregai khususnya tidak perlu lagi melanjutkan studi ke luar desanya seperti pada waktu dahulu, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari catatan statistik yang terdapat di desa Mengwi, jumlah pelajar dan mahasiswa yang masih aktif dalam studinya dapat dilihat dalam tabel III-3.

Tabel III-3
Komposisi Penduduk yang Masih Aktif
Menekuni Studinya

No.	Kategori Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Taman kanak-kanak	12	6,7
2.	SD	97	54,5
3.	SMP	32	17,9
4.	SMA	21	11,8
5.	Fakultas	11	6,1
6.	Kejuruan	5	2,8
	Jumlah	178	100,0

Sumber: Catatan statistik desa Mengwi.

Umumnya tingkat pendidikan penduduk mempunyai korelasi yang sangat erat dengan mata pencaharian hidup. Angka-angka pada Tabel III-4 menunjukkan komposisi penduduk menurut mata pencaharian hidup.

Tabel III-4
Komposisi Penduduk Menurut Mata
Pencapaian Hidup

No.	Mata Pencapaian Hidup	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Petani	29	11,3
2.	Buruh bangunan	119	46,5
3.	Tukang bangunan	81	31,6
4.	Kontraktor/pengusaha	3	1,2
5.	A B R I	4	1,6
6.	Pegawai	20	7,8
	J u m l a h	256	100,0

Sumber: Catatan Statistik desa Mengwi.

Dari data tabel tersebut terlihat bahwa mata pencapaian hidup yang paling banyak adalah sebagai buruh, sedangkan tukang bangunan menempati urutan ke dua. Sementara mata pencapaian hidup yang lainnya masih menunjukkan jumlah yang relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan penduduk secara mayoritas sebagai buruh dan tukang bangunan.

Untuk memperlancar proses komunikasi dalam pembangunan ini, penduduk banjar Pregai mempergunakan sarana transportasi dan hiburan yang berupa: sepeda, sepeda motor, bemo, truk, radio, tape, dan televisi. Tabel III-5 mencantumkan secara terperinci mengenai sarana transportasi dan hiburan yang digunakan oleh penduduk.

Tabel III-5
Sarana Transportasi dan Komunikasi yang Digunakan
Oleh Penduduk Banjar Pregai

No.	Jenis Barang	Jumlah (buah)	Persentase (%)
1.	S e p e d a	45	29,61
2.	Sepeda motor	28	18,42
3.	B e m o	1	0,66
4.	T r u k	2	1,32
5.	R a d i o	31	20,39
6.	T a p e	22	14,47
7.	Televisi	23	15,13
	J u m l a h	152	100,00

Sumber: Catatan statistik desa Mengwi

Melihat angka-angka pada tabel tersebut tentang sarana transportasi dan komunikasi yang digunakan oleh penduduk *banjar* Pregai dapat disimpulkan yaitu (a) sarana transportasi yang paling banyak digunakan adalah sepeda, (b) sarana komunikasi yang paling banyak digunakan adalah radio. Dan jika dilihat dari jumlah KK yang ada dan dibandingkan dengan jumlah peralatan yang dimiliki, maka dapat diperkirakan hampir di setiap rumah (KK) ada satu peralatan transportasi dan komunikasi tadi. Bahkan secara rata-rata dua KK menggunakan 3 (tiga) peralatan tersebut.

4. Struktur Pola Menetap dan Perumahan

Bentuk dan struktur pola perkampungan di desa Mengwi pada umumnya dan di *banjar* Pregai khususnya termasuk jenis pola perkampungan mengelompok, tetapi tidak begitu padat.

Kampung yang didiami oleh penduduk asli Bali secara turun temurun dengan pola aturan-aturan yang telah diatur sedemikian rupa berdasarkan konsepsi dalam masyarakat Hindu. Demikian pula halnya dengan penduduk *banjar* Pregai masih tetap berpedoman dengan pola pengaturan letak bangunan sesuai dengan konsep

dualistis dan pedoman *astakosali*, *hastabumi*, dan *bhamakrtih*.

Konsep dualistis adalah suatu konsepsi yang memiliki arti yang saling bertentangan yang terwujud dalam tata arah yang di simbolkan dengan arah *kaja*/utara — *kelod*/selatan, *kangin*/timur — *kauh*/barat, *luan* — *teben*, *niskala* — *sekala* dan lain-lainnya. Arah *kaja* dan *kangin* merupakan arah yang dianggap suci, sehingga di simbolkan dengan arah yang menghadap ke gunung. Sebaliknya arah *kelod* dan *kauh* merupakan arah yang selalu disimbolkan menuju ke arah laut yang dianggap kotor atau arah pembuangan. (Bagus, 1975: 280).

Hastakosali adalah isinya tentang ukuran-ukuran *metrik* dari tangan (*hasta*) dan kaki untuk berbagai jenis bangunan, baik bangunan-bangunan suci, maupun bangunan-bangunan perumahan dan sebagainya. Dan *hastabumi* isinya tentang tata letak dan denah bangunan-bangunan dan sebagainya. Sedangkan *bhamakrtih* isinya tentang upacara-upacara di dalam proses mendirikan suatu bangunan dan sebagainya.

Sesuai dengan konsepsi-konsepsi pola pengaturan letak bangunan seperti tersebut di atas, maka pekarangan warga *banjar* Pregai dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) bagian hulu yang merupakan tempat didirikan kuil keluarga atau kuil klen kecil yang disebut *sanggah* atau pemerajan yang terletak pada arah utara/*kaja* atau timur/*kangin*.
- 2) bagian madya/tengah yang merupakan halaman pekarangan serta bangunan rumah tempat tinggal yang mana dalam bahasa Balinya disebut *bale*. Sebagai bangunan-bangunan pokok dalam satu kesatuan tempat tinggal atau dalam satu pekarangan yaitu *bales adat/bale dangin* di bagian timur yang digunakan sebagai pusat-pusat kegiatan upacara. Di bagian utara/*luan* terdapat *bale meten/bale daja* yang biasanya dianggap sebagai balai suci yaitu tempat penyimpanan benda-benda pusaka. *Bale delod* yang menempati arahselatan merupakan tempat tidur biasa. Di bagian barat biasanya terdapat dapur dan lumbung padi. Kadang-kadang di bagian ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dan WC/kakus.
- 3) bagian *teben* yang menempati arah*delod*/selatan atau *kauh*/barat yang biasanya dimanfaatkan untuk tempat pembuang-

an sampah, kandang kambing, kandang babi dan lain-lainnya.

Macam-macam rumah yang terdapat di banjar Pregai antara lain rumah adat Bali, rumah moderen dengan gaya rumah adat Bali, dan rumah moderen.

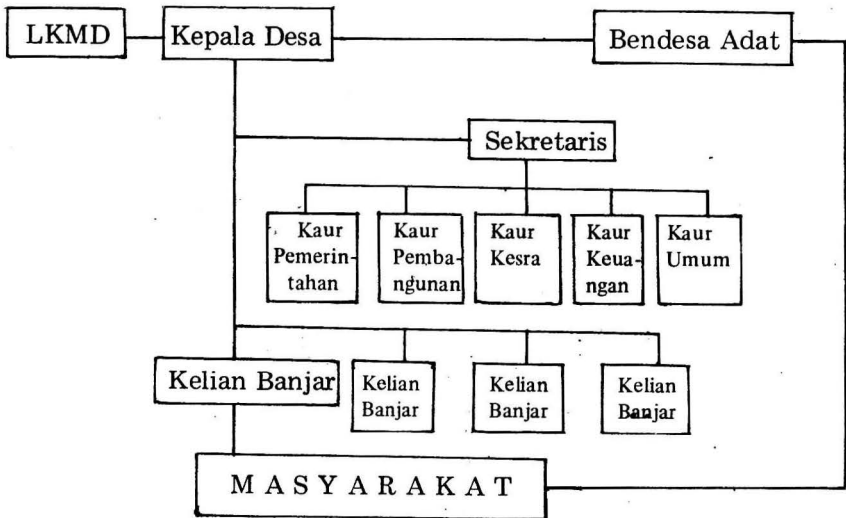
Batas antara satu pekarangan tempat tinggal satu dengan yang lain umumnya berupa batas buatan yaitu tembok *popolan*, tembok batu, tembok batako atau pagar hidup. Setiap pekarangan rumah biasanya memiliki pintu masuk dalam bentuk yang tradisional yang bernama *kuri* atau angkul-angkul yaitu gapura-gapura kecil.

5. Struktur Administrasi Desa — Banjar

Pada hakikatnya pemerintahan desa dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pemerintahan desa dinas yang dikepalai oleh kepala desa/*perbekel* dan pemerintahan desa adat yang dikepalai oleh *bendesa adat*.

Kepala desa Mengwi di dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris/juru tulis dan dua orang pembawa surat/*lover*, dan juga didampingi oleh LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang ketua umumnya kepala desa. LKMD ini bertugas untuk merencanakan dan sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di desa. Sementara dana di kantor kepala desa masih kurang, maka dua orang pembawa surat tadi juga merangkap sebagai kepala urusan untuk membantu sekretaris dalam bidang tugasnya. Selain itu pembantu kepala desa pada masing-masing banjar adalah *kelian banjar*. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas perhatikan bagan di bawah ini.

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Mengwi



Keterangan:

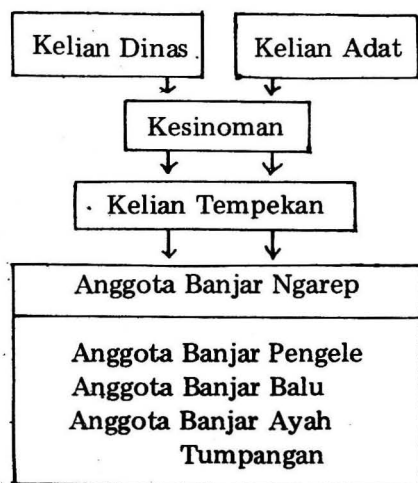
- = garis kerjasama
- = garis komando
- Kaur = Kepala Urusan
- Kesra = Kesejahteraan masyarakat

Sekretaris, selain tugasnya dalam bidang surat menyurat, juga bertugas menjalankan tugas dan wewenang kepala desa jika kepala desa berhalangan hadir.

Berdasarkan status pemerintahan *banjar*, maka pimpinan banjar Pregai dapat dibedakan yaitu pimpinan banjar dinas (*kelian dinas*) dan pimpinan *banjar* adat (*kelian adat*). Secara fungsional *kelian dinas* terkait dengan kepala desa dan *kelian adat* terkait dengan *bendesa adat*. Sementara pada masing-masing *tempekan* terdapat seorang *kelian tempekan* yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan anggotanya dalam suatu kegiatan adat maupun agama dan juga membantu *kelian dinas* dan *kelian adat*. Di

banjar ini terdapat empat orang kelian *tempekan* (1. *kelian tempekan kaja kangin/timur laut*; 2. *kelian tempekan kaja kauh/barat laut*; 3. *kelian tempekan kelod kauh/barat daya*; dan 4. *kelian tempekan kelod kangin/tenggara*) dan dua orang *kesinoman*/juru arah. *Kesinoman* ini berganti setiap 35 hari (satu bulan Bali) yang bertugas untuk menyampaikan pengumuman kepada anggota *banjar ngarep*, anggota banjar *pengele*, anggota banjar *balu*, dan anggota banjar *ayah tumpangan*. Untuk lebih jelasnya lihat bagan di bawah ini.

Bagan
Struktur Kepemimpinan Banjar Pregai



Keterangan:

- : komunikasi kedinasan
- : komunikasi keadatan

Dengan bagan tersebut bahwa hanya anggota *banjar ngarep* mempunyai hubungan yang bersifat kedinasan dan keadatan. Sedangkan anggota banjar *pengele*, anggota banjar *balu*, dan anggota banjar *ayah tumpangan* hanya mempunyai hubungan yang bersifat keadatan, tetapi di tingkat desa tidak mempunyai hubungan.

Jadi untuk di tingkat desa selain anggota banjar *ngarep* bebas dari tugas-tugas kedinasan dan keadatan.

6. Sistem Ekonomi yang Berkembang

Dari perspektif historis, kira-kira sudah dari dua generasi yang silam penduduk banjar Pregai relatif banyak yang bekerja sebagai buruh dan tukang bangunan. Bahkan sekarang ada beberapa yang menjadi kontraktor bangunan. Mereka tidak hanya mencari kerja di wilayah kabupaten Badung saja, namun menyebar di wilayah pulau Bali. Padapagi harinya, baik buruh maupun tukang bangunan biasanya berkumpul di pinggir jalan, kemudian berangkat ke tempat kerja dengan menggunakan alat transportasi mobil atau berangkat sendiri-sendiri jika tempat kerjanya dekat dari rumahnya. Bahkan mereka sering tidak akan pulang dalam beberapa hari dan langsung bermalam di tempat kerja dengan tujuan untuk menghemat biaya transportasi dan sekaligus efisien dalam penggunaan waktu.

Apabila kontraktor akan menggarap suatu bangunan, maka ia berusaha dulu mendari buruh dan tukang yang ada di lingkungan banjarnya sendiri, jika masih kekurangan barulah mencari di luar lingkungan banjarnya.

Seorang buruh akan naik statusnya yaitu sebagai tukang apabila pengetahuan dan ketrampilannya di bidang bangunan selaras dengan tukang, sehingga gaji seorang buruh relatif kecil daripada tukang. Dalam keadaan tertentu, misalnya sakit atau mengadakan upacara adat dan lain-lain yang relatif banyak memerlukan uang, sering terjadi saling pinjam meminjam uang di kalangan buruh dan tukang. Bahkan mereka kadang-kadang dapat juga minjam uang pada kontraktor tanpa bunga dan pengembaliannya dengan cara memotong gajinya.

Seperti telah disebutkan di depan bahwa tidak semua petani yang terdapat di banjar Pregai memiliki tanah sendiri, namun ada di antaranya yang menjadi penggarap, yakni mengerjakan sawah orang lain. Sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Mengwi pada umumnya dan di banjar Pregai khususnya untuk tanah sawah adalah pembagian $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ antara penggarap dan pemilik tanah yang disebut *nandu* pada. Namun biaya bibit dan pupuk ditanggung

bersama.

Dalam rangka usaha tani di banjar Pregai, tenaga kerja berasal dari keluarga petani itu sendiri dan buruh tani yang berasal dari luar banjarnya. Tolong-menolong dalam hal ini sudah semakin pudar, karena didominasi oleh tenaga upahan (ngupahang)

Selanjutnya dalam pengumpulan data yang dipakai untuk analisis dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara berstruktur terhadap 20 responden yang berstatus sebagai anggota *banjar* Pregai. Untuk lebih jelasnya tentang responden digolongkan menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel III-6.

Tabel III-6
Responden Digolongkan Menurut Jenis Pekerjaan
N = 20

No.	Jenis Pekerjaan	Absolut (orang)	Persentase (%)
1.	Petani	2	10,0
2.	Buruh bangunan	9	45,0
3.	Tukang bangunan	6	30,0
4.	A B R I	0	0,0
5.	Pegawai	2	10,0
6.	Kontraktor	1	5,0
	J u m l a h	20	100,0

Angka pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan berjumlah 9 orang atau 45,0 persen, 6 orang atau 30,0 persen sebagai tukang bangunan, 2 orang atau 10,0 persen sebagai petani, 2 orang atau 10,0 persen sebagai pegawai, dan 1 orang atau 5,0 persen sebagai kontraktor.

7. Beberapa Kegiatan Lain dalam Banjar dan Desa

Secara struktur organisasi pemuda-pemudi banjar Pregai merupakan bagian dari banjarnya yang bergerak sebagai tunas muda

untuk ikut membantu meningkatkan rasa persatuan yang berdasarkan perdamaian abadi antara sesamanya dan masyarakat umum, guna dapat menciptakan ketenangan/keamanan dalam rumah tangga, yang akan berakibat peningkatan daya pikir yang dinamis dan daya kerja yang maksimal untuk kesejahteraan keluarga.

Untuk menyeragamkan nama organisasi pemuda-pemudi yang ada di Bali, *kelian* banjar Pregai baru-baru ini menerima instruksi dari kepala desa supaya nama organisasi pemuda-pemudi yang ada di banjarnya diganti dengan nama *seka teruna teruni*.

Eksistensi daripada suatu organisasi umumnya memerlukan suatu biaya atau dana. Untuk memperoleh dana, *seka teruna-teruni* banjar Pregai mengadakan suatu kegiatan bazar/amal yang biasanya diselenggarakan pada hari gaya Galungan dan Kuningan. Teknis daripada pelaksanaan amal ini sesuai dengan hasil keputusan rapat yang diadakan secara rutin di balai banjar pada hari Penampahan Galungan (sehari sebelum hari raya Galungan).

Pada umumnya berbelanja di bazar jauh lebih mahal daripada berbelanja di warung atau di pasar. Dengan demikian sedikit yang berminat untuk berbelanja di sana. Maka untuk memeriahkan akan mengundang beberapa orang yang sudah dianggap mampu dalam rumah tangganya baik yang menjadi warga banjar maupun yang tidak warga banjarnya untuk berbelanja di bazar. Keseluruhan daripada hasil ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan *seka teruna-teruni*, yang bergerak di bidang olah raga, pendidikan, dan gotong royong.

Banjar pun kadang-kadang menggali dana dengan mengadakan bazar pada waktu-waktu tertentu, misalnya membangun atau memperbaiki balai banjar. Tetapi di dalam pelaksanaannya dibantu sepenuhnya oleh *seka teruna-teruni*.

Selain *seka teruna-teruni*, di banjar juga telah terbentuk organisasi PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) yang anggotanya ibu-ibu dari masing-masing KK (kepala keluarga). Seandainya ada yang sudah tua dan sudah tidak mampu lagi boleh diwakili oleh anak-anaknya. Organisasi ini hanya mengadakan kegiatan arisan sebulan sekali di balai banjar.

Di tingkat desa juga ada organisasi PKK yang juga mengadakan kegiatan arisan sebulan sekali yaitu tepatnya tiap-tiap tanggal 5 pukul 15.00 di kantor kepala desa.

Sementara untuk membentuk kader-kader KB (Keluarga Berencana) dan gizi pada masing-masing banjar yang ada di lingkungan desa Mengwi, banjar Pregai mendapat jatah sebanyak : dua orang perempuan. Kedua orang ini mendapat pendidikan yang menyangkut KB dan gizi keluarga. Setiap bulan sekali mereka bertugas untuk membantu petugas penimbangan anak dari kecamatan yang diselenggarakan di banjarnya.

Seperti juga desa-desa lainnya di Bali, maka desa Mengwi juga mengadakan Pordes (Pekan Olah Raga Desa) setahun sekali. Pada Pordes ini berhadapan atlit-atlit dan pemain-pemain dari masing-masing banjar yang ada di lingkungan desa Mengwi. Selanjutnya bagi yang mendapat juara akan sebagai wakil desa dalam Pekan Olah Raga Kecamatan (Porcam)

B. PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT TRADISIO- NAL DESA MENGWI

1. Kedudukan Banjar dan Fungsi Banjar Bagi Desa

Daerah Bali yang disentuh oleh pengaruh dari kebudayaan Jawa Hindu secara tidak merata menimbulkan adanya dua bentuk masyarakat Bali Aga dan Bali Hindu. Masyarakat Bali Aga yang kurang sekali mendapat pengaruh kebudayaan Jawa Hindu dan Majapahit mempunyai setruktur desa tersendiri di mana desa adat merupakan komuniti yang pokok. Walaupun ada pula organisasi-organisasi banjar, tetapi fungsinya terbatas. Tipe seperti ini terdapat pada desa adat di pegunungan, seperti: Desa Tenganan Pegringsingan di kabupaten Karangasem; Desa Sembiran, Sidatapa, dan Cempaga di kabupaten Buleleng. Sebaliknya di Bali dataran, di mana pengaruh Jawa Hindu itu kuat dan disertai pula dengan pengaruh Jawa Hindu itu kuat dan disertai pula dengan pengaruh administrasi pemerintah dan kekuasaan raja-raja, maka desa yang pada umumnya mempunyai wilayah yang lebih luas itu terbagi-bagi ke dalam kesatuan wilayah yang lebih kecil berupa banjar-banjar (Bagus, 1971: 284).

Desa dinas Mengwi yang secara administratif termasuk bagian dari kecamatan Mengwi, kabupaten Badung terdiri atas empat desa adat yaitu:

1. desa adat Gulingan;
2. desa adat Mengwi;
3. desa adat Den Kayu; dan
4. desa adat Banjar Sayan.

Desa dinas Mengwi terdiri atas 28 banjar dinas antara lain:

1. banjar Delod Balai Agung;
2. banjar Pengiasan;
3. banjar Lebah Pangkung;
4. banjar Alengkajeng;
5. banjar Pregai;
6. banjar Serangan;
7. banjar Pande;
8. banjar Munggu;
9. banjar Pandean;
10. banjar Gamblang;
11. banjar Batu;
12. banjar Den Kayu delodan;
13. banjar Den Kayu baleran;
14. banjar Sayan Delodan;
15. banjar Sayan Baleran;
16. banjar Binong;
17. banjar Batu Lumbung;
18. banjar Sedahan;
19. banjar Munggu Gulingan;
20. banjar Angkeb Cangkring;
21. banjar Badung;
22. banjar Lebah;
23. banjar Tengah Kelod;
24. banjar Tengah Kaler;
25. banjar Babakan Kawan;
26. banjar Babakan Kangin;
27. banjar Ulunuma Badung; dan
28. banjar Ulunuma Wedang.

Sebagai desa adat Mengwi terdiri atas 13 banjar adat antara lain:

1. banjar Delod Balai Agung;

2. banjar Pengiasan;
3. banjar Lebah Pangkung;
4. banjar Alengkajeng;
5. banjar Pregai;
6. banjar Serangan;
7. banjar Pande;
8. banjar Munggu;
9. banjar Padean;
10. banjar Batu;
11. banjar Gamblang;
12. banjar Ganter; dan
13. banjar Bajra.

Banjar Pregai merupakan salah satu dari 28 banjar dinas yang terdapat di desa dinas Mengwi atau salah satu banjar dari 13 banjar adat yang terdapat di desa adat mengwi yang terletak dekat dengan Pusat kerajaan Mengwi yang pernah jaya pada zaman dahulu.

Berdasarkan status keanggotaan banjar Pregai dapat dibedakan anggota banjar *ngarep*, anggota banjar *pengele*, anggota banjar *balu*, dan anggota banjar *tumpang*, yang masing-masing berjumlah 48 KK (kepala keluarga), 58 KK, 2 KK, dan 1 KK. Sehingga secara keseluruhannya berjumlah 109 KK.

Seseorang mulai terdaftar sebagai anggota banjar apabila telah kawin secara sah, sehingga dari 20 responden yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian di banjar ini ada yang relatif baru menjadi anggota banjar dan ada yang relatif lama, secara terperinci dapat dilihat pada tabel III-7.

Tabel III-7
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Lamanya
Menjadi Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	1 — 5	6	30,0
2	6 — 10	2	10,0
3	11 — 15	5	25,0
4	16 — 20	1	5,0
5	21 — 25	4	20,0
6	26 — 30	1	5,0
7	31 — 35	1	5,0
	J u m l a h	20	100,0

Angka-angka pada tabel tersebut menunjukkan proporsi jawaban yang bervariasi yaitu dari 20 responden 6 orang atau 30,0 persen mengatakan sudah lama menjadi anggota banjar 1—5 tahun, 2 orang atau 10,0 persen mengatakan sudah lama menjadi anggota banjar 6—10 tahun, 5 orang atau 25,0 persen mengatakan lama menjadi anggota banjar 11—15 tahun, 1 orang atau 5,0 persen mengatakan lama menjadi anggota banjar 16—20 tahun, 4 orang atau 20,0 persen mengatakan lama menjadi anggota banjar 21—25 tahun, dan yang mengatakan lama menjadi anggota banjar 26—30 tahun dan 31—35 tahun masing-masing 1 orang atau 5,0 persen.

Sesuai dengan statusnya, maka masing-masing anggota banjar mempunyai tugas-tugas yang telah diatur dalam awig-awig banjar yang direalisasi dan dikoordinasikan oleh *kelian dinas* dan *kelian adat*. Mengenai keikutsertaan responden dalam melaksanakan tugas-tugas banjar selama menjadi anggota banjar dapat dilihat dalam tabel III-8

Tabel III-8.

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Keikutsertaannya dalam Melaksanakan Tugas-tugas Banjar**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	20	100,0
2	Tidak	—	—
3	Tidak menjawab	—	—
	Jumlah	20	100,0

Angka pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua responden melaksanakan tugas-tugas banjar selama menjadi anggota banjar. Untuk melaksanakan tugas-tugas banjar tidak selalu orang yang tercatat sebagai anggota banjar yang terlihat, namun boleh diwakili oleh saudara atau anak-anaknya yang telah berumur 17 tahun ke atas.

Balai banjar yang menjadi pusat untuk mengadakan pertemuan, rapat (*sangkepan*) dan mengolah daging untuk makanan upacara (*mebat*) pada waktu-waktu tertentu, dibangun pada tahun 1970 dan sebelumnya masih merupakan bangunan yang bersifat tradisional. Biaya untuk membangun *bale banjar* tersebut diperoleh dengan beberapa cara, seperti memborong SD Inpres, mengadakan amal dan memungut iuran. Namun biaya yang paling utama bersumber dari ongkos memborong SD Inpres tersebut yang melibatkan seluruh anggota banjar yaitu anggota banjar *ngarep*, anggota banjar *pengele*, anggota banjar *balu*, dan anggota banjar *ayah tumpangan*. Karena anggota banjar relatif banyak jumlahnya, maka *kelian* banjar mengatur pembagian tugas sedemikian rupa, sehingga jumlah buruh dan tukang yang bekerja setiap harinya seimbang dan sesuai dengan pekerjaan yang digarap pada hari itu.

Dalam penggalian dana dengan cara mengadakan bazar atau amal, tidak saja melibatkan anggota banjar, tetapi juga minta bantuan tenaga pada *seka teruna-teruni*, yang terdiri dari para muda-mudi di banjar tersebut.

Dari sekian banyak jumlah anggota banjar yang ada sekarang

tidak semuanya ikut terlibat ketika mencari dana untuk pembangunan balai banjar yang lalu, oleh karena pada waktu itu mereka belum terdaftar sebagai anggota banjar. Mengenai keikutsertaan responden ketika mencari dana untuk pembangunan *bale banjar* yang lalu secara terperinci tertera pada tabel III-9.

Tabel III-9

Responden Digolongkan Menurut Pelaksanaan Tugas Banjar
Ketika Mencari Dana Untuk Pembangunan Balai Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ikut melaksanakan	9	45,0
2	Tidak melaksanakan	11	55,0
3	Melaksanakan kalau sempat	—	—
	J u m l a h	20	100,0

Pada tabel tersebut terlihat bahwa, dari 20 responden 9 orang atau 45,0 persen mengatakan ikut melaksanakan tugas banjar ketika mencari dana untuk pembangunan *bale banjar* yang lalu, dan 11 oran atau 55,0 persen mengatakan tidak ikut.

Pada waktu para petani masih menanam bibit padi lokal seperti padi *jo gading*, padi *cicih* dan sejenisnya, banjar ini sering memotong padi yang hasilnya kadang-kadang untuk khas banjar, namun lebih sering dibagikan secara merata oleh anggotanya. Kegiatan ini sudah berakhir semenjak para petani menanam bibit padi unggul seperti; pagi C4, IR 36 dan sejenisnya. Sejak itu juga para petani banyak yang beralih menjadi tukang atau buruh bangunan, sehingga saat ini tidak ada kegiatan bersama di banjar yang dapat mendatangkan hasil (income) buat para anggotanya.

Tabel III-10

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Kegiatan
Yang Dilakukan Bersama di Banjar yang
Dapat Mendatangkan Hasil Bagi Para Anggotanya**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ada	—	0
2	Tidak	20	100,0
3	Tidak tahu	—	0
4	Tidak menjawab	—	
Jumlah		20	100,0

Maka jelaslah bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan bersama di banjar yang dapat mendatangkan hasil (income) buat anggotanya seperti pada waktu yang lampau. Hal ini terbukti dari hasil wawancara berstruktur terhadap 20 responden seluruhnya menjawab tidak ada.

Seperti telah diuraikan di depan bahwa secara mayoritas warga banjar Pregai mempunyai mata pencaharian sebagai buruh dan tukang bangunan dan bahkan ada beberapa orang yang menjadi kontraktor/pengusaha. Dalam hal ini tampak rasa kekeluargaan antara warga banjar cukup tebal. Hal ini terbukti, apabila kontraktor/pengusaha memerlukan buruh dan tukang, atau tukang memerlukan buruh, untuk menggarap bangunan, biasanya mereka mencari tukang atau buruh yang ada di banjarnya dan seandainya masih kekurangan barulah mencari di luar banjarnya. Apabila buruh atau tukang dalam keadaan tidak bekerja, biasanya ia minta bantuan pada kontraktor/pengusaha untuk memperoleh pekerjaan. Tabel III-10 di bawah menunjukkan bahwa dari 20 responden yang diwawancarai 17 orang atau 85,0 persen mengatakan tidak minta bantuan banjar untuk memperoleh pekerjaan kalau kesulitan pekerjaan atau sedang tidak bekerja, 2 orang atau 10,0 persen menjawab tidak tahu, dan 1 orang atau 5,0 persen tidak menjawab.

Tabel III-11
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Cara Minta Bantuan Untuk Memperoleh
Pekerjaan Lewat Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	—	0
2	Tidak	17	85,0
3	Tidak tahu	2	10,0
4	Tidak menjawab	1	5,0
	J u m l a h	20	100,0

Walaupun balai banjar sudah permanen, tetapi lama kelamaan masih ada juga yang perlu diperbaiki atau diperbaharui, misalnya cat pintu, cat jendela, atau cat temboknya yang kotor dan yang kotor dan yang lainnya, sehingga memerlukan biaya untuk memperbaiki. Selain itu banjar juga mengeluarkan uang untuk:

1. odalan di pura banjar setiap enam bulan sekali;
2. membayar rekening listrik tiap-tiap bulan;
3. disumbangkan kepada anggota banjar yang mempunyai kema-
langan/kematian;
4. iuran di desa baik desa dinas maupun desa adat pada waktu-
waktu tertentu;
5. membeli perlengkapan banjar;
6. dan lain-lainnya.

Untuk itu semenjak banjar tidak pernah mengadakan kegiatan untuk mencari dana, yang sudah berlangsung lebih kurang lima tahun terakhir ini, maka setiap sebulan sekali tiap-tiap kepala keluarga harus membayar iuran sebesar Rp. 500,00 (lima ratus ru-
piah) yang dikoordinasikan oleh *kelian* dinas dan *kelian* adat. Se-
mentara itu uang yang telah terkumpul yang dimiliki oleh banjar
belum dimanfaatkan, dapat dipinjam oleh anggotanya. Sehubung-
an dengan peminjaman uang banjar telah diwawancarai 20 respon-
den secara berstruktur yang jawabannya secara terperinci tertera
pada tabel III-12 terlampir.

Tabel III-12

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Peminjaman
Uang Yang Dimiliki oleh Banjar Kalau Kesulitan Keuangan

No.	Kategori Jawa		
No.	Kategori Jawaban	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Dapat minta/dibantu	4	20,0
2	Dapat meminjam	14	70,0
3	Tidak dapat dipinjam	—	0
4	Tidak pernah meminjam	2	10,0
	J u m l a h	20	100,0

Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 20 responden 4 orang atau 20,0 persen mengatakan dapat minta/dibantu oleh banjar kalau kesulitan keuangan atau memerlukan sejumlah uang untuk keperluan yang mendadak, 14 orang atau 70,0 persen mengatakan dapat meminjam, dan 2 orang atau 10,0 persen tidak pernah meminjam, sehingga mereka tidak tahu apakah betul dapat dibantu atau meminjam uang kepada banjar kalau memerlukan sejumlah uang untuk keperluan yang mendadak atau dalam kesulitan keuangan.

Seperti dijelaskan tadi di depan bahwa tidak ada anggota banjar yang mengatakan minta bantuan banjar untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini juga diperkuat oleh informasi yang diperoleh dari bapak *kelian* dinas maupun *kelian adat* bahwa *belum pernah ada warga banjar yang datang* kepadanya apabila kesulitan pekerjaan atau sedang tidak bekerja. Karena umumnya mereka berusaha sendiri untuk mencari pekerjaan sesuai dengan minat, keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Dan mereka yakin bahwa apabila mau bekerja tanpa memandang atau membedakan pekerjaan itu kasar ataupun halus niscaya akan memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan karena warga banjar yang berstatus sebagai kontraktor/pengusaha tukang dan buruh menyebar mencari pekerjaan di seluruh Bali. Tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai cara yang lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang dirasakannya.

Tabel III-13
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Cara Yang
Lebih Mudah Mencari Pekerjaan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Lebih mudah lewat banjar	3	15,0
2	Lebih mudah usaha sendiri	16	80,0
3	Kedua-duanya	1	5,0
4	Tidak tahu	—	0
Jumlah		20	100,0

Dengan melihat tabel III-13 terlampir maka diketahui bahwa sebagian responden mengatakan lebih mudah usaha sendiri untuk mencari kerja yaitu sebanyak 16 orang atau 80,0 persen dari 20 orang responden, 3 orang atau 15,0 persen mengatakan lebih mudah lewat banjar, dan 1 orang atau 5,0 persen orang mengatakan kedua-duanya.

Banjar di Bali pada hakekatnya juga merupakan kesatuan ekonomi, karena masih ada yang melakukan kegiatan bersama yang dapat mendatangkan hasil (income) buat anggotanya. Namun banjar ini sudah lama tidak melakukan kegiatan tersebut, sehingga sebagian besar merasakan lebih mudah usaha sendiri untuk mencari kerja. Dalam hal ini mereka menjalin kerja sama dengan teman seprofesinya, karena secara formalitas banjar tidak mengharuskan anggotanya kerja di tempat yang ditentukan oleh banjar atau pimpinan banjar, hanya dibantu dalam urusan administrasinya saja. Sehubungan dengan ini tabel III-14 di bawah mencantumkan mengenai keringanan dalam bidang ekonomi dalam kehidupan setelah menjadi anggota banjar.

Tabel III-14

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pendapatnya
tentang adanya Keringanan Yang Dirasakan dalam Bidang
Ekonomi Setelah Menjadi Anggota Banjar**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ada	7	35,0
2	Tidak	12	60,0
3	Tidak tahu	1	5,0
4	Tidak menjawab	—	0
J u m l a h		20	100,0

Beberapa angka yang muncul dari tabel tersebut yang merupakan ungkapan responden yang mengatakan ada merasakan keringanan yang diperoleh dalam bidang ekonomi dalam kehidupan setelah menjadi anggota banjar yaitu sebanyak 7 orang atau 35,0 persen, 12 orang atau 60,0 persen orang mengatakan tidak merasakan, dan 1 orang atau 5,0 mengatakan tidak tahu. Mengenai keringanan yang dirasakan, sebagaimana terlukis dalam tabel III-5 terlampir.

Tabel III-15

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Jenis
Keringanan Yang Diperoleh Dalam Bidang Ekonomi Setelah
Menjadi Anggota Banjar**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Dapat meminjam uang banjar dengan bunga yang rendah	7	35,0
2	Tidak mendapatkan fasilitas	7	
		13	65,0
J u m l a h		20	100,0

Pada tabel tersebut terlihat bahwa, dari 20 responden, 7 orang atau 35,0 persen mengatakan merasa mendapat keringanan karena dapat meminjam uang dengan bunga yang rendah yaitu sebesar 3%, apabila meminjam lebih dari Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) harus menyerahkan barang seharga jumlah uang yang dipinjam. Seandainya si peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya pada waktunya yang sudah ditentukan oleh banjar, maka barang ini akan dijual. Apabila barang tersebut terjual dengan harga yang melebihi uang yang dipinjamnya, maka si peminjam akan menerima uang kelebihannya itu. Sedangkan 13 orang atau 65,0 persen mengatakan tidak merasa mendapat keringanan, karena merasa tidak mendapat fasilitas.

2. Sistem Aturan dan Perlengkapan Banjar

Banjar sebagai suatu organisasi tradisional pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan keamanan, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan keagamaan, dan kesatuan kebudayaan. Untuk menjaga dan memelihara keutuhan kesatuan tersebut, maka pada masing-masing banjar umumnya memiliki sistem aturan yang disebut *awig-awig banjar*, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.

Berkaitan dengan hal ini, di banjar Pregai sudah dimiliki *awig-awig* yang tertulis yang disusun oleh panitia perencanaan *awig-awig* dan didampingi oleh tim pembina yang anggotanya dari para sesepuh/tokoh-tokoh warga banjarnya. pembentukan panitia dan tim pembina ini berdasarkan atas hasil keputusan rapat.

Awig-awig yang terdapat di banjar ini disusun dengan berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang terdiri atas 8 *sarga* (bab) yang terbagi atas 44 *pawos* (pasal), merupakan patokan mengenai apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat, sehingga *awig-awig* itu membatasi sikap, tingkah laku dan perbuatan warganya. Dalam *awig-awig* tersebut juga disertai dengan sanksi-sanksi atau denda terhadap perbuatan tertentu, yang merupakan penguatnya yang dijatuhkan bagi pelanggarnya.

Ditinjau dari sudut geografis, banjar Pregai terletak relatif jauh dari kota. Dengan demikian, apabila ada warga banjar yang melanjutkan studi, menjenguk keluarga yang tinggal di kota, men-

cari pekerjaan dan lain-lain dalam waktu yang relatif lama biasanya melaporkan diri kepada pimpinan banjar. Apabila warga banjar yang berstatus sebagai kontraktor/pengusaha, tukang dan buruh mencari pekerjaan di luar kota bahkan menyebar di seluruh Bali, sehingga mereka sering tidak pulang dalam beberapa waktu dan menginap di tempat kerjanya. Berkaitan dengan hal ini diadakan wawancara berstruktur terhadap 20 responden, yang secara terperinci tertera pada tabel III-16.

Tabel III-16

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Permintaan Ijin Kepada Petugas Banjar Apabila Bepergian**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Minta ijin	12	60,0
2	Tidak minta ijin	2	10,0
3	Kadang-kadang	6	30,0
4	Tidak perlu	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Pada tabel tersebut terlihat bahwa, dari 20 responden 12 orang atau 60,0 persen mengatakan minta ijin dahulu kepada petugas/pimpinan banjar kalau akan bepergian keluar kota/lingkungan, 2 orang atau 10,0 persen mengatakan tidak minta ijin, dan 6 orang atau 30,0 persen mengatakan kadang-kadang minta ijin. Mengenai ijin yang diberikan oleh pimpinan banjar dapat dilihat pada tabel III-17 terlampir.

Tabel III-17
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Ijin Yang Diberikan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase %
1	Bebas dari semua kewajiban	—	0
2	Bebas dari kewajiban tertentu	18	90,0
3	Tidak mendapat hak apa-apa selama pergi	—	0
4	Masih mendapat sebagian hak	—	0
5	Bebas dari tanggung jawab banjar	—	0
6	Tidak menjawab	2	10,0
J u m l a h		20	100,0

Dengan melihat data dalam tabel tersebut bahwa ijin yang diberikan oleh pimpinan banjar yaitu bebas dari kewajiban tertentu yaitu tidak diabsen dan didenda dalam kegiatan gotong royong. Dan seandainya ada suatu persoalan yang tidak bisa diselesaikan pada waktu mereka pergi tetap mendapat tanggung jawab banjar. Dalam hal ini *kelian* banjar harus ikut terlibat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan yang lainnya yaitu yang tidak minta ijin tersebut tidak menjawab, karena mereka belum pernah ke luar kota lebih daripada satu hari, namun hanya beberapa jam saja.

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungan banjar, maka setiap warga banjar yang kedatangan tamu dari tempat lain dan menginap dalam jangka waktu lebih daripada 24 jam harus melapor kepada *kelian* banjar.

Dalam *awig-awig* banjar juga tertulis, yang disebut tamu adalah:

1. warga Hindu ataupun selain Hindu yang berasal dari luar banjar yang tinggal di lingkungan banjar Pregai.
2. orang yang beragama Hindu ataupun bukan Hindu yang menda-

tang salah seorang warga banjar Pregai.

Tabel III-18 terlampir akan mencatumkan mengenai pelaporan penerimaan tamu yang berasal dari tempat lain dan menginap.

Tabel III-18
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pelaporan
Dalam Penerimaan Tamu dari Tempat Lain
M e n g i n a p

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Melapor	20	100,0
2	Tidak melapor	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Dengan membaca tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa semua responden taat kepada *awig-awig* banjar yang menyangkut tentang penerimaan tamu. Hal ini terbukti dari 20 responden semuanya mengatakan melapor kalau kedatangan tamu dari tempat lain dan menginap.

Dalam satu pekarangan rumah tinggal dijumpai adanya anggota banjar, tetapi tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan ini ditentukan oleh kedudukannya sebagai anggota banjar. Dalam hal ini hanya sebagai anggota banjar *ngarep* mempunyai kewajiban di desa. Sedangkan anggota banjar lainnya seperti anggota banjar *pengele*, anggota banjar *balu*, dan anggota banjar *ayah tumpangan* bebas dari kewajiban di desa.

Tabel III-19
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Kedudukannya Sebagai Anggota Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	11	55,0
2	Tidak	2	10,0
3	Tidak tahu	6	30,0
4	Tidak menjawab	1	5,0
J u m l a h		20	100,0

Tabel III-19 menunjukkan bahwa dari 20 responden 11 orang atau 55,0 persen mengatakan langsung sebagai anggota desa adalah berstatus sebagai anggota banjar *ngarep*. Yang lainnya berstatus sebagai anggota banjar *pengele* yang memberikan jawaban bervariasi yaitu 2 orang atau 10,0 persen mengatakan tidak langsung sebagai anggota desa, 6 orang atau 30,0 persen mengatakan tidak tahu, dan 1 orang atau 5,0 persen tidak menjawab. Memang dalam hal ini yang bukan anggota banjar *ngarep* tidak langsung menjadi anggota desa, baik anggota desa dinas maupun anggota desa adat. Namun sebagai anggota banjar *ngarep* mempunyai kedudukan ganda di desa yaitu sebagai anggota desa dinas dan anggota desa adat, sehingga yang bukan anggota banjar *ngarep* tidak menjawab, seperti terlukis pada tabel di bawah ini.

Tabel III-20
Responden Banjar Pregai Digolongkan
Menurut Jenis Keanggotaannya di Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Anggota desa dinas dan anggota desa adat	11	55,0
2	tidak tahun	—	0
3	Tiadk menjawab	9	45,0
J u m l a h		20	100,0

Sebagai anggota desa dinas mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dikoordinasikan oleh kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, ketertiban, dan menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat. Pada tabel III-20 terlampir menunjukkan kewajiban-kewajiban anggota banjar ngarep sebagai anggota desa dinas, yaitu 8 orang atau 40,0 persen mengatakan gotong royong di kantor kepala desa dan sekitarnya, 2 orang atau 10,0 persen mengatakan gotong royong dan rapat di kantor kepala desa, 1 orang atau 5,0 persen mengatakan mentaati peraturan-peraturan desa dinas, sedangkan 9 orang atau 45,0 persen mengatakan bebas dari kewajiban karena berstatus sebagai anggota banjar *pengele*.

Tabel III-21

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Kewajibannya
Sebagai Anggota Desa Dinas

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Gotong royong di kantor kepala desa dan sekitarnya	8	40,0
2	Gotong royong dan rapat di kantor kepala desa	2	
3	Mentaati peraturan desa dinas	1	5,0
4	Bebas dari kewajiban	9	45,0
	J u m l a h	20	100,0

Anggota banjar ngarep yang sekaligus sebagai anggota desa dinas maupun anggota desa adat mempunyai kewajiban ganda, yaitu selain kewajibannya di desa dinas juga mempunyai kewajiban di desa adat. Sebagai anggota desa adat mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dikoordinasikan oleh *bendesa* adat yang memegang pucuk kepemimpinan yang sejajar dengan kepala desa. *Bendesa* adat bertugas melaksanakan suka duka, kehidupan bergotong royong dan keagamaan. Yang menyangkut dalam suka duka yaitu

kematia, ngaben, perkawinan dan lain-lain. Sedangkan yang menyangkut keagamaan yaitu odalan di pura-pura, seperti pura desa, pura puseh, pura dalem, dan pura yang lainnya yang menjadi milik desa. Selain itu *bendesa* adat juga mempunyai tugas untuk menjaga keamanan di pura desa, karena di sini banyak tersimpan arca-arca atau *pretima-pretima* yang terbuat dari emas. Untuk itu dalam rapat diadakan pembagian tugas, agar setiap malam harus ada yang *mekemit* (meronda) di pura desa sebanyak 13 orang anggota banjar *ngarep*. Karena jumlah anggota banjar *ngarep* di lingkungan desa adat Mengwi relatif banyak maka untuk *mekemit* (meronda) di pura desa dilakukan secara bergiliran. Tabel III-22 menunjukkan mengenai kewajiban sebagai anggota desa adat yaitu 6 orang atau 30,0 persen mengatakan gotong royong dan *mekemit* (meronda) di pura desa, 4 orang atau 20,0 persen mengatakan gotong royong dan rapat di pura desa, 1 orang atau 5,0 persen mengatakan rapat dan menyumbangkan tenaga (*ngayah*) pada upacara di desa. Sedangkan 9 orang atau 45,0 persen mengatakan bebas dari kewajiban.

Tabel III-22
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Kewajibannya sebagai Anggota Desa Adat

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Gotong royong dan <i>mekemit</i> (meronda) di pura desa	6	30,0
2	Gotong royong dan rapat di pura desa	4	
3	Rapat dan menyumbangkan tenaga (<i>ngayah</i>) pada upacara di desa	1	5,0
4	Bebas dari kewajiban	9	45,0
	J u m l a h	20	100,0

Di antara sekian banyak kegiatan-kegiatan yang ada di desa baik dinas maupun di desa adat tidak semuanya harus diikuti oleh semua anggota banjar. Dalam suatu kegiatan sering melibatkan orang-orang tertentu saja yang terpilih walaupun tidak sebagai anggota banjar, misalnya gerak jalan untuk mewakili desa, panitia suatu kegiatan tertentu, tim pendamping dan penyambut tamu yang datang dan pada waktu-waktu tertentu, dan lain-lain. Tabel III-23 terlampir mencantumkan kegiatan-kegiatan desa yang biasanya diikuti oleh responden sebagai anggota banjar.

Tabel III-23
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Kegiatan-kegiatan Desa yang Biasanya
Diikuti sebagai Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Gotong royong dan meronda di pura desa	8	40,0
2	Gotong royong, rapat dan meronda di pura desa	8	40,0
3	Rapat dan menyumbangkan tenaga pada waktu upacara di desa	2	10,0
4	Tidak ikut serta	1	5,0
	Jumlah	9	45,0
	Jumlah	20	100,0

Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 20 responden 8 orang atau 40,0 persen mengatakan gotong royong dan meronda di pura desa, 2 orang atau 10,0 persen mengatakan gotong royong, rapat, dan meronda di pura desa, 1 orang atau 5,0 persen mengatakan rapat dan menyumbangkan tenaga pada waktu upacara di desa, dan 9 orang atau 45,0 persen orang mengatakan tidak ikut serta.

Dalam *awig-awig* banjar tercantum bahwa setiap anggota banjar hendaknya mentaati peraturan-peraturan yang terdapat pada *awig-awig* banjar. Namun bagi anggota banjar yang seharusnya dikeluarkan bisa diganti dengan uang. Sebagai pengikat anggota di

dalam suatu kegiatan banjar, maka setiap ada kegiatan pimpinan banjar akan mengabsen untuk mengetahui anggota banjar yang hadir dan tidak hadir. Bagi anggota banjar yang tidak hadir akan dikenakan denda yang harus dibayar dengan uang pada rapat anggota yang diadakan pada setiap hari Penampahan Galungan (sehari sebelum Galungan) yaitu setiap enam bulan Bali (1 bulan Bali = 35 hari). Besarnya denda yang harus dibayar oleh seorang anggota banjar sesuai dengan kegiatan yang tidak diikutinya, yaitu:

1. tidak ikut bergotong royong biak di banjar maupun di desa dikenakan denda sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
2. tidak ikut meronda (*mekemit*) di pura desa dikenakan denda sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah);
3. tidak ikut *megebagan* (meronda) di rumah anggota banjar yang mempunyai kematian dikenakan denda sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
4. tidak ikut rapat di banjar dikenakan denda sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).

Tiap-tiap banjar di samping mempunyai wilayah tertentu, juga tersusun dari komponen-komponen peralatan, pimpinan dan anggota. Demikian pula halnya dengan banjar Pregai selain memiliki komponen pimpinan dan anggota juga memiliki alat peralatan yang berupa tanah pekarangan banjar, bale *kulkul* (ketongan), pura banjar, dan tanah sawah.

Tanah pekarangan banjar tempat di mana *bale* banjar ini berdiri luasnya kurang lebih 6 are, yang letaknya cukup strategis yaitu di pinggir jalan tanah di tengah-tengah kompleks pola menetap penduduk. Bale banjar ini berfungsi sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan, rapat, dan mengolah daging/ikan pada waktu-waktu tertentu. Selain itu juga berfungsi untuk tempat duduk-duduk bagi warganya dan umum dengan catatan tidak boleh merusak dan mengotorinya. Banjar pada hakekatnya jajar sekumpulan di mana keanggotaan banjar mempunyai status/kedudukan yang sejajar hak dan kewajibannya. Dengan demikian bangunan balai banjarpun mencerminkan tata cara untuk kepentingan bersama walaupun tingkatan-tingkatan kasta, status dan fungsi individu-individu tetap dihormati. Pengertian *bale* adalah ruang yang pada umumnya diartikan ruangan-ruangan tertutup

atap (beratap) yang dibangun dengan mengikuti aturan-aturan tertentu.

Dilihat dari sistem budaya yang menatanya, rupanya struktur peletakan bangunan *bale* banjar ini tetap berpedoman pada konsep *dualistis* seperti yang telah diuraikan pada bab di depan. Namun jenis bangunannya yang ada sekarang telah meninggalkan tata cara tradisional yang dibangun pada tahun 1970 dan selesai digarap serta diupacarai/dipelaspas pada tahun 1972.

Di pojok sebelah timur laut yang merupakan arah yang dianggap suci di dalam meletakkan tata bangunan terdapat pura (*pemerajan*) banjar yang di dalamnya berdiri tegak sebuah tempat pemujaan (*pelinggih*) untuk memuja Ida Bhagawan Penyarikan.

Di sebelah selatan halaman pura banjar, berdiri bale *kulkul* (kentongan) yang tingginya kurang lebih 5 (lima) meter. Pada *bale kulkul* ini tergantung dua buah kulkul yang hampir sama besarnya, yaitu sebuah milik banjar dan sebuah lagi milik *seka teruna-teruni*. Baik pura banjar maupun *bale kulkul* dibangun bersamaan dengan *bale* banjar. Pada hakikatnya *kulkul* adalah sebagai alat komunikasi antar warga banjar dan lebih luas lagi antar banjar dengan banjar pada waktu-waktu atau kejadian-kejadian tertentu. Dengan suara *kul-kul* warga banjar akan mengetahui mengenai adanya suatu kegiatan atau suatu kejadian tertentu. Maka dengan demikian diadakan perbedaan cara untuk membunyikan atau memukul *kulkul* supaya suara kulkul tersebut jelas dapat dibedakan oleh warga banjar.

Berkaitan dengan suara kulkul tersebut, apabila ada salah satu kulkul banjar yang berbunyi sebagai tanda bahwa adanya kebakaran, kecurian, perkelahian, dan lain-lain, maka kulkul banjar yang lainnya harus menyaut sesuai dengan keadaan atau kejadian tersebut. Dengan demikian warga banjar yang mendengarnya akan memberi pertolongan dengan membawa suatu peralatan sesuai dengan tanda yang diberikan oleh kulkul tersebut. Misalnya kalau kebakaran akan membawa ember dan lain-lain. Sedangkan kalau ada kecurian atau perkelahian harus membawa senjata.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ditetapkan suatu aturan yang tertulis dalam awig-awig banjar yang berkaitan dengan kulkul tersebut antara lain:

1. ciri-ciri bunyi *kulkul*;

2. apabila ada orang yang memukul kulkul tanpa adanya persetujuan dan pimpinan banjar akan dikenakan denda sesuai dengan hasil keputusan rapat;
3. *kulkul* tidak boleh dipukul secara sembarangan harus sesuai dengan kegiatan atau kejadian.

Sampai saat ini, banjar Pregai memiliki 18 are tanah sawah yang digarap oleh kelian adat yang hasilnya setengah diambil oleh penggarapnya (*kelian* adat) dan setengah lagi untuk banjar. Selain itu, banjar juga mempunyai perlengkapan untuk mengolah daging/ikan (*mebat*) yang disimpan di balai banjar. Setiap anggota banjar diperbolehkan menggunakan bale banjar dan perlengkapannya untuk mengolah daging/ikan (*mebat*) dengan membayar sewa Rp. 300,- (tiga ratus rupiah). Karena di banjar sudah ada sumur, maka pada waktu ada kegiatan-kegiatan tertentu tidak jauh lagi mencari air.

Sementara ini, banjar belum memiliki sarana hiburan yang berupa tv (televisi) dan radio, sehingga menjadi jarang warga banjar yang mau duduk-duduk di bale banjar pada waktu siang maupun malam harinya. Di samping itu banjar belum memiliki gambelan.

Selain peralatan banjar juga ada peralatan yang dimiliki oleh seka teruna-teruni yang berupa barang pecah belah dan meja pingpong. Setiap anggota banjar juga boleh mempergunakan peralatan ini dalam kegiatan-kegiatan tertentu dan seandainya pecah harus diganti dengan barang yang serupa, tetapi tidak dikenakan sewanya.

3. Sistem Keanggotaan Banjar, Desa dan Kelompok Sosial Lainnya.

Sudah menjadi suatu tradisi bahwa setiap orang yang sudah kawin secara sah untuk menjadi anggota banjar, tetapi hak dan kewajiban seorang anggota banjar tidak sama dengan hak dan kewajiban dengan anggota yang lain pada suatu hal tertentu.

Keanggotaan tersebut pada mulanya berada di tangan orang tua yang selanjutnya diwariskan kepada salah seorang anak lakinya yang paling pertama kawin setelah ia berumur 70 (tujuh puluh) tahun ke atas atau dapat pula diwariskan apabila orang tuanya sakit-sakitan. Oleh karena itu sebelum orang tuanya berumur

70 tahun atau tidak sakit-sakitan, maka semua anaknya yang telah kawin berstatus sebagai anggota banjar *pengela*, yang hanya mempunyai kewajiban dalam urusan suka duka di tingkat banjar saja. Sedangkan di tingkat desa ia bebas dari kewajiban, sehingga tidak berstatus sebagai anggota desa, baik desa dinas maupun desa adat.

Semua makhluk hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari kematian. Demikian pula kita sebagai manusia yang pada akhirnya juga akan mati atau meninggal dunia. Apabila ada pasangan suami istri yang salah satunya meninggal dunia ataupun bercerai, maka ia berstatus sebagai anggota *balu*, yang kewajibannya hanya dalam urusan suka duka di tingkat banjar pula.

Keanggotaan banjar Pregai bersifat terbuka. Dengan demikian apabila ada orang yang beragama Hindu atau bukan agama Hindu yang sudah berkeluarga dan mempunyai tempat tinggal dan menetap di wilayah banjarnya diharuskan masuk menjadi anggota banjar dengan beban yaitu:

1. menyerahkan beras pertama kali sebanyak 10 kg;
2. setiap bulannya harus menyerahkan beras sebanyak 2 kg;
3. harus mentaati *awig-awig* banjar Pregai.

Sedangkan bagi orang yang beragama Hindu atau bukan beragama Hindu yang sudah berkeluarga dan tinggal di wilayah banjar ini namun belum mempunyai tanah sendiri harus juga masuk menjadi anggota banjar hanya menyerahkan pertama kali beras sebanyak 10 kg dan mentaati *awig-awig* banjar Pregai.

Sesuai dengan persyaratan tersebut di atas, maka di banjar ini terdapat empat jenis keanggotaan banjar yaitu:

1. anggota banjar *ngarep*;
2. anggota banjar *pengele*;
3. anggota banjar *balu*; dan
4. anggota banjar *ayah tumpangan*.

Tabel III-24 di bawah memperlihatkan jenis keanggotaan banjar responden. Dari 20 responden 11 orang atau 55,0 persen sebagai anggota banjar *ngarep* dan 9 orang atau 45,5 persen sebagai anggota banjar *pengele*. Sedangkan untuk mewakili anggota banjar *balu* dan anggota banjar *ayah tumpangan* tidak ada, karena jumlahnya terlalu sedikit yaitu masing-masing 2 KK dan 1 KK sehingga sukar muncul pada waktu mengundinya untuk diangkat menjadi

sampel.

Tabel III-24
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Jenis Keanggotaannya di Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Anggota <i>ngarep</i> (suka duka dan dinas)	11	55,0
2	Anggota <i>pengele</i> (suka duka saja)	9	45,0
3	Anggota dinas (administrasi)	—	0
4	Anggota <i>balu</i> (suka duka saja)	—	0
5	Anggota <i>ayah tumpangan</i> (suka duka saja)	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas untuk memiliki kartu penduduk. Dalam hal ini, warga banjar Pregai membuatnya secara kolektif dengan berphoto di *bale* banjar.

Setiap berurusan surat-menyurat di banjar harus menunjukkan kartu penduduk dan kartu keluarga, kalau tidak dipungut biaya administrasi. Tanpa membawa kartu penduduk dan kartu keluar, *kelian* dinas tidak mau memberikan surat. Demikian juga di kantor Kepala Desa, harus menunjukkan kartu penduduk dan kartu keluarga dalam urusan surat-menyurat. Tanpa itu, kepala desa tidak akan mau memberikan surat pula. Tabel III-25 memperlihatkan bahwa semua responden menyatakan memiliki kartu penduduk (KTP).

Tabel III-25

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Keterangannya dalam Keanggotaan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	KTP (kartu penduduk)	20	100,0
2	Surat keterangan tempat tinggal	—	0
3	Surat keterangan pindah	—	0
4	Lainnya	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Mereka merasakan bahwa dengan membawa kartu penduduk urusan ke kantor-kantor baik kantor pemerintah maupun kantor swasta menjadi lancar, sehingga mereka merasakan besar sekali manfaat memiliki kartu penduduk. Apalagi bagi mereka yang penghidupannya sebagai kontraktor/pengusaha, tukang dan buruh bangunan yang menyebar di seluruh Bali mencari kerja. Berkaitan dengan ini, pada waktu mereka berpergian orang lebih sering menanyakan nama banjar daripada alamat rumahnya. Demikian juga dalam urusan pemerintahan maupun kepolisian mereka lebih menyebutkan nama banjarnya daripada alamat rumahnya, karena rumahnya belum berisi nama jalan atau gang dan nomer.

Penduduk banjar Pregai secara mayoritas berstatus sebagai tukang dan buruh bangunan yang mencari pekerjaan menyebar di seluruh Bali, tampak membawa pengaruh terhadap jumlah anggota banjarnya. Hal ini terbukti dari sekian banyak jumlah tukang dan buruh yang mencari pekerjaan di seluruh Bali, ada sebanyak kurang lebih 9 kepala keluarga berhenti menjadi anggota banjar dan terdaftar sebagai anggota banjar di tempat menetap sekarang. Ada beberapa persyaratan putusnya seseorang menjadi anggota banjar yaitu:

1. pindah tempat tinggal; dan
2. melanggar *awig-awig* banjar, karena tidak mau merubah sikap setelah tiga kali banjar mengadakan rapat (*pesangkepan*).

Warga banjar yang berhenti menjadi anggota banjar tidak mendapat hak apa-apa dari banjar. Dan seandainya turun lagi menjadi anggota banjar akan dikenakan biaya sesuai dengan keputusan rapat. Sehubungan dengan ini, dari 20 responden yang diwawancarai secara berstruktur semuanya menyatakan menjadi salah satu anggota banjar di tempat menetap sekarang ini, yaitu di banjar Pregai seperti terlihat pada tabel III-26 dan Tabel III-27 terlampir.

Tabel III-26

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Menjadi
Tidaknya Salah satu Anggota Banjar Sekarang ini**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Ya	20	100,0
2	Tidak	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Tabel III-27

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Tempat
Sebagai Anggota Salah Satu Banjar Sekarang**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Di tempat asal	—	0
2	Di tempat menetap sekarang	20	100,0
3	Di dua tempat tersebut	—	0
4	Tidak di mana-mana	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Seperti telah diuraikan di depan bahwa berdasarkan atas status keanggotaan banjar dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

1. Anggota banjar *ngarep*

Sebagai anggota banjar *ngarep* mempunyai kewajiban antara lain:

- a. ikut terlibat dalam penggalan dana untuk pembangunan balai banjar;
- b. mengeluarkan iuran tiap bulan sebesar Rp. 500,—, tepatnya pada hari Buda Kliwon (Rebo Kliwon);
- c. mengeluarkan iuran untuk desa, baik desa dinas maupun desa adat;
- d. *mekemit* (meronda) di pura desa;
- e. ikut rapat di banjar dan di desa;
- f. ikut bergotong royong di lingkungan banjar dan desa;
- g. ikut memberikan sumbangan/iuran dan terlibat dalam kegiatan banjar yang menyangkut urusan suka duka, seperti: upacara kematian, upacara *ngaben*, upacara *memukur*, upacara odalan, upacara perkawinan, upacara potong gigi (*mesanggih*) dan lain-lain.

Pada dasarnya anggota banjar *ngarep* mengeluarkan materi (*peson-peson*) dan tenaga (*ayahan*) sepenuhnya baik untuk banjar (banjar dinas dan banjar adat) maupun desa (desa dinas dan desa adat). Sedangkan sebagai haknya yaitu:

- a. mendapat pelayanan administrasi dan sosial lainnya;
- b. boleh menggunakan bale banjar dan perlengkapannya;
- c. boleh meminjam uang banjar;
- d. mengeluarkan usul, pendapat, saran dalam rapat banjar;
- e. mendapat perlindungan dari banjar;
- f. memilih dan dipilih untuk menjadi pimpinan/*kelian* banjar baik kelian dinas maupun kelian adat, dan kelian tempekan.

2. Anggota banjar *pengele*

Sebagai anggota banjar *pengele* mempunyai kewajiban antara lain:

- a. ikut terlibat dalam penggalan dana untuk pembangunan bale banjar;
- b. mengeluarkan iuran tiap bulan sebesar Rp. 500,— tepatnya pada hari raya Buda Kliwon (Rebo Kliwon);
- c. ikut rapat di banjar;

- d. ikut memberikan sumbangan/iuran dan terlibat dalam kegiatan banjar yang menyangkut urusan suka duka, seperti upacara kematian, upacara *ngaben*, upacara *memukur*, upacara odalan, upacara potong gigi, upacara perkawinan dan lain-lain.

Sedangkan sebagai haknya antara lain:

1. mendapat pelayanan administrasi dan sosial lainnya;
2. boleh menggunakan bale bajar dan perlengkapannya;
3. boleh meminjam uang banjar;
4. boleh mengeluarkan usul, pendapat, saran-saran dalam rapat tertentu; dan
5. mendapat perlindungan daribanjar.

3. Anggota Banjar Balu

Sebagai anggota banjar *balu* kewajibannya hampir sama dengan anggota *banjar* pengele, hanya bedanya dalam mengeluarkan tenaga (ayahan). Apabila jenis kelamin anggota banjar balu tersebut laki-laki, maka ia hanya terlibat dalam kegiatan banjar yang melibatkan tenaga laki-laki saja. Sebaliknya bila jenis kelamin anggota banjar tersebut perempuan, maka ia hanya terlibat dalam kegiatan banjar yang melibatkan tenaga perempuan saja. Seandainya anggota banjar yang *balu* tersebut mempunyai anak laki-laki sudah berumur 17 tahun ke atas, ia akan kembali menjadi anggota banjar ngarep. apabila tidak mempunyai anak sama sekali dan sakit-sakitan ia mendapat kebebasan di banjar dalam hal pungutan tenaga maupun materi.

Pengele

4. Anggota banjar ayah tumpangan

Sementara ini di banjar Pregai terdapat satu kepala keluarga anggota banjar *ayah tumpangan* yang tinggal menumpang di rumah keluarganya. Sebagai kewajibannya antara lain;

- a. kena sumbangan/iuran setiap bulan sebesar Rp. 500,— (limat ratus rupiah); dan
- b. kena pungutan tenaga (ayahan) dan materi (peson-peson) seperti anggota banjar *pengele*, tetapi mendapat kelonggaran yaitu pungutan-pungutan ini boleh diganti dengan mengeluarkan uang sesuai dengan keputusan rapat.

Sebagai haknya adalah hanya memperoleh perlindungan dari *banjar*. Untuk urusan administrasi dan adat diselesaikan di tempat salnya, karena ia tetap tercatat sebagai anggota *banjar ngarep* di tempat kelahirannya.

Selain sebagai anggota *banjar*, hanya anggota *banjar ngarep* yang langsung sebagai anggota desa, baik desa dinas maupun desa adat.

Dalam kaitannya dengan pimpinan *banjar*, hanya anggota *banjar ngarep* yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi *kelian dinas*, *kelian adat* atau *kelian tempekan*. Masa jabatan *kelian dinas* adalah lima tahun dan bisa dipilih kembali dalam rapat. Sedangkan masa jabatan *kelian adat* dan *kelian tempekan* tidak tentu. Dalam hal ini, apabila tetap mampu dan tidak melanggar awig-awig *banjar*, maka ia akan tetap menjabat sebagai *kelian adat* ataupun *kelian tempekan*.

Dalam menjalankan tugasnya, *kelian dinas* dan *kelian adat* dibantu oleh empat orang *kelian tempekan* dan dua orang juru arah/*kesinoman*. *Kesinoman* ini juga dijabat oleh anggota *banjar ngarep* secara bergiliran selama 35 hari atau satu bulan Bali.

Dalam mengerjakan tugas-tugas *banjar* tidak selalu anggota *banjar* yang bersangkutan saja yang terlibat, tetapi boleh diwakili oleh orang lain yang telah berumur 17 tahun ke atas. Dengan demikian banyak yang belum berstatus sebagai anggota *banjar* sudah sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan *banjar* yang bisanya untuk mewakili orang tuanya. Tabel II-28 memperlihatkan bahwa hampir semua responden mengerjakan tugas-tugas *banjar* sebelum menjadi anggota *banjar* yaitu sebanyak 18 orang atau 90,0 persen, dan 2 orang atau 10,0 persen mengatakan setelah menjadi anggota tetap.

Tabel III-28

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Tugas-tugas Banjar yang Dilaksanakan Sebelum atau Sesudah Menjadi Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Setelah menjadi anggota (tetap)	2	10,0
2	Sebelum menjadi anggota (ngayahin)	2	
3	Tidak menjawab	18	90,0
		—	0
	J u m l a h	20	100,0

Walaupun secara formalitas tidak ada suatu pekerjaan tertentu yang dipakai sebagai standar oleh banjar yang harus bisa dikerjakan oleh seseorang untuk dapat diterima menjadi anggota banjar. Tetapi umumnya seseorang akan merasa malu seandainya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas banjar pada waktu banjar mengadakan kegiatan, karena disaksikan atau dilihat oleh orang banyak. Untuk menghindari hal itu, maka sebelum menjadi anggota banjar biasanya seseorang akan mengadakan suatu latihan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan tugas-tugas banjar. Tabel III-29 memberikan gambaran bahwa dari 20 responden 17 orang atau 85,0 persen melaksanakan tugas-tugas banjar sebagai suatu latihan, dan 3 orang atau 15,0 persen mengatakan tidak melaksanakan latihan.

Tabel III-29

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Tugas-tugas Banjar Apakah Dilaksanakan Sebagai Suatu Latihan Sebelum Menjadi Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	17	85,0
2	Tidak	3	15,0
3	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Berkaitan dengan latihan-latihan tersebut, sebagian besar melaksanakan pekerjaan untuk upacara sebanyak 9 orang atau 45,0 persen, 3 orang atau 15,0 persen melaksanakan pekerjaan sehari-hari, misalnya cara memotong-motong atau menghaluskan bambu, 2 orang atau 10,0 persen melaksanakan kedua-duanya, 1 orang atau 5,0 persen melaksanakan penggalian dana, dan 5 orang atau 25,0 persen melaksanakan gotong royong. Tabel III-30 memperlihatkan jenis tugas banjar yang dilaksanakan sebagai suatu latihan sebelum menjadi anggota banjar.

Tabel III-30

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Jenis Tugas Banjar yang Dilaksanakan Sebagai Suatu Latihan Sebelum Menjadi Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pekerjaan sehari-hari	3	15,0
2	Pekerjaan untuk upacara	9	45,0
3	Kedua-duanya	2	10,0
4	Penggalian dana	1	5,0
5	Gotong royong	5	25,0
	Jumlah	20	100,0

Sementara ini di banjar Pregai terdapat dua jenis organisasi yaitu *seka teruna-teruni* dan PKK. Seseorang berstatus sebagai anggota *seka teruna-teruni* apabila sudah masuk sekolah menengah pertama (SMP) atau berumur 17 tahun ke atas bagi yang tidak melanjutkan pendidikan. Berakhirnya seseorang menjadi anggota *seka teruna-teruni* setelah dua tahun melangsungkan perkawinan bagi yang tidak kawin keluar. Sedangkan bagi yang kawin keluar otomatis berhenti terdaftar sebagai anggota *seka teruna-teruni*.

Organisasi PKK yang hanya mengadakan kegiatan arisan setiap bulan sekali anggotanya dari istri-istri kepala keluarga (KK).

4. Sistem Pengerahan Tenaga dan Pengendalian Sosial

Secara riil banjar mempunyai tugas yang beraneka ragam ragam yang direalisasikan dan dikoordinasikan oleh *kelian* dinas dan *kelian* adat dengan berpedoman pada awig-awig banjar dan hasil keputusan rapat. Kedudukan *kelian* dinas paralel (sejajar) dengan *kelian* adat serta menjalin hubungan koordinasi (kerja sama) dan dibantu oleh empat *kelian tempekan* dan dua orang *kesinoman/juru arah* di dalam menunaikan tugas-tugasnya.

Secara lebih terperinci tugas-tugas banjar antara lain:

- a. melayani urusan administrasi;
- b. menangani urusan yang berhubungan dengan perkawinan ataupun perceraian;
- c. memberikan pertolongan secara tiba-tiba pada waktu ada kebakaran, perkelahian, pencurian dan sebagainya;
- d. ikut serta dalam upacara adat, seperti: penguburan mayat, pembakaran mayat (*ngaben*), upacara lelehur (*memukur*), upacara potong gigi (*mesangih*), upacara perkawinan (*nganten*), *odalan* atau upacara di pura dan sebagainya;
- e. ikut serta dalam memelihara bangunan-bangunan di banjar dan di desa;
- f. ikut serta dalam memelihara dan menjaga keamanan, di banjar maupun di desa; dan
- g. mengayomi atau memberi perlindungan kepada segenap warganya.

Tabel di bawah ini memperlihatkan jenis pelayanan yang diperoleh oleh anggota banjar dari banjar. Dari keseluruhan responden 8 orang atau 40,0 persen mengatakan mendapat pelayanan administrasi, 7 orang atau 35,0 persen mengatakan mendapat pelayanan sosial lain, dan 5 orang atau 25,0 persen mengatakan mendapat rasa aman dan merasa adanya perlindungan.

Tabel III-31
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Jenis
Pelayanan yang Diperoleh Selama Menjadi Anggota
Banjar Dari Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Pelayanan administrasi	8	40,0
2	Pelayanan akan tenaga kerja murah/gratis	—	0
3	Pelayanan sosial lain	7	35,0
4	Rasa aman dan merasa adanya perlindungan	5	25,0
	J u m l a h	20	100,0

Masyarakat banjar Pregai yang berbentuk kumuniti kecil, tampak seolah-olah adanya rasa saling tolong-menolong yang tebal, sehingga seluruh kehidupan masyarakat itu rupanya berdasarkan rasa yang terkandung dalam jiwa paraarganya.

Sebagai masyarakat yang hidup dalam suatu banjar atau lebih luas lagi lingkungan desa mereka merasa tidak bisa lepas dari hubungan-hubungan dengan sesama warga banjar atau warga desa. Dalam hal ini terjalin hubungan timbal balik yaitu kewajiban memberi akan menimbulkan membalas oleh B Malinowski disebut *the principle of reciprocity* (Koentjaraningrat, 1980:213). Sifat pemberian bantuan warga banjar Pregai spontanitas karena mereka mempunyai keyakinan bahwa apabila mereka memerlukan bantuan supaya memperoleh bantuan dari para tetangga atau kerabat lainnya. Memberikan bantuan tenaga kepada orang minta bantuan disebut *nguopin* dan yang dimintai bantuan disebut *kediolasan* dalam aktivitas sekitar rumah tangga. Tabel III-32 mengungkapkan mengenai ada tidaknya bantuan dari para tetangga dalam kesulitan melaksanakan kewajiban di rumah tangga.

Tabel III-32

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Ada Tidaknya
Bantuan Dari Para Tetangga dalam Kesulitan Melaksanakan
Kewajiban di Rumah Tangga**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Ada bantuan	20	100,0
2	Tidak ada bantuan	—	0
3	Tidak tahu	—	0
4	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Ternyata dari keseluruhan responden menyatakan merasa mendapatkan bantuan dari para tetangga dalam kesulitan melaksanakan kewajiban di rumah tangga. Pemberian bantuan tidak terbatas terhadap para tetangga yang menjadi anggota banjar, tetapi juga terhadap bukan anggota banjar, bahkan lebih jauh lagi yaitu terhadap anggota banjar di tempat lain. Karena antara banjar satu dengan banjar yang lainnya di lingkungan desa Mengwi jaraknya relatif berdekatan.

Tabel III-33 mengungkapkan tentang sejak mulai mendapatkan bantuan dari masing-masing responden:

Tabel III-33

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pendapatnya
tentang Waktu Mendapatkan bantuan**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah ()	Persentase
1	Sejak menjadi anggota banjar	3	15,0
2	Jauh sebelum menjadi anggota banjar	6	30,0
3	Meningkat setelah menjadi anggota banjar	11	55,0
4	Tidak tahu	—	—
5	Tidak menjawab	—	—
	J u m l a h	20	100,0

Dari tabel tersebut dapat terungkap bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti terlihat bahwa sebagian besar menyatakan menerima bantuan meningkat setelah menjadi anggota banjar, yakni 11 orang atau 65,0 persen dari jumlah responden. Hal ini terjadi karena begitu mempunyai anak akan lebih sering mengadakan upacara sehingga akan lebih sering pula minta bantuan kepada para tetangga dan kerabat.

Dari tabel di atas juga terlihat 8 orang atau 40,0 persen dari seluruh responden yang menyatakan mendapatkan bantuan jauh sebelum menjadi anggota banjar, dan 3 orang atau 15,0 persen menyatakan mendapatkan bantuan sejak menjadi anggota banjar.

Untuk dapat mengetahui apakah semua orang di banjar ini mendapatkan perlakuan/bantuan yang sama dapat dilihat dalam tabel III-34 terlampir

Tabel III-34

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pengamatannya
Apakah Semua Orang di Banjar Mendapatkan Perlakuan/
Bantuan yang Sama**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Semua mendapat yang sama	19	95,0
2	Hanya anggota banjar saja	—	0
3	Orang-orang tertentu saja	—	0
4	Tidak tahu	1	5,0
5	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Tabel tersebut menyatakan bahwa 19 orang atau 95,0 persen dari keseluruhan responden menyatakan semua mendapat yang sama. Bantuan-bantuan tersebut bahwasanya berupa tenaga, peralatan, nasehat atau uang, serta meliputi lapangan-lapangan aktivitas rumah tangga (membuat dasar rumah, memperbaiki rumah, menembok batas pekarangan rumah dan sebagainya), dalam peristiwa kecelakaan, dalam kematian, dan dalam upacara-upacara atau

perayaan-perayaan yang diadakan oleh suatu keluarga. Sistem tolong menolong (*nguopin*) ini merupakan suatu tradisi yang hidup subur di kalangan masyarakat banjar ini.

Sebagai contoh: di dalam peristiwa kematian, di samping bantuan yang bersifat pribadi (*jenukan*), juga ada *patus* (sumbangan) yang diberikan oleh setiap anggota banjar kepada warga banjar yang kena musibah tersebut.

Patus tersebut ada dua jenis yaitu.

1. Apabila jenazah orang yang meninggal tersebut dikubur dan minta *patus* kecil (*alit*), maka banjar akan memberikan kain putih tiga meter, daun kelapa yang muda dan utuh sebanyak 20 helai, buah kelapa 20 butir, itik satu ekor, dan biaya oli diganti dengan uang kurang lebih seharga Rp. 1500,—
2. Apabila minta sumbangan (*patus*) besar (*ageng*), maka masing-masing kepala keluarga akan mengeluarkan beras satu *bumbung* (alat ukur tradisional yang dibuat dari bambu, yang mana 6 *bumbung* beras beratnya ± 7 kg), kelapa satu buah, kayu api satu ikat apabila jenazah tersebut dibakar (*mekinsan digeni*, artinya dibakar dulu tapi belum *diaben*). Kemudian dari banjar mendapat sumbangan yang berupa kain putih 3 meter, daun kelapa yang muda (*papah*) 20 helai, itik satu ekor dan oli satu jeriken apabila jenazah tersebut dibakar/*mekinsan digeni*.

Pada malam harinya anggota banjar akan secara bergiliran *megebagan*/menginap di rumah keluarga yang mempunyai halangan itu sampai tiga hari setelah jenazah tersebut dikubur atau dibakar. Pada waktu *megebagan*/menginap ada beberapa kegiatan yaitu mengerjakan pekerjaan yang belum selesai atau bermain kartu dan sebagainya.

Contoh yang lainnya yaitu kecelakaan. Bila ada warga banjar ini mengalami kecelakaan, misalnya ditabrak kendaraan atau jatuh dari kendaraan, maka para tetangganya bahkan warga banjar yang mendengar musibah ini akan datang ke rumah warga banjar yang kena musibah tersebut dan sekaligus menawarkan jasa agar dapat membantunya, misalnya mencari bahan-bahan untuk sesajen atau langsung membuatnya untuk dibawa ke tempat kejadian tadi dan sebagainya. Tabel III-35 memperlihatkan data tentang responden yang memberikan bantuan kepada orang lain di ling-

kungan banjar.

Tabel III-35

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Memberi
Tidaknya Bantuan Kepada Orang Lain Di Lingkungan Banjar**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	20	100,0
2	Tidak	—	0
3	Tidak tahu	—	0
4	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Dari tabel tersebut terlihat secara keseluruhan responden memberikan bantuan kepada orang lain di lingkungan banjarnya. Para tetangga akan berusaha membantunya kepada setiap orang yang minta bantuan. Sesuai dengan informasi yang diperoleh bahwa saling tolong menolong dalam pekerjaan sudah merupakan salah satu kewajiban dari anggota banjar.

Tabel III-36 mengungkapkan mengenai pernah tidaknya responden memberikan bantuan kepada orang-orang sesama anggota banjar.

Tabel III-36

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Pendapatnya tentang Tidak Memberikan Bantuan Kepada
Orang-orang Sesama Anggota Banjar**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pernah	—	0
2	Tidak pernah	20	100,0
3	Tidak tahu	—	0
4	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Ternyata seluruh responden menyatakan tidak pernah tidak memberikan bantuan kepada orang-orang sesama anggota banjar. Hal ini terjadi karena adanya ketakutan/kekuatiran pada dirinya sendiri kalau tidak dibantu oleh anggota banjar lainnya pada suatu pekerjaan nantinya. Setiap ada kegiatan yang melibatkan banjar, misalnya mengiringi jenazah ke kuburan, *megebagan*/menginap di rumah yang mempunyai halangan, kelian banjar akan selalu mengabsen anggotanya dan jika absen didenda sebesar Rp. 25,—. Cara ini bermaksud untuk memberikan pendidikan kepada para anggota banjar agar mentaati tata nilai yang telah diwarisinya.

Tabel III-37 mengungkapkan dikenakan tidaknya sanksi hukuman jika tidak memberikan bantuan.

Tabel III-37
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut
Dikenakan Tidaknya Sanksi/Hukuman Jika
Tidak Memberikan Bantuan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	14	70,0
2	Tidak	—	0
3	Tidak tahu	1	5,0
4	Tidak menjawab	5	25,0
	Jumlah	20	100,0

Dari melihat tabel tersebut keseluruhan responden yang diteliti 14 orang atau 70,0 persen menyatakan dikenakan sanksi jika tidak memberikan bantuan. Responden menyatakan ada sanksi ini karena melihat adanya denda yang dikenakan oleh banjar jika tidak ikut terlibat dalam upacara kematian. Dalam kegiatan-kegiatan lain yang tidak melibatkan banjar juga dirasakan ada sanksi yang diberikan oleh para tetangganya, misalnya karena tidak pernah memberikan bantuan maka para tetangga juga tidak akan datang membantu jika memerlukan bantuan nantinya.

Dalam tabel tersebut juga tampak bahwa sebanyak 1 orang atau 5,0 persen yang mengatakan tidak tahu, dan 5 orang atau

25,0 persen tidak menjawab.

Tabel III-38 akan mengungkapkan mengenai jenis sanksi tersebut.

Tabel III-38
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Jenis Sanksi Yang Dikenakan Kalau Tidak Memberikan Bantuan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Denda berupa uang yang dikenakan oleh banjar	11	55,0
2	Sanksi moral	3	15,0
3	Tidak tahu	1	5,0
4	Tidak menjawab	5	25,0
	J u m l a h	20	100,0

Dari tabel tersebut terungkap bahwa dari keseluruhan responden 11 orang atau 55,0 persen mengatakan dikenakan sanksi yang berupa denda yang harus dibayar dengan uang kepada banjar pada kegiatan seperti tersebut pada alinea di atas, 3 orang atau 15,0 persen mengatakan sanksi moral 1 orang atau 5,0 persen mengatakan tidak tahu dan 5 orang atau 25,0 persen tidak menjawab.

Kebiasaan saling bantu membantu, bekerja sama di lingkungan banjar atau kegiatan dalam suatu organisasi merupakan penerusan nilai-nilai, dan gagasan serta keyakinan yang bersifat umum. Dalam hal ini anggota banjar *ngarep* dan anggota banjar *balu* yang berstatus senior selalu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada anggota banjar yang statusnya yunior (anggota banjar *pengele*). Sehingga begitu anggota banjar yang berstatus yunior menggantikan kedudukan ayahnya sebagai anggota banjar *ngarep*, sudah pernah mengalami suatu latihan-latihan pengenalan tingkah laku, nilai gagasan dan keyakinan dan kemudian dapat ditransper kepada generasi berikutnya.

Cara penerusan nilai dan gagasan serta keyakinan seperti

tersebut di atas disebut melalui pendidikan formal dalam usaha pengendalian sosial. Tetapi dapat juga diteruskan dengan pendidikan non formal yaitu lewat pendidikan keluarga, seperti mengadakan suatu latihan-latihan untuk mengerjakan tugas-tugas banjar di rumah, misalnya mengayam daun kelapa, mengolah daging/ikan (*mebat*), dan sebagainya.

Selain mempertebal keyakinan dengan melalui pendidikan baik formal maupun non formal dapat juga ditempuh dengan cara pemberian sugesti sosial, dongeng, ceritera dan pepatah.

Mempertebal keyakinan dengan cara sugesti sosial ditempuh dengan cara mengikutsertakan anggota banjar yang berstatus yunior dalam rapat-rapat tertentu, sehingga mereka dapat belajar mendiskusikan permasalahannya dan mengambil keputusan. Sedangkan mempertebal keyakinan dengan cara pemberian dongeng, ceritera dan pepatah dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecil yang biasanya dilakukan pada saat menjelang tidur malam.

Cara lain yang ditempuh dalam memberikan pengendalian sosial yaitu pemberian imbalan dan pengembangan rasa malu dan takut.

Setiap keterlibatan banjar di dalam mengerjakan pekerjaan anggotanya yang menyangkut upacara adat kecuali upacara kematian (tidak termasuk *ngaben*) selalu memperoleh imbalan yang berupa masakan/makanan. Bahkan telah tercantum dalam awig-awig banjar tentang pekerjaan yang bisa diserahkan ke banjar dan banyak imbalannya yang diterima oleh masing-masing anggota.

Sebagai contoh: apabila ada salah satu anggota banjar yang menyerahkan kerja ke banjar dalam rangka odalan/upacara di pura atau di *pemerajan/sanggah*, maka tiap-tiap anggota banjar mengeluarkan daun kelapa yang sudah dianyam (*klangsah*) satu helai. Sebagai imbalannya yaitu konsumsi ringan seperti kopi/teh, jajan dari beras ketan, rokok dan daun sirih dan setelah selesai bekerja masing-masing anggota banjar akan makan bersama dengan wadah/tempat daun pisang (tekor). Dalam hal ini *kesinoman* memperoleh bagian yang lebih banyak, karena lagi memperoleh sesajen/*bebanten* di dapur.

Jenis-jenis pekerjaan yang bisa diserahkan ke banjar yaitu:

1. upacara bayi berumur 3 bulan (*metelubulanan*);

2. upacara potong gigi (*mesangih*);
3. upacara perkawinan;
4. upacara kematian;
5. upacara ngaben;
6. upacara memukur;
7. upacara/odalan di pemerajan/sanggha atau pura;
8. dan lain-lainnya.

Pengembangan rasa malu dan takut sebagai salah satu cara pengendalian sosial yang dilakukan di banjar ini dengan cara menjatuhkan sanksi kepada anggota banjar yang melanggar *awig-awig* banjar; misalnya salah satu sanksi yang terberat yaitu diberhentikan dari keanggotaan banjar karena tidak mau merubah sikap setelah tiga kali banjar mengadakan rapat (*pesangkepan*).

Sedangkan di tingkat desa juga ada sanksi-sanksi yang tercantum pada *awig-awig* desa adat atas pelanggaran-pelanggaran yang ditangani oleh *bendesa* adat.

Dengan adanya sanksi yang diberikan oleh banjar maupun desa adat, maka warga banjar ini menjadi takut untuk melanggar *awig-awig* tersebut, sehingga keamanannya menjadi terjamin. Untuk mengetahui perasaan responden tentang lebih aman atau tidaknya menjadi anggota banjar dapat dilihat pada tabel III-39

Tabel III-39
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Lebih
Aman Tidaknya Menjadi Anggota Banjar Daripada
Tidak Menjadi Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Lebih aman	20	100,0
2	Biasa saja	—	0
3	Tidak merasa aman	—	0
4	Tidak tahu	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Dalam tabel tersebut ternyata dari keseluruhan responden semuanya menyatakan lebih aman menjadi anggota banjar daripada tidak menjadi anggota banjar. Dari mana rasa aman itu timbul ketika menjadi anggota banjar dapat dilihat dalam tabel III-40

Tabel III-40
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Munculnya
Rasa Aman itu Ketika Menjadi Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Merasa sudah terdaftar sebagai penduduk	10	50,0
2	Merasa akan mendapatkan perhatian	3	15,0
3	Merasa akan mendapatkan bantuan dari anggota lain	2	10,0
4	Merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai penduduk	5	25,0
	J u m l a h	20	100,0

Dari tabel tersebut terungkap bahwa dari 20 responden yang diteliti sebagian besar mengatakan merasa sudah terdaftar sebagai penduduk, yakni 10 orang atau 50,0 persen dari jumlah responden, 3 orang atau 15,0 persen mengatakan merasa akan mendapatkan perhatian, 2 orang atau 10,0 persen mengatakan merasa akan mendapatkan bantuan dari anggota lain, dan 5 orang atau 25,0 persen mengatakan merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai penduduk.

Seperti telah dijelaskan di depan bahwa setiap warga banjar yang telah kawin secara sah otomatis menjadi anggota banjar dan setiap pendatang yang beragama Hindu maupun bukan beragama Hindu yang sudah berumah tangga dan tinggal di wilayah banjar ini walaupun belum mempunyai tanah sendiri diharuskan juga

menjadi anggota banjar. Turunnya seseorang mulai menjadi anggota banjar diumumkan pada rapat anggota yang dilaksanakan pada setiap hari penampahan Galungan (sehari sebelum hari Galungan).

Sementara itu belum ada orang yang telah berkeluarga yang tinggal di wilayah banjar ini tanpa menjadi anggota banjar. Tabel III-41 memperlihatkan pandangan-pandangan orang-orang di sini terhadap seseorang yang tidak menjadi anggota banjar dan seharusnya sudah menjadi anggota banjar.

Tabel III-41

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pengamatannya
Tentang Pandangan-pandangan Orang-orang di Sini
Terhadap Seseorang yang Tidak Menjadi
Anggota Banjar dan Seharusnya Sudah
Menjadi Anggota Banjar**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Dipandang tidak baik	14	79,0
2	Dikatakan tidak tahu aturan	6	30,0
3	Bisa saja dan dianggap umum	—	0
4	Tidak apa-apa/tidak usah dihiraukan	—	0
5	Tidak tahu	—	0
6	Tidak menjawab	—	0
	Jumlah	20	100,0

Tabel tersebut mengungkapkan bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti sebagian besar menyatakan dipandang tidak baik bila ada seseorang yang tidak menjadi anggota banjar dan seharusnya sudah menjadi anggota banjar, yakni 14 orang atau 70,0 persen dari jumlah responden, dan 6 orang atau 30,0 persen mengatakan tidak tahu aturan.

5. Sistem Upacara di Banjar dan di Desa

Desa adat Mengwi yang terdiri dari atas 13 banjar adat seperti telah disebutkan di atas merupakan satu kesatuan wilayah kemasyarakatan dalam kaitannya pelaksanaan adat istiadat, kolektivitas dan konsepsi upacara keagamaan.

Pemerintahan desa adat dalam mengaktifkan upacara-upacara keagamaan tampak adanya rasa kesatuan sebagai desa adat ditentukan oleh faktor yang disebut *Tri Hita Karana* yang merupakan kelanjutan dari pengertian bahwa desa adat itu adalah suatu badan yang hidup. *Tri Hita Karana* artinya tiga aspek yang menciptakan kesejahteraan (Putra, t.t.: 107), terdiri atas:

- a. *karang* desa yang teritorial yang ditentukan secara difinitif batas-batasnya dengan upacara;
- b. *kerama* desa yang merupakan warga atau aparatur dari desa, yang merupakan bagian dari sel-sel tubuh desa yang paling menentukan seumpama jantung, hati dan limpa, dari suatu mahluk hidup. *Kerana* desalah yang merupakan orang bergerak dari tubuhnya desa, sedang alam lainnya di desa itu adalah merupakan sel-sel yang kurang begitu menentukan tetapi diperlukan oleh tubuh desa dalam pembentukan suatu desa.
- c. *kahyangan* tiga yang merupakan jiwa daripada *karang* desa ini yang tidak bisa dipecah-pecah dengan seluruh aktivitas dan kehidupan desa, yang terdiri atas:
 1. pura *Bale Agung* tempat pemujaan Sang Hyang Widhi dalam manifestasi-NYA sebagai maha pencipta (*utpeti*) yang disebut Brahma;
 2. pura *Puseh* tempat pemujaan Sang Hyang Widhi dalam manifestasiNYA sebagai maha maha pemelihara (*Sthiti*) yang disebut Wisnu;
 3. pura *Dalem* tempat pemujaan Sang Hyang Widhi dalam manifestasiNYA sebagai maha pelebur (*prelina*) yang disebut Siwa. Dengan demikian letak pura Dalem berdekatan dengan kuburan/*Setra*.

Di desa Mengwi, pura Bale Agung dan pura Puseh dijadikannya satu disebut pura Desa, sehingga masyarakatnya jarang yang mengenal pura Puseh, namun yang dikenal adalah pura *Desa* dan pura *Dalem*. Di pura-pura ini dijumpai adanya bangunan-

bangunan (*pelinggih-pelinggih*) sebagai tempat pemujaan yang bentuknya cukup rumit dan jumlahnya relatif banyak. Oleh karena pura sebagai tempat suci yang disucikan/disakralkan, maka diadakan tata tertib masuk ke dalamnya, dan ada beberapa yang tercantum pada *awig-awig* desa adat. Salah satu di antaranya yaitu: apabila ada orang hamil masuk ke pura, kemudian anaknya lahir di pura, maka pura tersebut menjadi *leteh*/kotor (dalam pengertian religius). Untuk menghilangkan *keletehan*/kekotoran itu, orang tersebut harus mengupacarainya dengan *bebanten/sesajen* selengkap-kapnya dan didenda sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) oleh desa.

Selain itu masih ada beberapa larangan masuk ke pura yang tidak tertulis dalam *awig-awig* desa antara lain: dalam keadaan *sebel* karena punya kematian, *sebel* karena kotor kain, *sebel* karena sakit lepra (*gede*), menyusui anak, membuang air kecil atau besar, dan lain-lain.

Untuk mengatur dan menyelesaikan upacara di pura *Desa* maupun di pura *Dalem* ditangani oleh *pemangku*. Sebelum seseorang diangkat menjadi *pemangku* terlebih dahulu diupacarai yang disaksikan oleh pemuka-pemuka agama yang disebut upacara *pe-wintenan*. Selain *pemangku* juga ada *sadeg* yaitu sebagai pendamping *pemangku* dalam menyelesaikan upacara. Umumnya jabatan *pemangku* maupun *sadeg* secara turun temurun.

Setiap enam bulan sekali yaitu tepatnya pada hari Umanis Galungan (sehari setelah Galungan) merupakan hari odalan di pura *Desa*. Pada hari ini bangunan-bangunan (*pelinggih-pelinggih*) pura akan dihias sedemikian rupa dengan kain dan sampaian (janur yang diukir dan kemudian dijarit).

Odalan adalah suatu upacara persembahyangan yang dilakukan di pura atau di *sanggah/pemerajan*. Pada pagi harinya para *krama desa* yang terdiri dari para *pemangku* dan *sadeg* akan mempersiapkan dan membuat segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara berlangsung. Kurang lebih pukul 16.00 *krama*/warga desa akan mulai mengadakan persembahyangan sesuai dengan perintah yang diterima dari banjarjanya masing-masing.

Untuk mengetahui keikutsertaan dari anggota banjar Pregai dalam persembahyangan di pura *Desa* dapat dilihat dalam tabel III-42 terlampir.

Tabel III-42

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pengamatannya
tentang Keikutsertaan Anggota Banjar Dalam
Persembahyangan di Pura Desa**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Semua ikut serta	20	100,0
2	Tidak semua ikut serta	—	0
3	Ikut karena persyaratan tertentu	—	0
4	Tidak tahu	—	0
5	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa seluruh responden menyatakan semua anggota banjar ikut serta dalam persembahyangan di pura desa, kecuali bagi keluarga yang mempunyai halangan seperti kematian, sakit, bayi belum berumur tiga bulan dan sebagainya. Dalam hal ini, bukan saja yang ikut yang menjadi anggota banjar saja tetapi juga dari kalangan remja dan anak-anak. Bahkan keluarga yang sudah mempunyai tempat tinggal di luar desa Mengwi pun hadir juga pada waktu odalan di desa.

Untuk mengetahui cara pergi ke pura, jika banyak yang ikut dapat dilihat dalam tabel III-43.

Tabel III-43

**Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pengmatannya
Mengenai Cara Pergi Ke Pura Jika Banyak Pesertanya**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah(orang)	Persentase
1	Pergi sendiri-sendiri	20	100,0
2	Pergi bersama di koordinir oleh banjar	—	0
3	Ada yang bersama-sama dan ada yang sendiri-sendiri	—	0
4	Tidak tahu	—	0
5	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Dari melihat tabel di atas terungkap

bahwa semua responden menyatakan pergi sendiri-sendiri, walaupun banyak yang ikut bersembahyang ke pura desa. Dalam hal ini banjar tidak mengkoordinirnya, tetapi hanya memberikan pengarahannya bahwa warga banjar diwajibkan untuk bersembahyang pada setiap odalan di desa baik di pura *Desa* maupun di pura *Dalem*. Sampai di pura bagi yang laki-laki duduk bersila dan yang perempuan duduk bersimpuh menghadap ke *paling-gih* dan kadang-kadang berdiri sebentar karena yang lainnya yang lebih datang belum selesai melakukan persembahyangan. Selama persembahyangan berlangsung biasanya diiringi dengan suara gamelan dan suara *kulkul*/kentongan, sehingga suasana menjadi betul-betul lain daripada hari-hari biasa. Selain itu juga disertai dengan asap dupa yang mengepul dan baunya yang harum menambah hikmat dan heningnya suasana itu.

Untuk di pura *Desa* maupun di pura *Dalem* yang merupakan pura milik desa mempunyai sebuah panitia yang khusus menangani mengenai pura yang personilnya berasal dari masing-masing banjar. Adapun struktur organisasinya yaitu: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan beberapa pembantu atau ketua seksi. Panitia ini bertanggung jawab tentang keadaan di pura *Desa* maupun di pura *Dalem* kepada bendesa adat. Selain panitia tersebut juga ada *penyungsong* pura terdiri dari para *pemangku* dan *sadeg*. Biasanya yang mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam persembahyangan ditangani oleh para pemangku, kemudian berapa menghabiskan biaya dilaporkan kepada panitia.

Tabel III-44 memperlihatkan pendapat dari responden tentang pengelolaan/pertanggungjawaban pelaksanaan upacara di pura desa. Ternyata dari keseluruhan responden yang diteliti sebanyak 6 orang atau 30,0 persen menyatakan panitia khusus yang mengelola/bertanggung jawab pada pelaksanaan upacara di pura desa, dan 14 orang atau 70,0 persen menyatakan kelompok penyungsong khusus. Memang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa panitia pura dan kelompok penyungsong khusus sama-sama mengelola/bertanggung jawab pada pelaksanaan upacara di pura *Desa* dan di pura *Dalem* terhadap desa, karena tanpa adanya salah satu komponen tersebut upacara di pura ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Semua biaya yang dihabiskan untuk upacara di pura desa maupun

di pura Dalam dibiayai oleh desa.

Tabel III-44

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pendapatnya
Tentang Pengelolaan/Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Upacara di Pura Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Sebuah panitia khusus	6	30,0
2	Kelompok penyungsong khusus	14	70,0
3	Semua warga desa	—	0
4	Hanya beberapa banjar saja	—	0
5	Tidak tahu	—	0
6	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Bagi umat Hindu di Bali pergantian tahun caka selalu dimulai sesudah tilem ke IX (*kesanga*) sehingga hari raya Nyepi merupakan hari raya tahun baru. Demikian pula umat Hindu di desa Mengwi yang setiap tahun sekali merayakan hari raya Nyepi. Dua hari sebelum hari raya Nyepi didahului dengan upacara *melis* (*mekiyis*) yang artinya menyucikan *pratime* (arca-arca sebagai lambang dewa) serta alat-alat upacara lainnya dan mengiringi *Ida Betara* yang bersemayam di desa Mengwi mencari kekuatan hidup (*amerta*) dan sumber kemakmuran ke pantai Seseh.

Sehari sebelum *melis* kira-kira jam 18.00 arca-arca dan perlengkapan upacara yang lainnya sudah menuju ke pura desa dan langsung bersemayam. Kira-kira pukul 11.00 siang barulah menuju pantai *Seseh* yang jaraknya cukup jauh dari desa Mengwi yang diiringi oleh para *penyungsong*/pendukungnya dan segenap warga desa adat Mengwi, tetapi tidak dikoordinir oleh banjar. Sekembalinya dari pantai Seseh singgah sebentar di pura Desa Kapal dan kemudian menuju pasar Mengwi (di sebelah selatan kantor Camat Mengwi) dan setelah diupacarai barulah menuju ke pura Desa

dan langsung bersemayangan selama dua hari lagi. Besok sore harinya warga desa Mengwi akan bersembahyang seperti pada waktu odalan di pura desa.

Besok harinya (dua hari setelah *mekyis*) diadakan upacara pecaruan yaitu upacara korban kepada roh jahat yang dilakukan oleh desa. Hari ini juga dinamai *Taur Agung Kesanga*, yakni upacara pelepasan tahun caka yang lama dan melangkah tahun caka yang baru. Di banjar-banjar juga diadakan upacara pecaruan, namun tidak melibatkan anggota banjar, hanya ditangani oleh beberapa orang saja yang biasa menghaturkan *sesajen* di pura banjar. Sore harinya, kira-kira pukul 22.00 malam semua arca-arca yang bersemayangan di pura desa kembali ke tempat semanyannya masing-masing setelah diupacarai. Pada malam hari ini juga masing-masing rumah menyalakan obor dan membunyikan alat-alat bunyi-bnyian seperti kentongan kecil dan sebagainya untuk menetralsir *Bhutakala*.

Selanjutnya besok harinya setelah pcaturan/*pengerupukan* tibalah saatnya hari Nyepi, di mana secara lahiriah orang tidak boleh memuaskan hawa nafsu, biasanya hawa nafsu itu timbul karena panas. Oleh karena itu secara lahiriah tidak dibenarkan berapi-api atau menggunakan api. Secara rohaniah Nyepi adalah bersema-di atau mengheningkan pikiran dan perasaan menghentikan segala aktivitas (mengosongkan segala kenangan baik dan buruk). *Krama*/warga banjar harus semua tinggal di rumah dan tidak boleh ribut-ribut, kecuali yang mendapat tugas di banjar.

Selain upacara pada waktu *odalan* di pura Desa dan beberapa rangkaian upacara sebelum Nyepi yang dilakukan di desa, juga ada upacara pada waktu *odalan* di pura Dalem yang dirayakan setahun sekali, tepatnya pada hari Tilem sasih Kedasa. Pada waktu odalan ini semua *krama*/warga desa Mengwi melakukan persembahyangan ke pura Dalem sama halnya pada waktu odalan di pura Desa.

Semua upacara tersebut di atas diadakan di tingkat desa yang ditangani oleh panitia pura dan penyungsong khusus serta semua biaya yang dihabiskan ditanggung oleh desa.

Sementara pura banjar/pemerajan banjar Pregai juga mempunyai hari odalan tertentu yang dirayakan setiap enam bulan (Bali) sekali tepatnya pada hari Buda Cemeng (dua puluh satu hari sebelum Galungan) yang melibatkan segenap anggota banjar. Kira-kira

dua hari sebelumnya *prajuru*/pimpinan banjar sudah mulai mencari perlengkapan untuk perlengkapan upacara. Sehari sebelumnya para istri-istri *prajuru* banjar mulai mengerjakan segala sesuatu yang akan digunakan besokharinya dan sudah mulai membersihkan *bale* banjar dan menghiasnya. Selanjutnya sore harinya pada waktu *odalan* masing-masing kepala keluarga bersama istrinya akan membawa *sesajen/bebanten* untuk dihaturkan di pura tersebut. Persembahyangan di pura banjar ini dipimpin oleh *pemangku* desa. Dalam persembahyangan ini juga hadir para remaja yang ada di banjar ini. Setelah selesai *Tri Sandya* bersama dilanjutkan *metirta* (minum air yang telah disucikan oleh *pemangku* atau pendeta yang memimpin upacara). Dengan demikian selesailah rangkaian upacara *odalan* di pura banjar. Kemudian buah-buahan yang terdapat dalam *bebanten/sesajen* yang dibuat di banjar boleh dinikmati oleh segenap warga banjar yang hadir sebelum pulang ke rumah masing-masing. Semua biaya upacara dipikul oleh banjar.

Setiap bulan mati (*tilem*) masyarakat desa Mengwi menyelenggarakan upacara pecaruan di pura desa, di banjar dan di rumah keluarga masing-masing. Upacara di pura desa hanya ditangani oleh para *pemangku*, sedangkan di banjar ditangani oleh salah satu *prajuru* banjar. Sementara di rumah keluarga ditangani oleh keluarga masing-masing. Sarana upacara pecaruan ini antara lain tirta dan beberapa *bebanten* yang diperoleh di pura desa selain *bebanten* dibuat sendiri serta *sanggah cucuk*. Upacara ini diselenggarakan pada waktu senja harinya.

6. Sistem Pengorganisasian Kegiatan-kegiatan Banjar dan desa

Banjar sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen antara lain pimpinan, anggota perlengkapan dan wilayah. Dalam hal ini *kelian* banjar merupakan pucuk pimpinan tertinggi di tingkat banjar. Dengan demikian semua organisasi yang ada di banjar di bawah naungan banjar, seperti organisasi PKK dan *seka teruna-teruni*.

Organisasi PKK yang anggotanya dari istri-istri kepala keluarga hanya mengadakan kegiatan arisan sebulan sekali yang juga dihadiri oleh *kelian banjar*.

Mengenai cara kerja arisan tersebut adalah sebulan sekali akan

diputar di balai banjar. Masing-masing anggota membayar arisan sebesar Rp. 500,— yang langsung dikumpulkan pada bendahara. Setengah dari uang yang terkumpul seluruhnya akan ditarik dan setengahnya lagi disimpan yang menurut rencana akan digunakan untuk membeli pakaian seragam, karena sampai saat ini PKK belum mempunyai pakaian seragam. Adapun tujuan daripada arisan itu bukan semata-mata untuk mengumpulkan uang dan kemudian ditarik, akan tetapi untuk memupuk rasa persaudaraan dan saling tukar-menukar pikiran serta pengalaman di antara anggotanya, misalnya mengenai keluarga berencana, masak-memasak, merawat anak, kebersihan lingkungan dan lain-lain melalui ngobrol-ngobrol sebelum diadakan penarikan.

Sementara *seka teruna-teruni* anggotanya dari orang-orang yang sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) bagi yang bersekolah dan bagi yang tidak apabila berumur 17 tahun ke atas. Mengenai struktur organisasinya yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan beberapa seksi. Namun sampai saat ini belum mempunyai anggaran dasar yang tertulis. Dalam melaksanakan fungsinya hanya berpedoman pada peraturan-peraturan hasil daripada keputusan rapat, yang bergerak dalam bidang pendidikan, olah raga dan gotong royong.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, setiap hari minggu diadakan les untuk anak-anak sekolah dasar yang bertempat di balai banjar. Pada kesempatan ini, anak-anak tersebut akan membeberkan kesulitan-kesulitannya yang dialaminya seminggu yang lalu kepada guru lesnya. Jika masih ada waktu masing-masing orang akan membuat soal untuk didiskusikan, sehingga setiap pertemuan ada saja persoalan yang dibahas.

Selanjutnya kegiatan dalam bidang olah raga dapat dikatakan cukup maju. Hal ini terbukti karena telah terbentuk persatuan sepak bola, volly baal putra-putri, tenis meja putra-putri, lari putra-putri dan catur yang sudah sering mengadakan pertandingan persahabatan dengan pemain-pemain dari luar banjarnya.

Kadang-kadang *seka teruna-teruni* membantu banjar bergotong-royong di lingkungan banjar serta perumahan, yang diselenggarakan dua kali sebulan yang dikoordinasikan oleh *kelian* banjar. Dalam kegiatan ini tidak semua anggota banjar ikut serta, tetapi

hanya anggota banjar *ngarep* saja. Dua hari sebelum gotong royong juru *arah/kesinoman* menyebarkan informasi ke rumah-rumah anggota banjar *ngarep*. Kemudian pada hari yang telah ditentukan dibunyikan kentongan *kulkul* dengan pukulan pelan-pelan untuk mengumpulkan anggota banjar. Pada hari-hari tertentu misalnya dekat hari besar mereka bergotong royong tidak saja di lingkungan banjar dan perumahan tetapi juga di lingkungan desa bergabung dengan banjar-banjar yang lainnya yang dikoordinasikan oleh kepala desa. Dalam hal ini pimpinan banjar tidak hanya menggerakkan/memerintah saja namun ikut serta bekerja. Bagi anggota banjar yang tidak hadir dikenakan sanksi yang berupa denda sebesar Rp. 25,-

Apabila ada anggota banjar yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan upacara, misalnya upacara perkawinan, upacara ngaben, dan lain-lain yang akan melibatkan banjar, terlebih dahulu harus melapor kepada *kelian* banjar adat dan setelah ada kesepakatan, *kelian* adat akan memerintahkan *kesinoman/juru arah* untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan tersebut kepada segenap anggota banjar. Selanjutnya tepat pada waktunya *kulkul* akan dibunyikan untuk mengumpulkan anggota banjar.

Apabila dalam hal ini ada yang tidak mampu untuk melibatkan banjar, dapat pula hanya melibatkan *tempekannya* saja atau minta tolong kepada tetangga. Namun dalam kematian bagaimanapun keadaan keluarganya sudah menjadi kewajiban banjar untuk ikut serta terlibat mengiringi jenazah ke kuburan.

Sebagai tugas rutin banjar adat yang ada di lingkungan desa adat Mengwi harus ada sebanyak 13 (tiga belas) orang yang meronda/*mekemit* setiap malam di pura desa secara bergiliran yang dikoordinasikan oleh *bendesa* adat dan dibantu oleh pimpinan banjar untuk mengontrol anggotanya. Anggota banjar yang terlibat dalam hal ini hanya anggota banjar *ngarep* saja. Bagi yang tidak menjalani kewajibannya ini dikenakan sanksi yang berupa denda Rp. 500,-

Setiap sebulan sekali, anggota banjar *ngarep* diwajibkan rapat di pura desa yang dikoordinasikan oleh *bendesa* adat. Biasanya yang dibahas dalam rapat adalah mengenai pembangunan, odalan, dan hal-hal yang menjadi milik desa antara lain: pasar, pertokoan di pasar Mengwi, THR (Taman Hiburan Rakyat) dan lain-lain.

Semua tanah yang termasuk desa adat Mengwi, kecuali tanah di wilayah banjar adat *Ganter* dan banjar adat *Bajra* karena sudah termasuk wilayah Kabupaten Tabanan, adalah termasuk tanah di bawah hak ulayat desa (tanah yang ada di bawah pengawasan desa). Selain itu desa adat Mengwi juga memiliki beberapa hektar tanah sawah.

Kalau ditinjau perkembangan pembangunan di desa Mengwi cukup pesat, baik di bidang budaya, sosial, maupun ekonomi. Hal ini terbukti dengan adanya fasilitas pendidikan yang jumlahnya relatif banyak (dari tingkat TK sampai SLA) dan bangunan fisik lainnya serta orang-orang yang terdidik relatif banyak juga jumlahnya. Untuk mengetahui ada tidaknya pungutan-pungutan yang dirasakan oleh anggota banjar untuk kepentingan desa dapat dilihat pada tabel III-45.

Tabel III-45

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Merasakan Tidaknya Pungutan-pungutan Untuk Kepentingan Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ada	11	55,0
2	Tidak ada	5	25,0
3	Tidak tahu	4	20,0
4	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Dari tabel tersebut ternyata sebagian besar responden yang diteliti merasakan adanya pungutan-pungutan untuk kepentingan desa yakni 11 orang atau 55,0 persen dari jumlah responden, 5 orang atau 25,0 persen yang menyatakan tidak ada dan 4 orang atau 20,0 persen yang menyatakan tidak tahu. Responden yang menyatakan ada berstatus sebagai anggota banjar *ngaren*, seandainya yang menyatakan tidak ada maupun tidak menjawab adalah anggota banjar *pengele*. Mengenai rupa daripada pungutan-pungutan tersebut dapat dilihat dalam tabel III-46.

Tabel III-46
Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Jenis
Pungutan Untuk Kepentingan Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Berupa uang	5	25,0
2	Berupa bahan	1	5,0
3	Berupa tenaga/untuk bekerja	5	25,0
4	Tidak tahu	9	45,0
	J u m l a h	20	100,0

Dari tabel tersebut dapat terungkap bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti terlihat 5 orang atau 25,0 persen menyatakan pungutan itu berupa uang, namun tidak secara kontinu, 1 orang atau 5,0 persen menyatakan pungutan itu berupa bahan. Adapun yang dimaksudkan di sini yaitu janur, daun enau, dan lain-lain pada saat upacara di desa, serta sebanyak 5 orang atau 25,0 persen menyatakan pungutan itu berupa tenaga/untuk bekerja antara lain: tenaga untuk meronda/*mekemit* di pura desa dan gotong royong.

Dari tabel tersebut sebanyak 9 orang atau 45,0 persen menyatakan tidak tahu, karena mereka belum mempunyai kewajiban di desa.

Banjar secara struktural di bawah struktur desa. Adalah landasam inti dan landasan ideal dalam hubungan pimpinan desa secara vertikal adalah landasan kerja sama (gotong royong) untuk menyelesaikan tugas-tugas desa. Sedangkan secara horisontal antara aparat desa lebih dilandasi oleh asas kepemimpinan yang bersifat bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama. Banjar adat sebagai sub-komunitas desa adat dan banjar dinas sebagai sub-komunitas desa dinas mempunyai peranan yang besar dalam komunitas. Untuk mengetahui ada tidaknya perhatian desa terhadap banjar, dapat dilihat dalam tabel III-47.

Tabel III-47

Responden Banjar Pregai Digolongkan menurut Pendapatnya
Tentang Ada Tidaknya Perhatian Desa Terhadap Banjarnya

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Ada	20	100,0
2.	Tidak	—	0
3.	Tidak tahu	—	0
4.	Tidak menjawab	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti ternyata seluruhnya menyatakan ada bantuan. Mengenai bentuk daripada bantuan tersebut dapat dilihat dalam tabel III-48

Tabel III-48

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Bentuk
Bantuan Desa yang Diterima oleh Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Berupa uang bantuan	—	0
2	Berupa bahan bangunan	—	0
3	Pengelolaan administrasi	18	90,0
4	Berupa sarana upacara	2	10,0
	J u m l a h	20	100,0

Tabel tersebut memperlihatkan 18 orang atau 90,0 persen menyatakan ada bantuan yang berupa pengelolaan administrasi banjar, misalnya buku register, dan sebanyak 2 orang atau 10,0 persen menyatakan bantuan berupa sarana upacara, seperti *tirta*

pada waktu-waktu tertentu.

Selain banjar merupakan wadah pelaksana dari bermacam-macam kegiatan komunitas dalam aspek kemasyarakatan, ekonomi, agama dan pemerintahan, juga berperan dalam menunjang berbagai kegiatan pemerintah seperti pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, kelian banjar mulai berperan pada tahun 1980. Dengan demikian bagi mereka yang anaknya sudah bersekolah sebelum tahun 1980 tidak dapat bantuan dari pimpinan banjar. Dengan cara ini sering terjadi pertengkaran di kalangan orang tua murid, karena masing-masing mengharapkan anak-anaknya diterima, walaupun usianya masih kecil atau belum sewajarnya dapat diterima. Tabel berikut ini memperlihatkan tentang pendapat mereka merasa tidaknya responden dibantu oleh pimpinan banjar atau desa ketika memasukkan anak ke sekolah dasar (SD).

Tabel III-49

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pendapat Mereka Tentang Merasa Tidaknya Dibantu oleh Pimpinan Banjar atau Desa Ketika Memasukkan Anak Ke SD

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	11	55,0
2	Tidak	9	45,0
	J u m l a h	20	100,0

Dari sekian banyak responden yang diteliti hanya 11 orang atau 55,0 persen yang dibantu oleh banjar atau desa ketika memasukkan anak ke SD. Namun setelah tamat SD untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dibantu oleh pimpinan banjar atau desa. Untuk lebih jelasnya jawaban responden mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel III-50 dan III-51.

Tabel III-50

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Pendapat Mereka Merasa Tidaknya Dibantu oleh Pimpinan Banjar atau Desa Ketika Memasukkan anak ke SLTP

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Ya	—	0
2	Tidak	7	35,0
3	Tidak tahu	3	15,0
4	Tidak menjawab	10	50,0
	J u m l a h	20	100,0

Tabel III-51

Responden Banjar Pregai Diolongkan Menurut Pendapat Mereka Merasa Tidaknya Dibantu oleh Pimpinan Banjar atau Desa Ketika Memasukkan Anak ke SLTA

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase
1	Ya	—	0
2	Tidak	3	15,0
3	Tidak tahu	3	15,0
4	Tidak menjawab	14	70,0
	J u m l a h	20	100,0

Semua responden yang memperoleh bantuan dari pimpinan banjar atau desa, ketika memasukkan anak ke SD, hanya untuk mengkoordinasikan pendaftaran saja. Menjelang penerimaan murid baru pimpinan banjar akan mencatat anak-anak yang akan tamat TK (Taman Kanak-kanak) dan beberapa yang tidak melalui jalur TK, karena masih ada orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke TK. Selanjutnya pimpinan banjar akan membawa identitas anak-anak tersebut ke sekolah dasar. Sesuai dengan informasi yang diperoleh di sekolah, pimpinan banjar akan menginformasi-

kan kepada orang tua murid yang bersangkutan.

Tepat pada hari yang telah ditentukan, orang tua murid akan mengantar anaknya ke sekolah dan selanjutnya mengisi blangko pendaftaran tentang identitas anaknya masing-masing. Penentuan untuk dapat tidaknya diterima seorang anak akan ditentukan oleh identitasnya sendiri sesuai dengan yang tertulis dalam blangkonya masing-masing. Adapun yang memimpin tentang proses penerimaan murid baru ini adalah guru-guru di sekolah bersangkutan dan didampingi oleh pimpinan masing-masing banjar. Tabel III-52 berikut mencantumkan mengenai data-data di atas ini.

Tabel III-52

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Bantuan Yang Diterimanya Ketika Memasukkan Anaknya ke SD

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Hanya koordinator pendaftaran saja	11	55,0
2	Keringanan biaya pendaftaran	—	0
3	Mem bantu memilih sekolah	0	0
4	Tidak menjawab	9	45,0
	Jumlah	20	100,0

Dewasa ini tujuan program keluarga berencana cenderung berusaha menekan lajunya pertumbuhan penduduk yang selanjutnya diharapkan agar setiap keluarga secara ekonomis dapat tumbuh dengan baik, sehingga mereka akan lebih mampu untuk menghadapi keluarga mereka secara wajar.

Keluarga berencana adalah merupakan program Nasional dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam rangka mensukseskan program ini. Demikian pula halnya seperti lembaga sosial seperti desa dan

banjar ikut serta dalam mensukseskan program tersebut. Warga banjar Pregai dalam hal ini sudah relatif banyak yang mengikuti program keluarga berencana. Tabel III-53 mencantumkan responden ikut tidaknya program keluarga berencana.

Tabel III-53
Responden Banjar Pegai Digolongkan Menurut Ikut
Tidaknya Program Keluarga Berencana

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Ikut	18	90,0
2.	Belum ikut	2	10,0
3.	Tidak ikut	—	0
	J u m l a h	20	100,0

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti sebanyak 18 orang atau 90,0 persen sudah mengikuti program keluarga berencana, sedangkan sisanya sebanyak 2 orang atau 10,0 persen belum ikut, karena baru mempunyai seorang anak yang berumur beberapa bulan.

Dalam rangka mensukseskan program keluarga berencana di banjar ini ditempuh dengan cara memberikan saran-saran kepada anggota banjar pada rapat-rapat tertentu oleh pimpinan banjar. Jauh sebelum adanya KB yang disiarkan lewat banjar, katanya ada petugas dari desa yang bertugas untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang program keluarga berencana. Untuk mengetahui keikutsertaan responden dalam program keluarga berencana atas saran banjar atau petugas desa dapat dilihat dalam tabel III-54.

Tabel III-54

Responden Banjar Pregai Digolongkan Menurut Keikutsertaannya
Berkeluarga Berencana atas Saran Banjar atau Petugas Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Saran banjar	3	15,0
2	Kemauan sendiri	14	70,0
3	Petugas desa	1	5,0
4	Tidak menjawab	2	10,0
	J u m l a h	20	100,0

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti sebagian besar menyatakan keikutsertaannya berkeluarga berencana karena kemauan sendiri yakni sebanyak 14 orang atau 70,0 persen dari jumlah responden, 3 orang atau 15,0 persen atas saran banjar.

Dalam tabel tersebut juga ada 1 orang atau 5,0 persen yang menyatakan keikutsertaannya berkeluarga berencana karena petugas desa, yang mana orang ini sekarang umurnya sudah relatif tua, dan 2 orang atau 10,0 persen tidak menjawab karena belum ikut program keluarga berencana.

7. Analisa Tentang Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali

Desa secara operasionalnya dapat dibedakan desa adat dan desa dinas yang terjalin secara fungsional dan tidak secara struktural. Desa adat dalam segi pemerintahan adat bersifat otonomus karena mempunyai aturan-aturan (*awig-awig*) tersendiri yang hanya berlaku bagi warga di wilayah bersangkutan.

Banjar sebagai suatu sistem organisasi terkecil dalam masyarakat Mengwi khususnya dan masyarakat Bali umumnya menurut wujudnya dapat dibedakan *banjar* adat dan *banjar* dinas. Sehingga menurut status kepemimpinan banjar dapat dibedakan pimpinan *banjar* adat (*kelian* adat) dan pimpinan *banjar* dinas (*kelian* dinas). Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pimpinan banjar berpedoman pada *awig-awig banjar* dan hasil keputusan rapat.

Secara struktural banjar merupakan bagian yang kuat dari desa dan banjar membentuk struktur desa. Tanpa *banjar* desa tidak bisa tergambar. Sedangkan secara fungsional banjar merupakan bagian yang tidak terpisah dari desa dan *banjar* merupakan wujud pemerintahan desa. Antara *banjar* dan desa tampak adanya saling keterkaitan/ketergantungan. Oleh karena itu setiap warga banjar yang berurusan surat-menyurat harus terlebih dahulu menghubungi pimpinan *banjarnya*. Dan semua organisasi yang ada di banjar seperti *seka teruna-teruni* dan PKK di bawah naungan banjar.

Dalam sistem keanggotaan banjar tampak adanya tingkatan-tingkatan yaitu anggota banjar *ngarep* yang berstatus senior dan anggota banjar *pengele* yang berstatus yunior. Sebelum anggota banjar yang berstatus yunior (*pengele*) menggantikan kedudukan ayahnya sebagai anggota banjar *ngarep*, diberi bimbingan serta tuntunan oleh anggota yang berstatus senior untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas banjar. Dengan demikian dalam hal ini terjadi proses belajar-mengajar, sehingga nantinya anggota yang berstatus yunior dapat sebagai penerus nilai, gagasan, dan keyakinan kepada generasi berikutnya.

Banjar dapat berfungsi sebagai pusat orientasi masyarakat desa. Hal ini terbukti dengan menjadi salah satu anggota banjar merasa aman dan merasa adanya perlindungan serta merasa bangga. Orientasi masyarakat terhadap banjar sangat kuat sekali. Hal ini terlihat jika orang-orang yang seharusnya sudah menjadi anggota banjar tetapi tidak menjadi anggota banjar dipandang tidak baik dan dikatakan tidak tahu aturan seperti yang ditunjukkan pada tabel III-41. Dengan demikian sementara ini setiap orang yang sudah berkeluarga dan tinggal menetap di wilayah banjar Pregai telah terdaftar sebagai anggota banjar, yang menurut statusnya dapat dibedakan anggota banjar *ngarep*, anggota banjar *pengele*, anggota banjar *balu*, dan anggota banjar *ayah tumpangan*.

Dalam kegiatan-kegiatan desa, banjar dapat berperan sebagai sumber tenaganya, baik di desa adat maupun di desa dinas. Dalam desa adat tampak dalam kegiatan gotong royong, *mekemit/meronda* di pura desa, rapat, dan menyumbangkan tenaga (*ayahan*) pada upacara. Sedangkan dalam desa dinas yang tampak dalam kegiatan gotong royong dan rapat.

Pada kegiatan-kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh sa-

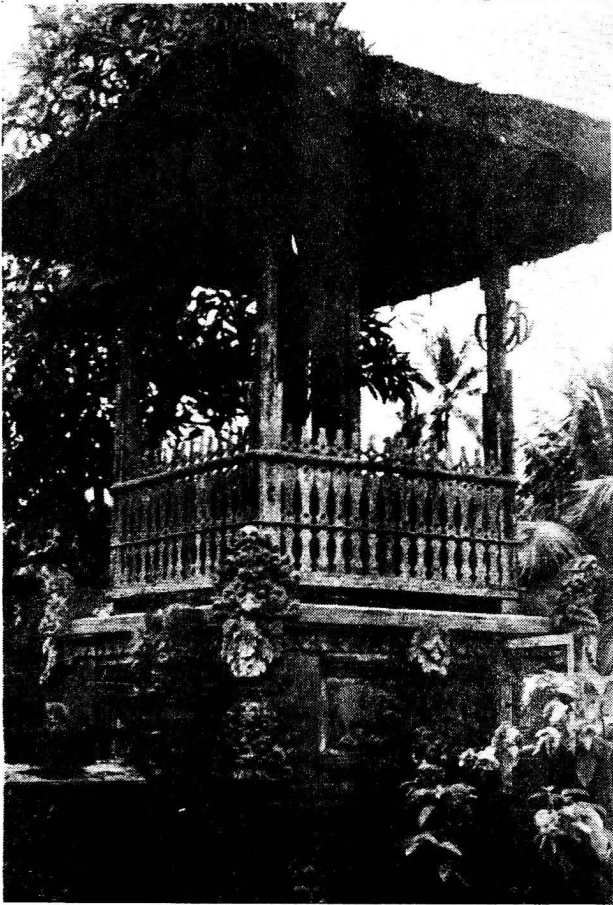
lah seorang anggota banjar, misalnya upacara pembakaran mayat (*ngaben*), upacara leluhur (*memukur*), upacara potong gigi (*mesan-gih*), upacara perkawinan, odalan (upacara) di sanggah/pemera-jan, dan lain-lain, banjar dapat berperan sebagai lembaga pengor-ganisasian pengerahan tenaga. Selain itu dalam keadaan-keadaan bahaya, misalnya kebakaran, pencurian, perkelahian, dan lain-lain banjar dapat berperan sebagai penyelamat, berfungsi sebagai pe-ngerahan tenaga dengan cepat-cepat dan efektif.

Untuk mensukseskan program pendidikan, banjar hanya ber-peran untuk mengkoordinir pendaftaran anak-anak yang akan masuk sekolah dasar saja. Demikian pula dalam hal program ke-luarga berencana, banjar juga mempunyai peranan yang cukup berarti, karena terbukti dari keikutsertaan anggota banjar yang berkeluarga berencana ada yang menyatakan berkat adanya saran banjar seperti tercantum dalam tabel III-54.

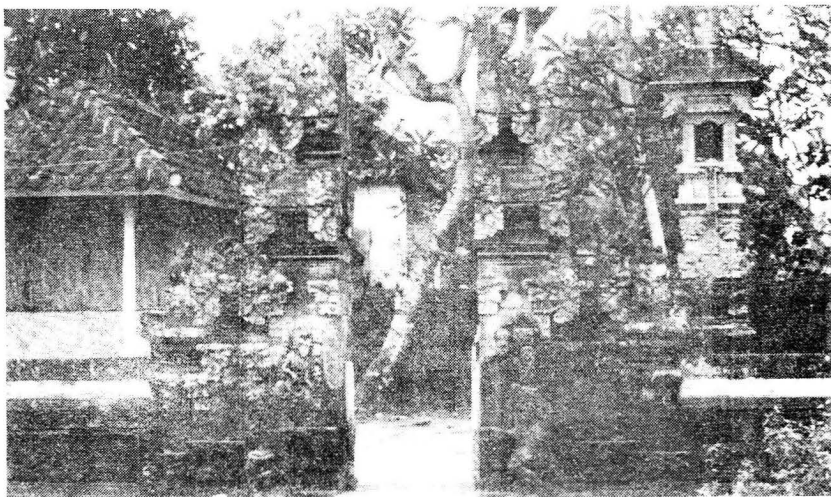
Selain itu banjar juga berperan sebagai lembaga pengorgani-sasian kegiatan sosial, budaya dan ekonomi. Dalam kegiatan sosial tampak dalam bidang gotong royong yang diselenggarakan dua minggu sekali secara kontinyu di lingkungan banjar dan perumah-an penduduk. Dalam kegiatan budaya tampak dalam upacara per-sembahyangan di pura (pura *desa*, pura *dalem*, pura *banjar*), *pe-caruan* dan lain-lain. Selanjutnya dalam suatu penggalian dana un-tuk kepentingan banjar, banjar dapat juga berperan sebagai lem-baga pengorganisasian kegiatan ekonomi.

Walaupun secara formal banjar tidak mengkoordinir anggotanya dalam mencari pekerjaan, namun sebagai anggota banjar me-reka merasa mendapatkan keringanan dalam mencari pekerjaan, khususnya dalam pertukangan dan perburuhan. Seperti dijelaskan bahwa para kontraktor/pengusaha akan mengutamakan warga ban-jarnya apabila memerlukan tukang ataupun buruh. Demikian pula para tukang apabila memerlukan buruh akan berusaha mencari dulu dalam banjarnya sendiri.

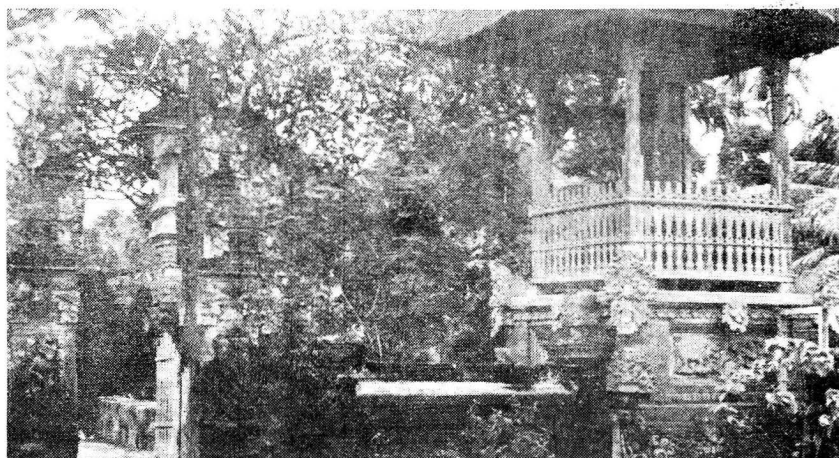
Berdasarkan atas kenyataan yang dijumpai di lapangan seper-ti diuraikan di atas jelas bahwa peranan banjar bagi masyarakat menyatu pada bidang adat maupun dinas.



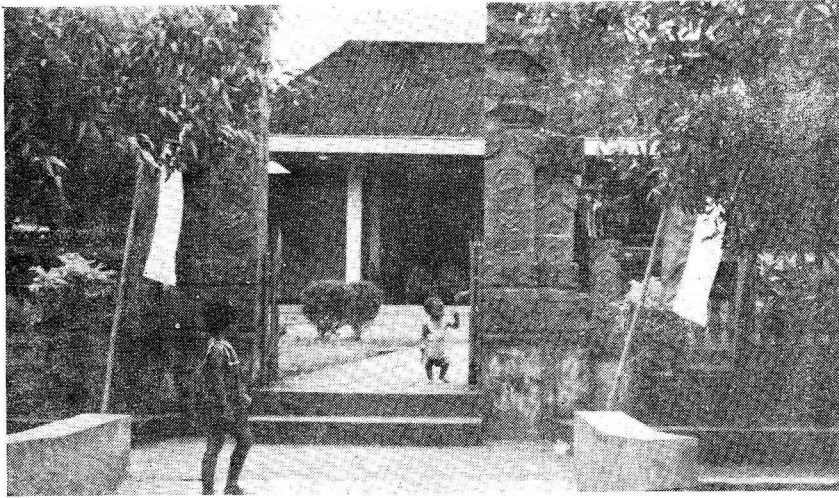
Gambar 12 Bangunan *Bale Kulkul* dengan dua buah *kulkul* atau kentongan, sebagai kelengkapan sebuah *banjar* di Bali; yang dimiliki oleh Banjar Pragae di Desa Mengwi.



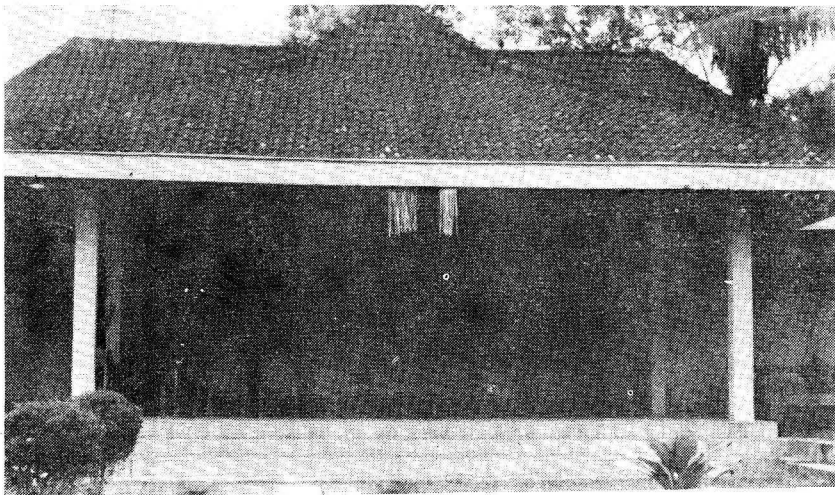
Gambar 13 Bangunan *Merajan Banjar* atau *Pura Banjar* di Banjar Praga Desa Mengwi, tempat segenap warga banjar melakukan persembahyangan dan sebagai kelengkapan sebuah Bale Banjar di Bali.



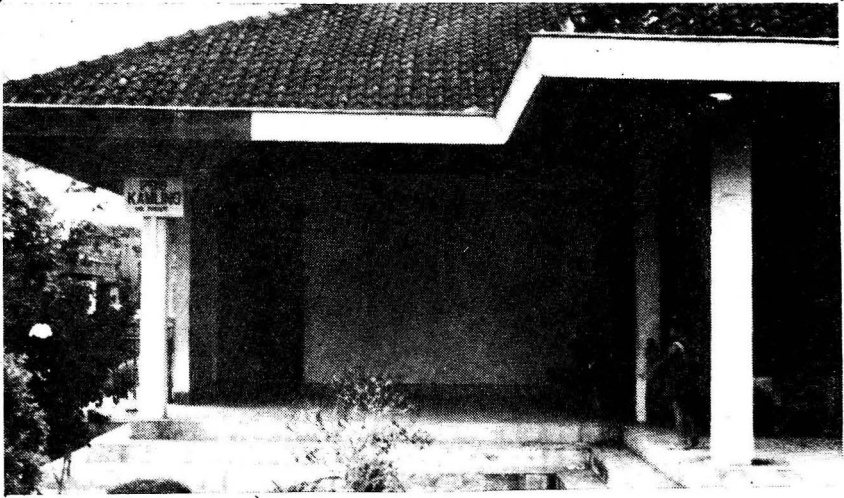
Gambar 14 Bagian daerah yang dinyatakan *suci* atau sakral dari sebuah lingkungan Bale Banjar di Banjar Praga yaitu, bangunan *Bale Kulkul* dan *Merajan Banjar*.



Gambar 15 Pintu Masuk Banjar Pragmae Desa Mengwi dengan tembok kelilingnya yang membatasi lingkungan bale banjar dengan lingkungan lainnya. Hiasan yang terpasang dalam rangka menyambut hari raya.



Gambar 16 Bangunan Bale Banjar Pragmae Desa Mengwi dalam wujud pendopo atau bangunan terbuka tempat warga banjar mengadakan kegiatan bersama.



Gambar 17 Bagian samping dari bangunan bale banjar Pragmae yang dimanfaatkan untuk Pos Kamling dan Kantor administrasi *banjar*, sebagai wujud fungsi yang baru dari bangunan *bale banjar* pada umumnya di Bali.



Gambar 18 Suasana lingkungan pemukiman penduduk di Banjar Pragmae Mengwi, dengan *rurung* atau gang yang panjang dan bangunan perumahan di kiri-kanannya.

KASUS 3

PERANAN BANJAR MASYARAKAT KOTA

DENPASAR : SEBUAH DESKRIPSI TENTANG BANJAR
TRANSISI DI PUSAT KOTA (KASUS BANJAR GERENCENG,
DESA PEMECUTAN KAJA)

A. IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN

1. Lokasi Geografis

Kota Denpasar sebagai ibu kota Propinsi Bali mengalami perkembangan yang demikian pesat. Perkembangan tidak saja terjadi pada pembangunan pusat pemerintahan saja tetapi juga menyangkut perkembangan pada bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Bermula dari fungsi sebagai kota kerajaan Badung, kemudian ibu kota Swapraja Badung dan akhirnya ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Pusat kota adalah alun-alun atau tanah lapang dekat bekas Puri Denpasar yang sekarang dikitari oleh Rumah kediaman Gubernur, Kantor Kodam IX Udayana, Bali Museum dan kantor Kodim Denpasar serta kantor Pertamina. Alun-alun yang diberi nama tanah lapang Puputan Badung ini menjadi pusat kota dengan istilah yang populer 'Kilometer 0' dikelilingi oleh daerah perumahan penduduk yang terbentuk dalam wilayah banjar-banjar yang secara tradisional telah ada sejak jaman dahulu. Ke arah barat dari alun-alun ini adalah pusat pasar yang juga mengambil nama Pasar Badung, dengan satu jalan utama dari barat ke timur sebagai pusat pertokoan atau perdagangan. Beberapa jalan potong lainnya yang memotong jalan utama tadi dari utara ke selatan atau sebaliknya berkembang pula sebagai pusat perdagangan lainnya atau pusat pertokoan. Di sekitar pusat perdagangan tadi berkembang pula pemukiman penduduk asli kota Denpasar yang dikenal dengan istilah '*anak uli Badung*' (orang Badung atau orang Denpasar) dengan ciri-ciri yang khusus yang membedakannya dari orang-orang dari daerah kabupaten lainnya di Bali. Ciri khususnya yang terkenal adalah 'dialek bahasa Bali' nya yang kaku dan praktis dengan penggunaan bahasa Bali biasa/rendahan yang agak dominan. Dan ciri lainnya adalah okupasi penduduk sebagai dagang dan pengusaha yang dominan di sekitar pusat pemerintahan tadi dan pusat perdagangan.

Perkembangan selanjutnya menyebabkan kota Denpasar menjadi pusat kehidupan bagi daerah-daerah lainnya dari seluruh kabupaten di Bali. Penduduk berdatangan ke kota Denpasar sehingga Denpasar menjadi kota dengan bermacam ciri: pusat

pemerintahan, pusat pendidikan, pusat pelayanan sosial, dan juga pusat orientasi bagi para pendatang. Berkembanglah kemudian pusat-pusat pemukiman yang menyebar ke semua penjuru kota dan meluas ke arah empat mata angin. Kehidupan kemudian berubah dengan cepat dari kota dengan ciri pemukiman penduduk yang tergabung dalam banjarbanjar yang asli/khas kota Denpasar ke kehidupan sebuah kota kompleks dengan berbagai masalahnya. Sementara banjar-banjar asli yang tadinya menjadi pusat pemukiman penduduk asli kota Denpasar 'terjepit' di tengah-tengah perkembangan tadi.

Salah satu banjar yang 'terjepit' di tengah-tengah perkembangan kota ini adalah Banjar Gerenceng yang dipilih sebagai salah satu banjar sampel dari penelitian ini. Terletak kira-kira 1000 meter dari alun-alun, dan kira-kira 300 meter dari Pasar Badung bahkan ada bagian-bagian wilayahnya yang juga sudah menjadi pusat perdagangan, banjar ini masih berkembang sebagai pusat pemukiman penduduk asli ditambah dengan sejumlah besar penduduk pendatang dari berbagai daerah. Hal inilah yang menyebabkan dipilihnya banjar ini sebagai sampel sebagai banjar yang masih berusaha mempertahankan beberapa sistem aturannya yang asli di tengahaengah perkembangan ke arah kehidupan yang moderen dari penduduknya (sebagai banjar transisi yang ada di tengah kota administratif Denpasar). Berbatasan dengan beberapa banjar lain yang juga menghadapi masalah yang sama dan jalan raya pusat kota yang menjadi pusat perdagangan tadi, ternyata banjar ini masih dapat bertahan dengan berbagai peraturan banjar yang bersifat lokal terutama dalam pengaturan penduduknya yang sudah mulai mempunyai ciri yang kompleks.

2. Kondisi dan Lingkungan Sekitar.

Kondisi daerahnya sama seperti kondisi banjar lainnya di tengah-tengah kota, yaitu dengan ciri yang khas adalah padatnya daerah pemukiman. Beberapa *rurung* atau gang kecil yang belum terjamah oleh perbaikan kampung masih menjadi urat nadi perhubungan bagi warga banjar dan juga orang lain yang lewat, menjadi ciri dari kondisi banjar ini. Sungai Badung yang membelah kota Denpasar menjadi dua bagian juga menjadi batas Timur dari

banjar, di mana beberapa keperluan penduduk masih berlangsung di sana. Rumah-rumah umumnya sudah terdiri dari bahan tembok dan atap genteng walau beberapa di antaranya masih ada bangunan rumah yang terbuat dari bahan gedeg dan atap ilalang. Banyak rumah penduduk yang masih berpola tradisional dengan tetap menerapkan konsepsi *Tri Hita Karana*.

Sebagai pusat dari Banjar ini adalah *Bale Banjar* Gerenceng yang terletak di Jalan Dr. Sutomo — (sebelum jalan ini diberi nama, orang cukup menyebut nama banjar Gerenceng saja, dan pernah juga menyandang nama Jalan Arca karena banyaknya pemahat atau pematung yang tinggal di wilayah banjar ini dan beberapa banjar lainnya di jalan ini), — yaitu sebuah bangunan yang berfungsi bagi segenap warga banjar. *Bale Banjar* ini mempunyai pola bangunan yang memenuhi kriteria tiga unsur atau *Tri Angga* dalam konsepsi kehidupan orang Bali yaitu: unsur *Suci, Utama Angga* yaitu terdiri dari komplek/wilayah *Merajan Banjar*, unsur *Madya Angga* yaitu bangunan *Bale Gede, Bale banjar* untuk berbagai kegiatan dan *Nista Angga* yaitu bangunan sumur, gudang dan dapur. Semuanya dalam mempertahankan konsepsi *Tri Hita Karana* dalam kehidupan masyarakat. Sebuah Pura sebagai cagar budaya nasional yaitu Pura Maospahit juga terletak di wilayah banjar ini, yaitu di seberang banjar. Jalan Sutomo sendiri karena dibuka satu arah adalah jalan masuk ke kota Denpasar dari wilayah kota sebelah barat, karena itu kepadatan lalu lintas yang melewati jalan ini cukup tinggi setiap harinya. Demikian juga bagian wilayah selatan dari banjar ini yaitu berbatasan dengan jalan Gajah Mada adalah jalan di mana pusat-pusat pertokoan dan bank dibangun. Di seberang bagian wilayah ini adalah pusat pasar Badung, pasar terbesar di kabupaten Badung dan juga di Propinsi Bali, karena menjadi pusat perdagangan semua kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu banyak di antara warga banjar yang mendapatkan penghidupannya di pasar ini sebagai pedagang, atau jasa lainnya.

3. Penduduk dan Gambaran Demografis

Penduduk banjar yang terdiri dari penduduk yang asli berasal dari Banjar Gerenceng dan para pendatang, seluruhnya berjumlah 3.106 jiwa yang terdiri dari 644 KK. Mereka mendiami wilayah

banjar yang dibagi (untuk memudahkan administrasi dan koordinasi pekerjaan dan pengerahan tenaga) menjadi 4 *tempekan* (wilayah banjar). Demikian juga status penduduk yang dibagi menjadi warga *banjar Ngarep* (suka duka) dan warga banjar *Tan Ngarep* (administrasi). Gambaran penduduk terlihat seperti pada tabel berikut.

Tabel IV-1
Penduduk Banjar Gerenceng Menurut Status Keanggotaan,
Jenis Kelamin dan KK
Data per Januari 1986

No.	Tempekan	Br. Ngarep				Br. Tan Ngarep			
		KK	L	P	Jml.	KK	L	P	Jml.
1.	Gerenceng	64	183	179	362	19	50	41	91
2.	Majelangu	57	139	154	293	59	135	114	249
3.	Batang Mo- ning	55	147	141	288	111	266	226	492
4.	Dauh Jalan	85	213	220	433	194	459	439	898
	Jumlah	261	682	694	1376	383	910	820	1730

Sumber: Statistik Banjar

Untuk banjar Tan Ngarep masih dibedakan mereka yang berstatus WNI dan juga mereka yang berstatus masih WNA terutama dari keturunan Cina yang banyak di Jalan Gajah Mada dan Wahidin di bagian baret wilayah bayak

Gambaran jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV-2

Penduduk Banjar Gerenceng Menurut Jenis Pekerjaan
Data per Januari 1986

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Pegawai Negeri	64	7.7
2.	Pensiunan	17	2.1
3.	ABRI	4	0.4
4.	Pertukangan	10	1.2
5.	Dagang	245	29.4
6.	Sopir	25	3.1
7.	Lainnya (Jasa)	468	56.9
	J u m l a h	833	100.0

Data: Statistik Banjar Gerenceng 1986.

Dari gambaran data tersebut terlihat bahwa jenis-jenis pekerjaan yang ada dan banyak hubungannya dengan lingkungan banjar itu sendiri yaitu: pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pasar. Segi pendidikan juga menunjukkan gambaran yang cukup baik dari jumlah mereka yang sedang mengalami pendidikan saat ini ada: Anak TK 50 orang (5,3%), SD. 350 orang (36,8%), SMP 225 orang (23,7%), SMA 200 orang (21,1%) dan Perguruan Tinggi/Akademi 125 orang (13,2%) dan seluruhnya ada 950 orang (100%). Jumlah ini cukup menarik mengingat keseluruhannya ada 30,1% dari seluruh penduduk yang ada sedang menjalani pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi.

4. Struktur Pola Menetap dan Perumahan

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa struktur pola menetap di lingkungan banjar Gerenceng masih banyak di antaranya yang masih mempertahankan struktur pola menetap Bali yang lengkap dengan menerapkan struktur dari konsepsi *Tri Hita Karana* dan juga konsepsi *Tri Angga* dalam perwujudannya. Hal ini segera dapat dilihat kala memasuki *rurung* atau gang yang ada yang

memberikan gambaran pada pola pemukiman yang tertutup dari luar karena adanya tembok pekarangan dengan *kuri* atau gapura pekarangan. Di tengah pola pemukiman yang bertembok tinggi tadi ada *natah* atau halaman terbuka yang dikelilingi oleh beberapa bangunan yang fungsional. Bangunan ini ada yang berciri bangunan Bali dengan bahan-bahan yang masih tradisional atau bahan campuran, dan ada juga bangunan yang sudah moderen dengan ciri-ciri pemanfaatan ruang yang efisien.

Satu bagian dari pola menetap ini adalah pemanfaatan ruang untuk bangunan suci yaitu pura keluarga: *sanggah* atau *merajan*, sebagai tempat suci di lingkungan keluarga yang bersangkutan. Wujudnya ada yang *sanggah gede* (pura dengan struktur lengkap) ada juga *kemulan taksu* (pura dengan struktur yang lebih sederhana, yang biasanya dipakai oleh para pendatang baru di suatu tempat), tetapi karena para penduduk banjar Gerenceng adalah penduduk yang asli berasal dari banjar tersebut, kebanyakan dari tempat persembahyangan ini berstruktur lengkap (*sanggah gede*) dengan ciri sebagai tempat persembahyangan keluarga besar atau keluarga luas. Sedikit sekali di antaranya yang mempunyai tempat suci ini dalam bentuk *kemulan taksu* sebagai ciri tempat persembahyangan baru atau untuk keluarga kecil (walaupun di dalam wujud *sanggah gede* ada juga tempat yang disebut *kemulan*).

Adanya tempat persembahyangan di setiap rumah menggiatkan para penghuninya dalam banyak kegiatan adat dan upacara, yang memberi ciri kepada masyarakat banjar ini dalam wujud banjar adat. Di samping itu kegiatan juga berlangsung di beberapa tempat suci lainnya yang ada di lingkungan banjar seperti di Pura atau Merajan Banjar, Pura Majelangu, Pura Masopahit, Pura Gerenceng dan Pura Batan Kresek. Orientasi masyarakat terhadap tempat-tempat suci ini memberikan pula gambaran pada orientasi masyarakat pada pola pemukiman dan struktur perumahan mereka.

5. Struktur Administrasi Desa dan Banjar

Banjar Gerenceng secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat Kota Administratif Denpasar, Kabupaten Badung. Dan secara adat ma-

suk dalam wilayah keadatan Desa Adat Denpasar, dengan pusat orientasi kepada tiga pura *Kahyangan Tiga* di kota Denpasar, yaitu Pura Desa/Puseh Denpasar (Badung) dan Pura Dalem atau Pura Kahyangan Badung. Dua struktur ini menyebabkan sistem pemerintahan banjar dan desa juga terwujud dalam sistem pemerintahan desa secara administratif dan sistem pemerintahan desa dan banjar secara adat. Perangkat untuk kedua macam sistem pemerintahan ini juga dibentuk sesuai dengan fungsinya. Di banjar Gerenceng ada seorang Klian Dinas yang mengatur pemerintahan secara administrasi dan juga memimpin rapat-rapat yang bersifat keadatan. Dalam tugas dan fungsi administrasi Klian Banjar dibantu oleh perangkat pegawai administrasi. Sedangkan dalam fungsi dan tugas keadatan Klian Banjar dibantu oleh 8 orang *Klian Suka Duka* yang dipilih dua orang di setiap Tempekan. Karena banyaknya tugas dan fungsi administrasi yang juga memerlukan komunikasi dengan warga banjar, maka para klian Suka Duka juga melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam batas tertentu. Dan untuk pelaksanaan tugas-tugas komunikasi ini para klian suka duka dibantu oleh seorang *kesinoman* di setiap tempeekan, yang melaksanakan tugas dan fungsi adat dan administratif. Karena itu pimpinan dan perangkat banjar dalam satu periode berjumlah: satu *klian dinas*, delapan *klian suka duka* dan empat *kesinoman*. Untuk tugas-tugas persembahyangan di Merajan Banjar juga ada *Pemangku Banjar*. Masa jabatan Klian Dinas adalah lima tahun sedangkan *kesinoman* dilakukan secara bergilir setiap bulan (35 hari) sekali yang diatur berdasarkan urutan nama anggota banjar (*urak*) di setiap tempekan.

Dalam sistem pemerintahan desa secara administrasi ada Kepala Desa yang membawahi beberapa Klian Dinas atau Kepala Dusun. Di tingkat pemerintahan desa sendiri, Kepala Desa dibantu oleh beberapa tenaga administrasi tingkat desa yang mengurus beberapa urusan atau bidang. Lembaga musyawarah Desa adalah lembaga yang terdiri atas perutusan banjar dan pimpinan desa. lembaga ini merupakan komunikasi antara pimpinan dan perangkat pemerintahan banjar untuk merencanakan atau memutuskan suatu rencana.

Di tingkat banjar, khususnya di banjar Gerenceng keputusan

tentang sesuatu dicapai dalam keputusan bersama lewat rapat banjar. Ada tiga tingkat rapat atau pertemuan yang dilakukan di banjar untuk merencanakan atau melaksanakan suatu keputusan, yaitu:

- a. rapat *prejuru* yaitu pertemuan yang diadakan antara pra *prejuru* yang terdiri dari Klian Dinas dan Klian Suka Duka;
- b. Rapat banjar yang hanya dihadiri oleh anggota *banjar ngarep* atau *suka duka* saja biasanya untuk merencanakan/memutuskan hal-hal yang bersifat keadatan;
- c. rapat umum yang dihadiri oleh segenap warga banjar baik *banjar ngarep* maupun *tan ngarep*, biasanya untuk merencanakan/memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan/administrasi.

6. Sistem Ekonomi Yang Berkembang

Sebagai lembaga sosial yang ada di pusat kota banjar Geren-ceng dihadapkan pada masalah bagaimana menggerakkan anggota untuk satu kegiatan yang bersifat ekonomis. Umumnya para anggota banjar sibuk dengan ruusan atau kegiatan ekonomi mereka masing-masing, sehingga tidak mungkin lagi menggerakkan mereka untuk tujuan yang sama bagi kepentingan banjar. Sistem ekonomi masyarakat sendiri berkembang sebagaimana umumnya di kalangan masyarakat perkotaan. Baik produksi, distribusi maupun pola konsumsi berkembang berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat kota. Untuk kegiatan banjar sendiri beberapa tahun yang lalu memang ada kegiatan yang dapat mendatangkan dana bagi kegiatan banjar, tetapi sekarang kegiatan seperti mengadakan amal atau usaha dagang pada hari raya sudah tidak memungkinkan lagi. Karena itu simpanan dana dan sebidang sawah milik banjar adalah modal dalam usaha memenuhi kebutuhan banjar seperti: sumbangan-sumbangan, hari upacara, pembayaran listrik dan air, ongkos kebersihan dan sebagainya.

Wujud sumbangan anggota banjar kepada lembaganya dalam hal ini banjar, kecil sekali seperti misalnya: sumbangan uang administrasi ke banjar, uang sewa peralatan banjar Rp. 500,— yang dikenakan kepada anggota yang menggunakan *bale banjar* dan peralatannya, serta uang pendaftaran bagi penduduk yang tidak

termasuk anggota *banjar ngarep*. Dengan demikian banjar sebagai lembaga sosial di tingkat yang paling bawah dalam sistem pemerintahan desa benar-benar merupakan lembaga yang dapat membantu para anggotanya dalam kegiatan adat dan kedinasan baru sebagian kecil saja dari fungsi organisasi sosial yang diharapkan oleh para anggotanya, dalam artian yang sangat terbatas sekali.

7. Beberapa Kegiatan Lain Dalam Banjar dan Desa

Selain kegiatan yang berhubungan dengan adat dan kedinasan yang mengaktifkan warga banjar, juga ada beberapa kegiatan lainnya yang belakangan ini menampakkan aktivitas masyarakat di lingkungan banjar. Kegiatan pemuda dan pemudinya adalah kegiatan para muda-mudi banjar dalam usahanya menggalang persatuan dan kesatuan terutama dalam usaha sosialisasi mereka pada tugas dan kewajiban banjar. Di samping itu ada juga kegiatan olah raga dan seni yang dikembangkan oleh para pemuda ini. Kelompok kegiatan pemuda ini yang tergabung dalam wadah *Sekeha Teruna* memang mempunyai tugas untuk mensosialisasi diri dalam kegiatan banjar dan desa dan berada di bawah pembinaan para pimpinan banjar dan segenap warga banjar.

Kegiatan para wanita banjar yang tergabung dalam PKK adalah kegiatan yang menampung aspirasi dalam pembangunan terutama bagaimana menggiatkan peranan wanita dalam kehidupan rumah tangga serta di lingkungan banjar dan desa. Dimulai dengan kegiatan kecil: arisan, para wanita banjar ini kemudian melakukan beberapa pertukaran informasi tentang bidang mereka yaitu: kewanitaan. Pertemuan biasanya diadakan sebulan sekali untuk tetap dapat saling bertemu, dan diadakan di *bale banjar*. Sebagai organisasi wanita kemudian banyak sekali perlombaan yang diikuti baik di tingkat desa maupun kabupaten. Yang menarik dalam kegiatan para wanita ini adalah partisipasinya dalam perlombaan layang-layang, yang biasanya hanya dilakukan oleh anggota pria saja.

Dalam usaha ikut berpartisipasi dalam program pemerintah seperti Keluarga Berencana dan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, di banjar juga diadakan kegiatan penimbangan bayi dan usaha untuk mendata para peserta program KB. Usaha ini selain dilakukan oleh petugas khusus juga disertai oleh para prejuru banjar dan juga para anggota PKK. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan fung-

si banjar, selain giat dalam fungsi organisasi adat dan dinas juga dalam kegiatan menunjang usaha pemerintah mensukseskan pembangunan.

Kegiatan tolong menolong dalam kebutuhan akan tenaga kerja terutama melaksanakan tata upacara adat dan agama, adalah kegiatan yang rutin dan menjadi ciri utama dalam kehidupan di banjar Gerenceng. Terutama bagi mereka yang menjadi anggota banjar ngarep (warga asli) di banjar gerenceng, maka hubungan yang bersifat kekeluargaan mendominasi pola-pola hubungan yang ada secara umum. Dalam memberi bantuan kepada para tetangga yang sama-sama anggota banjar atau di luar banjar, selain dilakukan dengan menyumbangkan tenaga juga disertai oleh bawaan atau *aban-aban* yang dapat berupa: peralatan upacara. Sedangkan dalam hal yang berhubungan dengan kematian seluruh anggota dengan spontan memberikan bantuan walaupun sekedar hanya bawaan berupa beras, kain putih atau bahan lainnya lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut ternyata mengikat anggota banjar dalam satu pola orientasi yang tinggi kepada banjarnya (terutama dalam keanggotaan banjar adat) sehingga tidak ada anggota banjar suka-duka yang menyatakan berhenti sebagai anggota banjar, walaupun ia sudah tidak bertempat tinggal di sana (*neolokal*).

B. PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT TRANSISI DI DESA PEMECUTAN KAJA, BANJAR DI KOTA DENPASAR: BANJAR GERENCENG

1. Kedudukan Banjar dan Fungsi Banjar bagi Desa:

Untuk melihat fungsi banjar bagi desa dan demikian juga sebaliknya tinjauan akan dilihat bagaimana kedudukan seseorang dalam banjarnya dan hubungannya dengan wujud sistem banjar yang ada. Di banjar Gerenceng sebagai banjar yang ada di tengah-tengah kota kedudukan dan peranan seseorang sebagai anggota banjar tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal terutama yang berhubungan dengan kehidupan mereka di kota. Karena itu fungsi banjar bagi anggotanya dan kemudian hubungannya dengan desa juga akan sangat berpengaruh. Dari 32 orang responden yang diambil untuk penelitian ini, semua responden (100%) menyatakan

bahwa mereka menjadi anggota banjar pada saat ini. Keanggotaan mereka sudah dihitung sejak mereka kawin dan dinyatakan dewasa, sehingga variasi lamanya keanggotaan mereka dalam banjar berkisar dari baru setahun yang lalu sampai lebih dari 55 tahun yang lalu. Dalam hubungannya dengan peranan mereka sebagai anggota banjar 31.3% dari responden menyatakan bahwa mereka melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota banjar setelah mereka menjadi anggota banjar secara resmi. Sedangkan 68.7% lagi menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota banjar jauh sebelum mereka menjadi anggota banjar secara resmi (*ngayahin*). Untuk mereka yang menyatakan telah melaksanakan kewajiban sebagai kegiatan *ngayahin*, menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka latihan untuk mengenal tugas tersebut.

Dalam fungsi ekonomi banjar bagi masyarakatnya terutama dalam usaha banjar menggerakkan bantuan tenaga bagi para anggotanya terlihat pada pernyataan para responden yang menyatakan mendapatkan bantuan sebelum menjadi anggota banjar (68.8%), sejak menjadi anggota banjar (28.1%) dan meningkat setelah menjadi anggota banjar (3.1%). Dan berdasarkan pendapat tersebut 68.8% menyatakan bahwa semua orang mendapat bantuan seperti itu, sedangkan 31,2% menyatakan bantuan hanya diberikan kepada mereka yang menjadi anggota banjar saja. Sedangkan fungsi lain dalam memberikan rasa aman dengan menjadi anggota banjar dirasakan oleh responden: 96.9% menyatakan merasa lebih aman dan sisanya menyatakan biasa saja. Bagi mereka yang merasakan adanya rasa aman setelah menjadi anggota banjar: 50% menyatakan bahwa rasa aman itu ada karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga, 43.6% menyatakan dengan menjadi anggota banjar merasakan sudah terdaftar sebagai penduduk dan sisanya menyatakan akan mendapatkan bantuan dari banjar jika mengalami kesulitan.

Tentang hubungannya dengan desa adat maupun desa dinas informasi yang didapatkan dari para responden menyatakan semua merasakan sebagai anggota desa adat maupun desa dinas. Walaupun kemudian penjabaran tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota tidak banyak dapat mereka bedakan mana untuk kepentingan desa adat dan mana untuk kepentingan desa dinas. Tetapi

satu hal yang mereka ketahui kalau kegiatan tersebut ada hubungannya dengan kegiatan upacara maka itu adalah kegiatan desa adat, sedangkan yang lainnya adalah kegiatan desa dinas.

2. Sistem Aturan dan Perlengkapan Banjar

Aturan banjar yang disebut *awig-awig adat* yang dipunyai oleh banjar Gerenceng telah dibukukan dan disebar luaskan kepada para anggota banjar. Dengan demikian aturan yang dipunyai banjar dan diberlakukan bagi para anggota banjar, dapat diketahui oleh anggota sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap sistem aturan tersebut dapat dicegah sejak awal. Aturan tentang keanggotaan banjar adalah aturan yang utama yang dipertahankan oleh banjar sampai saat ini. Keanggotaan yang membedakan antara anggota *banjar ngarep* dan anggota banjar *tan ngarep* bukanlah untuk suatu sistem diskriminasi anggota tetapi untuk dapat membedakan antara hak dan kewajiban seorang anggota yang mempunyai fasilitas kehidupan yang lengkap. Seorang anggota *banjar ngarep* tadinya adalah seorang yang telah kawin dan berasal dari banjar Gerenceng (unsur asli), tetapi kemudian berkembang kepada siapa saja yang telah mempunyai lingkungan kehidupan atau pola menetap yang didasarkan pada konsepsi *Tri Hita Karana* dan *Tri Angga* secara utuh. Maka seorang yang telah demikian lama menjadi anggota *tan ngarep* jika sudah memenuhi syarat tersebut dapat menjadi anggota *banjar ngarep*. Sistem aturan lain adalah dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban banjar yang dibebankan kepada anggota yang dinyatakan oleh para responden: 87,5% menyatakan tugas tersebut menyangkut bidang administrasi (harus melapor), 12,5% menyatakan untuk tugas gotong royong. Di samping tentunya tambahan aturan tentang bagaimana mengatur sistem pengerahan tenaga kalau ada tugas.

Perlengkapan banjar seperti telah dikemukakan di depan dapat digunakan oleh para anggota banjar dengan membayar sekecilnya. Pembayaran ini sendiri bukanlah berupa sewa, tetapi sekedar mengikat para anggota akan tanggung jawab untuk penggunaan peralatan banjar tersebut. Peralatan tersebut terdiri dari peralatan yang dapat digunakan untuk memasak, peralatan pesta, kursi meja dan sebuah aula besar untuk melakukan kegiatan umum. Dapur, air PAM dan listrik dapat digunakan secara bebas

jika seseorang meminjam peralatan tersebut untuk keperluan upacara. Penggunaan tersebut diberi catatan bahwa peralatan tersebut kembali bersih dan tersimpan rapi di tempatnya kembali setelah dipakai. Jika ada kehilangan atau kerusakan pada peralatan tersebut peminjam harus mengganti dengan barang yang sama. Biasanya para anggota banjar menggunakan peralatan tersebut untuk kegiatan atau kepentingan upacara.

Peralatan yang disucikan di banjar adalah peralatan di *Merajan Banjar*, serta *Kulkul* yang ada di *Bale kulkul*. Kulkul atau kentongan ini disucikan karena tidak setiap waktu dan setiap orang dapat menggunakan kulkul itu, walaupun kulkul itu sebagai alat komunikasi antara warga banjar. Kalau ada kematian dan anggota banjar ingin memberitahukan kepada masyarakat dan meminta bantuan tenaga, maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada klian banjar. Pada waktu itu juga akan dilihat kemungkinan lain apakah tepat waktunya untuk membunyikan kentongan atau adakah hari baik untuk melaksanakan penguburan. Jika semuanya sudah memungkinkan barulah kulkul dibunyikan menurut ritme tertentu berdasarkan keperluannya.

3. Sistem Keanggotaan Banjar, Desa dan Kelompok Sosial Lain

Sistem keanggotaan banjar di banjar Gerenceng yang diatur oleh *awig-awig* yang ada memungkinkan para anggota banjar tahu dan menyadari akan tugas dan kewajibannya. Sistem keanggotaan yang ada membedakan antara anggota *banjar ngarep* yaitu anggota banjar yang berhak atas sejumlah hak untuk mendapatkan pelayanan secara penuh baik dalam kesukaan maupun dalam duka. Karena itu keanggotaan banjar ini biasa juga disebut anggota banjar suka-duka. Perkembangan banjar sebagai wilayah yang berdekatan dengan pemusatan kegiatan manusia seperti: pasar, sekolah dan kantor, memungkinkan berkembangnya pola kehidupan di banjar ini, terutama dengan semakin banyaknya penduduk yang tinggal di lingkungan banjar. Untuk itu dalam tugas administrasi banjar juga mencakup warga pendapata ini dengan sistem keanggotaan banjar *tan ngarep* atau banjar administrasi yang hanya berhak atas pelayanan dinas saja atau kalau ada kedukaan (kematian).

Sistem keanggotaan desa sendiri dinyatakan oleh para responden bahwa secara langsung mereka menjadi anggota desa, baik dinas maupun adat, hal ini tentunya tidak demikikan dengan para penduduk pendatang tadi yang masih mempunyai keterikatan adat dengan desa tempat asal mereka. Dengan demikian seorang anggota banjar belum tentu menjadi anggota desa adat, terutama dalam hal yang menyangkut tata pelaksanaan upacara adat dan agama. Tetapi dalam hubungan dengan dinas/administrasi setiap orang yang telah menjadi anggota banjar adalah anggota desa juga. Dalam kehidupan banjar ada beberapa kelompok sosial lain yang juga ada di lingkungan banjar sebagai pembantu kegiatan banjar. Kelompok sosial yang umum disebut *sekeha* adalah kelompok kegiatan yang menyangkut sejumlah orang dengan tujuan dan kepentingan yang sama. Demikian misalnya dapat diketahui adanya kelompok pemuda atau *sekeha teruna*, yang berfungsi membantu tugas banjar untuk kegiatan desa misalnya. Dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat para pemuda ini sangat berperan dalam melayani kepentingan masyarakat. Demikian juga mengingat bahwa kehidupan di kota menyebabkan setiap orang mempunyai waktu yang terbatas, maka para pemuda ini membantu warga banjar dalam membayarkan rekening listriknya ke PLN atau ke Bank. Dengan demikian mereka berfungsi secara jelas sebagai organisasi sosial yang mempunyai keterkaitan dengan banjar. Dari ciri kehidupan banjar yang masih ketat dengan beberapa aturannya, banjar juga mengembangkan aturan-aturan baru yang mengadaptasi perkembangan moderen dalam kehidupan kota.

Kegiatan gotong royong atau tolong menolong dalam beberapa aspek kehidupan terutama dalam aspek pelaksanaan tata upacara adat dan agama masih berlangsung dengan ketat. Hal ini tentunya sangat erat hubungannya dengan status keanggotaan seseorang dalam organisasi sosial yang ada apakah: desa, banjar atau *sekeha*. Dengan status sebagai anggota salah satu kelompok dalam kehidupan ini maka jaminan untuk mendapatkan bantuan tenaga akan menjadi pasti. Hal ini tentunya sangat menggembirakan jika melihat bahwa aturan tolong-menolong ini di masyarakat perkotaan sudah mulai menipis kelihatannya.

4. Sistem Pengerahan Tenaga dan Pengendalian Sosial

Dalam suatu masyarakat di mana kegiatan yang melibatkan seluruh warga masyarakat, memberi kehidupan dan ciri kepada sistem masyarakat itu sendiri; cara-cara pengerahan tenaga untuk tujuan kegiatan tersebut menjadi penting artinya. Sistem ini sendiri akan dapat menghidupkan masyarakatnya sendiri atau kalau sistem pengerahan tenaganya tidak berhasil maka fungsi lembaga tersebut juga akan gagal. Di lingkungan banjar Gerenceng sistem pengerahan tenaga secara tolong menolong diakui oleh para responden sebagai cara yang mudah dan gampang, karena semua responden menyatakan memberikan bantuannya kepada sesama anggota banjar bila ada kegiatan. Hal ini dilakukan karena adanya ikatan keanggotaan dalam banjar yang mengikat setiap anggota dalam suatu ikatan tolong menolong dalam kegiatan. Pernyataan responden bahwa yang diberikan bantuan hanyalah mereka yang menjadi anggota banjar saja dikemukakan oleh 68,8% responden, sedangkan 31,2% menyatakan bahwa bantuan diberikan kepada semua orang.

Sistem yang dipakai dalam pengerahan tenaga ini adalah sistem keanggotaan banjar, yaitu jika seorang menjadi anggota banjar ngarep, maka ia berhak atas bantuan yang sifatnya suka-duka dalam kegiatan yang dipunyainya. Sedangkan bila seseorang hanya berstatus banjar *tan ngarep* maka ia hanya berhak atas bantuan yang bersifat kedukaan dalam kegiatannya. Sebaliknya yang dilakukan oleh mereka adalah kewajiban sesuai dengan hak yang didapatnya. Jika ia anggota banjar ngarep maka ia berkewajiban memberikan bantuan yang sama kepada sesama anggota lainnya. Prinsip resiprokal dalam pengerahan tenaga ini sudah menjadi prinsip utama dalam satu sistem sosial seperti telah dikemukakan di depan. Karena itulah kegiatan banjar kelihatan berjalan kalau sistem pengerahan tenaga ini berjalan lancar.

Bunyi *kulkul* atau kentongan adalah komunikasi yang paling nyata bagi para warga banjar, jenis bantuan apa yang akan diberikan. Irama pukulan *kulkul* memberi tanda apakah ada orang meninggal, waktu bekerja membantu ataukah waktu penguburan akan dilaksanakan. Demikian juga pada kegiatan lainnya yang bersifat suka, kapan harus mendatangi seseorang di rumahnya

atau kapan harus datang ke banjar untuk kegiatan upacara. Kerja bakti pembersihan lingkungan yang dilakukan setiap bulan sekali juga dikomunikasikan dengan bunyi kulkul ini. Demikian misalnya, bunyi kulkul tiga kali pada pagi hari menandakan ada yang meninggal dan kegiatan pertama adalah datang ke banjar membawa peralatan kerja untuk membantu membuat peralatan penguburan, atau penguburan pada keesokan harinya. Selain itu ada juga pengumuman yang disampaikan oleh *klian banjar* pada waktu masyarakat berkumpul di satu tempat, karena terbatasnya waktu untuk mengumumkan ke rumah-rumah. Ini tentu sebagai akibat bahwa hidup di lingkungan banjar di perkotaan seperti banjar Gerenceng, waktu berkumpul dari para warga sangat sedikit sehingga setiap kesempatan yang ada dipakai oleh prejuru untuk mengerahkan tenaga masyarakat ini dalam berbagai kepentingannya.

Keberhasilan suatu sistem pengerahan tenaga untuk menggiatkan masyarakat dalam kegiatan tertentu sangat ditentukan apakah dalam sistem tersebut dikembangkan juga sistem lainnya yaitu: sistem pengendalian sosial. Sistem ini mengarahkan masyarakat pada suatu sikap yang mentaati peraturan yang diberlakukan serta menanamkan suatu disiplin sosial dan tanggung jawab sosial di masyarakat. Di banjar Gerenceng seperti juga di banjar-banjar lainnya pengendalian sosial dapat dikembangkan melalui pengembangan rasa takut akan sanksi yang dijatuhkan. Misalnya saja pengembangan pandangan terhadap seseorang yang tidak menjadi anggota banjar oleh orang lainnya, dinyatakan oleh responden sebagai dipandang tidak baik (96.9%). Demikian juga jika seseorang tidak memberikan bantuan apakah akan diberikan sanksi atau hukuman, para responden menjawab: tidak (100%). Namun demikian kenapa sistem banjar ini masih dapat bertahan rupanya pengembangan sistem sanksi yaitu sanksi sosial (walaupun belum pernah dijatuhkan), dimana seseorang tidak akan mendapatkan bantuan jika ia mempunyai kegiatan nanti apabila sekarang ia tidak melakukan pemberian bantuan pada orang lain. Kadangkadang sistem pengendalian sosial dengan mengembangkan rasa takut seperti itu (akan ada sanksi sosial yang akan dijatuhkan bila tidak melakukan hal yang sama) cukup efektif dalam rangka pengerahan tenaga sukarela di lingkungan banjar. Dan rupanya

itulah yang berkembang di lingkungan masyarakat banjar Geren-ceng yaitu pengembangan rasa takut dan rasa malu akan dikenakan sanksi sosial dikemudian hari, jika seseorang tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kewajiban banjar.

5. Sistem Upacara di Banjar dan Di Desa

Dalam kegiatan upacara di lingkungan masyarakat yang ter-gabung dalam kesatuan banjar, ada kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga atau rumah tangga, ada kegiatan yang berlangsung di banjar atau lingkungan yang lebih luas, dan ada juga kegiatan yang berlangsung di tingkat desa (*Kahyangan Tiga*). Untuk kegiatan upacara di lingkungan rumah tangga banyak dilakukan oleh anggota rumah tangga itu sendiri beserta para tetangga yang berdekatan. Biasanya upacara berlangsung untuk upacara daur hidup seseorang dalam rumah tangga. Di tingkat banjar upacara yang berlangsung adalah upacara *Piodalan Merajan Banjar* yang diikuti oleh segenap warga banjar, baik laki maupun wanita. Untuk kegiatan ini semua warga banjar datang selain untuk melakukan persembahan juga untuk menyumbangkan tenaga membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Para wanita yang berperanan cukup besar dalam hal ini melakukan kegiatannya dua tiga hari sebelumnya, sedangkan para anggota *banjar muani* (laki-laki) hanya melakukan kegiatan pada waktu upacara saja. Para *perjuru* selama kegiatan berlangsung terus sibuk mengkoordinasikan kegiatan yang ada. Dan dalam persembahyangan di *Merajan Banjar* ini tidak ada perbedaan status keanggotaan lagi semua baur menjadi satu dalam persembahyangan. Demikian juga halnya jika ada upacara *mecaru* menyambut *Hari Penyepian*, maka dihari upacara di banjar semua anggota (banjar datang ke banjar membawa *prani* (sajian yang berisi nasi, buah, kue dan peralatan lainnya), baik anggota *banjar ngarep* maupun *tan ngarep*.

Kalau di lingkungan banjar demikian keadaannya maka tidak demikian halnya dengan upacara yang berlangsung di lingkungan desa. Menurut pendapat responden tentang keikutsertaan mereka dalam upacara yang berlangsung di tingkat desa, adalah: 18,8% menyatakan semua ikut serta, 15,6% menyatakan ikut karena persyaratan tertentu (karena langsung sebagai *penyungsung pura*,

yaitu kelompok pengelola pura), 46,9% menyatakan tidak semua ikut dalam persembahyangan itu. Demikian juga halnya dengan koordinasi banjar tentang kegiatan upacara di pura desa tidaklah besar karena umumnya seperti dikatakan oleh responden: 87,5% menyatakan pergi sendiri-sendiri ke pura dan tidak bersama-sama dari banjar.

Dalam kegiatan upacara yang berlangsung di banjar maupun di pura desa tidak ada pungutan yang dikenakan kepada anggota. Untuk kegiatan upacara di banjar biasanya dana banjar sudah ada untuk itu. Demikian juga dalam pelaksanaan upacara di tingkat desa biasanya sudah ada panitia pengelola khusus untuk melaksanakan upacara tersebut, dan anggota banjar tinggal ikut bersembahyang saja. Karena itu dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan upacara yang berlangsung di banjar respon masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu diikat oleh adanya sistem keterikatan sebagai anggota banjar. Sedangkan respon untuk partisipasi upacara di desa tidak begitu mengikat karena banyak di antara warga banjar yang juga mempunyai ikatan pada desa-desa lainnya terutama dalam kegiatan upacara ini.

6. Sistem Pengorganisasian Kegiatan-kegiatan Banjar dan Desa

Pengorganisasian kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan banjar ataupun desa menyebabkan berlangsungnya suatu sistem sosial seperti banjar atau desa. Kegiatan yang terkoordinir dengan baik dapat memperlancar sistem pemerintahan atau pengorganisasian banjar atau desa. Banyak sekali kegiatan yang dapat berlangsung sebagai ciri adanya sebuah banjar atau desa. Tetapi di banjar Gerenceng sebagai banjar di pusat kota Denpasar, selain kegiatan yang umum dilakukan oleh anggota banjar di manapun (kegiatan ekonomi, sosial, upacara), masih ditambah dengan adanya kegiatan yang berfungsi sosial dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk memasukkan anak ke Sekolah Dasar misalnya sudah ada kegiatan yang dilakukan oleh banjar yaitu membantu para orang tua untuk memasukkan/mendaftarkan anaknya untuk bisa diterima di SD sekitar banjar (rayonisasi). Responden menyatakan bahwa mereka menerima bantuan tersebut dari klian banjar

(34,3%) dan yang tidak menerima bantuan ada 65,7%. Sedangkan untuk masuk ke SLTP dan selanjutnya banjar sebagai organisasi atau lembaga sosial belum mengambil inisiatif. Kegiatan lainnya dalam kehidupan masyarakat adalah program Keluarga Berencana yang sudah mulai masuk ke banjar. Dalam hal ini responden yang menyatakan ikut program KB (43,8%) semua menyatakan bahwa mereka ikut atas kemauan sendiri (100%) dan bukan karena saran banjar. Untuk pendataan saja tentang para peserta program KB ini memang dilakukan oleh banjar tetapi motivasinya sendiri tetap berada pada masyarakat dan petugas lapangan KB.

Pengorganisasian kegiatan lainnya seperti kegiatan para pemuda di banjar berada di bawah koordinasi klian banjar. Sesuai dengan wujud organisasi tersebut adalah organisasi atau kelompok sosial di bawah banjar maka segala kegiatan yang dapat diikuti atau dilakukan adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan fungsi kelompok tersebut sebagai lembaga sosialisasi tugas-tugas banjar. Biasanya dalam beberapa kegiatan yang melibatkan tenaga banjar para pemuda ini tanpa diminta dengan sukarela menyumbangkan tenaganya untuk itu. Demikian misalnya dalam upacara kematian sampai kepada pembakaran mayat (*ngaben*) para pemuda ini dengan sukarela ikut berpartisipasi. Tentunya ada dua keuntungan dalam kegiatan yang mereka lakukan yaitu: sosialisasi tentang tugas dan kewajiban banjar yang akan menjadi tugas dan kewajiban mereka nanti jika menjadi anggota banjar, dan juga menyumbangkan tenaga bagi kepentingan banjar di mana mereka bertempat tinggal.

Kegiatan di desa sendiri yang dapat diikuti adalah dalam kegiatan kerja bakti, perlombaan olah raga dan seni, atau kegiatan yang memerlukan pengerahan tenaga yang besar dari banjar. Dalam kegiatan yang utama di tingkat desa adalah gotong royong kerja bakti yang dinyatakan diikuti oleh 34,4% dari responden sedangkan yang lainnya menyatakan hanya ikut dalam kegiatan di banjar saja. Dengan demikian sistem pengorganisasian kegiatan yang ada lebih banyak berorientasi ke banjar daripada ke desa.

7. Analisa Tentang Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali. Khususnya Pada Masyarakat Kota Denpasar

Suatu analisa tentang peranan banjar pada masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan memberikan gambaran tentang bagaimana kedudukan dan fungsi banjar pada masyarakat di kota. Masyarakat kota yang berkembang dengan ciri yang khusus yaitu keterikatan akan berbagai kegiatan dalam aspek kehidupan mereka seperti: keterikatan akan sistem ekonomi yang baru, keterikatan akan sistem hubungan sosial, dan keterikatan akan sistem penggunaan waktu yang kesemuanya memberikan suatu pola orientasi yang khusus yaitu orientasi kota.

Di kota Denpasar di mana kota ini baru berkembang dalam dua dasa warga terakhir ini pola orientasi tersebut tentunya tidak demikian mutlak perubahannya kalau diingat bahwa kota Denpasar tumbuh sebagai sebuah kota tua (bekas pusat kerajaan) yang juga meninggalkan sisa-sisa pemukiman dari penduduk asli Denpasar, berubah sebagai kota pusat berbagai kegiatan. Dengan sendirinya perkembangan yang terjadi harus mempertimbangkan juga peranan dari para pemukim asli ini di tengah munculnya pendatang baru yang menyebabkan kota ini semakin berubah. Pemukiman penduduk asli kota Denpasar dengan berbagai ciri budayanya memang tidak bisa bertahan dari adanya perkembangan yang dibawa oleh pendatang dan perkembangan kota itu sendiri. Banyak terjadi perkembangan terutama yang menyangkut perkembangan pemukiman dan wilayah tempat tinggal yang berbeda dari pola pemukiman penduduk asli tadi. Dan dalam keadaan seperti itulah kota Denpasar mau dilihat terutama yang berhubungan dengan perkembangan sistem banjar yang ada.

Sistem banjar sebagai suatu sistem organisasi sosial yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Bali juga berkembang di lingkungan pemukiman penduduk asli di kota Denpasar. Sistem tersebut menyangkut berbagai sub sistem yang akhirnya berfungsi untuk menggerakkan kehidupan masyarakat dan kebudayaannya. Wujud sistem banjar memberikan ciri pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan di lingkungan masyarakat pemukim asli tadi.

Banjar Gerenceng yang ada di tengah-tengah kota Denpasar,

dekat dengan pusat pasar dan perdagangan mengembangkan suatu sistem aturan banjar yang diberlakukan kepada para anggotanya, seperti juga banjar-banjar tetangganya di bagian lain dari kota Denpasar. Sebagai pusat perdagangan, dan pasar, lingkungan banjar ini juga kedatangan para pemukim baru yang bermukim secara tetap di banjar ini. Sebagai akibat dari itu adalah berlakunya sistem aturan baru di banjar Gerenceng yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan tadi. Sistem keanggotaan banjar yang bertingkat menurut status keberadaan seseorang di banjar itu adalah salah satu ciri dari penyesuaian ini.

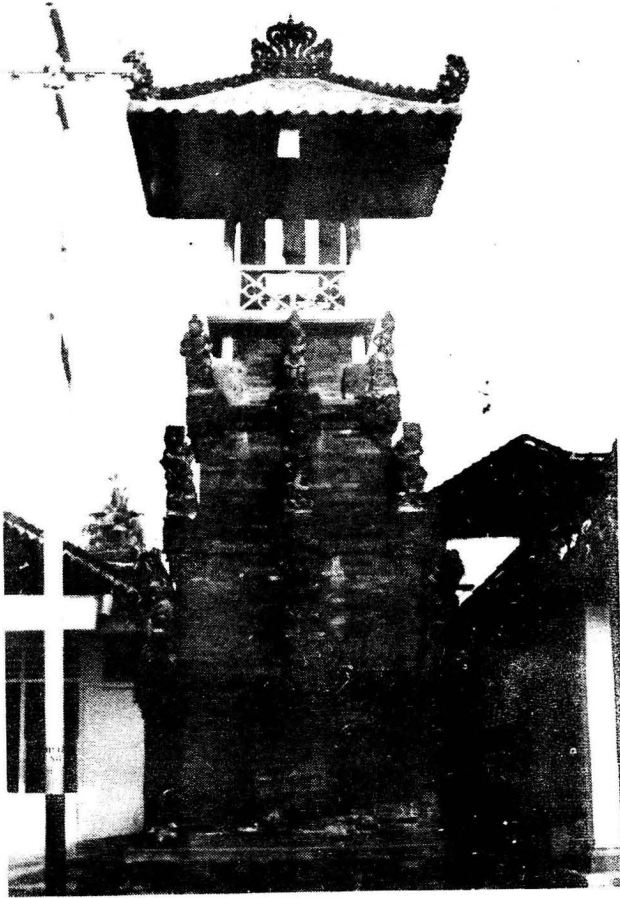
Keterlibatan seseorang anggota dalam setiap kegiatan yang dilakukan di banjar juga memberikan gambaran bahwa telah ada penyesuaian dalam sistem aturan banjar tentang tugas dan kewajiban seseorang dalam banjar. Dalam hal ini bagi seorang anggota banjar ngarep lebih banyak tugas dan kewajiban yang mereka harus laksanakan dengan demikian hak mereka juga lebih banyak untuk mendapatkan pelayanan sosial dari banjar. Bagi anggota tan ngarep karena tugas dan kewajiban mereka lebih sedikit, maka pelayanan yang mereka dapat menuntut hanyalah terbatas pada pelayanan administrasi saja. dengan demikian fungsi sosial dari banjar bagi masyarakat menyesuaikan pada anggota mana walaupun secara keseluruhan fungsi sosial itu masih tetap tergambar.

Dalam kegiatan ekonomi tidak begitu banyak yang dapat dikembangkan dari banjar, karena sebagian besar penduduknya telah mengembangkan sistem tersebut secara khusus dan sendiri. Fungsi ekonomi dari banjar adalah meringankan beban anggota terutama anggota banjar ngarep dalam sistem pengerahan tenaga untuk berbagai kegiatan. Demikian juga dalam hal penyewaan/penggunaan alat-alat banjar yang dapat dipakai oleh anggota berdasarkan suatu sistem penggunaan peralatan yang ada. Dari aspek administrasi sebagian besar anggota banjar baik banjar ngarep maupun tan ngarep mendapatkan pelayanan yang sama. Karena itu fungsi fungsi administrasi dari banjar ini tetap berjalan bahkan berkembang dengan semakin banyaknya penduduk yang memerlukan pelayanan ini. Untuk meningkatkan pelayanan bahkan diadakan satu kantor khusus Klian Dinas yang mengambil tempat di salah satu ruangan bale banjar, dengan perangkat pegawai administrasi

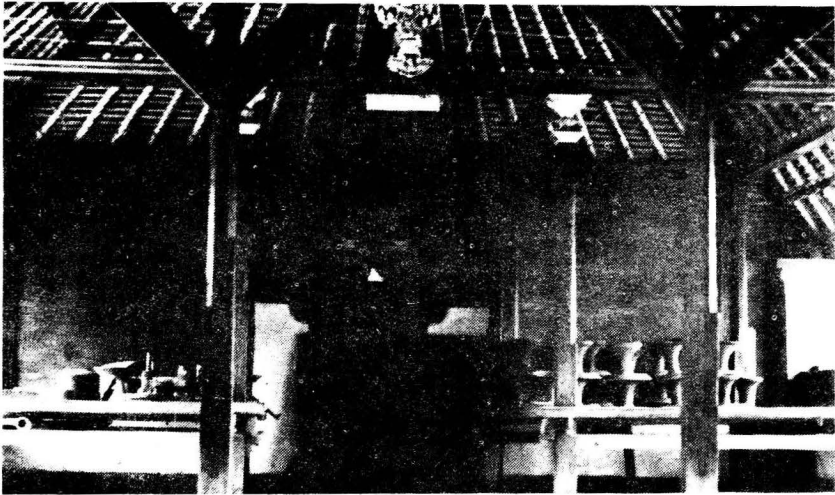
khusus. Sementara itu para prejuru atau pimpinan banjar tetap melakukan tugasnya dengan giat.

Dalam hubungannya dengan desa peranan banjar di perkotaan rupanya mempunyai fungsi yang lebih khusus dari banjar di tempat lain. Untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan desa dinas (administrasi) masyarakat kota masih melihat bahwa hubungan itu ada dalam rangka pelayanan administrasi, karena itu mereka masih aktif mengikuti kegiatan yang ada dan dilakukan sehubungan dengan fungsi kedinasan tadi, tetapi dalam hubungannya dengan desa adat, masyarakat banjar mempunyai pola yang berbeda karena ada yang masih secara ketat melaksanakan tata upacara yang berlangsung di desa dan ada juga yang kembali pada orientasi desa adatnya di tempat asal. Sehingga gambaran tentang hubungan antara banjar dan desa di Desa Pemecutan Kaja ini mempunyai gambaran yang berbeda atau bervariasi.

Banjar merupakan pusat orientasi dari masyarakatnya, sudah merupakan ciri yang jelas. Di kota Denpasar khususnya terlihat berbagai kegiatan yang tetap dilangsungkan di banjar walaupun sudah ada tersedia sarana di tempat lain. Demikian juga banjar merupakan sistem penggerakan tenaga yang aling efektif dalam menghadapi kesulitan tenaga di lingkungan perkotaan. Penggerakan tenaga ini didasarkan atas prinsip resiplokal, dengan suatu sistem pengembangan pengendalian sosial yang mantap. Dan akhirnya banjar di kota juga berfungsi pada sistem bantuan dan pelayanan lain yang bersifat sosial-ekonomis di samping fungsinya dalam pengenalan program-program baru dalam kehidupan masyarakat yang semuanya memakai 'sistem banjar' dalam programnya.



Gambar 19 Bangunan *Bale Kulkul* di Banjar Gerenceng sebagai unsur kelengkapan banjar. Bangunan ini tinggi dan megah dan termasuk bangunan yang disucikan atau dianggap sakral oleh warga banjar. Empat buah *kulkul* atau kentongan yang tergantung di sana mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan kepentingannya untuk mengumpulkan atau menggerakkan warga banjar dengan irama pukulan yang berbeda-beda dan tertentu pula.



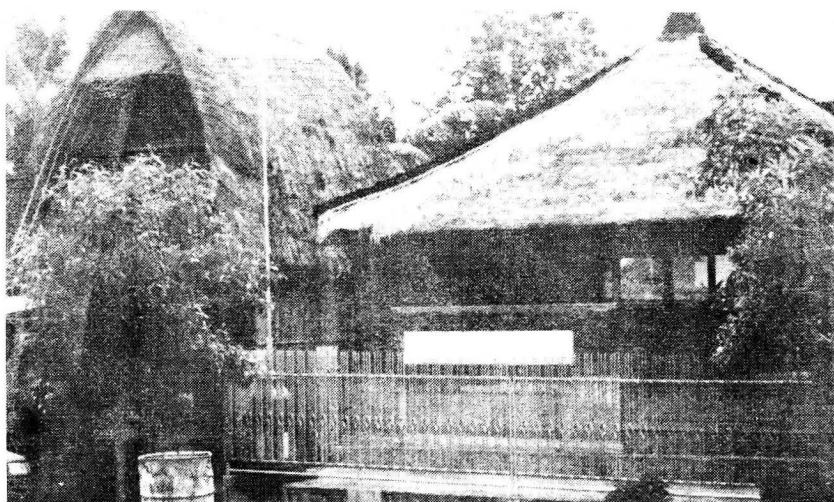
Gambar 20 Bangunan *Bale Gede* yang ada di Banjar Gerenceng sebagai bangunan tempat melaksanakan upacara. Pada hari biasa bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat menyimpan alat-alat upacara seperti di atas.



Gambar 21 Bangunan *Merajan Banjar* di Banjar gerenceng tempat warga banjar melaksanakan upacara persembahyangan bersama. Tampak bangunan tersebut masih lengkap dengan hiasan dan peralatan upacara dalam menyambut hari raya Galungan yang baru lewat.



Gambar 22 Bangunan dapur banjar dan *Bale Dauh* di banjar Gerenceng Denpasar, dua buah bangunan yang merupakan kelengkapan banjar dan berfungsi sebagai tempat untuk memasak atau menyiapkan peralatan upacara.



Gambar 23 Bangunan *Jineng* atau lumbung banjar dan Bale Gede di Banjar Gerenceng Denpasar. Kedua bangunan tersebut melengkapi syarat bangunan bale banjar di masa lalu.



Gambar 24 Bangunan utama Bale Banjar Gerenceng Denpasar dengan ruang yang luas karena digunakan sebagai bangunan serba guna. Poster Selamat Hari Raya masih terpasang dalam rangka menyambut hari raya yang lalu.



Gambar 25 Bagian belakang dari bangunan utama Bale Banjar Gerenceng yang digunakan untuk kantor administrasi dan sekretariat PKK. Fungsi tambahan dari bangunan Bale Banjar untuk kelancaran tugas administrasi banjar.



Gambar 26 Satu pemandangan terhadap kesatuan fungsi kelengkapan dari satu *bale banjar*, yaitu: *Bale Kulkul*, *Paon* (dapur) dan Bale untuk *mebat* atau mempersiapkan makanan untuk keperluan upacara.



Gambar 27 Satu pemandangan dari lingkungan banjar Gerenceng Desa Pemecutan Kaja, yaitu Pura Maospahit yang berada bersebelahan dengan bangunan Bale Kulkul, dengan jalan raya yang sibuk setiap harinya.

KASUS 4

PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT KOTA :

SEBUAH DESKRIPSI TENTANG BANJAR

PARA PENDATANG DI KOTA ADMINISTRATIF DENPASAR

(KASUS BANJAR KERTA PURA, DESA PEMECUTAN)

A. IDENTIFIKASI DAERAH PENELITIAN

1 Lokasi Geografi

Banjar Kerta Pura merupakan salah satu banjar pengembangan yang terletak di Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang masih berstatus dinas atau bagian wilayah dari banjar Kerandan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah (Subak Sempol)
Sebelah Timur : Banjar Merta Jaya
Sebelah Selatan : Banjar Kerandan
Sebelah Barat : Banjar Kerta Darma

Secara administrasi, banjar Kerta Pura merupakan bagian dari Kelurahan Pemecutan yang terdiri dari 17 banjar dan 2 RT yang berada di lingkungan Kecamatan Denpasar Barat. Banjar ini terletak di sebelah barat kota Denpasar yang jarak tempuhnya sekitar 2 km, sedangkan jarak antara banjar satu dengan banjar lainnya sekitar 200 meter.

Untuk menghubungkan ibukota kabupaten, kecamatan dan kelurahan dengan banjar dewasa ini relatif agak mudah dicapai karena prasarana jalan yang sudah diaspal oleh Pemerintah daerah, sehingga mempermudah untuk mengadakan komunikasi baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan lama perjalanan sekitar 10-15 menit. Selain itu pula jalan ini bisa juga merupakan jalan komunikasi pariwisata menuju daerah pariwisata Kuta yang jarak tempuhnya sekitar 9 km dari banjar Kerta Pura dengan lama perjalanan sekitar 30-35 menit. Hubungan antara banjar satu dengan banjar yang lainnyapun sudah dapat dicapai dengan kendaraan roda tiga maupun roda empat, walaupun jalannya masih merupakan jalan tanah. Kondisi perkampungannya sendiri relatif agak datar karena rumah-rumah yang ada didirikan di atas tanah persawahan.

2. Kondisi dan Lingkungan Alam Sekitarnya.

Banjar Kerta Pura merupakan salah satu banjar di antara beberapa banjar yang ada di kelurahan Pemecutan di bagian barat kota Denpasar. Banjar ini juga merupakan suatu kesatuan administrasi dan teritorial seperti juga banjar-banjar yang ada di Bali.

Penduduk yang mendiami banjar ini mayoritas suku bangsa Bali di samping etnis-etnis lainnya seperti: Cina, Jawa, Tapanuli.

Luas wilayah banjar Kerta Pura sekitar 6,00 ha yang terdiri dari luas tanah persawahan 40 are, untuk perubahan sekitar 4,00 ha, untuk tanah banjar sekitar 2 are dan sisanya berupa tanah ladang, jalan dan prasarana lainnya. Untuk lebih jelasnya penyajian data ini, dapat dilihat pada tabel V-1 terlampir.

Tabel V-1
Tata Guna Tanah di Banjar Kerta Pura

No.	Jenis Tanah	Luas (ha)
1.	Sawah	0,40
2.	Perumahan	4,00
3	Bangunan banjar	0,02
4.	Ladang, Jalan, Sekolah dan lain-lain	1,58
	Luas keseluruhan	6,00

Dari data tabel tersebut maka penduduk di banjar Kerta Pura hanya sebagian kecil saja yang mempunyai penghidupan dari sektor pertanian dan mereka lebih tertarik pada pekerjaan sebagai buruh atau pedagang. Sedangkan tanah untuk perumahan merupakan yang terluas dari luas wilayah yang ada digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha, yang bisa diletakkan di depan atau di sebelah rumah. Sebagian besar penduduk banjar Kerta Pura adalah pendatang dari berbagai daerah, propinsi dan negara, sehingga interaksi sosial antara sesama anggota banjar tidaklah begitu akrab seperti pada banjar-banjar yang ada di Bali. Hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu sajalah mereka bisa berkumpul dan berkomunikasi.

Secara geografis banjar Kerta Pura merupakan dataran rendah bukan pantai yang lokasinya cukup strategis untuk membuka berbagai macam usaha. Demikian terlihat saat ini, ada beberapa anggota banjar yang membuka usaha seperti konveksi, kontraktor, perusahaan dan lain-lain yang pemiliknya mayoritas orang Cina.

Karena lokasi dan keadaan alam yang memungkinkan itu banyak konsumen yang ingin membuka atau memiliki tanah di sekitar banjar Kerta Pura.

3. Penduduk dan Gambaran Demografi

Banjar Kerta Pura terdiri dari 4 *tempekan* yaitu *tempekan kaja kelod*, *kaja kangin*, *kelod kangin* dan *kelod kauh* dengan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 179 KK. Jumlah penduduk banjar yang tercatat dalam registrasi di kantor Kelurahan Pemecutan sebanyak 1463 jiwa yang meliputi jumlah pria sekitar 729 jiwa dan wanitanya sekitar 734 jiwa.

Kepadatan penduduk di banjar Kerta Pura disebabkan karena letak banjar tersebut sangat strategis yaitu dekat dengan pusat pembelanjaan (pasar Inpres) dan juga dekat dengan pusat pertokoan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh kebutuhan hidup. Tempat yang agak strategis itu menimbulkan besarnya minat penduduk untuk bertempat tinggal di bilangan banjar Kerta Pura. Di samping itu pula mereka bisa membuka usaha dengan berbagai jenis dan kelas atas, menengah maupun rendah seperti terlihat saat ini.

Keadaan penduduk di Bali boleh dikatakan cukup besar sehingga penyebarannya tidaklah begitu merata. Demikian halnya di banjar Kerta Pura yang penduduknya cukup banyak dan merupakan penduduk muda. Anak-anak yang berumur di bawah 15 tahun sekitar 31,92% dari jumlah penduduk seluruhnya. Produktifitas relatif dalam semua jenis pekerjaan tergantung dari kombinasi ketrampilan dan kekuatan fisik. Untuk itu penduduk yang dapat dikatakan produktif adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas sampai batas umur 55 tahun sejumlah 57,62%. Sedangkan penduduk yang kurang produktif berumur 55 tahun ke atas sebanyak 10,46%. Agar lebih jelasnya data mengenai umur penduduk banjar Kerta Pura dapat dilihat pada tabel V-2 terlampir.

Tabel V-2
Penduduk Banjar Kerta Pura Menurut
Umur dan Jenis Kelamin

No.	Golongan Umur	Pria	Wanita	Jumlah	Persentase
1	0 — 4	65	64	129	8,8
2	5 — 9	78	74	152	10,8
3	10 — 14	92	94	186	12,7
4	15 — 19	85	88	173	11,8
5	20 — 24	63	67	130	8,8
6	25 — 29	54	55	109	7,4
7	30 — 34	61	51	112	7,6
8	35 — 39	49	50	99	6,7
9	40 — 44	39	40	79	5,4
10	45 — 49	36	39	75	5,1
11	50 — 54	33	33	66	4,5
12	55 — 59	25	29	54	3,8
13	60 — 64	22	25	47	3,2
14	65 — 69	15	11	26	1,7
15	70 ke atas	12	14	26	1,7
	Jumlah	729	734	1.463	100,00

Sumber: Catatan Statistik Kelurahan.

Dengan memperhatikan tabel tersebut dapatlah diketahui bahwa perbandingan jumlah penduduk yang berjenis kelamin pria dengan wanita tidaklah begitu menjolok. Secara kuantitatif memang jumlah wanita lebih banyak daripada pria, namun demikian aktivitas mereka tidak terpaku pada satu kegiatan yang ada di rumah tangga saja, bahkan di luar rumah tanggapun mereka secara agresif melakukan berbagai pekerjaan seperti dagang, buruh di pasar maupun buruh bangunan. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di banjar Kerta Pura adalah buruh, kemudian pe-

dagang kecil, menengah maupun besar, pegawai negeri/swasta dan lain sebagainya.

Dengan jumlah penduduk seperti terlihat di atas, tidak mengurangi niat daripada anggota banjar untuk menikmati pendidikan secara formal dengan jalan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah seperti TK, SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi dan Sekolah Kejuruan. Secara regertrasi tercatat di kantor Kelurahan Pemecutan bahwa sejumlah 17,77% dari seluruh jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan dan sisanya lagi 82,23% pernah/tidak pernah sekolah termasuk juga anak-anak yang belum mencapai usia sekolah. Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci, di bawah ini akan disajikan dalam bentuk tabel mengenai tingkat pendidikan.

Tabel V-3
Penduduk Banjar Kerta Pura
Digolongkan Menurut Pendidikan

No.	Jenis Sekolah	Jumlah	Persentase
1	TK	25	1,7
2	SD	125	8,5
3	SLTP	38	2,6
4	SLTA	40	2,7
5	Perguruan Tinggi	25	1,7
6	Kejuruan	7	0,5
7	Pernah/tidak pernah/belum sekolah	1.203	82,2
	J u m l a h	1.463	100,0

Sumber: Catatan Statistik Kelurahan/Banjar

Dari tabel tersebut, tampak begitu besar keinginan dari anggota banjar mengenyam pendidikan dari tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi yang sekaligus juga dapat menunjang pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan.

4. Struktur Pola Menetap dan Pemukiman

Sistem pola menetap dan perumahan yang menata masyarakat Bali khususnya berlandaskan pada dua konsep dualistis yaitu konsepsi akan adanya dua hal yang berlawanan yang mempunyai arti penting menurut pandangan dan kepercayaan orang Bali. Konsep dualistis tersebut dalam tata arah yaitu kaja dan kelod yang mana tata arah ini dikaitkan dengan gunung dan laut. Hal-hal yang dianggap suci dan bernilai sakral akan ditempatkan pada bagian utara untuk Bali selatan dan mengarah ke gunung. Sebaliknya segala sesuatu yang dianggap tidak suci dan bernilai profan akan diletakkan di bagian selatan untuk Bali selatan yang mengarah ke laut. Sedangkan untuk masyarakat Bali utara kebalikannya.

Struktur pola menetap dan perumahan untuk masyarakat Bali umumnya terdiri dari berbagai bangunan sesuai dengan tempat tinggal orang Bali. Bangunan-bangunan yang mesti ada dalam satu kesatuan tempat tinggal meliputi balai saja di bagian utara, balai dauh di bagian barat, balai dangin atau balai adat di bagian timur, dapur dan lumbung padi di bagian selatan.

Lain halnya dengan bangunan-bangunan penduduk yang ada di kota khususnya di banjar Kerta Pura. Warga banjar tidak begitu memperhatikan pola maupun struktur bangunan yang ada. Struktur bangunan di banjar ini sangat tergantung dari arah jalan maupun gang-gang yang menjadi tolok ukur atau pedoman bagi penduduk yang ada di lingkungan banjar Kerta Pura. Karena lokasi tanah yang kurang memungkinkan dan penduduknya bersifat heterogen, maka orientasi penduduk di banjar tersebut dalam pola menetap lebih mengarah pada pendirian rumah dengan pola yang ada dewasa ini.

Untuk perumahan untuk warga penduduk di banjar Kerta Pura bermacam-macam, ada yang memakai gaya tradisional dan ada juga dengan gaya yang ada dewasa ini, dengan bahan-bahan yang lebih kuat dan permanen. Di lain pihak ada juga yang semi permanen dengan bahan setengah batu dan atasnya gedeg. Secara umum perumahan penduduk di banjar Kerta Pura bersifat permanen yang hanya memiliki balai untuk tempat tidur dan dapur saja.

Penduduk di banjar Kerta Pura mayoritas pendatang yang pada saat tertentu mereka harus pulang ke daerah asal untuk melakukan kegiatan-kegiatan adat dan upacara. Anggota banjar ini

kurang memperhatikan struktur pola menetap dan perumahan yang ada di tempat menetap sekarang, karena anggota banjar ini khususnya suku bangsa Bali, selain mereka ikut banjar di tempat menetap sekarang juga tercatat sebagai anggota banjar di tempat asal. Oleh karena itu mereka lebih terikat akan kegiatan yang ada di daerah asal daripada di tempat menetap sekarang. Hal ini disebabkan oleh sistem banjar dan desa yang ada di daerah asal lebih kuat peranannya daripada di tempat menetap sekarang.

5. Struktur Administrasi Desa — Banjar

Dalam tiap kehidupan masyarakat diorganisasi atau diatur oleh adat istiadat, dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan mana ia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang terkecil dalam suatu komunitas adalah desa yang mana desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan LKMD. Dalam menjalankan tugas-tugas desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris dan sekretaris dibantu oleh 5 orang kepala urusan yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. Kemudian secara struktural kepala desa langsung membawahi banjar yang dalam hal ini banjar yang menjadi fokus penelitian adalah banjar Kerta Pura.

Banjar Kerta Pura merupakan banjar pengembangan yang muda sebelumnya masih berbentuk RT. Mengingat jumlah RT di tahun 1966 lebih dari 50 KK, maka seluruh KK mempunyai inisiatif untuk mengadakan rapat dalam rangka pembentukan banjar yang sebelumnya harus melapor pada kepala desa. Setelah sepakat semua, warga banjar yang akan dibentuk itu wajib mengeluarkan tiap bulan sebesar Rp. 2.000,—. Kemudian pada tahun 1970 banjar mulai didirikan di atas areal tanah seluas 2 are termasuk tanah sumbangan dari salah satu anggota banjar atas dasar hak pakai. Cara kerja dalam pembangunan balai banjar bersifat gotong ro-

yong yang melibatkan seluruh calon anggota banjar. Dua tahun setelah itu tepatnya pada tahun 1972 banjar Kerta Pura diresmikan/dipelaspas oleh Ida Pedanda yang dihadiri oleh anggota banjar dan juga bapak Kepala Desa.

Sebenarnya banjar Kerta Pura sudah bisa berstatus dinas di banjar sendiri. Oleh karena masalah biaya, maka status sebagai banjar dinas sementara ini masih di banjar Kerandan dan apabila anggota banjar mencari surat-surat diwajibkan membuatnya rangkap empat yang kemudian diserahkan ke Kelurahan, Kelian Dinas, Pengurus Banjar, dan anggota masing-masing sebuah.

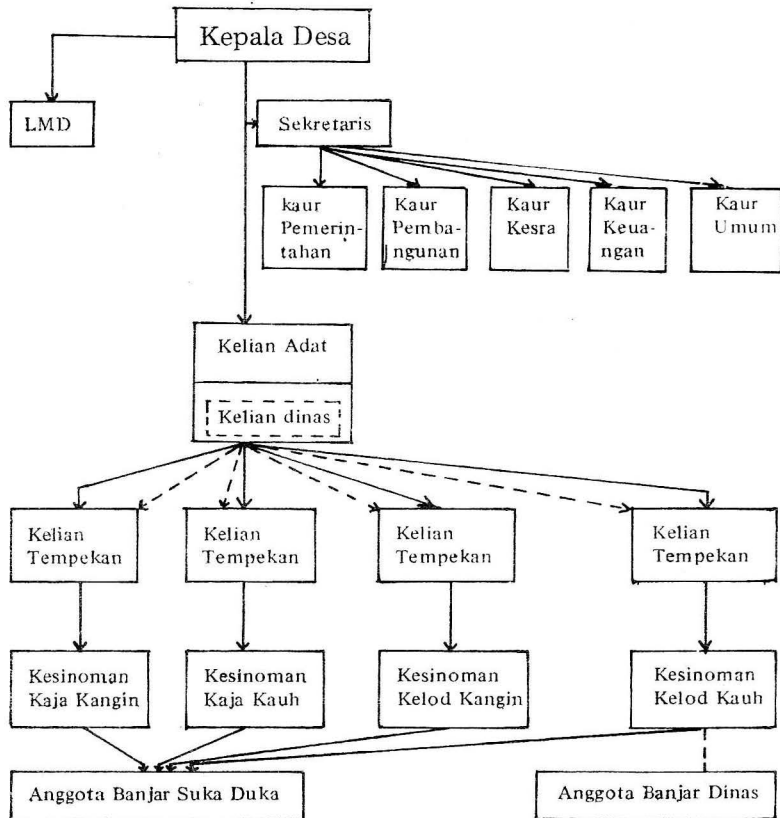
Dalam suatu banjar harus ada pimpinan (kelian) banjar yang merupakan salah satu unsur yang penting peranannya dalam suatu komunitas kecil seperti yang ada di banjar Kerta Pura. Kelian banjar adalah suatu tokoh dengan berbagai hak dan kewajiban yang mesti dilakukan dengan berlandaskan pada kedudukannya dalam masyarakat. Untuk di banjar Kerta Pura dikenal adanya pimpinan banjar (kelian) suka duka dan banjar dinas yang kepemimpinannya dipegang oleh seorang kelian banjar. Kelian banjar mengangkat seorang sekretaris yang bisa diajak kerja sama yang tidak termasuk dalam sembilan prajuru banjar dan hanya sebagai pembantu saja. Kemudian kelian banjar juga membawahi 4 kelian tempekan yaitu tempekan kaja kauh, kaja kangin, kelod kauh, kelod kangin dan juga 4 kesinoman (juru arah) yang bertugas menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di banjar. Kelian banjar dipilih untuk masa jabatan 3 tahun sedangkan kesinoman dipilih setiap 6 bulan sekali secara bergilir.

Kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan banjar yang menyangkut dinas adalah kerja bakti sebulan sekali dalam minggu kedua. Dalam kegiatan ini hampir sebagian besar anggota banjar yang hadir. Sedangkan untuk kegiatan adat (suka duka) anggota banjar khususnya suku bangsa Bali lebih sering mengadakan di tempat asal. Tetapi ada juga warga banjar Kerta Pura yang tempat asalnya dekat dengan banjar, sehingga apabila mereka punya pekerjaan suka maupun duka semua anggota banjar suka duka bisa hadir. Lain halnya dengan anggota banjar yang berasal agak jauh dari banjar yaitu radius 8 km, hanya pengurus sajalah yang datang.

Hubungan di antara kelian banjar ada yang bersifat koordinasi dan ada yang bersifat perintah. Yang bersifat koordinatif apabila

ada hal-hal yang rutin dalam kegiatan seperti adat dan agama sedangkan hal-hal yang bersifat perintah apabila menyangkut kedinasan seperti kerja bakti, pengumuman pemerintah dan lain-lain. Di sini terlihat adanya perbedaan antara anggota banjar dinas dan banjar suka duka. Untuk tugas-tugas kedinasan melibatkan semua anggota banjar baik mereka anggota banjar suka duka maupun dinas dan untuk tugas-tugas keadatan hanya melibatkan anggota banjar suka duka saja.

BAGAN STRUKTUR KEPEMIMPINAN BANJAR



Keterangan:

----- : Komunikasi Kedinasan

 : Komunikasi Keadatan

6. Sistem Ekonomi Yang Berkembang

Manusia di dalam kehidupannya sehari-hari selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan yang bersifat primer maupun sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang harus mendapat perhatian pertama dan tidak boleh tidak terpenuhi. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan suatu kebutuhan yang baru terpenuhi setelah kebutuhan primer. Berbicara mengenai kebutuhan hidup, kita tidak bisa lepas dengan mata pencaharian hidup yang merupakan dua hal yang berbeda, tetapi masih mempunyai hubungan yang terkait.

Demikian terjadi pada warga banjar Kerta Pura yang penduduknya mayoritas suku bangsa Bali, dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik primer maupun sekunder mereka juga tidak bisa lepas dari masalah mata pencaharian hidup. Karena bagi mereka mata pencaharian hidup merupakan sumber pendapatan utama bagi setiap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dengan melihat lokasi banjar dan lingkungannya, anggota banjar Kerta Pura sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai buruh. Selain itu ada juga penduduk yang mempunyai mata pencaharian hidup sebagai dagang, pegawai, sopir, kontraktor, bengkel, penjahit dan lain-lain. Ini terlihat dari 20 responden yang dianggap mewakili sampel atas dasar random sampling undian, mayoritas anggota banjar mempunyai mata pencaharian sebagai buruh. Untuk lebih jelasnya data mengenai mata pencaharian hidup penduduk di banjar Kerta Pura dapat dilihat pada tabel V-4.

Tabel V-4
Responden Digolongkan Menurut Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Bur u h	5	20,0
2	D a g a n g	5	20,0
3	Pegawai Negeri	3	12,0
4	G u r u	3	12,0
5	Karyawan	3	12,0
6	S o p i r	2	8,0
7	D o s e n	1	4,0
8	Kontraktor	1	4,0
9	Bengkel	1	4,0
10.	Penjahit	1	4,0
	J u m l a h	20	100,0

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa mata pencaharian hidup sebagai buruh menempati urutan teratas pada penduduk di banjar Kerta Pura yaitu 20% dari jumlah responden, baik mereka sebagai buruh bangunan, buruh stand plat, maupun buruh di pasar. Kemudian yang menempati urusan kedua yaitu sebanyak 5 orang atau 20 persen dari jumlah responden adalah pedagang. Adapun pedagang yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang mempunyai kegiatan yang berhubungan dengan dunia perdagangan atau pemberian jasa dalam peredaran barang, baik itu pedagang keliling, pedagang tetap, di warung atau di toko. Sedangkan untuk pegawai negeri, guru, dan karyawan dalam hal ini mempunyai urusan yang sama yaitu 3 orang atau 12% dari jumlah responden. Karyawan dalam hal ini meliputi karyawan hotel, karyawan bus malam, karyawan telkom dan lain-lain. Untuk urutan keempat adalah mereka yang mempunyai mata pencaharian hidup sebagai sopir sebanyak 2 orang atau 8% dari jumlah responden yang jalurnya di seputar kota Denpasar dan ada juga ke luar kota atau ke luar Bali. Sebagai urutan terakhir adalah mereka yang mempunyai penghidupan sebagai kontraktor, dosen, bengkel, dan penjahit masing-masing 4% dari jumlah responden. Pekerjaan sebagai kontraktor umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai modal seperti halnya suku bangsa Cina yang ada di lingkungan banjar Kerta Pura yang mendominasi kegiatan perekonomian.

Dalam kesulitan perekonomian, sistem tolong menolong di antara tetangga terlihat dalam kehidupan masyarakat di banjar Kerta Pura agak baik. Demikian terlihat dalam kesulitan keuangan rumah tangga maupun konsumsi rumah tangga, seperti halnya pada warga banjar Kerta Pura yang berasal dari Bakas (kabupaten Klungkung) yang kebetulan juga tempat tinggalnya agak mengelompok. Jika anggota banjar yang menemui kesulitan keuangan, maka salah satu dari yang agak mampu memberikan pinjaman pada sesama anggota. Demikian juga halnya dengan konsumsi rumah tangga, seperti kekurangan gula, kopi, garam dan lain-lain mereka bisa saling memberikan dan ini hanya dilakukan di antara tetangga terdekat atau antar warga kampung Bakas saja. Agak berbeda dengan warga banjar lainnya yang masih ada di lingkungan banjar Kerta Pura yang mana mereka hanya bisa melakukan kegiatan tolong menolong dalam bidang ekonomi di antara tetangga terdekat

atau di sebelah rumah, ataupun di antara satu suku bangsa. Dalam hal ini sifat individualis warga banjar terlihat dalam bidang ekonomi, karena sebagian besar anggota berasal dari berbagai suku bangsa, sehingga konformitas mereka dalam bidang ekonomi secara keseluruhan agak kurang.

7. Beberapa Kegiatan Lain Dalam Banjar dan Desa

Sebagai suatu bentuk komunitas kecil yaitu banjar yang merupakan bagian dari desa yang ada di Bali mempunyai peranan yang penting dalam membentuk kehidupan masyarakatnya. Banjar juga dapat menjadi pusat orientasi dari para anggota masyarakat untuk suatu kegiatan-kegiatan tertentu serta pilihan untuk pengadaan dan pengerahan tenaga dalam upacara. Kegiatan-kegiatan di banjar maupun di desa dewasa ini cukup kompleks dan tidak terbatas pada satu kegiatan saja, ada yang mengarah dalam kegiatan olah raga, kesenian, kesehatan, ekonomi dan lain-lain yang melibatkan anggota secara keseluruhan.

Kegiatan olah raga menempati urutan pertama dalam rangka mewujudkan kesehatan jasmani maupun rohani seperti yang digalakkan saat ini. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri yang hampir setiap hari Jum'at pagi melakukan senam kesegaran jasmani di masing-masing instansi, tetapi sekarang sudah luas lingkupnya sampai pada tingkat banjar yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Demikian terlihat pada ibu-ibu PKK di banjar Kerta Pura yang belakangan ini telah giat-giatnya melakukan kegiatan olah raga senam kesegaran jasmani dalam rangka ikut menunjang pembangunan khususnya di bidang kesehatan.

Selain melibatkan ibu-ibu PKK di banjar Kerta Pura. Para muda/mudi pun secara aktif melakukan berbagai kegiatan olah raga seperti sepak bola, bola volli, bola basket, tenis meja, bulu tangkis, catur dan lain-lain. Di samping prasarana lapangan yang ada di lingkungan banjar Kerta Pura sebagai penunjang juga potensi fisik yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan olah raga. Dari sekian cabang olah raga yang disebutkan di atas, semua telah pernah diikuti baik mengatas namakan banjar maupun perorangan. Salah satu dari cabang olah raga yang paling menonjol dan pernah memperoleh piala atau juara yang diperoleh adalah

dalam cabang bola basket. Regu bola basket ini lebih sering mengatas namakan banjar dengan nama klubnya PORTAPURA dan bila mengadakan pertandingan dalam rangka perebutan piala disponsori oleh banjar. Regu bola basket inipun tampil ketika peresmian gedung olah raga Ngurah Rai sebagai eksebis saja.

Sebenarnya anggota muda/mudi banjar Kerta Pura cukuplah potensial dalam berbagai aspek, tetapi karena mereka mempunyai kesibukan yang berbeda, maka ruang geraknya agak terbatas. Demikian halnya terlihat dalam bidang seni dimana sebenarnya mereka cukup mampu dalam mengembangkan kegiatan kesenian, namun orientasi seninya hanya terbatas pada kegiatan yang ada di banjar setiap 6 bulan sekali yaitu pada upacara piodalan di pura banjar saja. Di samping itu perhatian banjar terhadap seni agak berkurang, selain prasarananya belum ada juga niat dari anggota banjar agak kurang.

Kegiatan lain yang ada di banjar yang melibatkan muda/mudi serta ibu-ibu PKK adalah penggalan dana berupa amal yang dilakukan hampir setiap 6 bulan sekali tepatnya pada hari raya Galungan. Teknis pelaksanaannyadiatur oleh ketua dan diawasi oleh kelian. Mengingat mayoritas penduduk banjar Kerta Pura adalah pendatang kekompakan dalam melakukan kegiatan amal ini agak kurang, karena mereka lebih cenderung untuk pulang ke kampung halamannya. Jadi yang menjalankan tugas-tugas banjar dalam kegiatan adalah panitia-panitia saja serta ada beberapa anggota muda/mudi atas dasar kesadaran. Di sini terlihat kurangnya kesadaran dan pengertian anggota muda/mudi terhadap kewajibannya sebagai anggota banjar.

Untuk kegiatan arisan di banjar hanya melibatkan ibu-ibu PKK saja. Arisan dilakukan sebulan sekali di rumah anggota banjar atas dasar penarikan. Dalam pertemuan ini ibu-ibu PKK tidak saja memfokuskan diri pada kegiatan arisan saja, tetapi mereka sering juga mendiskusikan tentang aneka resep masakan yang nantinya dipraktekkan di rumah masing-masing. Di sini mereka saling tukar menukar informasi mengenai masalah kewanitaan. Kegiatan arisan ini tidak saja dilakukan di lingkungan banjar saja, tetapi ada beberapa anggota PKK banjar ikut aktif dalam kegiatan arisan di tingkat desa.

Dalam penimbangan bayi juga ibu-ibu PKK ikut berperan

yang mana mereka hanya sebagai koordinator saja sedangkan sebagai pengawas atau penanggung jawab adalah kelian banjar. Sebagai pelaksana dalam kegiatan penimbangan bayi ini adalah kader petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang diberikan dari desa. Di sini tampak juga peran serta ibu-ibu PKK dalam menunjang pembangunan khususnya di bidang Keluarga Berencana.

B. PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT KOTA DENPASAR, DI BANJAR KERTA PURA

1. Kedudukan Banjar dan Fungsi Banjar Bagi Desa

Dalam pandangan orang Bali konsep banjar memiliki 2 pengertian yaitu pertama banjar sebagai kesatuan wilayah tempat tinggal para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya dengan nama banjar adat dan kedua banjar sebagai kesatuan wilayah administrasi dengan nama banjar dinas. Banjar adat dalam rangka sistem pemerintahan tidak terjalin secara struktural dan juga dalam kaitannya terhadap banjar dinas, banjar adat hanya terjalin secara fungsional dan tidak secara struktural. Dalam hal ini kedudukan atau posisi banjar berada di bawah pengawasan desa.

Banjar pada hakikatnya adalah kesatuan wilayah dan merupakan bagian dari suatu desa dengan memiliki kesatuan wilayah, ikatan wilayah serta perasaan cinta dan kebanggaan tersendiri. Batas antara satu banjar dengan banjar lainnya pada umumnya adalah batas alam seperti sawah, jalan, bukit, gunung, lautan dan lain-lain. Sedangkan batas pekarangan tempat tinggal antara satu dengan yang lainnya pada umumnya adalah batas buatan berupa tembok pekarangan yang dibangun dengan bahan batu padas, batu bata, tanah dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan banjar yang ada di kota khususnya di banjar Kerta Pura dengan berbagai fungsi kegiatan.

Di banjar Kerta Pura, seseorang yang mempunyai tempat tinggal atau rumah dan bekerja di lingkungan wilayah banjar wajib mendaftarkan diri pada kelian banjar dalam rangka mentaati peraturan-peraturan dari pemerintah daerah. Jumlah kepala keluarga

(KK) di lingkungan banjar Kerta Pura saat ini adalah 179 KK baik itu termasuk anggota banjar suka duka maupun banjar dinas. Dari jumlah tersebut 25 orang responden (KK) ayang dipilih sebagai sampel dalam rangka penelitian mengenai peranan banjar yang ada di Bali khususnya di banjar Kerta Pura semua yang terpilih sebagai responden itu berstatus sebagai anggota banjar suka duka yang secara tidak langsung juga sebagai anggota banjar dinas.

Dua orang dari 25 orang responden mengatakan bahwa mereka mulai aktif menjadi anggota banjar sekitar 1 s/d 5 tahun dan 2 orang responden juga mengatakan keterlibatan mereka sebagai anggota banjar sekitar 6 s/d 10 tahun. Sedangkan responden yang turun sebagai anggota banjar sekitar 11 s/d 15 tahun sebanyak 22 orang responden itu adalah mereka yang sejak dulu atau sebelum berdirinya banjar sudah memiliki tempat tinggal di lingkungan banjar Kerta Pura. Untuk lebih jelasnya data mengenai lamanya responden menjadi anggota banjar dapat dilihat pada tabel V-5.

Tabel V-5
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Lamanya menjadi Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	1 - 5 tahun	2	8,0
2	6 - 10 tahun	2	8,0
3	11 - 15 tahun	21	84,0
	J u m l a h	25	100,0

Sebagai anggota banjar, dalam suatu kegiatan di banjar diwajibkan semua anggota banjar hadir dan menjalankan tugas-tugas banjar sesuai dengan awig-awig banjar atau instruksi pemerintah. Anggota banjar yang berstatus anggota banjar dinas orientasinya mengarah pada masalah kedinasan saja, sedangkan anggota banjar suka duka selain melaksanakan tugas-tugas banjar dalam kaitannya dengan adat dan agama, juga wajib melaksanakan tugas-tugas yang menyangkut kedinasan atau administrasi. Dalam hal ini anggota banjar yang diwawancarai sebanyak 25 orang responden itu, se-

mua mengatakan turut aktif dalam kegiatan atau tugas-tugas banjar selama mereka menjadi anggota banjar. Agar lebih jelasnya data yang disajikan mengenai tugas-tugas banjar tersebut dapat dilihat pada tabel V-6 terlampir.

Tabel V-6
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Keikutsertaannya dalam Melaksanakan
Tugas-tugas Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	25	100,0
2	Tidak	—	0
3	Tidak Terjawab	—	0
J u m l a h		25	100,0

Penggalian dana untuk pembangunan bale banjar, pada mulanya dilakukan lewat iuran dari masing-masing anggota sebesar Rp. 2.000,— setiap bulan. Kekurangan biaya dari hasil iuran itu, atas kesepakatan anggota banjar semua, diadakanlah kegiatan berupa amal setiap 6 bulan sekali yang melibatkan semua anggota banjar baik itu PKK, muda/mudi maupun kepala keluarga. Kemudian setelah dana untuk pembangunan bale banjar terkumpul, mulailah bale banjar digarap oleh semua anggota banjar atas dasar gotong royong. Berbeda halnya dengan anggota banjar yang baru ikut aktif sekitar 1 s/d 5 tahun, mereka sama sekali tidak ikut serta dalam pembangunan bale banjar untuk pertama kalinya. Bagi anggota banjar baru yang sudah memiliki tempat tinggal tetap di lingkungan banjar Kerta Pura, mereka bisa turun menjadi anggota banjar suka duka dengan syarat membayar uang suka duka dan uang pembangunan sesuai dengan aturan yang ada.

Dari seluruh responden yang diwawancarai, 24 orang responden mengatakan bahwa mereka ikut melaksanakan tugas-tugas banjar ketika mencari dana untuk pembangunan bale banjar yang lalu. Sedangkan seorang responden lagi yang merupakan anggota baru dan terdaftar sebagai anggota banjar sejak tahun 1984 me-

ngatakan tidak ikut dalam penggalan dana untuk pembangunan bale banjar, tetapi mereka sudah membayar uang suka duka dan uang pembangunan. Di bawah ini akan disajikan data mengenai keikutsertaan anggota banjar dalam melaksanakan tugas ketika mencari dan untuk pembangunan bale banjar. (Lihat tabel V-7)

Tabel V-7
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Keikutsertaannya Dalam Penggalan Dana Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	24	96,0
2	Tidak	1	4,0
3	Melaksanakan kalau sempat	--	-
	J u m l a h	25	100,0

Berkaitan dengan masalah penggalan dana tersebut di atas, sebanyak 24 orang responden mengatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam penggalan dana tersebut tidak untuk dibagi-bagikan kepada anggota banjar maupun untuk kegiatan lain, tetapi semua hasil yang diperoleh itu disalurkan untuk kepentingan atau pembangunan bale banjar. Sedangkan seorang responden mengatakan bahwa mereka tidak ikut dalam penggalan dana untuk pembangunan bale banjar. Banjar pernah juga meminjam uang dari salah satu anggota banjar untuk pembangunan bale banjar tanpa bunga dan kapan saja bisa dikembalikan. Di sini terlihat besarnya kesadaran salah seorang anggota banjar terhadap banjar, demi terwujudnya banjar sebagai suatu komunitas kecil.

Tabel V-8 memperlihatkan data mengenai pendistribusian hasil dari penggalan dana.

Tabel V-8

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Pandangannya Terhadap Pendistribusian Hasil Penggalan Dana**

No.	Kategori Banjar	Jumlah	Persentase
1	Semua untuk banjar	24	96,0
2	Sebagian untuk anggota dan sebagian untuk banjar	—	—
3	Tidak dapat apa-apa	—	—
4	Tidak menjawab	1	4,0
	J u m l a h	25	100,0

Seperti halnya banjar-banjar yang ada di Bali dalam suatu kegiatan perekonomian terlihat adanya kegiatan ekonomi yang mengatas namakan banjar yang dapat memberi keuntungan bagi anggota banjar seperti pekerjaan panen, tukang dan lain-lain yang kemudian hasilnya dibagi dua yaitu setengah masuk kas banjar dan setengah lagi masuk anggota banjar. Tetapi dewasa ini kegiatan ekonomi tersebut jarang yang melakukan atas nama banjar, mereka lebih cenderung untuk mencari usaha lewat usaha lainnya. Semenjak berdirinya banjar Kerta Pura belum pernah banjar melibatkan anggota banjar dalam bidang ekonomi yang mendatangkan hasil buat para anggotanya, karena anggota banjar tersebut cenderung mencari usaha sendiri.

Sebanyak 23 orang responden mengatakan bahwa banjar tidak berperan dalam kegiatan ekonomi yang dapat kiranya mendatangkan hasil buat para anggotanya sedangkan 2 orang responden memang betul-betul tidak tahu, apakah ada atau tidak kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi atas nama banjar.

Untuk lebih jelasnya data mengenai kegiatan banjar yang dapat mendatangkan hasil buat para anggotanya dapat dilihat pada tabel V-9

Tabel V-9
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan
Menurut Pelaksanaan Tugas Banjar Ketika Mencari
Dana Untuk Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ada	—	—
2	Tidak	23	92,0
3	Tidak tahu	2	8,0
4	Tidak menjawab	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Masalah yang akan dibicarakan dalam hal ini adalah mengenai jenis pekerjaan yang mempunyai kaitan yang erat dengan masalah kegiatan yang dilakukan bersama di banjar yang dapat mendatangkan hasil buat para anggotanya. Dari 25 orang responden yang ada, semuanya tidak memberikan jawaban tentang kegiatan ekonomi ini, karena di banjar Kerta Pura belum ada kegiatan seperti ini yang bisa mendatangkan hasil buat para anggotanya.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk di banjar Kerta Pura adalah buruh, dagang, pegawai negeri/swasta, petani, tukang dan lain-lain. Dari seluruh jumlah penduduk yaitu 1463 jiwa hanya 16,5% yang secara aktif mempunyai pekerjaan, sedangkan 83,5% tidak bekerja karena masih mengikuti pendidikan dan ada juga karena sudah usia lanjut sehingga tenaganya kurang produktif, dan ada yang belum bekerja karena kesempatan belum ada.

Dalam kesulitan pekerjaan, tidak pernah ada anggota banjar yang minta bantuan banjar untuk mencari pekerjaan, karena anggota banjar lebih cenderung mencari pekerjaan sendiri daripada minta bantuan banjar. Demikian diungkapkan oleh 25 orang yang diwawancarai. Agar lebih jelasnya data mengenai bantuan banjar untuk mencari pekerjaan bagi anggota yang menemukan kesulitan pekerjaan dapat dilihat pada tabel V-10

Tabel V-10

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan
Menurut Adanya Bantuan Banjar Dalam Kesulitan Pekerjaan**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	—	—
2	Tidak	25	100,0
3	Tidak tahu	—	—
4	Tidak terjawab	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Begitu pula halnya dengan masalah kesulitan keuangan. Dari 25 orang responden ini semuanya mengatakan tidak dapat meminjam uang untuk keperluan mendadak, karena banjar memang tidak mempunyai kas lebih untuk dipinjamkan. Peminjaman uang untuk kebutuhan mendadak biasanya dilakukan di antara tetangga terdekat yang bisa dipercaya dan pengembaliannya tergantung dari pemilik uang. Pada tabel V-11 terlihat data mengenai ada tidaknya peminjaman uang kas banjar kepada para anggota.

Tabel V-11

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan
Menurut Peminjaman Uang Banjar**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Dapat dibantu	—	—
2	Dapat dipinjam	—	—
3	Tidak dapat	25	100,0
4	Lainnya	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Penduduk di banjar Kerta Pura paling banyak menekuni pekerjaan sebagai buruh. Mereka secara agresif melakukan berbagai

kegiatan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memandang apakah pekerjaan itu dapat dikategorikan sebagai pekerjaan kasar atau tidak. Demikian juga bagi penduduk yang mempunyai mata pencaharian hidup sebagai dagang apakah mereka termasuk pedagang kecil-kecilan, menengah ataupun besar, mereka berlomba-lomba mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Warga banjar ini dalam pencarian nafkah tidak begitu memperhatikan warga lainnya, sifat individualnya lebih kelihatan daripada sifat gotong royong.

Dalam mencari pekerjaan atau nafkah, sebanyak 23 orang responden menyatakan bahwa mereka lebih mudah mencari pekerjaan sendiri bila dibandingkan dengan pengelolaan melalui banjar, tetapi ada juga seorang responden mengatakan kedua-duanya yaitu melalui banjar maupun sendiri-sendiri. Sedangkan seorang responden lagi mengatakan tidak tahu tentang kemudahan dalam mencari pekerjaan. Untuk lebih jelasnya data tentang cara mencari pekerjaan dapat dilihat tabel V-12 terlampir.

Tabel V-12
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Pendapatnya tentang Cara Mencari Pekerjaan

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Lebih mudah lewat banjar	—	—
2	Lebih mudah lewat sendiri	23	92,0
3	Kedua-duanya	1	4,0
4	Tidak tahu	1	4,0
J u m l a h		25	100,0

Sebagai anggota banjar, semua anggota mendapat perlakuan yang sama antara sesama anggota banjar. Di sini tidak ada perbedaan apakah mereka masuk anggota dinas atau suka duka dalam aitananya dengan masalah ekonomi. Dari 25 orang responden yang mewakili sampel, sebanyak 23 orang responden mengatakan bahwa mereka tidak mendapat keringanan yang diperoleh dalam bidang ekonomi dalam kehidupannya setelah menjadi anggota ban-

jar dan seorang responden mengatakan bahwa mereka betul-betul memang tidak tahu apakah ada atau tidak keringanan tersebut. Sedangkan seorang responden lagi tidak memberikan jawaban tentang masalah keringanan ekonomi setelah menjadi anggota banjar. Untuk lebih jelasnya data mengenai keringanan ekonomi setelah menjadi anggota banjar dapat dilihat tabel V-13

Tabel V-13

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Keringanan dalam Bidang Ekonomi Setelah
Menjadi Anggota Banjar**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	A d a	—	—
2	Tidak ada	23	92,0
3	Tidak tahu	1	4,0
4	Tidak terjawab	1	4,0
	J u m l a h	25	100,0

Pembicaraan yang akan diungkapkan dalam hal ini, mempunyai kaitan yang erat sekali dengan masalah tersebut di atas, yaitu tentang keringanan yang diperolehnya dalam bidang ekonomi setelah menjadi anggota banjar. Ke 25 orang responden yang mewakili sampel ini semuanya mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak memperoleh keringanan di bidang ekonomi, karena itu responden tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada.

2. Sistem Aturan dan Perlengkapan Banjar

Dalam suatu komunitas seperti banjar atau desa, aturan dan adat istiadat berkembang bagi segenap warganya. Sistem aturan dan adat istiadat ada beberapa di antaranya mempunyai akibat hukum yang disebut hukum adat. Sulit kiranya membedakan mana adat yang mempunyai sanksi hukum dan mana yang hanya mempunyai sanksi adat dari suatu komunitas. Ada kebiasaan atau

adat yang mempunyai sanksi secara bertingkat yaitu sanksi peringatan adat, kemudian menjadi denda dan akhirnya sampai pada pemecatan. Aturan adat bisa mempunyai sanksi hukum apabila tingkat pelanggarannya sudah semakin tinggi dalam artian bila pelanggaran terhadap aturan adat istiadat itu dilakukan secara berulang-ulang, maka suatu sanksi hukum akan dikenakan kepada pelanggarnya.

Sementara ini warga banjar Kerta Pura belum pernah ada yang melanggar aturan-aturan yang ada secara berkali-kali atau dipecat begitu saja. Memang ada salah satu anggota banjar yang hanya melakukan pelanggaran kecil yang kemudian dikenakan sanksi diberhentikan sementara dari keanggotaan banjar dan setelah ada perubahan sifat dari yang bersangkutan, baru bisa aktif lagi sebagai anggota banjar.

Sebagai anggota banjar tidak saja taat akan aturan-aturan yang bersifat adat, namun yang bersifat kedinasaanpun harus mendapat perhatian dari warga banjar. Demikian halnya dengan warga banjar Kerta Pura sendiri, bila akan, bepergian ke luar kota/lingkungan diwajibkan untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu karena banyaknya terjadi kasus penduduk liar yang tidak mempunyai identitas secara pasti, sehingga sering dilakukan penertiban tentang KTP. Tetapi bila tidak mempunyai KTP kalau bepergian ke luar kota, anggota banjar wajib melapor pada kelian banjar untuk minta surat keterangan jalan.

Dari seluruh responden yang diwawancara sebanyak 14 orang responden yang tidak minta ijin bila akan bepergian ke luar kota/lingkungan dan 7 orang responden mengatakan kadang-kadang saja minta ijin kalau menginap, sedangkan 4 orang responden mengatakan tidak perlu minta ijin, karena sudah ada kartu penduduk (KTP). Hal ini dapat dilihat pada tabel V-14, mengenai ijin dari kelian banjar bila anggota banjar akan bepergian ke luar kota/lingkungannya.

Tabel V-14

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Pendapat Mereka Tentang Perlunya Ijin Jika
Bepergian Ke Luar Kota**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Minta ijin	—	—
2	Tidak minta ijin	14	56,0
3	Kadang-kadang	7	28,0
4	Tidak perlu	4	16,0
J u m l a h		25	100,0

Berkaitan dengan masalah di atas yaitu masalah minta ijin dalam hal bepergian ke luar kota/lingkungan, maka bentuk ijin yang diberikan terhadap 7 orang responden itu adalah berupa kebebasan dalam kewajiban tertentu. Sedangkan 18 orang responden yang mengatakan tidak minta ijin dan tidak perlu minta ijin itu tidak memberikan jawaban terhadap bentuk ijin yang diterima.

Untuk lebih jelasnya data mengenai bentuk ijin yang diberikan kelian banjar bila anggota banjar pergi ke luar/lingkungan dapat dilihat pada tabel V-15 terlampir.

Tabel V-15

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Pendapatnya Tentang Bentuk Ijin Bila Bepergian Ke Luar Kota**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Bebas dari semua kewajiban	—	—
2	Bebas dari kewajiban tertentu	7	28,0
3	Tidak mendapat hak selama pergi	—	—
4	Masih mendapat sebagian hak	—	—
5	Bebas dari tanggung jawab banjar	—	—
6	Tidak terjawab	18	72,0
J u m l a h		25	100,0

Begitu pula kalau kedatangan tamu dari tempat lain dan lebih dari 24 jam, maka anggota banjar wajib melapor kepada kelian karena itu sudah dianggap menginap. Tetapi realisasinya, dari 25 orang responden yang mewakili sampel ini hanya 22 orang responden yang menyatakan bahwa mereka melapor kedatangan tamu dari luar dan sebanyak 2 orang responden mengatakan tidak melapor kepada kelian, sedangkan seorang responden lagi kadang-kadang saja melapor pada kelian banjar. Hal ini juga tergantung dari siapa tamu yang datang dan menginap di rumah penduduk, kalau tamunya itu adalah keluarga biasanya jarang yang melapor dan bila tamunya orang lain baru melapor pada kelian. Untuk lebih jelasnya laporan tentang tamu yang menginap dapat dilihat pada tabel V-16.

Tabel V-16
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Pendapatnya Tentang Keharusan Melaporkan Tamu
Yang Menginap

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Melapor	22	88,0
2	Tidak melapor	2	8,0
3	Kadang-kadang	1	4,0
	J u m l a h	25	100,0

Organisasi banjar merupakan organisasi sosial yang secara struktural berada di bawah desa, yang mempunyai suatu ikatan wilayah. Sebagai anggota banjar otomatis juga sebagai anggota desa. Demikian terlihat di banjar Kerta Pura yaitu dari 25 orang responden yang diambil sebagai sampel, semuanya mengatakan bahwa mereka langsung sebagai anggota desa. Untuk lebih jelasnya data tentang keanggotaan desa dapat dilihat pada tabel V-17 terlampir.

Tabel V-17
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Keanggotaan Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Y a	25	100,0
2	Tidak	—	—
3	Tidak tahu	—	—
4	Tidak terjawab	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Masalah ini berkaitan dengan masalah keanggotaan desa, apakah responden banjar Kerta Pura ini ikut anggota banjar suka duka atau banjar dinas, atau kedua-duanya. Dua orng dari 25 responden mengatakan bahwa mereka termasuk anggota banjar dinas dan 24 orang responden ikut sebagai anggota banjar suka duka dan dinas, sedangkan seorang lagi mengatakan bahwa mereka memang betul-betul tidak tahu apakah mereka masuk anggota banjar suka duka atau dinas karena mereka berasal dari warga Tionghoa yang belum begitu paham tentang jenis keanggotaan tersebut. Tabel V-18 akan menyajikan data mengenai keanggotaan desa.

Tabel V-18
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan
Menurut Keanggotaan Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Anggota desa dinas	—	—
2	Anggota desa dinas dan suka duka	24	96,0
3	Tidak tahu	1	4,0
4	Tidak terjawab	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Sebagai anggota desa dinas setiap anggota akan dihadapkan berbagai kewajiban-kewajiban desa yang semestinya dilaksanakan. Sebanyak 8 orang dari 25 responden mengatakan kewajibannya sebagai anggota desa dinas adalah mentaati aturan-aturan dinas atau pemerintahan dan 5 orang responden lagi mengatakan kewajibannya yang mestinya dilakukan sebagai anggota desa adalah terbatas pada masalah administrasi atau mencari surat-surat, sedangkan seorang responden mengatakan kewajibannya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian 10 orang responden mengatakan kewajibannya sebagai anggota desa adalah melaksanakan kegiatan gotong royong dan taat pada masalah kedinasan, dan seorang responden lagi mengatakan bahwa mereka betul-betul tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban yang mesti mereka lakukan sebagai anggota desa. Untuk lebih jelasnya data tentang kewajiban anggota desa, dapat dilihat pada tabel V-19.

Tabel V-19

Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut Pendapatnya Tentang Kewajiban Sebagai Anggota Desa Dinas

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mentaati aturan-aturan desa dinas (administrasi dan pemerintahan)	8	30,0
2	Taat pada masalah administrasi atau mencari surat-surat keterangan saja	5	20,0
3	Gotong royong dan taat pada masalah kedinasan	10	32,0
4	Melaksanakan tugas-tugas pemerintah	1	4,0
5	Tidak tahu	1	4,0
	J u m l a h	25	100,0

Begitu pula halnya sebagai anggota desa suka duka akan dihadapkan dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan. Dari 25 orang responden yang diwawancara sebanyak 6 orang mengatakan kewajibannya sebagai anggota desa suka duka adalah dalam kegiatan suka maupun duka saja dan 8 orang responden mengatakan kewajibannya dalam kegiatan dan ikut sembahyang di pura desa. Sedangkan 8 orang responden lagi mengatakan kewajibannya sebagai anggota desa suka duka adalah taat pada awig-awig desa adat dan melaksanakan tugas-tugas adat maupun agama serta 3 orang responden mengatakan bahwa mereka tidak tahu secara pasti kewajiban-kewajiban apa yang semestinya mereka lakukan. Agar lebih jelasnya akan disajikan melalui tabel V-20 terlampir.

tabel V-20

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Pendapatnya tentang Kewajibannya Sebagai
Anggota Desa Suka Duka**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Dalam kegiatan suka duka saja	6	24,0
2	Kegiatan kematian dan sembahyang di pura Desa	8	32,0
3	Taat pada awig-awig desa adat dan melakukan tugas-tugas adat maupun agama	8	32,0
4	Tidak tahu	3	12,0
	J u m l a h	25	100,0

Untuk memudahkan pengaturan tugas-tugas kedinasan di wilayah banjar Kerta Pura, maka tugas-tugas dibagi atas 4 tempekan yaitu tempekan *kaja kangin* (wilayah timur laut), tempekan *kaja kauh* (wilayah barat laut), tempekan *kelod kangin* (wilayah tenggara) dan *kelod kauh* (wilayah barat daya) yang dipakai sebagai dasar pembagian wilayah adat.

Bale banjar atau bangunan banjar merupakan salah satu ciri

dan persyaratan banjar yang ada di banjar Kerta Pura dengan beberapa perlengkapan antara lain *kulkul gede* (kentongan besar) yang dipakai sebagai alat komunikasi antar warga banjar, dan kulkul besi (nengneng) dipakai sebagai alat komunikasi antar muda/mudi dalam mengadakan rapat atau suatu kegiatan. *Kulkul gede* hanya dipakai pada waktu memanggil warga banjar untuk kegiatan suka maupun duka. Selain itu pula banjar memiliki perlengkapan upacara seperti *padmasana* yaitu bangunan untuk persembahyangan yang *disungsung* oleh seluruh warga yang beragama Hindu, yang setiap 6 bulan sekali melakukan persembahyangan bersama.

Perlengkapan banjar seperti barang-barang pecah belah sudah ada di banjar yang merupakan inventarisasi PKK. Alat-alat tersebut boleh dipinjam oleh warga banjar bila memerlukan, tanpa dikenakan sewa berupa uang, kecuali pecah harus diganti dengan barang yang sama juga. Tetapi untuk warga ini jarang ada yang meminjam inventaris banjar tersebut.

Alat-alat olah raga seperti sepak bola, bola basket, bola volly dan lain-lain sudah dimiliki oleh banjar. Begitu pula halnya dengan alat-alat untuk keperluan adat seperti *mebat* yaitu kegiatan mempersiapkan makanan upacara juga telah tersedia. Sedangkan perlengkapan banjar seperti tv, radio yang merupakan sarana komunikasi dan interaksi terhadap anggota banjar sementara ini belum ada. Dengan demikian, dari 25 responden yang mewakili sampel ini, sesuai dengan pertanyaan yang ada mengatakan bahwa di banjar Kerta Pura saat ini tidak ada tv untuk dipasang di banjar, sehingga kalau tidak ada kegiatan malam hari di banjar praktis semua anggota banjar berada di rumah masing-masing. Komunikasi lewat sarana tv, antara warga tidak berlangsung di banjar.

Jenis perlengkapan lainnya yang telah dimiliki banjar Kerta Pura adalah berupa sarana penerangan (listrik) yang merupakan sarana penting dalam penerangan bale banjar. Di samping sarana tersebut, di banjar juga sudah ada sumur, dapur dan PAM pun sudah masuk ke banjar yang biasanya digunakan untuk kepentingan banjar. Demikian juga halnya dengan sarana pendidikan, di banjar Kerta Pura sudah ada sekolah Taman Kanak-kanak dengan berbagai perlengkapan pendidikan. Dalam hal ini banjar Kerta Pura sudah dapat membantu pemerintah dalam melancarkan pendidik-

an yang secara tidak langsung dapat menunjang pembangunan khususnya di bidang pendidikan.

3. Sistem Keanggotaan Banjar, Desa dan Kelompok Sosial Lain

Di Bali, konsep desa mengandung 2 pengertian, pertama desa sebagai komunitas kecil yang bersifat sosial, tradisional, religius, yang merupakan suatu kesatuan wilayah di mana para warganya secara bersama-sama atas tanggungan bersama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya. Desa dalam pengertian ini disebut desa adat. Kedua, desa sebagai komunitas yang lebih bersifat administratif atau kedinasan yaitu suatu kesatuan wilayah di bawah kecamatan, dan dikepalai oleh seorang kepala desa atau perbekel. Desa dengan pengertian ini disebut desa dinas. Para warga komunitas desa dinas disatukan oleh adanya kesatuan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai kesatuan administrasi.

Baik desa adat maupun desa dinas, umumnya terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang juga terwujud sebagai sub komunitas yaitu banjar adat dan banjar dinas, dengan perbedaan fungsi utamanya yaitu yang pertama, memusatkan fungsinya di bidang adat istiadat dan yang kedua, di bidang kedinasan.

Banjar merupakan organisasi terendah yang berada di bawah desa dengan berbagai kemudahan dalam pengerahan tenaga. Sifat keanggotaan banjar tidak tertutup dan terbatas kepada orang-orang asli yang lahir di dalam lingkungan banjar itu saja. Namun kalau ada orang-orang dari wilayah lain atau yang lahir di banjar lain, yang kebetulan tinggal di sekitar wilayah banjar yang bersangkutan, dan mau menjadi warga banjar, hal ini bisa saja. Pusat dari banjar adalah bale banjar di mana para warganya bisa saling bertemu dan berapat pada hari-hari yang tertentu.

Keanggotaan banjar merupakan suatu keharusan, apabila seseorang telah kawin dan bertempat tinggal di lingkungan banjar yang bersangkutan. Tiap-tiap anggota mempunyai sejumlah hak dan kewajiban atas dasar kesamaan. Keanggotaan banjar dapat dibedakan atas:

- a). Anggota banjar *ngarep* yaitu anggota banjar inti yang terdiri dari sepasang suami istri.

- b). Anggota banjar *romboan* yaitu anggota banjar yang salah satu suami istri meninggal dunia atau anggota banjar masih kecil dan belum kawin.

Istilah anggota banjar seperti ini, tidak ada untuk di banjar Kerta Pura, dan istilah keanggotaan banjar yang dipakai adalah anggota banjar tetap (*suka duka*) dan anggota banjar dinas (administrasi). Sebagai anggota banjar, baik itu anggota banjar dinas maupun anggota banjar suka duka secara langsung juga sebagai anggota desa.

Dengan berpegangan pada masalah keanggotaan banjar, sekitar 10% dari jumlah kepala keluarga di banjar Kerta Pura, yaitu sebanyak 25 orang diambil sebagai sampel dalam rangka status keanggotaan di banjar. Dari 25 orang responden yang terpilih semuanya kebetulan berstatus sebagai anggota banjar tetap (*suka duka*) dan juga sebagai anggota banjar dinas (administrasi). Agar lebih jelasnya data yang disajikan tentang status keanggotaan banjar, dapat dilihat pada tabel V-21

Tabel V-21
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Status Keanggotaan Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Anggota banjar tetap (<i>suka duka</i>)	—	—
2	Anggota banjar dinas (administrasi)	—	—
3	Anggota banjar tetap (<i>suka duka</i>) dan anggota banjar dinas (administrasi)	25	100,0
	J u m l a h	25	100,0

Melihat tabel tersebut yaitu 100% dari responden mengatakan bahwa anggota banjar suka duka secara langsung sudah merupakan anggota banjar dinas. Lain halnya dengan anggota banjar

dinas, mereka tidak bisa secara langsung sebagai anggota banjar suka duka, kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh banjar.

Mengingat semua responden yang diwawancara adalah anggota banjar suka duka dan dinas, mau tidak mau mereka harus menaati aturan-aturan yang berlaku. Seperti halnya terhadap masalah-masalah administrasi yaitu tentang pemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi sebagai anggota banjar yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah atau memperlancar masalah kedinasan.

Terlihat pada anggota banjar yang ada di banjar Kerta Pura yang mana ke 25 responden tersebut telah memiliki surat keterangan dalam keanggotaan banjar yang berupa KTP. Adapun fungsi daripada pemilikan KTP ini adalah untuk mempermudah bila akan bepergian. Tabel V-22 akan menyajikan data tentang keterangan dalam keanggotaan banjar.

Tabel V-22

Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut Keterangan yang Dimiliki Sebagai Keanggotaan Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	KTP	25	100,0
2	Surat keterangan tempat tinggal	—	—
3	Surat keterangan pindah	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Dari penyajian tabel tersebut, terlihat besarnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya memiliki identitas diri dalam kaitannya dengan aturan-aturan yang ada di banjar.

Setiap penduduk yang sudah kawin dan berada pada satu wilayah tertentu, wajib mendaftarkan diri pada pimpinan banjar, kepala RT dan lain-lain yang ada di lingkungan tempat tinggal untuk

ikut sebagai anggota banjar atau anggota RT. Demikian terlihat di banjar Kerta Pura di mana setiap individu yang datang dan bertempat di lingkungan banjar Kerta Pura karena tugas ataupun mempunyai tempat tinggal (rumah) di sekitar banjar, secara langsung mereka harus mendaftarkan diri pada pimpinan banjar. Bila lebih dari 1 bulan mereka tidak menghadap pimpinan banjar, maka pimpinan banjarlah yang datang ke rumah yang bersangkutan untuk memberikan peringatan. Tetapi untuk sementara ini belum ada kasus seperti ini untuk di banjar Kerta Pura.

Dari 25 orang yang diwawancara sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah menjadi salah satu anggota banjar di mana mereka tinggal sekarang ini. Walaupun di tempat asal mereka sebagai anggota banjar, tetapi mereka berusaha mengatur waktu seefisien mungkin bila ada kegiatan-kegiatan di dua banjar tersebut. Tabel V-23 terlampir memperlihatkan data mengenai keanggotaan salah satu banjar sekarang ini.

Tabel V-23
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Keanggotaan Dalam Salah Satu Banjar Saat Ini

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	25	100,0
2	Tidak	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Bertitik tolak dari tabel tersebut, anggota banjar Kerta Pura terpaku pada keanggotaan banjar yang ada di tempat menetap sekarang, tetapi mereka tidak mengabaikan kedudukannya sebagai anggota banjar di tempat asal. Dari 25 orang responden yang diwawancara, sejumlah 19 orang responden mengatakan bahwa mereka tercatat sebagai anggota banjar hanya di tempat menetap sekarang saja, karena di tempat asal sudah ada salah satu keluarga yang turun *mebanjar* kecuali mereka pergi atau meninggal baru digantikan. Kemudian sebanyak 6 orang responden mengatakan bahwa mereka ikut mebanjar di 2 tempat yaitu di tempat menetap

sekarang dan di tempat asal. Untuk lebih jelasnya data tentang pencatatan dalam keanggotaan banjar dapat dilihat pada tabel V-24

Tabel V-24
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Statusnya Dalam Pencatatan Tentang Keanggotaan
B a n j a r

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Di tempat asal	—	—
2	Di tempat menetap sekarang	19	76,0
3	Di kedua tempat tersebut	6	24,0
4	Tidak di mana-mana	—	—
J u m l a h		25	100,0

Melihat tabel tersebut, maka warga banjar Kerta Pura tidak saja aktif dalam kegiatan di tempat menetap sekarang, namun mereka juga memperhatikan kegiatan yang ada di tempat asal. Karena keterikatan adat istiadat di tempat asal boleh dikatakan lebih kuat bila dibandingkan dengan di tempat menetap sekarang.

Sebagai anggota banjar, apakah itu anggota banjar suka duka atau dinas akan dihadapkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan. Dalam kegiatan kedinasan seperti go-tong royong, semua anggota banjar harus hadir untuk melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan kematian, upacara keagamaan dan lain-lain hanya anggota banjar suka duka sajalah yang wajib datang. Di sini terlihat perbedaan antara anggota banjar suka duka dengan anggota banjar dinas dalam melaksanakan tugas-tugas banjar.

Dari 25 orang responden yang mewakili, sebanyak 19 orang responden mengatakan bahwa mereka baru melaksanakan kegiatan-kegiatan di banjar, setelah mereka sah menjadi anggota banjar. Sedangkan 6 orang responden lagi mengatakan bahwa sebelum mereka menjadi anggota banjar, mereka sudah melakukan berbagai kegiatan yang ada di banjar. Agar dapat memberikan kejelasan me-

ngenai data tentang tugas-tugas yang dilakukan setelah dan sebelum menjadi anggota banjar dapat dilihat pada tabel V-25 terlampir.

Tabel V-25
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Tugas-tugas Yang Dilakukan
Setelah Atau Sebelum Menjadi Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Setelah menjadi anggota banjar	19	76,0
2	Sebelum menjadi anggota banjar	6	24,0
3	Tidak terjawab	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Berkaitan dengan masalah di atas, maka sebanyak 6 orang responden atau 25% dari jumlah responden mengatakan bahwa mereka melakukan tugas-tugas banjar sebelum mereka menjadi anggota banjar tetap. Dengan demikian 6 orang responden tersebut yang melakukan tugas-tugas banjar sebelum mereka menjadi anggota banjar tetap menganggap bahwa tugas-tugas tersebut sebagai suatu latihan saja. Sedangkan 18 orang responden mengatakan tidak ikut dalam melaksanakan tugas-tugas banjar sebagai suatu latihan dan seorang responden lagi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Tabel V-26 memaparkan data mengenai tugas-tugas banjar yang dianggap sebagai suatu latihan.

Tabel V-26

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Tugas-tugas Banjar Yang Dianggap Sebagai Latihan**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	6	24,0
2	Tidak	18	72,0
3	Tidak terjawab	1	0
	J u m l a h	25	100,0

Begitu pula dengan masalah yang akan diungkapkan ini, mempunyai kaitan yang erat pula dengan masalah tersebut di atas yaitu tentang bentuk latihan-latihan yang dilaksanakan oleh anggota banjar yang sebelumnya menjadi anggota banjar tetap. Dari 25 orang responden, 6 orang di antaranya mengatakan bahwa bentuk latihan-latihan yang mereka laksanakan berupa kegiatan gotong royong dan penggalian dana untuk pembangunan bale banjar. Sedangkan 19 orang responden mengatakan bahwa mereka tidak ikut aktif dalam latihan-latihan tersebut, mengingat bahwa mereka ikut sebagai anggota banjar setelah berdirinya bale banjar tersebut.

Untuk lebih jelasnya data tentang bentuk latihan-latihan tersebut, dapat dilihat pada tabel V-27.

Tabel V-27

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Bentuk Latihan yang Dilaksanakan**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pekerjaan sehari-hari	—	—
2	Pekerjaan upacara	—	—
3	Gotong royong dan Penggalian dana	6	24,0
4	Tidak ikut	19	76,0
	J u m l a h	25	100,0

Dengan memperhatikan tabel tersebut yaitu 19 orang responden atau 76,0 % dari jumlah responden di banjar Kerta Pura itu merupakan warga atau penduduk baru, setelah 16 tahun banjar Kerta Pura berdiri dan dengan sendirinya mereka tidak ikut aktif dalam suatu latihan-latihan yang dilakukan.

Dalam suatu banjar terdapat berbagai kelompok-kelompok sosial, seperti halnya kelompok belajar, kelompok arisan, kelompok muda/mudi, kelompok tani dan lain-lain yang keanggotaannya hanya berada di lingkungan banjar saja. Tetapi ada juga kelompok sosial yang lebih luas ruang lingkupnya yaitu tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan lain-lain. Dalam hal ini kelompok sosial yang akan dibicarakan hanya terbatas di lingkungan banjar khususnya di banjar Kerta Pura.

Jenis kelompok sosial yang ada di banjar Kerta Pura adalah arisan, PKK, muda/mudi, olah raga dan lain-lain.

Untuk kelompok arisan, anggotanya terdiri dari ibu-ibu yang suaminya tinggal di lingkungan banjar dan mereka langsung sebagai anggota PKK. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota arisan atau ibu-ibu PKK hanya terkait pada masalah kewanita-an yang meliputi praktek masak-memasak bila ada perlombaan, menyulam, senam kesegaran jasmani, penimbangan bayi dan lain-lain.

Keanggotaan dalam kelompok muda/mudi terdiri dari mereka-mereka yang orang tuanya berada di lingkungan wilayah banjar Kerta Pura yang berumur 17 tahun ke atas sampai batas perkawinan. Kegiatan yang pernah dilakukan oleh muda/mudi adalah dalam kegiatan banjar seperti amal, kerja bakti, menengok anggota muda/mudi yang kawin dan lain-lain. Sedangkan kegiatan lain adalah dalam bidang olah raga.

Kelompok atau klub olah ragapun telah ada di banjar Kerta Pura dengan nama PORTAPURA. Dari sekian banyak cabang olah raga yang ada, yang paling menonjol adalah cabang olah raga basket. Keanggotaan klub ini hanya terbuka untuk anggota banjar saja khususnya bagi anggota pemuda saja yang berpotensi di bidang olah raga. Sedangkan untuk pemudinya tidak begitu aktif dalam kegiatan ini.

Dengan demikian banjar Kerta Pura telah bisa mengembangkan kelompok-kelompok sosial lain dalam rangka mewujudkan

persatuan dan kesatuan antar anggota banjar.

4. Sistem Pengerahan Tenaga dan Pengendalian Sosial

Pandangan hidup penduduk Bali dengan penduduk pendatang pada hakikatnya mempunyai perbedaan satu sama lain, karena masih kuatnya terasa pengaruh faktor kebudayaan masing-masing dan faktor agama yang mereka anut. Dengan makin berkembangnya orientasi kehidupan sebagai suatu masyarakat yaitu warga dari masyarakat Bali, yang mendukung kebudayaan Bali khususnya dan kebudayaan nasional umumnya, maka tampaklah jarak sosial antara mereka makin dekat satu sama lain. Di antara mereka makin berkembang kesadaran bahwa pada hakikatnya adalah warga dari satu masyarakat negara dengan hak dan kewajiban yang pada dasarnya sama-sama sebagai warga negara yang menghadapi sistem sosial budaya. Kesadaran seperti itu agaknya mempengaruhi pola pandangan dan sikap mereka untuk hidup bersama atas dasar kesatuan. Hal ini merupakan suatu faktor yang mendorong proses pembauran antara anggota.

Dengan memperhatikan pola-pola kehidupan masyarakat tersebut, partisipasi warga pendatang dalam berbagai kegiatan sosial tampaknya cukup baik, dalam arti bahwa tampak adanya inisiatif untuk berpartisipasi yang mana partisipasi tersebut ditanggapi secara positif oleh penduduk setempat. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial baik yang tradisional seperti perkawinan, kematian dan berbagai kegiatan individual serta kolektif lainnya maupun yang bersifat lebih modern seperti olah raga, arisan, kegiatan PKK dan lain-lain. Dari hasil pengamatan pada beberapa desa ataupun banjar, sejumlah pendatang baik yang beragama Islam, Kristen maupun kelompok etnis Cina, mau ikut sebagai anggota banjar dengan sejumlah hak dan kewajiban tertentu yang sama dengan anggota banjar setempat.

Banjar sebagai sub komunitas desa adat (*banjar adat*) dan banjar sebagai sub komunitas desa dinas (*banjar dinas*) peranannya dalam komunitas sangat besar. Banjar merupakan wadah pelaksanaan dari bermacam-macam kegiatan komunitas, baik yang ber aspek ekonomi, kemasyarakatan, agama dan pemerintahan. Pranata gotong-royong pada hakikatnya terwujud dan terbina dalam organisasi banjar. Di samping itu banjar juga sangat berperan dalam me-

nunjang berbagai kegiatan pemerintah seperti keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, pemuda dan lain-lain.

Dalam sistem pengerahan tenaga, banjar merupakan wadah dalam rangka menggerakkan anggota banjar untuk suatu kegiatan. Pengerahan tenaga pada mulanya dilakukan oleh pimpinan banjar (*kelian*) terhadap beberapa petugas banjar yang bertugas memberikan informasi kepada warga tentang suatu kegiatan. Pengerahan tenaga seperti tersebut di atas, juga terdapat di banjar yang berlokasi di kota yang merupakan banjar pengembangan yaitu di banjar Kerta Pura. Cara pengerahan tenaga untuk banjar ini, dilakukan oleh *kelian* kepada 4 orang *kesinoman* (juru arah), kemudian *kesinoman* menyampaikan langsung kepada anggota.

Jenis pengerahan tenaga di banjar Kerta Pura dapat dibedakan atas pengerahan tenaga dengan melibatkan seluruh anggota banjar dan pengerahan tenaga yang melibatkan beberapa orang saja. Cara pengerahan tenaga yang melibatkan seluruh anggota banjar adalah dengan membunyikan kentongan besar (*kulkul gede*) pada saat kegiatan akan dilakukan seperti dalam kegiatan kerja bakti, kematian, upacara dan lain-lain, yang masing-masing dari kegiatan tersebut mempunyai bunyi kentongan yang berbeda. Sedangkan cara pengerahan tenaga yang melibatkan beberapa orang anggota saja adalah melalui surat edaran yang dibuat oleh *kelian*, yang kemudian disampaikan kepada masing-masing *kesinoman* dengan nama sudah tercantum dalam surat edaran tersebut. Pengerahan tenaga seperti ini biasanya dipakai untuk mewakili banjar dalam suatu kegiatan seperti penataran, pembentukan kader, simulasi dan lain-lain. Anggota banjar yang dipilih dalam hal ini adalah anggota-anggota yang berpotensi.

Sebagai anggota banjar, mereka mempunyai sejumlah hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Adapun kewajiban-kewajiban yang dilakukan sebagai anggota banjar mentaati aturan-aturan banjar, menjalankan tugas-tugas sosial dan lain-lain. Sedangkan hak sebagai anggota banjar adalah minta perlindungan dari banjar, memperoleh pelayanan baik pelayanan sosial, administrasi maupun yang lainnya.

Demikian terlihat di banjar Kerta Pura, dari 25 orang responden yang diangkat, sebanyak 21 orang responden mengatakan bahwa jenis pelayanan yang didapatkan selama menjadi anggota ban-

jar berupa pelayanan administrasi. Sedangkan sebanyak 4 orang responden mengatakan bahwa jenis pelayanan yang mereka dapatkan adalah perasaan aman bila suda menjadi anggota banjar dan merasa akan adanya perlindungan. Untuk lebih jelasnya data tentang jenis pelayanan yang diterima sebagai anggota banjar, dapat dilihat pada tabel V-28 terlampir.

Tabel V-28
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Jenis Pelayanan Yang Diterima

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pelayanan administrasi	21	84,0
2	Pelayanan akan tenaga	—	—
3	Pelayanansosial lain	—	—
4	Rasa aman dan merasa adanya perlindungan	4	16,0
	J u m l a h	25	100,0

Melihat tabel tersebut, sebanyak 21 orang responden atau 84% lebih berorientasi pada masalah administrasi. Di samping itu pula karena penduduk di banjar Kerta Pura bersifat heterogen, yang mempunyai sistem perekonomian pasar, dengan sendirinya masalah administrasi merupakan hal yang penting dalam menunjang usahanya.

Dalam kehidupan komunitas banjar di Bali, peranan hubungan tetangga sangat besar. Berbagai kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan diaktifkan melalui hubungan di antara tetangga. Masih terlihat bahwa dalam kegiatan antar tetangga seperti kegiatan gotong-royong tolong menolong merupakan prinsip yang mendasari hubungan antara tetangga. Hal ini tampak dalam berbagai bentuk kegiatan gotong royong tolong menolong seperti *nguopin*, *ngajakang* dan lain-lain. Dalam hubungan ini antara tetangga, dalam rangka kegiatan tolong menolong, sistem pelapisan sosial (*kasta*) kurang berpengaruh, walaupun dalam hal sopan santun hubung-

an antara lapisan tetap terlihat.

Kegiatan tolong menolong ini juga terdapat di banjar Kerta Pura. Dalam kesulitan melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah tangga, para tetangga di lingkungan banjar mau ikut membantu kesulitan yang dihadapi oleh tetangga. Dari 25 orang responden yang diwawancara, semuanya mengatakan bahwa mereka menerima bantuan dari para tetangga yang ada di lingkungan banjar, bila mereka menemukan kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang ada di rumah tangga. Di sini terlihat adanya hubungan yang cukup baik di antara tetangga dalam kaitannya dengan sistem gotong royong tolong menolong.

Masalah ini mempunyai kaitan yang erat dengan masalah tersebut di atas yaitu tentang bantuan yang didapat dalam kesulitan melaksanakan kewajibannya di rumah tangga. Sejumlah 14 orang dari 25 orang responden yang diwawancara mengatakan bahwa bantuan mereka dapatkan itu sejak mereka menjadi anggota banjar dan 9 orang responden mengatakan bahwa jauh sebelum menjadi anggota banjar, mereka sudah mendapatkan bantuan dari para tetangga di lingkungan banjar. Sedangkan 2 orang responden lagi mengatakan bahwa bantuan meningkat setelah menjadi anggota banjar, bila menemukan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Tabel V-29 terlampir menyajikan data mengenai bantuan yang didapat, apakah sejak menjadi anggota banjar atau jauh sebelumnya.

Tabel V-29
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan
Menurut Bantuan Yang Didapat

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sejak menjadi anggota banjar	14	56,0
2	Jauh sebelum menjadi anggota banjar	9	36,0
3	Meningkat setelah menjadi anggota banjar	2	8,0
4	Tidak tahu	--	--
5	Tidak terjawab	--	--
	J u m l a h	25	100,0

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran mereka sebagai anggota banjar dalam kegiatan tolong menolong di antara warga banjar lebih terlihat pada waktu turun *mebanjar*. Ini berarti kurangnya perhatian anggota banjar baru terhadap kegiatan-kegiatan, yang ada sebelumnya.

Demikian juga halnya dengan masalah yang akan diungkapkan ini yaitu mengenai perlakuan yang didapat sebagai anggota banjar, yang mempunyai kaitan erat pula dengan masalah tersebut di atas. Dari sekian jawaban yang ada sebanyak 5 orang responden mengatakan bahwa semua orang yang ada di lingkungan banjar mendapat perlakuan atau bantuan yang sama. Sedangkan 2 orang responden mengatakan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapat perlakuan atau bantuan serta 7 orang responden lagi mengatakan bahwa mereka memang tidak tahu tentang masalah tersebut. Agar lebih jelasnya data tentang perlakuan atau bantuan dapat disajikan tabel V-30.

Tabel V-30

Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut Perlakuan Atau Bantuan yang Didapat

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Semua mendapat yang sama	5	20,0
2	Hanya anggota banjar saja	11	44,0
3	Orang-orang tertentu saja	2	8,0
4	Tidak tahu	7	28,0
J u m l a h		25	100,0

Dengan memperhatikan tabel V-30, sebanyak 11 orang atau 44% dari jumlah responden beranggapan bahwa mereka lebih mementingkan urusan ke dalam, dalam artian memfokuskan perhatian di antara warga banjar saja, dalam menemui kesulitan rumah tangga bila dibandingkan dengan warga lain, dan tidak terlalu pilih kasih terhadap orang-orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi atau orang-orang tertentu saja.

Dalam kehidupan di masyarakat, kita dihadapkan dengan

berbagai masalah yang perlu dipecahkan baik itu masalah pribadi maupun masalah keluarga. Cara pemecahannya dilakukan secara bertahap yaitu pada tingkat keluarga dulu, kemudian bila masalah tersebut tidak bisa dipecahkan baru meningkat kepada tetangga dan selanjutnya sampailah kepada banjar. Seperti halnya di banjar Kerta Pura, bila ada orang lain di lingkungan banjar yang minta bantuan untuk memecahkan suatu masalah, wajarlah mereka untuk dibantu.

Demikian pendapat dari 25 orang responden, semuanya mengatakan bahwa mereka memberikan bantuan kepada orang lain di lingkungan banjar, asal saja mereka minta bantuan. Dengan demikian terlihatlah sifat kegotong royongan mereka terhadap orang-orang yang ada di lingkungan banjar.

Sebagai anggota banjar akan dihadapkan dengan berbagai kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang dilakukan sesama anggota banjar lebih mengarah kepada kegiatan sosial, yaitu tolong menolong.

Sebanyak 25 orang responden yang diwawancara, semuanya mengatakan bahwa mereka tidak pernah tidak memberikan bantuan kepada orang-orang sesama anggota banjar. Walaupun ada yang tidak bisa hadir dalam memberikan bantuan tersebut, mereka berusaha mencari pengganti (wakil) untuk menggantikan kedudukannya sementara waktu saja. Dalam hal ini tanggung jawab terhadap banjar boleh dikatakan cukup.

Apabila ada anggota banjar yang tidak hadir dalam kegiatan di banjar, sedangkan mereka tidak memberikan penggantinya untuk mengisi kegiatan tersebut, mereka tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman. Tetapi perasaan tidak enak yang menghantui bila tidak sempat hadir dalam kegiatan banjar ataupun dalam memberikan bantuan terhadap sesama anggota banjar.

Sejumlah 25 orang responden yang diwawancara mengatakan bahwa mereka tidak dikenakan sanksi atau hukuman bila mereka tidak sempat memberikan bantuan kepada sesama anggota banjar. Namun di benak hatinya tersimpan perasaan khawatir, bila punya kegiatan nanti. Di sini sanksi moralnya yang menghantui perasaan daripada anggota.

Kemudian masalah yang akan diungkap inipun mempunyai kaitan yang erat dengan masalah di atas yaitu tentang sanksi atau

hukuman yang diberikan kepada warga banjar. Daro 25 orang responden tersebut, semuanya tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam kaitannya dengan sanksi atau hukuman yang dilimpahkan pada anggota banjar yang tidak memberikan bantuan kepada anggota banjar, karena anggota banjar tidak merasa akan adanya sanksi atau hukuman yang nyata ataupun tertulis.

Sistem pengendalian sosial lahir dari suatu masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau kebiasaan tertentu yang dalam perjalannya memerlukan suatu cara atau alat untuk mengatasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam suatu komplek tata kelakuan dari warganya yang berupa cita-cita, norma-norma, pendirian, kepercayaan, sikap aturan-aturan, hukum dan sebagainya, maka dalam kehidupan dalam masyarakat itu sendiri sangat besar kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Penyimpangan-penyimpangan terhadap kebiasaan dari masyarakat mungkin terjadi karena sikap individu sebagai anggota masyarakat hanya ingat pada kebutuhan diri sendiri dan mengabaikan adat istiadat atau aturan-aturan yang tidak cocok dengan kebutuhan pribadinya. Karena kebutuhan pribadi lebih menonjol dari pada kebutuhan golongan atau kelompok, maka cara mengatasi penyimpangan-penyimpangan tersebut perlu adanya pengendalian sosial.

Masyarakat sebagai suatu sistem memerlukan adanya tingkat keseimbangan tertentu, yaitu keseimbangan sosial, sehingga masyarakat tersebut dapat bereksistensi dan berfungsi. Terhadap tuntutan itulah setiap masyarakat mengenal adanya berbagai jenis pengendalian sosial, baik dengan mempertebal keyakinan para warga masyarakat, dengan memberikan imbalan, dengan mengembangkan rasa malu, maupun dengan mengembangkan rasa takut.

Salah satu cara untuk pengendalian atas ketegangan-ketegangan sosial adalah dengan mempertebal keyakinan antara warga masyarakat akan kebaikan dari adat istiadat yang berlaku dan ada di suatu masyarakat atau komunitas. Demikian terlihat pada banjar Kerta Pura yang mana warga masyarakat tersebut mempunyai keyakinan bahwa menjadi anggota banjar akan merasa lebih aman bila dibandingkan dengan tidak ikut sebagai anggota banjar.

Menjadi anggota banjar berarti sudah ikut mentaati aturan-

aturan dalam suatu komunitas kecil, apabila seseorang sudah kawin. Tujuan menjadi anggota banjar pada dasarnya adalah untuk mendapatkan perlindungan dari banjar apabila menemui suatu kesulitan serta bisa saling bantu sesama anggota banjar dalam hal kematian, perkawinan dan kegiatan lain yang bersifat suka maupun duka.

Sebanyak 23 orang dari 25 yang diwawancara di banjar Kerta Pura beranggapan bahwa menjadi anggota banjar boleh dikatakan lebih aman daripada tidak sebagai anggota banjar. Sedangkan 2 orang responden menanggapi keanggotaan banjar sebagai suatu hal yang biasa saja.

Untuk lebih jelasnya data tentang tanggapan responden terhadap keanggotaan banjar dapat dilihat pada tabel V-31 terlampir.

Tabel V-31
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Tanggapan Terhadap Keanggotaan Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Lebih aman	23	92,0
2	Biasa saja	2	8,0
3	Tidak merasa aman	—	—
	J u m l a h	25	100,0

Berpegang pada masalah di atas yaitu tentang tanggapan responden terhadap keanggotaan banjar, maka masalah yang akan diungkapkan ini, lebih mengarah pada perasaan aman yang ditimbulkan ketika menjadi anggota banjar.

Sebanyak 9 orang dari 25 responden mengatakan bahwa perasaan aman itu timbul, karena merasa sudah terdaftar sebagai penduduk, dan seorang responden mengatakan bahwa dengan menjadi anggota banjar, mereka merasa akan mendapat perhatian dari banjar. Sedangkan 15 orang responden mengatakan bahwa perasaan aman itu timbul, karena mereka merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai warga.

Agar dapat memberikan kejelasan data tentang rasa aman

yang ditimbulkan ketika menjadi anggota banjar, dapat dilihat pada tabel V-32.

Tabel V-32

Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut Rasa Aman yang Ditimbulkan Sebagai Anggota Banjar

No.	Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
1	Merasa sudah terdfatar sebagai penduduk	9	36,0
2	Merasa akan mendapat perhatian	1	4,0
3	Merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai warga	15	60,0
	J u m l a h	25	100,0

Dari tabel tersebut bahwa tingginya tingkat kesadaran dari penduduk untuk mendaftarkan diri sebagai anggota banjar dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai warga.

Bagi penduduk yang telah kawin dan bertempat tinggal dalam lingkungan banjar, wajiblah mereka mendaftarkan diri untuk ikut sebagai anggota banjar. Apabila ada individu yang seharusnya sudah ikut menjadi anggota banjar, namun mereka tidak turun sebagai anggota banjar. maka hal ini dipandang tidak baik dalam suatu masyarakat.

Sebanyak 25 orang responden yang diwawancara, 13 orang responden berpandangan tidak baik apabila ada warga di lingkungan banjar yang seharusnya sudah menjadi anggota banjar, namun tidak ikut sebagai anggota banjar. Sejumlah 6 orang responden beranggapan bahwa dipandang tidak tahu aturan bagi mereka yang ikut *mebanjar* dan seharusnya sudah wajar menjadi anggota banjar. Kemudian seorang responden mengatakan suatu hal yang biasa saja dan dianggap umum apabila seseorang yang tidak ikut sebagai anggota banjar, walaupun sebenarnya sudah pantas menjadi anggota banjar. Sedangkan sebanyak 3 orang responden mengatakan tidak

apa-apa atau tidak usaha dihiraukan bagi mereka yang tidak tahu aturan tersebut. Dua orang responden lagi mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang keanggotaan banjar, karena mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda, sehingga masalah keanggotaan tersebut tidak begitu diketahui. Tabel V-33 akan menyajikan data tentang seseorang yang tidak menjadi anggota banjar dan seharusnya sudah menjadi anggota banjar.

Tabel V-33
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Pandangannya Jika seorang Tidak Menjadi
Anggota Banjar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Dipandang tidak baik	13	52,0
2	Dipandang tidak tahu aturan	6	24,0
3	Biasa saja dan dianggap umum	1	4,0
4	Tidak apa-apa atau tidak usah dihiraukan	3	12,0
5	Tidak tahu	2	8,0
	J u m l a h	25	100,0

Bertitik tolak dari tabel tersebut, maka terlihatlah ketimpangan-ketimpangan sosial bagi para warga apabila tidak mentaati adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam suatu komunitas banjar. Ketimpangan ini biasa diatasi dengan suatu pengendalian sosial yang berupa pendidikan, mempertebal keyakinan dan mengembangkan rasa malu.

5. Sistem Upacara di Banjar dan di Desa

Sistem kepercayaan dan sistem upacara keagamaan memberikan kepada para warga komunitas suatu pengertian bahwa dalam sistem tersebut telah tersimpul suatu pengertian yang lebih luas tentang hidup, pola tingkah laku, pola hubungan yang seharusnya diciptakan oleh manusia dalam kehidupannya. Karena itulah pe-

ngertian yang lebih mendalam tentang sistem kepercayaan dan agama tersebut, juga merupakan salah satu jalan untuk memper-tebal keyakinan para warga tentang adat istiadat yang berhubung-an dengan kedua sistem tersebut.

Ajaran kepercayaan etnis Bali lebih banyak terwujud pada ajaran yang ada hubungannya dengan agama Hindu. Karena itu istem kepercayaan yang lebih banyak berusaha mendekatkan manusia pada agama dengan segala manifestasinya. Demikian mi-salnya ajaran kepercayaan tentang Tuhan, yang mana Tuhan itu adalah satu dan benar-benar ada, apapun sebutan namanya tapi lebih banyak disebut Brahma.

Kepercayaan terhadap Tuhan menurut ajaran agama Hindu tidak saja dilakukan dengan memanjatkan doa, tetapi juga mela-lui kegiatan-kegiatan lain terutama kegiatan berupa upacara/upakara keagamaan yang melibatkan individu-individu dalam masyarakat. Upacara/upakara tersebut biasanya berupa material yang terwujud dalam bentuk *bebantenan/sesajen*.

Organisasi banjar yang berkaitan dengan sistem kepercayaan dan agama dalam suatu komunitas adalah banjar adat. Seperti telah disinggung di atas, sesuai dengan fungsinya banjar adat mempunyai titik berat fungsinya adalah dalam bidang agama dan adat istiadat. Banjar adat dalam kaitannya dengan bidang relegi, berperan sangat besar yaitu ikut mengkonsepsikan dan melaksana-kan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan.

Di banjar Kerta Pura sistem upacara yang dilakukan dikoordi-nir oleh banjar. Seperti halnya dalam melaksanakan upacara *pioda-lan* di banjar, semua anggota banjar yang beragama Hindu ikut ak-if dalam melaksanakan persiapan untuk upacara tersebut. Dari membeli kebutuhan untuk upacara sampai membuat *bebantenan*, juga dilakukan atas dasar kerja sama. Bahkan dari suku bangsa lain seperti Cina pun mau ikut membantu dalam kegiatan tersebut. *Piodalan* untuk di banjar Kerta Pura jatuh pada *purnama kasa*.

Tepat pada waktu *piodalan* di banjar, pimpinan banjar me-nyuruh salah satu anggota banjar yang kebetulan ada di banjar, untuk membunyikan *kulkul gede* (kentongan besar) pertanda upa-cara akan segera dimulai. Beberapa menit setelah kentongan ber-bunyi, warga banjar datang memakai pakaian adat Bali dengan membawa *banten sodan* yang kemudian dihaturkan oleh para

wanitanya. Pelaksanaan upacara *piodalan* tersebut dilangsungkan oleh *pedanda* (pendeta) maupun *pemangku*, yang kemudian diikuti oleh warga banjar dalam melakukan persembahyangan (*muspa*). Setelah upacara *piodalan* tersebut selesai, warga banjar disarankan untuk menikmati banten yang tidak dihaturkan (*paridannya*) secara bersama-sama di banjar dan para wanitanya sambil membersihkan perabot-perabot yang dipakai dalam upacara, serta mengumpulkan *paridan* yang nantinya dibagi-bagikan pada anggota banjar yang mau membawanya. Sedangkan untuk para prianya bertugas membersihkan halaman di lingkungan tempat persembahyangan dilakukan.

Akhir-akhir ini, dalam upacara *piodalan* di pura banjar, kadang-kadang saja anggota banjar khususnya para wanita membuat *bebantenan* untuk upacara *piodalan* di banjar. Karena kesibukan warga banjar dalam mencari nafkah, maka kegiatan membuat *banten* di banjar yang biasanya melibatkan ibu-ibu di lingkungan banjar Kerta Pura tidak aktif lagi. Keperluan *bebantenan* untuk upacara *piodalan* di banjar, dibeli pada salah satu *geria* (rumah pendeta) di banjar Panti. Dengan demikian tampak jarak sosial antara anggota banjar agak renggang, karena masalah membeli banten tersebut. Mungkin warga banjar lebih mementingkan penghidupan daripada interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Kegiatan upacara lain yang ada di banjar di kota adalah dalam upacara *taur agung kesanga*. Dalam kegiatan ini tiap-tiap anggota banjar membuat *banten prani* (sesajian yang terdiri dari nasi dan buah-buahan), yang hampir menyerupai banten *sodan* (sesajian dari nasi, buah dan kue) namun nasi yang diisi dalam banten tersebut hanya satu. Demikian halnya di banjar Kerta Pura juga sama dengan mempunyai kegiatan-kegiatan dengan banjar-banjar yang ada di kota.

Upacara *taur agung kesange* adalah upacara pelepasan tahun baru, yang dilakukan sehari sebelum hari raya Nyepi dan menurut istilah Balinya disebut *Pangerupukan*. Dalam upacara ini, ibu-ibu anggota banjar pergi ke banjar dengan membawa *baten prani* bersama anggota keluarga sekitar pukul 16.30. Setelah selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan membawa tirta dan sate dari banjar yang kemudian dipakai untuk pecaruan di

sangah *cucuk* yang ada di tiap-tiap rumah penduduk.

Masyarakat Bali yang menganut agama Hindu sangat merasakan fungsi dari agama tersebut dalam kehidupannya. Hal ini terutama terlihat dari sub sistem agama Hindu itu sendiri yaitu sub sistem upacara, yang bagi penganutnya sendiri kadang-kadang diartikan sebagai hal yang sangat mutlak. Bahkan tidak jarang ada pengertian agama itu sendiri adalah upacaranya. Kalau tidak melakukan upacara, maka kadang-kadang juga diartikan sebagai tidak beragama atau tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama.

Upacara keagamaan tidak hanya dilakukan di tingkat banjar, tetapi juga dilakukan di tingkat desa. Sebagai warga banjar adat otomatis sebagai warga desa adat dengan berbagai hak dan kewajibannya. Orientasi sebagai banjar adat maupun desa adat lebih terfokus pada masalah adat istiadat dan keagamaan.

Bagi anggota banjar yang ada di banjar Kerta Pura, bila ada upacara *piodalan* di pura Desa, boleh dikatakan hanya sebagian dari anggota banjar saja yang datang ke pura tersebut, untuk melakukan persembahyangan. Persembahyangan di pura Desa selain dilakukan dalam rangka *piodalan*, juga dilakukan pada hari-hari raya maupun pada waktu *melasti*.

Dari 25 orang responden yang diwawancara, sebanyak 21 orang responden mengatakan bahwa tidak semua anggota banjar ikut dalam persembahyangan di pura Desa. Sedangkan 4 orang responden lagi mengatakan tidak tahu tentang keikutsertaan anggota banjar pada persembahyangan di pura Desa, karena mereka agak jarang memperlihatkan masalah tersebut, dan juga karena mereka kadang-kadang saja pergi sembahyang ke pura Desa. Hal ini terjadi karena kesibukan-kesibukan yang ada di tempat asalnya. Tabel V-34 terlampir menyajikan data mengenai keikutsertaan anggota banjar dalam persembahyangan di pura Desa.

Tabel V-34

**Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Keikutsertaan Dalam Persembahyangan di Pura Desa**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Semua ikut serta	—	—
2	Tidak semua ikut	21	84,0
3	Ikut karena Persyaratan Tertentu	—	—
4	Tidak tahu	4	16,0
	J u m l a h	25	100,0

Melihat tabel tersebut, maka sebanyak 21 orang atau 84 % mengatakan tidak semua ikut dalam persembahyangan di pura Desa. Hal ini disebabkan karena kesibukan-kesibukan yang berbeda, sehingga kurangnya perhatian warga banjar terhadap upacara di pura Desa. Di samping itu karena masyarakat di banjar Kerta Pura khususnya yang beragama Hindu hampir semua pendatang, sehingga mereka lebih mementingkan kegiatan upacara yang ada di tempat asal bila dibandingkan dengan di tempat menetap sekarang.

Dalam persembahyangan di pura Desa, anggota banjar yang akan pergi ke pura Desa, lebih sering perginya bersama anggota keluarga dengan membawa *banten sodan* dan canang untuk melakukan persembahyangan. Dengan bepergian bersama keluarga mereka merasa lebih bebas daripada pergi berkelompok, kemudian jalan bersama-sama ke pura dengan jarak kurang lebih 0,5 km, yang letaknya di pusat pertokoan kota Denpasar.

Sebanyak 25 orang responden diwawancara mengatakan bahwa mereka lebih sering pergi sendiri-sendiri dalam melakukan persembahyangan di pura Desa. Sebanyak 6 orang responden mengatakan bahwa ada anggota banjar yang pergi bersama-sama dan ada juga yang sendiri-sendiri dalam melakukan persembahyangan di pura Desa. Sedangkan 3 orang responden mengatakan tidak tahu tentang cara bepergian anggota banjar bila ada upacara di pura Desa, dan seorang responden lagi tidak memberikan jawaban

atas pertanyaan yang diajukan tentang bepergian sembahyang ke pura Desa, karena mereka jarang sekali pergi sembahyang ke pura Desa. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel V-35, tentang cara bepergian dalam upacara persembahyangan.

Tabel V-35
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Cara Bepergian Ke Pura Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pergi sendiri-sendiri	15	60,0
2	Pergi bersama dikoordinir oleh banjar	—	—
3	Ada yang bersama-sama, ada yang sendiri	6	24,0
4	Tidak tahu	3	12,0
5	Tidak terjawab	1	4,0
	J u m l a h	25	100,0

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kurangnya keinginan dari anggota banjar untuk pergi bersama-sama dalam upacara persembahyangan di pura Desa. Dengan demikian terlihat sifat kemandirian dari para anggota banjar dalam melakukan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan upacara di pura Desa ditangani oleh seluruh warga desa adat, tetapi yang bertanggung jawab terhadap sistem upacara tersebut adalah kelompok *penyungsung* khusus dari *kasta ksatria* yang tinggal di banjar Wangaya. Persiapan upacara *bebantenan* sampai alat-alat untuk ekpentingan upacara ditangani langsung oleh *penyungsung* (warga yang mengelola/bertanggung jawab pada pura) tersebut, dengan dibantu oleh pengikut-pengikutnya dari kasta yang lebih rendah (*sudra*).

Sebanyak 4 orang dari 25 orang responden yang diwawancara mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara di pura Desa adalah sebuah panitia khusus dan 18 orang responden mengatakan bahwa kelompok *penyungsung* khususlah

yang lebih berperan dalam pelaksanaan upacara tersebut. Sedangkan 3 orang responden lagi mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang siapa-siapa yang sebenarnya dapat memberikan kejelasan data tentang pengelolaan pada pelaksanaan upacara di pura Desa, dapat dilihat pada tabel V-36 terlampir.

Tabel V-36
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Pengelolaan Pada Pelaksanaan
Upacara di Pura Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sebuah panitia khusus	4	16,0
2	Kelompok penyungsong khusus	18	72,0
3	Semua warga banjar	—	—
4	Tidak tahu	3	12,0
	J u m l a h	25	100,0

Berdasarkan dari tabel tersebut, anggota banjar di Kerta Pura tidak begitu mengetahui secara pasti siapa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upacara tersebut, sehingga terdapat jawaban yang agak berbeda. Semestinya menjadi anggota banjar, sedikit tidaknya harus tahu tentang adat istiadat maupun sistem upacara keagamaan.

6. Sistem Pengorganisasian Kegiatan-kegiatan di Banjar dan di Desa

Jenis lembaga-lembaga sosial dalam komunitas kecil ada bermacam-macam, yang di antara lembaga sosial tersebut adalah desa dan banjar. Kegiatan dari lembaga ini tidak hanya terbatas pada satu lapangan kehidupan tertentu saja. Walaupun demikian, masing-masing lembaga sosial mempunyai titik berat dalam lapangan kehidupan yang paling relevan dengan lembaga sosial yang ada.

Pada suatu komunitas kecil di mana kerja sama merupakan unsur daripada sistem nilai sosialnya, sistem interaksi adalah

kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama-sama. Pertemuan individu-individu secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila individu atau kelompok-kelompok manusia saling bekerja sama, saling berbicara dan seterusnya sampai mencapai suatu tujuan bersama. Hal semacam ini merupakan dasar dari proses sosial, pengertian mana menunjukkan pada hubungan sosial yang dinamis.

Pengorganisasian kegiatan dalam suatu komunitas kecil, biasanya ditangani oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain bisa bertindak laku sebagaimana dikehendaki pimpinan. Kadangkala kepemimpinan dibedakan atas kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Di beberapa desa atau banjar sebagai motivator dalam melaksanakan berbagai kegiatan adalah pimpinan yang mempunyai wewenang dan tugas-tugas yang mesti dilaksanakan. Tugas utama sebagai pengorganisasian kegiatan adalah memimpin segenap warga komunitas atau kelompok berbentuk desa atau banjar, yang meliputi tugas-tugas administrasi, penyelesaian perselisihan, membina kelompok yang ada di desa atau banjar, mengembangkan ide-ide untuk pembangunan dan juga menyampaikan pesan-pesan pembangunan dari pemerintah.

Dalam suatu komunitas kecil seperti banjar, sistem pengorganisasian kegiatan terlihat dalam kegiatan gotong royong, yang mana kegiatan tersebut wajib dilakukan oleh setiap warga banjar sebulan sekali. Kegiatan tersebut merupakan instruksi pemerintah yang kemudian sampai pada organisasi terendah yaitu banjar. Sistem pengorganisasian kegiatan ini dipimpin oleh kelian banjar yang juga diawasi oleh kepala desa.

Kadaan yang sama terdapat di banjar Kerta Pura. Sebagai anggota banjar terasa adanya suatu pungutan yang pada hakekat-

nya untuk kepentingan desa. Sebanyak 25 responden yang diwawancara dalam rangka pengumpulan data mengenai sistem pengorganissian kegiatan di banjar Kerta Pura, semuanya mengatakan bahwa selama menjadi anggota banjar terasa adanya suatu pungutan-pungutan untuk kepentingan desa. Jenis pungutan-pungutan tersebut tidak berupa uang, ataupun berupa bahan-bahan bangunan yang kiranya dapat memberatkan anggota banjar, tetapi hanya berupa tenaga untuk bekerja saja.

Begitu pula halnya dengan 25 orang responden yang diwawancara. Dalam kegiatannya dengan masalah di atas, maka di sini ditekankan pada bentuk pungutan tersebut. Semua responden yang mewakili tersebut mengatakan bahwa bentuk pungutan untuk kepentingan desa hanya berupa tenaga untuk kerja. Karena desa Pemecutan, yang secara struktural merupakan atasan dari banjar Kerta Pura memiliki *income* (pendapatan) yang cukup untuk kegiatan pembangunan phisik maupun yang lainnya, untuk itu pungutan-pungutan dari banjar untuk kepentingan yang berupa uang maupun berupa bahan tidak ada.

Sistem pengorganisasian kegiatan seperti gotong royong di tingkat banjar dikerahkan oleh pimpinan banjar, dengan jalan memukul kentongan besar sebagai pertanda kegiatan gotong royong akan segera dimulai. Gotong royong yang dilakukan tersebut adalah melakukan pembersihan di depan rumah penduduk, selokan, banjar dan lain-lain. Apabila ada pungutan tenaga untuk kepentingan desa, semua warga banjar secara bersama-sama pergi ke desa dengan berjalan kaki. Pembersihan yang dilakukan untuk di tingkat desa adalah membersihkan lingkungan kantor desa, selokan-selokan, kuburan dan pura-pura yang ada di lingkungan desa, yang khusus dilakukan oleh laki-lakinya.

Di samping pungutan tenaga untuk bekerja yang diberikan anggota banjar terhadap desa, sebaliknya desa pun wajib memberikan bantuan atau perhatian kepada banjar. Sehubungan dengan itu, anggota banjar Kerta Pura merasakan ada bantuan atau perhatian yang dicurahkan oleh desa. Sehingga 24 orang dari 25 orang responden yang diwawancara mengatakan bahwa ada perhatian desa terhadap banjar. Sedangkan seorang responden lagi mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang ada atau tidaknya perhatian desa terhadap banjar.

Masih berhubungan dengan masalah di atas yaitu tentang perhatian desa terhadap banjar, dalam hal ini diketengahkan mengenai perhatian yang diberikan desa terhadap banjar, apakah berupa uang bantuan, berupa bahan bangunan atau pengelolaan administrasi. Sehubungan dengan itu 24 orang dari 25 orang responden yang diwawancara mengatakan bahwa perhatian yang diperoleh dari desa adalah mengenai pengelolaan administrasi. Sedangkan seorang responden lagi mengatakan bahwa mereka betul-betul tidak tahu tentang perhatian yang diberikan desa terhadap banjar.

Dalam tiap masyarakat, manusia tidak dapat mengabaikan pengetahuan tentang sesama manusianya melalui jalur pendidikan. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga pembangunan.

Demikian halnya dengan pendidikan yang ada di banjar Kerta Pura. Hampir sebagian besar dari penduduk banjar Kerta Pura yang sudah cukup umur, menekuni pendidikan yaitu dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama/ Atas, sampai Perguruan Tinggi. Sistem pengorganisasian pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-kanak bisa melalui banjar langsung, karena di banjar Kerta Pura sendiri sudah ada Sekolah Taman Kanak-kanak dengan nama Widya Kumara Pura.

Sistem pengorganisasian pendidikan untuk ke tingkat sekolah dasar memang ada dan merupakan program pemerintah, yang dikeluarkan kira-kira 3 tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 1982/1983. Cara pengorganisasian kegiatan ini, pertama-tama adalah melalui *kelian* banjar yang mencari *blanco* ke Kasi Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar, kemudian *kelian* banjar mengintruksikan kepada warga banjar tentang siapa-siapa di antara warga banjar yang mau memasukkan anaknya ke sekolah dasar (SD). Bagi kepala keluarga yang punya anak akan masuk ke sekolah Dasar, langsung diberikan *blanco* isian oleh *kelian* banjar yang berisi cap banjar atau *kelian* banjar. Bila *blanco* isian sudah

terkumpul semua, maka calon murid-murid tersebut, disalurkan pada tiap-tiap sekolah dasar (SD) yang ada di lingkungan desa Pemecutan.

Dari 25 orang responden yang diwawancara sebanyak 17 orang responden mengatakan bahwa mereka merasa akan adanya bantuan dari pimpinan banjar ketika memasukkan anak ke SD. Sedangkan 8 orang responden lagi mengatakan tidak merasa mendapat bantuan dari pimpinan banjar ketika memasukkan anak ke sekolah dasar (SD). Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel V-37 tentang adanya bantuan dari pimpinan banjar ketika memasukkan anak ke sekolah dasar (SD).

Tabel V-37
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Bantuan Dalam Memasukkan Anak ke Sekolah Dasar

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ada	17	68,0
2	Tidak	8	32,0
	J u m l a h	25	100,0

Dengan melihat tabel tersebut, sebanyak 8 orang atau 32% mengatakan tidak merasakan bantuan dari pimpinan banjar ketika memasukkan anak ke sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena anak-anak dari setiap keluarga yang diwawancara tersebut sudah melewati peraturan yang ada, sehingga mereka tidak memperoleh bantuan.

Selanjutnya sistem pengorganisasian pendidikan ke tingkat SLTP, sementara ini belum ada warga banjar Kerta Pura yang merasa akan adanya bantuan atau pengelolaan dari pimpinan banjar atau desa. Seluruh responden yang diwawancara yaitu sebanyak 25 orang mengatakan bahwa mereka tidak merasa dibantu oleh pimpinan banjar atau desa ketika memasukkan anak ke SLTP.

Begitu pula halnya dengan sistem pengorganisasian pendidikan ke tingkat SLTA maupun ke Perguruan Tinggi, boleh dikatakan tidak ada. Karena dewasa ini agak sulit memasukkan anak ke ting-

kat yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena banyaknya saingan-saingan dalam menuntut pendidikan. Apalagi sistem pendidikan sekarang memakai sistem nilai evaluasi murni sehingga adak sulit kiranya mencari sekolah berstatus negeri, kalau tidak betul-betul berprestasi dalam pendidikan.

Masalah yang akan diungkapkan ini mempunyai kaitan yang erat dengan masalah pengorganisasian pendidikan bagi mereka yang merasa dibantu oleh pimpinan banjar atau desa. Dalam hal ini sistem pengorganisasian lebih ditekankan pada jenis bantuan yang diterima, apakah hanya koordinator pendaftaran, keringanan biaya pendaftaran, membantu memilih sekolah atau tidak ada jawaban sama sekali.

Dari 25 orang responden yang diwawancara tersebut, sebanyak 16 responden memberikan jawaban tentang bantuan yang diterima dari pimpinan banjar atau desa adalah hanya koordinator pendaftaran saja. Sedangkan sebanyak 9 orang responden lagi tidak memberikan jawaban tentang bantuan yang diterima, mungkin mereka tidak merasakan akan bantuan yang diterima tersebut. Tabel V-38 akan menyajikan data mengenai jenis bantuan yang diterima dari pimpinan banjar atau desa.

Tabel V-38

Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut Jenis Bantuan yang Diterima Dari Pimpinan Banjar dan Desa

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Hanya koordinator pendaftaran saja	16	64,0
2	Keringanan biaya pendaftaran	—	—
3	Membantu memilihkan sekolah	—	—
4	Tidak terjawab	9	36,0
Jumlah		25	100,0

Bertitik tolak dari tabel tersebut, maka warga banjar Kerta Pura hanya merasa memperoleh keringanan atau bantuan berupa pengkoordiniran dalam pendaftaran. Sedangkan membantu me-

milihkan sekolah rupanya cukup berperan juga dalam pengorganisasian pendidikan, tetapi mungkin itu nomer dua setelah pengkoordiniran pendaftaran.

Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana (KB) yang mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil. Karena kegagalan pelaksanaan program keluarga berencana (KB) akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan program keluarga berencana sudah digalakkan ke pelosok-pelosok seperti desa, banjar dan juga desa-desa terpencil sudah mengenal adanya program keluarga berencana (KB). Program keluarga berencana ini pada dasarnya bertujuan untuk menekan jumlah penduduk dan secara tidak langsung dapat menunjang pembangunan.

Di banjar Kerta Pura hampir semua warga banjar sudah mengenal akan adanya program keluarga berencana (KB). Bahkan sudah banyak pula anggota banjar khususnya ibu-ibu yang mengikuti program tersebut. Dari 25 orang responden yang diwawancara, sebanyak 19 orang responden mengatakan bahwa mereka sudah mengikuti program keluarga berencana. Sedangkan 6 orang responden lagi mengatakan bahwa mereka tidak ikut program tersebut.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan disajikan tabel V-39 mengenai keikutsertaan dalam program keluarga berencana.

Tabel V-39
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Keikutsertaan Dalam Program Keluarga Berencana

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ikut	19	76,0
2	Belum ikut	—	—
3	Tidak ikut	6	24,0
	J u m l a h	25	100,0

Dari tabel terlampir dapat dilihat bahwa 19 orang atau 76,0% boleh mengatakan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam rangka mensukseskan program pembangunan khususnya dalam program keluarga berencana (KB). Selain itu pula keikutsertaan anggota banjar dalam keluarga berencana juga dapat meringankan baban keluarga demi terwujudnya kesejahteraan di tingkat rumah tangga.

Berpangkal pada masalah keikutsertaan anggota banjar dalam program keluarga berencana (KB), maka keikutsertaan tersebut pada prinsipnya karena kemauan sendiri dan ada juga atas saran banjar, petugas desa atau yang lainnya.

Sebanyak 4 orang dari 25 orang responden yang diwawancara mengatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam program keluarga berencana adalah karena saran kelian banjar. Sedangkan 15 orang responden mengatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam program keluarga berencana memang atas kemauan sendiri, dan 6 orang responden lagi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada.

Tabel V-40 terlampir akan menyajikan data tentang anjuran dalam keikutsertaan responden sebagai peserta keluarga berencana.

Tabel V-40
Responden Banjar Kerta Pura Dikelompokkan Menurut
Anjuran Dalam Keikutsertaan Program Keluarga Berencana

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Saran banjar	4	16,0
2	Kemauan sendiri	15	60,0
3	Petugas desa	—	—
4	Tidak terjawab	6	24,0
	J u m l a h	25	100,0

Tabel terampir tersebut menunjukkan bahwa 6 orang atau 24,0% mengatakan tidak ikut program keluarga berencana (KB). Faktor penyebabnya adalah karena mereka menerapkan keluarga

berencana (KB) secara alamiah dalam artian mereka tidak memakai alat-alat kontrasepsi, tetapi sudah stop punya anak. Karena faktor umur yang sudah lanjut dapat juga menentukan program keluarga berencana secara otomatis.

7. Analisa Tentang Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali

Konsep komunitas merupakan suatu bentuk kesatuan sosial karena adanya ikatan wilayah atau tempat kehidupan. Sebagai suatu kesatuan sosial, maka warga suatu komunitas biasanya mempunyai perasaan kesatuan sedemikian kuat, sehingga rasa kesatuan itu menjadi sentimen persatuan. Hal semacam itu dapat mewujudkan rasa kepribadian kelompok, yaitu perasaan bahwa kelompok kelompok sendiri itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan kelompok lain. Suatu komunitas mempunyai beberapa ciri pokok yaitu kesatuan wilayah anggota, dan rasa memiliki wilayah dan kepribadian kelompok.

Menurut bentuknya, komunitas dibedakan atas 2 jenis yaitu komunitas besar dan komunitas kecil. Dalam kategori komunitas besar tercakup bentuk-bentuk komunitas seperti kota, negara bagian, negara dan persekutuan dari negara-negara. Sedangkan dalam katagori komunitas kecil tercakup bentuk-bentuk komunitas seperti banjar, desa, rukun tetangga dan lain sebagainya. Titik berat dalam analisa ini mengarah pada bentuk komunitas kecil yaitu banjar.

Di samping memiliki ciri-ciri seperti tersebut di atas, komunitas kecil juga mempunyai ciri-ciri lain yaitu:

- a). Komunitas kecil adalah kelompok-kelompok di mana warga warganya semuanya masih bisa kenal mengenal dan saling bergaul dengan intensif.
- b). Komunitas kecil adalah pula kelompok di mana manusia menghayati sebagian besar dari lapangan-lapangan kehidupannya secara bulat.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa banjar merupakan kesatuan sosial atas dasar ikatan wilayah. Sesuai dengan fokus fungsinya banjar dapat dibedakan atas banjar adat dan banjar dinas. Banjar adat dengan fokus fungsinya dalam bidang adat dan agama, serta secara struktural menjadi bagian dari desa adat. Sedangkan

banjar dinas dengan fokus fungsinya dalam bidang administrasi dan secara struktural menjadi bagian dari desa diinas.

Banjar Kerta Pura merupakan suatu sistem organisasi terkecil di lingkungan desa Pemecutan dengan berbagai unsur-unsurnya yang meliputi keanggotaan, peralatan, aturan-aturannya (*awig-awig*), pengendalian sosial, pengerahan tenaga dan perangkat pelaksana. Antara banjar dengan desa mempunyai hubungan struktural, banjar merupakan bagian yang kuat dari desa dan bisa membentuk struktur desa. Tanpa banjar desa tidak akan terwujud sebagai suatu sistem. Secara fungsional banjar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari desa, yang mana banjar wujud pembentuk desa. Demikian dapat dilihat bahwa ada saling keterkaitan atau saling ketergantungan antara banjar dengan desa.

Sebagai suatu bentuk komunitas kecil, banjar mempunyai peranan yang penting dalam membentuk kehidupan masyarakat. Sesuai dengan aturan (*awig-awig*) banjar yang ada, turut sertanya masyarakat dalam suatu keanggotaan banjar, baik anggota banjar suka duka maupun diinas akan dapat meringankan beban mental sebagai warga yang bertempat tinggal di lingkungan banjar. Seperti terlihat pada tabel V-31 di atas, bahwa masyarakat akan merasa lebih aman bila sudah ikut terdaftar dalam kelompok banjar. Karena persepsi masyarakat terhadap banjar lebih terarah akan adanya perlindungans. Banjar juga dapat menjadi pusat orientasi dari para anggota masyarakat untuk suatu kegiatan tertentu, serta pilihan untuk pengadaan dan kegiatan sosial lainnya.

Sebagai anggota banjar, tentunya mempunyai sejumlah hak dan kewajiban yang mesti dilakukan. Adapun kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan sebagai anggota banjar adalah melaksanakan tugas-tugas banjar, mentaati peraturan-peraturan yang ada dan lain sebagainya. Hak sebagai anggota banjar adalah minta perlindungan, pelayanan dari banjar dan lain sebagainya. Menjadi anggota banjar secara langsung juga menjadi anggota desa.

Ciri khas dari suatu banjar adalah bale banjar dengan seperangkat peralatan-peralatannya. Banjar dikepalai oleh seorang pimpinan banjar yang disebut *kelian banjar*. Dalam melaksanakan tugas-tugas banjar, pimpinan banjar dibantu oleh *prajuru-prajuru* banjar yang jumlahnya sebanyak 9 orang *prajuru* banjar. Pengerahan tenaga untuk kegiatan di banjar dilakukan dengan jalan mem-

bunyikan kentongan besar (*kulkul gede*), sebagai isyarat kegiatan akan segera dimulai. Kegiatan yang rutin dilakukan di banjar setiap bulan sekali adalah kegiatan gotong royong dan kadang-kadang juga dilakukan di tingkat desa dengan melibatkan semua anggota banjar. Orientasi daripada warga masyarakat di banjar ini terfokus pada masalah adat terpecah-pecah ke tempat asalnya masing-masing.

Kelompok sosial merupakan suatu wadah untuk menggerakkan warga masyarakat dalam suatu aktivitas seperti aktivitas olahraga, kesenian dan lain-lain. Salah satu aktivitas yang paling menonjol adalah di bidang olah raga khususnya di bidang bola basket. Bahkan ini telah membentuk kelompok sosial di bidang olah raga dengan nama Portapura.

Di samping terdapat kelompok sosial lain, banjar juga berperan sebagai lembaga pengorganisasian kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan ekonomi. Sebagai kegiatan sosial, banjar berperan dalam masalah pengorganisasian pendidikan yaitu pengorganisasian anak-anak sekolah dari TK, ke SD, dan juga masalah pelayanan KB dan lain-lain. Kemudian pengorganisasian budaya, banjar berperan dalam kegiatan upacara yang ada di banjar yang melibatkan anggota banjar khususnya yang beragama Hindu, dan untuk di tingkat desa anggota banjar melakukan kegiatan upacara dengan menempuh jalan sendiri-sendiri. Sedangkan untuk pengorganisasian kegiatan ekonomi, banjar hanya berperan dalam masalah penggalian dana saja dengan mengikut sertakan muda/mudi dan PKK.

Dari uraian tersebut di atas, dapat memberikan suatu gambaran tentang peranan banjar dalam kehidupan masyarakat khususnya di banjar Kerta Pura, yang pada dasarnya terfokus pada masalah administrasi dan masalah adat terpecah-pecah ke desa asalnya. Dengan demikian terbukti bahwa hubungan antara banjar pengembangan dengan penduduk yang bersifat heterogen, lebih berorientasi ke masalah administrasi. Sementara untuk orientasi pada kegiatan adat dan upacara para anggota banjar tetap berorientasi ke desa asal mula.



Gambar 28 Bangunan *Bale Kulkul* Banjar Kerta Pura Denpasar, yang terletak di tingkat/lantai atas dari bangunan bale banjar yang bertingkat. Di atas tergantung sebuah *kulkul* atau kentongan yang multi-guna, dan sebuah *neng-neng* atau kentongan besi milik organisasi pemudanya.



Gambar 29 Bangunan Bale Banjar Kerta Pura dari depan, dengan halaman depan yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir oleh seorang warga banjar.



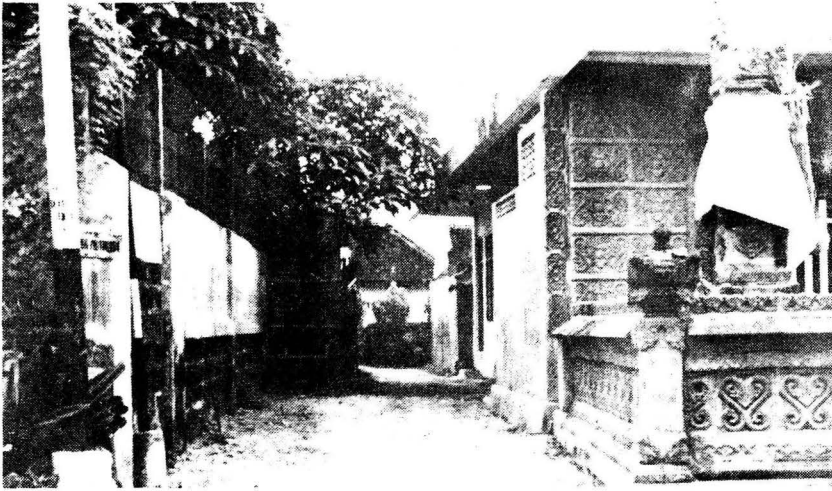
Gambar 30 Padmasana/bangunan persembahyangan yang ada di banjar Kerta Pura, tempat semua warga banjar melakukan persembahyangan bersama. Bangunan suci tersebut masih lengkap dengan hiasan dan peralatan upacara, karena ketika gambar ini diambil hari raya Galungan baru lewat beberapa hari.



Gambar 31 Satu pemandangan lingkungan Banjar Kerta Pura Denpasar yaitu Jalan Gunung Agung yang cukup ramai setiap harinya. Beberapa toko berdiri di kiri-kanan jalan wilayah banjar Kerta Pura ini.



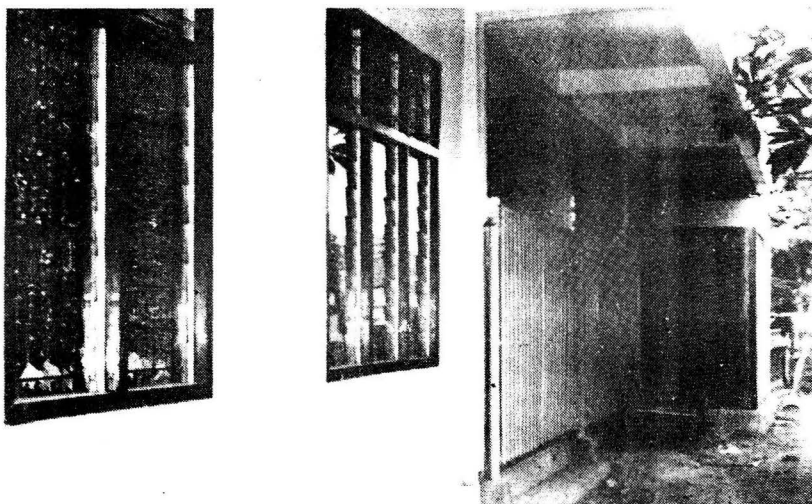
Gambar 32 Satu pemandangan lain dari wilayah banjar Kerta Pura Denpasar. Tembok tinggi sebelah kanan adalah tembok Sekolah Menengah Pertama yang ada di depan banjar.



Gambar 33 Pemandangan sebuah gang di lingkungan pemukiman banjar Kerta Pura. Umumnya rumah-rumah di sini terletak di gang-gang yang jauh masuk ke dalam.



Gambar 34 Bagian bawah dari bangunan Bale Banjar Kerta Pura yang dimanfaatkan untuk ruang belajar Sekolah Taman Kanak-kanak. Ruang itu sendiri dipagar besi untuk mengamankan peralatan anak-anak TK belajar.



Gambar 35 Karena terbatasnya ruang di daerah perkotaan, maka pemanfaatan ruang untuk penempatan peralatan ini dilakukan secara efisien. Seperti yang tampak di banjar Kerta pura ini.



Gambar 36 Papan nama Taman Kanak-kanak Widya Kumara Pura, di gantung saja di pagar besi bale banjar Kerta Pura ini. Umumnya anak-anak TK adalah anak para warga banjar sendiri dan anak-anak lainnya dari sekitar banjar.

DAFTAR BIBLIOGRAFI

Bagus, I Gusti Ngurah :

- 1971 " Kebudayaan Bali " dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Kuntjaraningrat (ed). Jakarta, Jambatan.

Covarubias, Miguel :

- 1972 " *Island of Bali* ", Singapore, Oxford University Press.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- 1985 " *Adat Istiadat Daerah Bali* ", laporan Proyek Pengembangan Media Kebudayaan. Jakarta.

Geertz, C.

- 1978 " Form and Variation in Balinese Village Structure ", *American Anthrologist*. Vol. 61

Kaler, I Gusti Ketut :

- 1983 " *Butir - butir Tercecer Tentang Adat Bali* ", Bali Agung. Denpasar.

Korn, V. E ;

- 1960 " The Village Republic of Tenganan Pegringsingan " in *Bali Studies in Life, Thought and Ritual* The Hague and Bandung.

Kuntjaraningrat :

- 1980 " *Sejarah Teori Antropologi I* ", Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
1964 " *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini* ", Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Djakarta.

Raka, I Gusti Gede :

- 1955 " *Monografi Pulau Bali* ", Pusat Jawatan Pertanian Rakyat Djakarta.

Rivai Abu (ed) :

- 1982 " *Sistim Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali* ", Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali.

Sudhana Astika, Ketut :

- 1982 " *Masa Bepantang sebagai perwujudan tradisi Lisan di Desa Tenganan Pegringsingan dan Pengaruhnya pada KB*. paper pada Seminar Tradisi Lisan. Jakarta.
1984 " *Interaksi Sosial dalam Arena Perkampungan di Bali* "

- dalam *ANALISIS KEBUDAYAAN*, Th. IV. No. 3. 1983/84.
- 1985 dkk : " *Pola Kehidupan Pelukis Tradisional di Desa Kamasan Klungkung* ". laporan penelitian Baliologi.
- 1985 " *Tata Krama di Lingkungan Kehidupan Masyarakat Bali* " paper pada Seminar PPIS V, FS Unud, Denpasar.
- Suparlan, Parsudi :
- 1978 " Jaringan Sosial " *Jurnal Penelitian Komunikasi Pembangunan*. Vol. 2. Jakarta.
- 1980 " Manusia Kebudayaan dan Lingkungannya Perspektif Antropologi Budaya ", dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*. Fakultas Sastra Univ. Indonesia. Jakarta.
- Shepard, John, M. :
- 1974 " *Sociology, Structure, Interaction and Change* ". Harper & Row Publishers.
- Sweilengrebel, J.L. (ed).
- 1960 " *Bali, Studies in Life, Thought and Ritual* ". The Hague and Bandung.
- Lampiran : 1

Lampiran : 1

Daftar Nama - nama Responden
di
Desa Adat Tenganan Pegringsingan

1. I Nengah Rica
2. Nengah Sukerta
3. W.Ranu
4. I Wayan Melem
5. I Nengah Sintar
6. I Wayan Sugita
7. Nengah Sumita
8. Wayan Wira
9. Nengah Berata
10. Ni Rantum
11. Wayan Diasti
12. I Nengah Rempa
13. I Ketut Muliasih
14. I Nengah Kasih
15. I Nyoman Suarna
16. I Nengah Landri
17. Nengah Sukerta
18. Nyoman Suarni
19. Nengah Maderi

Lampiran : 2

Daftar Nama — nama Informan
di
Desa Tenganan Pegringsingan

1. Nama : I Nyoman Sadra
Kelamin : Laki
Umur : 35 tahun
Jabatan : Kepala Desa Tenganan Pegringsingan.
Alamat : Desa Tenganan Pegringsingan , Karangasem.
2. Nama : I Nyoman Rumi
Kelamin : Laki
Umur : 60 tahun
Jabatan : Pemuka Desa Adat Tenganan Pegringsingan
Alamat : Desa Tenganan Pegringsingan.
3. Nama : I Nengah Parti
Kelamin : Laki
Umur : 36 tahun
Jabatan : Kelian Banjar
Alamat : Desa Tenganan Pegringsingan.
4. Nama : Mangku Widia
Kelamin : Laki
Umur : 37 tahun
Jabatan : Pemangku Desa
Alamat : Desa Tenganan Pegringsingan.

Lampiran : 3

**Daftar Nama—nama Responden
di
Banjar Pregai Desa Mengwi**

1. I Nyoman Sika
2. I Nyoman Dana
3. I Made Kartawan
4. I Made Suanda
5. I Made Candri
6. I Ketut Jana
7. I Ketut Suparman
8. I Made Sarda
9. I Made Regug
10. I Ketut Tangkas
11. I Made Darma
12. I Ketut Nama
13. I Ketut Badung
14. I Made Suarta
15. I Nyoman Mendri
16. I Ketut Ardana
17. I Nyoman Purna
18. I Ketut Rasna
19. I Made Mudarna
20. I Ketut Mendra

Lampiran : 4

Lampiran : 4

Daftar Nama—nama Informan
di
Banjar Pregai Desa Mengwi

1. Nama : I Made Darka
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tukang
Jabatan di Banjar : —
Alamat : Banjar Pregai, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi
2. Nama : I Nyoman Endra
Umur : 35 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Jabatan di Banjar : Kelian Dinas
Alamat : Banjar Pregai, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi
3. Nama : I Gusti Ngurah Kamasan
Umur : 66 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : —
Jabatan di Banjar : —
Alamat : Banjar Pregai, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi
4. Nama : I Made Suasna
Umur : 30 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Kontraktor/pengusaha
Jabatan di Banjar : elian Tempekan
Alamat : Banjar Pregai, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi

Lampiran : 5

**Daftar Nama—nama Responden
di
Banjar Gerenceng Desa Pemecutan Kaja**

1. Wayan Nandri
2. I Wayan Marka
3. Made Gembrong
4. I Gede Eka Suarjana
5. I Wayan Gd. Wandu
6. I Made Subrata
7. I Nyoman Saba
8. I Gusti Putu Gede
9. I Wayan Lodra
10. A.A. Made Oka
11. I Ketut Suanda
12. I Nyoman Agus Aryasa
13. I Nyoman Dibia
14. I Ketut Sanit
15. I Nengah Taes
16. Ni Murdi
17. I Gusti Ketut Gede
18. Ni Ketut Madri
19. Ni Ketut Mutir
20. I Nengah Catri
21. Ni Made Sore
22. I Ketut Sugiarta
23. I Nyoman Magleg
24. I Gst. Agung Gd. Ngurah
25. I Made Adiwijaya
26. A.A. Sagung Seni
27. I Ketut Kontra
28. I Wayan Nuriya
29. I Nyoman Lepeg
30. I Made Pegig
31. Wayan Madra
32. I Wayan Repot

Lampiran : 6

Daftar Nama—nama Informan
di
Banjar Gerenceng

1. Nama : Made Retu Arthana
Umur : 51 tahun
Pendidikan : SGA
Jenis Kelamin : Laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan di banjar : Kelian Dinas Br. Gerenceng
Alamat : Jl. Wahidin 4A. Denpasar.
2. Nama : I Made Sudira Sudika
Umur : 46 tahun
Pendidikan : SD
Jenis Kelamin : Laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan di banjar : Kelian Suka Duka
Alamat : Jl. Gunung Agung Gang IV/1. Denpasar.
3. Nama : I Made Sukadi
Umur : 40 tahun
Pendidikan : SD
Jenis Kelamin : Laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tukang Kayu
Jabatan di banjar : Kelian Tempekan
Alamat : Jl. Sutomo Gang XII/5. Banjar Gerenceng.
4. Nama : I Made Mintan
Umur : 45 tahun
Pendidikan : SD
Jenis Kelamin : Laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : —
Jabatan di banjar : —
Alamat : Jl. Sutomo Gang V/4 Banjar Gerenceng.

Lampiran: 7

Daftar Nama-nama Responden
di
Banjar Kerta Pura Desa Pemecutan

1. I Nyoman Linggih
2. I Gusti Made Astawa
3. I Gusti Ngurah Atmaja
4. I Ketut Sumertayasa
5. I Made Sudiarsa
6. I Wayan Parsa
7. Sugiarto
8. I Wayan Warnata
9. I Wayan Sura
10. I Made Diana
11. I Made Parta
12. Drs. I Made Subandi
13. I Nyoman Purna
14. I Ketut Ladera
15. I Wayan Supartha
16. I Made Menolan
17. Edi Susanto
18. I Made Manuh
19. I Made Sukarya
20. Drs. I Gede Natha
21. I Wayan Gindil
22. I Ketut Tegig
23. I Nyoman Cenik
24. The Hok San
25. I Ketut

Lampiran. 8

Daftar Nama-nama Informan di Banjar Kerta Pura Desa Pemecutan

1. Nama : I Gusti Ketut Sumatra
Umur : 38 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Dagang
Agama : Hindu
Jabatan di Banjar : Kelian Banjar Kerta Pura
Alamat : Jl. Gunung Agung 81 Denpasar
2. Nama : I Gusti Nyoman Triyasaputra
Umur : 41 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Dagang
Agama : Hindu
Jabatan di Banjar : Sekretaris Banjar Kerta Pura
Alamat : Jl. Gunung Agung Gang Irawadi
3. Nama : Budi Laksana
Umur : 63 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Dagang
Agama : Budha
Jabatan di Banjar : Anggota Banjar
Alamat : Jl. Gunung Agung 95 Denpasar

PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT BALI

DAFTAR PERTANYAAN

BERikut ini ada sejumlah pertanyaan yang ingin kami ajukan pada Anda yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menginventarisir dan mendokumentasikan aspek-aspek kebudayaan daerah, antara lain sejauh mana peranan banjar pada masyarakat Bali. Jawaban dari Anda akan sangat membantu team peneeliti dalam mengumpulkan data dan menganalisanya, dan jawaban Anda sepenuhnya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi Anda pada penelitian ini.

I. IDENTIFIKASI:

1. Nama Responden :
(boleh ditulis dan boleh tidak ka-
lau resp. tidak mau menyebutnya)
2. Umur Responden :
3. Jenis Kelamin : a. Laki b. Perempuan
4. Pendidikan : a. SD b. SLTP c. SLTA
d. Univ/ Ak. e. tidak
5. Pekerjaan :
6. Alamat : a. Tenganan b. Mengwi,
c. Kerta Pura d. Gerenceng
7. Status Perkawinan : a. kawin b. tidak c. janda/duda
8. Status dalam rumah tangga:
a. kepala rumah tangga
b. istri kepala rumah tangga
c. anak kepala rumah tangga
d. anggota rumah tangga
e. hanya penumpang
f. lainnya;

9. Keanggotaan dalam banjar:
 - a. anggota tetap (suka duka)
 - b. anggota pengele
 - c. anggota dinas (administrasi)
 - d. lainnya;
10. Keterangan dalam keanggotaan:
 - a. KTP
 - b. surat keterangan tempat tinggal
 - c. surat keterangan pindah
 - d. lainnya;

II. FUNGSI BANJAR BAGI MASYARAKAT BALI

A. Fungsi administrasi:

1. Apakah Saudara menjadi anggota salah satu banjar sekarang ini?
 - a. ya
 - b. tidak
2. Di mana Saudara tercatat sebagai anggota satu banjar sekarang?
 - a. di tempat asal
 - b. di tempat menetap sekarang
 - c. di dua tempat tersebut
 - d. tidak di mana-mana (tidak tercatat)
3. Sudah berapa lama Saudara menjadi anggota banjar?
 (dalam tahun)
4. Selama menjadi anggota banjar apakah Saudara melaksanakan tugas-tugas banjar?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. tidak menjawab
 - d. lainnya;
5. Apakah tugas-tugas tersebut telah Saudara lakukan setelah menjadi anggota banjar atau sebelumnya?
 - a. setelah menjadi anggota (tetap)
 - b. sebelum menjadi anggota (ngayahin)
 - c. tidak menjawab
 - d. lainnya;

6. Apakah sebelum menjadi anggota tetap Saudara melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagai latihan saja?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. tidak menjawab
7. Kalau ya, apa saja bentuk latihan-latihan tersebut?
 - a. pekerjaan sehari-hari
 - b. pekerjaan untuk upacara
 - c. kedua-duanya
 - d. lainnya;
8. Kalau akan bepergian keluar kota/lingkungan apakah Saudara minta ijin dahulu kepada petugas banjar Saudara?
 - a. minta ijin
 - b. tidak minta ijin
 - c. kadang-kadang
 - d. tidak perlu
 - e. lainnya;
9. Kalau minta ijin berupa apakah ijin yang diberikan?
 - a. bebas dari semua kewajiban
 - b. bebas dari kewajiban tertentu
 - c. tidak mendapat hak apa-apa selama pergi
 - d. masih mendapat sebagian hak
 - e. bebas dari tanggung jawab banjar
 - f. lainnya;
10. Kalau Saudara kedatangan tamu dari tempat lain dan menginap apakah Saudara melaporkan hal ini kepada kelian banjar?
 - a. melapor
 - b. tidak melapor
 - c. lainnya;
11. Jenis pelayanan apa saja yang Saudara dapatkan selama menjadi anggota banjar dari banjar Saudara?
 - a. pelayanan administrasi
 - b. pelayanan akan tenaga kerja murah/gratis
 - c. pelayanan sosial lain
 - d. lainnya;
 - e. rasa aman dan merasa adanya perlindungan

B. Fungsi dalam sistem ekonomi:

1. Apakah Saudara melaksanakan tugas banjar ketika mencari dana untuk pembangunan bale banjar yang lalu?
 - a. ya
 - b. tidak melaksanakan
 - c. melaksanakan kalau sempat
 - d. lainnya:
2. Kalau Saudaraikut apakah semua hasil yang diperoleh untuk banjar semua?
 - a. semua untuk banjar
 - b. sebagian untuk banjar sebagian untuk anggota
 - c. sebagian untuk banjar sebagian untuk kegiatan lain
 - d. tidak mendapatkan apa-apa
 - e. tidak menjawab
3. Adakah kegiatan yang dilakukan bersama di banjar yang mendatangkan hasil (income) buat para anggotanya?
 - a. ada
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
4. Kalau ada berupa apakah pekerjaan itu?
 - a. pekerjaan panen
 - b. pekerjaan tukang bangunan
 - c. berdagang/amal
 - d. pekerjaan lainnya;
5. Apakah dengan pekerjaan yang sekarang Saudara merasa ada bantuan atau perhatian dari banjar?
 - a. ada perhatian
 - b. tidak ada perhatian
 - c. ada bantuan
 - d. tidak ada bantuan
 - e. lainnya,
6. Kalau kesulitan pekerjaan (Saudara sedang tidak bekerja), apakah Saudara minta bantuan banjar untuk memperoleh pekerjaan?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. tidak tahu

- d. tidak menjawab
- 7. Kalau kesulitan keuangan (Saudara memerlukan sejumlah uang untuk keperluan yang mendadak), apakah Saudara dapat meminta/meminjam kepada banjar?
 - a. dapat minta/dibantu
 - b. dapat meminjam
 - c. tidak dapat
 - d. lainnya;
- 8. Mana yang lebih mudah menurut Saudara mencari pekerjaan lewat banjar atau usaha sendiri?
 - a. lebih mudah lewat banjar
 - b. lebih mudah usaha sendiri
 - c. kedua-duanya
 - d. tidak tahu
- 9. Dengan pekerjaan yang sekarang apakah ada hubungannya dengan status keanggotaan Saudara dalam banjar?
 - a. ada
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
- 10. Apakah Saudara merasakan ada keringanan yang Saudara peroleh dalam bidang ekonomi dalam kehidupan Saudara setelah menjadi anggota banjar?
 - a. ada
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
- 11. Kalau ada keringan dalam hal apakah itu?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

C. Fungsi dalam sistem Sosial:

- 1. Dalam kesulitan melaksanakan kewajiban di rumah tangga apakah Saudara merasa mendapatkan bantuan dari para tetangga?

- a. ada bantuan
 - b. tidak ada bantuan
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
2. Kalau ada bantuan yang didapatkan, apakah Saudara mendapatkan itu sejak menjadi anggota banjar atau jauh sebelumnya?
 - a. sejak menjadi anggota banjar
 - b. jauh sebelum menjadi anggota banjar
 - c. meningkat setelah menjadi anggota banjar
 - d. tidak tahu
 - e. tidak menjawab
 3. Apakah semua orang di banjar ini mendapat perlakuan/bantuan yang sama seperti yang Saudara juga dapatkan?
 - a. semua mendapat yang sama
 - b. hanya anggota banjar saja
 - c. orang-orang tertentu saja
 - d. tidak tahu
 - e. tidak menjawab
 4. Apakah Saudara juga memberikan bantuan kepada orang lain di lingkungan banjar Saudara?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
 5. Pernahkan SAudara tidak memberikan bantuan kepada orang sesama anggota banjar?
 - a. pernah
 - b. tidak pernah
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
 6. Kalau tidak memberikan bantuan, apakah dikenakan sanksi/hukuman?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjaawb

7. Kalau ya, apakah/berupa apakah sanksi tersebut?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
8. Apakah Saudara merasa bahwa menjadi anggota banjar itu lebih aman daripada tidak menjadi anggota banjar?
 - a. lebih aman
 - b. biasa saja
 - c. tidak merasa aman
 - d. tidak tahu
9. Dari mana rasa aman itu timbul ketika Saudara menjadi anggota banjar?
 - a. merasa sudah terdaftar sebagai penduduk
 - b. merasa akan mendapatkan perhatian
 - c. merasa akan mendapatkan bantuan dari anggota lain
 - d. merasa sudah memenuhi kewajiban sebagai warga
 - e. lainnya;
10. Bagaimanakah pandangan orang-orang di sini terhadap seseorang yang tidak menjadi anggota banjar dan seharusnya sudah menjadi anggota banjar?
 - a. dipandang tidak baik
 - b. dikatakan tidak tahu aturan
 - c. biasa saja dan dianggap umum
 - d. tidak apa-apa/tidak usah dihiraukan
 - e. tidak tahu
 - f. tidak menjawab

D. Fungsi dalam Pengorganisasian Kegiatan-kegiatan lain:

1. Sebagai anggota banjar apakah Saudara langsung sebagai anggota desa?
 - a. ya
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
2. Kalau ya, apakah sebagai anggota desa dinas atau anggota desa adat?

- a. anggota desa dinas
 - b. anggota desa adat
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
3. Sebagai anggota desa dinas apa saja kewajiban Saudara?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 4. Sebagai anggota desa adat apa saja kewajiban Saudara?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 5. Dalam kegiatan-kegiatan desa apa saja biasanya Saudara sebagai anggota banjar ikut serta?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 6. Apakah semua anggota banjar ikut serta dalam kegiatan desa tersebut?
 - a. semua ikut serta
 - b. tidak semua ikut
 - c. ikut karena persyaratan tertentu
 - d. tidak tahu
 - e. tidak menjawab
 7. Dalam persembahyangan di pura desa, apakah semua anggota banjar ikut serta?
 - a. semua ikut serta
 - b. tidak semua ikut
 - c. ikut karena persyaratan tertentu
 - d. tidak tahu
 - e. tidak menjawab
 8. Kalau banyak yang ikut bersembahyang ke pura desa, bagaimana cara pergi ke pura?
 - a. pergi sendiri-sendiri
 - b. pergi bersama di koordinir oleh banjar

- c. ada yang bersama-sama dan ada yang sendiri-sendiri
 - d. tidak tahu
 - e. tidak menjawab
9. Menurut Saudara siapa yang mengelola/bertanggung jawab pada pelaksanaan upacara di pura desa?
 - a. sebuah panitia khusus
 - b. kelompok penyungung khusus
 - c. semua warga desa
 - d. hanya beberapa banjar saja
 - e. tidak tahu
 - f. tidak menjawab
 10. Sebagai anggota banjar apakah selama ini ada Saudara rasakan pungutan-pungutan untuk kepentingan desa?
 - a. ada
 - b. tidak ada
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
 11. Berupa apakah pungutan tersebut?
 - a. berupa uang
 - b. berupa bahan
 - c. berupa tenaga/untuk bekerja
 - d. lainnya;
 12. Menurut Saudara adakah perhtian desa terhadap banjar Saudara?
 - a. ada
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
 13. Kalau ada berupa apakah?
 - a. berupa uang bantuan
 - b. berupa bahan bangunan
 - c. pengelolaan administrasi
 - d. lainnya;
 14. Ketika Saudara memasukkan anak ke sekolah SD apakah Saudara merasa dibantu oleh pimpinan banjar atau desa?
 - a. ya
 - b. tidak

15. Ketika memasukkan anak ke sekolah SLTP, apakah Saudara merasa dibantu oleh pimpinan banjar atau desa?
- a. ya
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
16. Ketika memasukkan anak ke sekolah SLTA apakah ada bantuan yang sama dari pimpinan banjar dan pimpinan desa?
- a. ya
 - b. tidak
 - c. tidak tahu
 - d. tidak menjawab
17. Berupa apakah bantuan yang Saudara terima?
- a. hanya koordinir pendaftaran saja
 - b. keringanan biaya pendaftaran
 - c. membantu memilihkan sekolah
 - d. lainnya;
18. Apakah di banjar Saudara ada televisi untuk umum?
- a. ada
 - b. tidak
19. Kalau ada, siapa sajakah yang biasanya nonton tv tersebut?
- a. mereka yang tidak punya tv di rumah
 - b. mereka yang sudah punya tv di rumah
 - c. siapa saja yang sedang berada di banjar
 - d. lainnya;
20. Apakah Saudara atau istri Saudara ikut program Keluarga Berencana?
- a. ikut
 - b. belum ikut
 - c. tidak ikut
- Kalau ikut apakah atas saran banjar atau petugas desa?
- a. saran banjar
 - b. kemauan sendiri
 - c. petugas desa
 - d. tidak menjawab

PERANAN BANJAR PADA MASYARAKAT

Perpustakaan D
Jenderal Kebu

307.862

KET

p

PERC. "TUNGGAL JAYA" DENPASAR